

Kesejahteraan rakyat adalah cita-cita setiap negara. Kesejahteraan dapat dicapai ketika kestabilan perekonomian diraih, yang dapat dilihat dari pendapatan nasional meningkat, tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta kemiskinan dan pengangguran yang rendah pula (Sukirno, 2008) Salah satu variabel ekonomi makro yang bisa menunjukkan tingkat pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang darinya bisa dihitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun.

Tingginya PDB memang bukan sesuatu yang mutlak untuk menjelaskan bahwa seluruh rakyat pasti merasa sejahtera, namun dengan PDB yang tinggi maka tingkat kesejahteraan relatif lebih bisa dicapai. Oleh karena itu, membandingkan kinerja ekonomi antarnegara paling sering dilakukan dengan membandingkan PDB tiap-tiap negara tersebut. PDB yang tinggi menggambarkan kemampuan rakyat suatu negara dalam memenuhi berbagai kebutuhannya (Mankiw, 2010).

Berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF/International Monetary Fund) dan juga Bank Pembangunan Asia selalu melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap pertumbuhan ekonomi berbagai negara.

Pada sisi lain, Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau sistem ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits (KNEKS, 2021). Oleh karena itu, Ekonomi Pembangunan Islam dapat difahami sebagai studi tentang bagaimana perekonomian ditransformasikan dari stagnasi ke pertumbuhan dan dari berpendapatan rendah ke negara berpendapatan tinggi serta mengatasi permasalahan kemiskinan absolut yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Buku ini hadir untuk memperkaya khazanah pengetahuan Ekonomi Islam, khususnya bidang pembangunan ekonomi di negara-negara Muslim.

Prodi Magister Ekonomi Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, SE., MSc. dkk

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM



EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, SE., MSc. dkk

Prodi Magister Ekonomi Syariah
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN Sunan Kalijaga

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, SE., MSc. dkk

Magister Ekonomi Syariah (MES)
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2024

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

~Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, SE., MSc., ~Suryani, ~Mega Musrifa,
~Syahrul Gunawan, ~Ahmad Musleh Abdul Hamid, ~Siti Alfajriyani, ~Abdullah,
~Sofia Dina Salsabila, ~Nuvilu Usman Alatas, ~Dafelia Qodhari, ~Adelina,
~Nurianingtyas Arwanto, ~Bagus Prayogi, ~Maulana Ali Akbar, ~Ayu Wandirah,
~Andri Juansya, ~Iko Penantu Nate, ~Irdlonia Robba, ~Fahrul Hudatil Atkiyan,
~Natasya Ul-Ashwat, ~Andi Putradi, ~St. Marlianti, ~Basri, ~Oka Musir,
~Anggita Renata Sari, ~Salwa Nabella Aksi Humanita, ~M. A Sahal Baihaqi,
~Hasan Bisri, ~Ismayanti, ~Era Suryadi Putri, ~Riska Prasasti, ~Nesha Rizky Ashari,
~Ajeng Lestari, ~Irwan W., ~Cut Sari Maswidar, ~Khadhiya Fahira, ~Maya Karmila,
~Muhammad Akbar Ramadhani, ~Pipi Gusmianti, ~Laras Aisah,
~M.Yusril Hafidz Nur Izza, ~Muhammad Rafiuddin, ~Novita Ayu Amalikhah,
~Intan Magfirah, ~M. Faizin Rasyidi, ~Asmara

Tim Ahli:

~ Dr. Joko Setyono, SE., MSi.
~ Dr. Misnen Ardiansyah, SE., MSi. Ak., CA.
~ Dr. Syafiq M. Hanafi, MAG.
~ Dr. Ibnu Muhdir, MAG.
~ Dr. Slamet Haryono, SE., MSi.
~ Dr. Abdul Haris, MAG.
~ Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, SE., MSc.

Cetakan: 2024

16 x 23 cm; vi + 300 hlm.

Penerbit:

Magister Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta, Indonesia 55281
<http://es.uin-suka.ac.id>

All Rights reserved. Hak cipta dilindungi undang-undang.
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun
tanpa ijin tertulis dari penerbit.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah rabbil 'alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad.

Penulis bersyukur Kepada Allah SWT atas segala nikmat, karunia, kesehatan, serta kesadaran iman dan ilmu, sehingga penulis dapat menyelesaikan buku ini yang berjudul “Ekonomi Pembangunan Islam”. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada banginda Rasulullah SAW. Buku ini merupakan hasil karya kolaborasi dosen dan mahasiswa Prodi Magister Ekonomi Syariah (MES), Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI), Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Tata kelola perekonomian global saat ini mengalami pergeseran signifikan. Di mana kebutuhan akan pendekatan yang inovatif dan inklusif terhadap pembangunan ekonomi juga menjadi semakin mendesak. Dalam konteks ini, Ekonomi pembangunan Islam telah muncul sebagai sebuah disiplin ilmu yang krusial, yaitu menawarkan sebuah kerangka kerja yang menarik untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan dan berkeadilan. Ekonomi pembangunan Islam bukan sekadar perluasan dari ekonomi tradisional, melainkan sebuah paradigma yang berbeda yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum Islam (*syariah*) dengan teori ekonomi. Dengan demikian, pendekatan ini memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami interaksi yang kompleks antara sistem ekonomi, struktur sosial, dan nilai-nilai moral. Sehingga dengan hadirnya buku ini, diharapkan menjadi terobosan untuk mengkodifikasi dan menyebarluaskan pengetahuan dan wawasan dari bidang yang sedang berkembang pesat ini.

Yogyakarta, 26 Mei 2024

Penulis

Tim Prodi MES

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM & PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM.....	1
<i>Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, SE., MSc.</i>	
KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN PEMBANGUNAN	13
<i>(Suryani, Mega Musrifa, Syahrul Gunawan, Ahmad Musleh Abdul Hamid)</i>	
PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI	33
<i>(Siti Alfajriyani, Abdullah, Sofia Dina Salsabila, Nuvilu Usman Alatas)</i>	
URBANISASI DAN MIGRASI DESA-KOTA.....	61
<i>(Dafelia Qodhari; Adelina Nurianingtyas Arwanto; Bagus Prayogi; Maulana Ali Akbar)</i>	
MODAL MANUSIA: PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI	89
<i>(Ayu Wandirah, Andri Juansya, Iko Penantu Nate, Irdlonia Robba)</i>	
TRANSFORMASI PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN DESA	119
<i>(Fahrul Hudatil Atkiyan, Natasya Ul-Ashwat, Andi Putradi, St. Marlianti)</i>	
EKONOMI LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN.....	143
<i>(Basri, Oka Musir, Anggita Renata Sari, Salwa Nabella Aksi Humanita)</i>	

PERAN PASAR, NEGARA, DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBANGUNAN	175
<i>(M. A Sahal Baihaqi, Hasan Bisri, Ismayanti, Era Suryadi Putri)</i>	
PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN STRATEGI PEMBANGUNAN.....	191
<i>(Riska Prasasti, Nesha Rizky Ashari, Ajeng Lestari, Irwan W.)</i>	
DEFISIT NERACA PEMBAYARAN: UTANG PEMERINTAH, KRISIS KEUANGAN DAN KEBIJAKAN STABILISASI	223
<i>(Cut Sari Maswidar, Khadhiya Fahira, Maya Karmila, Muhammad Akbar Ramadhani)</i>	
KEUANGAN ASING, INVESTASI, BANTUAN, DAN KONFLIK: KONTERVERSI DAN PELUANG	253
<i>(Pipi Gusmianti, Laras Aisah, M.Yusril Hafidz Nur Izza, Muhammad Rafiuddin)</i>	
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN FISKAL UNTUK PEMBANGUNAN.....	279
<i>(Novita Ayu Amalikhah, Intan Magfirah, M. Faizin Rasyidi, Asmara)</i>	

PENGANTAR

**EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM &
PEMBANGUNAN DI NEGARA-NEGARA MUSLIM**

Dr. Muhammad Ghafur Wibowo, SE., MSc.

Kesejahteraan rakyat adalah cita-cita setiap negara. Kesejahteraan dapat dicapai ketika kestabilan perekonomian diraih, yang dapat dilihat dari pendapatan nasional meningkat, tingkat inflasi yang rendah, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, serta kemiskinan dan pengangguran yang rendah pula (Sukirno, 2008) Salah satu variabel ekonomi makro yang bisa menunjukkan tingkat pendapatan nasional adalah Produk Domestik Bruto (PDB) yang darinya bisa dihitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara dari tahun ke tahun.

Tingginya PDB memang bukan sesuatu yang mutlak untuk menjelaskan bahwa seluruh rakyat pasti merasa sejahtera, namun dengan PDB yang tinggi maka tingkat kesejahteraan relatif lebih bisa dicapai. Oleh karena itu, membandingkan kinerja ekonomi antarnegara paling sering dilakukan dengan membandingkan PDB tiap-tiap negara tersebut. PDB yang tinggi menggambarkan kemampuan rakyat suatu negara dalam memenuhi berbagai kebutuhannya (Mankiw, 2010).

Berbagai lembaga ekonomi internasional seperti Bank Dunia, Dana Moneter Internasional (IMF/*International Monetary Fund*) dan juga Bank Pembangunan Asia selalu melakukan perhitungan dan pemantauan terhadap pertumbuhan ekonomi berbagai negara. Tabel 1 berikut menunjukkan perkembangan pertumbuhan ekonomi dunia dan berbagai kawasan (Ayuni, 2018):

Tabel 1. Tabel Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Global

Kelompok Negara	2013	2014	2015	2016	2017
A.Dunia	3,5	3,6	3,5	3,2	3,8
B.Negara-negara maju	1,3	2,1	2,3	1,7	2,3
Amerika Serikat	1,7	2,6	2,9	1,5	2,3
Jepang	2,0	0,4	1,4	0,9	1,7
Inggris	2,1	3,1	2,3	1,9	1,8
Korea	2,9	3,3	2,8	2,8	3,1
Kawasan Eropa	-0,2	1,3	2,1	1,8	2,3
Jerman	0,6	1,9	1,5	1,9	2,5
Perancis	0,6	0,9	1,1	1,2	1,8
Belanda	-0,2	1,4	2,3	2,2	3,1
C. Negara-negara berkembang	5,1	4,7	4,3	4,4	4,8
Sub-Sahara Afrika	5,3	5,1	3,4	1,4	2,8
Asia	6,9	6,8	6,8	6,5	6,5
Tiongkok	7,8	7,3	6,9	6,7	6,9
India	6,4	7,4	8,2	7,1	6,7
Amerika Latin dan Karibia	2,9	1,3	0,3	-0,6	1,3
Timur Tengah, Afrika Utara, Afghanistan, dan Pakistan	2,6	2,8	2,5	4,9	2,6
Eropa	4,9	3,9	4,7	3,2	5,8
Negara-negara persemakmuran	2,5	1,0	-2,0	0,4	2,1
D. Negara-negara ASEAN	5,2	4,7	4,6	4,7	5,2
Malaysia	4,7	6,0	5,0	4,2	5,9
Filipina	7,1	6,1	6,1	6,9	6,7
Singapura	5,1	3,9	2,2	2,4	3,6
Thailand	2,7	1,0	3,0	3,3	3,9
Indonesia	5,6	5,0	4,9	5,0	5,1
Vietnam	5,4	6,0	6,7	6,2	6,8

Sumber: IMF dan Bank Dunia dalam Laporan Perekonomian Indonesia 2018 (BPS)

Berdasar tabel 1 yang dikutip Badan Pusat Statistik dari IMF dan Bank Dunia tersebut ditunjukkan bahwa perekonomian dunia tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding 2016 (dari 3,2% menjadi 3,8%) yang salah satunya ditopang oleh tingginya pertumbuhan ekonomi China dan India. Secara umum, pertumbuhan ekonomi di negara-negara maju relatif lebih rendah dibanding negara berkembang karena mereka sudah mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja dan faktor produksi yang sudah/hampir penuh (full employment).

Satu hal yang menarik dari tabel 1 di atas adalah rendahnya pertumbuhan ekonomi di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara ditambah dengan Afghanistan dan Pakistan yang sebesar 2,6% di tahun 2017. Angka ini memang lebih tinggi dibanding kawasan di Amerika Latin, namun lebih rendah dari Sub-Sahara Afrika apalagi ASEAN (Association of South East Asia Countries) yang sama-sama negara berkembang. Kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara adalah wilayah yang terdiri dari negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Demikian pula Pakistan dan Afghanistan yang sebenarnya masuk wilayah lain, namun juga berpenduduk mayoritas muslim.

Konfirmasi dengan data lain yang dihimpun oleh Kuran semakin menunjukkan ketertinggalan negara-negara muslim (berpenduduk mayoritas muslim) dalam hal kinerja perekonomian mereka. Bersumber pada data yang diterbitkan oleh UNDP, Kuran membandingkan beberapa indikator kinerja perekonomian antara negara berpenduduk mayoritas muslim dan non-muslim (Kuran, 2018).

Kuran membandingkan beberapa indikator kinerja ekonomi negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam/OKI (Organisation of Islamic Cooperation, OIC) dengan data global dan negara-negara non-OKI tahun 2014. Dalam hal kualitas sumber daya manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di tabel I.2, nilai IPM (Human Development Index, HDI) menunjukkan ketertinggalan yang cukup jauh antara nilai IPM negara muslim (0,61) dengan nilai IPM dunia (0,71) apalagi dengan nilai IPM negara non-muslim (0,74).

Dari sisi kualitas kesehatan yang diukur dengan tingkat harapan hidup, capaian negara-negara muslim juga lebih rendah (66,5 tahun) dari data dunia (71,4 tahun) dan negara non-muslim (72,8). Kualitas pendidikan negara-negara muslim yang diukur dari tingkat literasi (kemampuan membaca) juga jauh tertinggal (73,3%) dari total data dunia

(85,2%) apalagi negara-negara non-muslim (88,9%). Rendahnya kualitas sumber daya manusia di negara-negara muslim akhirnya secara tidak langsung berdampak pada rendahnya pendapatan per penduduk (PDB per kapita) mereka yang sebesar USD 10.015 per tahun, jauh dibandingkan data dunia (USD 15.740) dan data negara non-muslim (USD 17.500).

Ketertinggalan dalam bidang ekonomi negara-negara berpenduduk mayoritas muslim dari negara-negara lain sudah sejak lama menjadi kajian para pemikir muslim. Monzer Kahf, salah seorang ekonom muslim dunia, menulis artikel panjang yang berjudul *Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy* (Kahf, 1997). Menurut Kahf, isu ketertinggalan ekonomi negara muslim dan kaitannya dengan defisit anggaran adalah sebuah masalah yang serius, mengingat fenomena tersebut sudah menjangkiti sejak puluhan tahun lalu. Mayoritas negara muslim yang merupakan negara berkembang memiliki utang publik (pemerintah) yang besar. Menurutnya, ada beberapa faktor yang menyebabkan defisit anggaran tersebut, yaitu korupsi dan pembelanjaan sia-sia; subsidi harga; inefisiensi pada sektor publik yang besar; serta belanja pertahanan yang besar (Kahf, 1997).

Tabel 2 Perbandingan Indikator Kinerja Ekonomi Negara-negara Berpenduduk Mayoritas Muslim Tahun 2014

Region, Country, or Country Grouping	Population (millions)	Human Development Index (0-1)	Life expectancy at birth (years)	Adult literacy rate (%)	Gross Domestic Product Per Capita (US\$, PPP)
Afghanistan	31	0.47	60.4	38.2	1,934
Arab League	378	0.66	70.5	77.9	17,428
ASEAN, Muslim-maj.	283	0.69	69.5	95.4	12,809
Balkans, Muslim-maj.	9	0.73	75.8	98.1	10,636
Bangladesh	159	0.57	71.6	61.5	3,332
Ex-USSR, Muslim-maj.	75	0.70	69.0	99.8	12,099
Iran	79	0.76	75.4	84.6	17,365
Non-Arab Africa, Muslim-maj.	96	0.39	55.8	54.8	3,604
Pakistan	185	0.54	66.2	55.6	5,041
Turkey	76	0.76	75.3	95.4	19,618
OIC	1,678	0.61	66.5	73.3	10,015
World	7,347	0.71	71.4	85.2	15,740
Non-OIC	5,669	0.74	72.8	88.9	17,500
ASEAN, Muslim-min.	274	0.64	70.6	93.8	8,417
Balkans, Muslim-min.	59	0.81	76.3	98.0	20,693
China	1,371	0.73	75.8	95.1	14,238
Ex-USSR, Muslim-min.	71	0.76	71.8	99.7	10,832
India	1,311	0.61	68.0	69.3	6,088
Latin America	633	0.75	75.0	92.6	15,581
Non-Arab Africa, Muslim-min.	859	0.52	58.7	65.3	3,907
OECD (except Turkey)	1,204	0.88	80.8	99.8	42,216
Russia	143	0.80	70.1	99.7	24,451

Sumber: UNDP, *Human Development Report 2015*, dalam Kuran (2018).

Sejalan dengan Kahf, Kuran menjawab pertanyaan tentang mengapa negara-negara di Timur Tengah yang mayoritas beragama Islam tertinggal secara ekonomi dari wilayah lain (Kuran, 2004). Menurut Kuran, dipandang dari sudut sejarah, beberapa penyebab utama ketertinggalan tersebut adalah 1) hukum kontrak yang berorientasi pada individu (*individually oriented contract law*), 2) pembiayaan tanpa bank (*finance without banks*), 3) kesewenangan perpajakan dan lemahnya pengakuan hak milik pribadi (*arbitrary taxation and weak private property rights*), 4) sistem perwarisan yang egaliter (*egalitarian inheritance system*), 5) penyediaan barang publik yang tidak memadai.

Penilaian serupa juga disampaikan oleh Lackey (2019) ketika menganalisis mengapa negara-negara Islam yang dikaruniai dengan kekayaan alam dan sumber daya yang melimpah, namun gagal membangun ekonominya dengan baik. Negara-negara muslim yang berada di wilayah Timur Tengah, Afrika Utara, Asia Selatan, dan juga Asia Tenggara secara umum memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak dan gas. Namun demikian, mereka tertinggal jauh dari negara yang tidak memiliki kekayaan sumber daya yang cukup, seperti Belanda, Swiss, dan negara-negara maju lainnya. Menurut Lackey, lemahnya pendidikan, ketidakstabilan keamanan, serta kepastian hukum yang lemah menjadi penyebab utama masalah tersebut. Selain itu, nasib wanita yang sering ditinggalkan dalam berbagai aspek kehidupan juga menambah berat kondisi tersebut. Terlebih lagi, secara kelembagaan, buruknya pelayanan publik serta tingginya korupsi semakin memperparah keterpurukan ekonomi negara-negara muslim.

Penelitian terkait dengan kinerja perekonomian khususnya pendapatan nasional dan pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim sudah cukup banyak dilakukan. Pryor menganalisis pengaruh populasi penduduk muslim terhadap pertumbuhan ekonomi dikaitkan dengan sistem ekonomi yang dianut di 62 negara berpenduduk muslim. Pryor menyatakan bahwa kehadiran Islam yang diukur dari persentase penduduk muslim hanya berpengaruh kecil dan tidak signifikan terhadap kinerja ekonomi dan sosial.

Hasil penelitian yang serupa ditemukan oleh Khalfaooui (2015) yang menunjukkan bahwa pengaruh persentase jumlah penduduk muslim di 20 negara muslim terpilih tahun 1990-2014 berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Temuan Khalfaooui sejalan dengan penelitian

yang dilakukan oleh Campante dan Drott yang menganalisis pengaruh ibadah Ramadhan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara muslim (Filipe R. Campante, 2013). Penelitian yang dilakukan lintas negara muslim tahun 1981-2014 itu menemukan bahwa praktik ibadah yang diukur melalui jumlah jam pada bulan Ramadhan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun demikian berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kebahagiaan (happiness).

Sejak abad ke-19, negara-negara di Timur Tengah tertinggal secara ekonomi dibanding negara-negara di Eropa, khususnya Eropa Barat, bahkan memasuki abad ke-21 mereka juga tertinggal dari kawasan Timur Jauh (Far East). Kawasan Timur Tengah secara umum merupakan negara-negara yang berpenduduk mayoritas muslim. Pada awal kemunculan Islam di Timur Tengah, mereka menjadi kekuatan baru peradaban dunia, seiring dengan berkembangnya kekhalifahan Islam pasca meninggalnya Nabi Muhammad. Beberapa pemikiran dan praktik ekonomi yang berkembang pada masa lalu adalah (Kuran, 2004):

- a. Hukum kontrak yang berorientasi pada individu (*individually oriented contract law*). Hukum Islam fokus pada prinsip, aturan, dan prosedur yang dirasa lebih berorientasi pada individu sehingga menghambat terbentuknya kerjasama kolektif.
- b. Pembiayaan tanpa bank (*finance without banks*). Islam melarang pemungutan “riba” dari peminjaman uang sehingga perputaran dana menjadi terbatas. Berbagai usaha yang produktif menjadi terhambat karena kekurangan modal. Walaupun dimungkinkan untuk melakukan kerjasama penggabungan modal dan keahlian, namun akses terhadap dana menjadi terhambat ketika tidak ada bank.
- c. Kesewenangan perpajakan dan lemahnya pengakuan hak milik pribadi (*arbitrary taxation and weak private property rights*). Pemerintah harusnya bertugas untuk menyediakan berbagai kebutuhan publik dan penganggaran (fiskal) negara. Dampaknya, pemungutan pajak menjadi sangat dominan bahkan cenderung berlebihan di sebagian tempat sehingga memberatkan masyarakat. Kesewenangan pajak tidak hanya dirasakan oleh penduduk muslim, namun juga penduduk non-muslim. Dalam tahap tertentu pemerintah melakukan penyitaan atas harta benda rakyat tanpa menghargai hak kepemilikannya.
- d. Sistem perwarisan yang egaliter (*egalitarian inheritance system*). Sistem perwarisan dalam Islam sering dianggap sangat rumit dan berbelit-

belit dalam perhitungannya. Banyaknya pihak yang harus mendapat bagian warisan menyebabkan harta terbagi-bagi dalam ukuran yang kecil-kecil. Hal ini membatasi terpusatnya/terkumpulnya kekayaan yang sangat dibutuhkan bagi permodalan usaha. Sistem waris Islam berdampak pada pemecahan properti khususnya kekayaan keuangan. Tentu saja ini semakin melemahkan sumber produksi barang dan jasa dalam masyarakat.

- e. Penyediaan barang publik melalui sistem wakaf. Berbagai kebutuhan umum masyarakat seperti sekolah, panti asuhan, penyediaan air, hingga masjid didanai oleh dana wakaf yang merupakan dana “swadaya” dari masyarakat. Oleh karena itu, harta hasil wakaf dianggap suci sehingga aman dari pengambilalihan oleh pemerintah.

Perbandingan antara Timur Tengah dan Eropa di abad ke-19:

- a. Terdapat banyak perusahaan besar di berbagai negara Eropa yang dikelola dengan manajemen yang modern dan profesional. Mereka memiliki jaringan yang luas dan kemampuan daya tahan lebih baik dibandingkan perusahaan-perusahaan di kawasan Timur Tengah. Pelibatan masyarakat dalam jumlah yang banyak dalam hal permodalan maupun sumber daya jarang terjadi di Timur Tengah.
- b. Sistem wakaf gagal menyediakan berbagai fasilitas publik sebagaimana yang mampu disediakan di Eropa. Sistem wakaf dirasa tidak mampu melakukan adaptasi terhadap kebutuhan masyarakat yang semakin banyak dan beragam. Hal ini berbeda dengan pemerintah di negara Eropa yang memungut pajak dan menggunakannya guna memenuhi kebutuhan publik dengan baik.
- c. Kurang terciptanya keamanan di kawasan Timur Tengah menyebabkan pembangunan terhambat, termasuk dalam hal perpajakan maupun pengambilalihan asset yang sering terjadi di sana. Di Barat, ada keberhasilan dalam menciptakan pemerintahan yang menghargai hak milik pribadi, pembatasan pajak, serta pemberantasan korupsi. Berkembangnya demokrasi membuat pemerintahan semakin bisa diperkirakan, sehingga para pelaku usaha juga mampu memperkirakan bisnisnya dengan baik.
- d. Ketika Timur Tengah semakin jauh tertinggal, para pengusaha, pedagang, maupun investor dari Eropa datang untuk memainkan peranan penting mereka dalam perekonomian. Melalui lembaga

perbankan dan asuransi, orang-orang Eropa yang notabene beragama Kristen dan Yahudi mulai mengambil peran penting dalam perekonomian Timur Tengah.

Ajaran Islam dianggap dan diyakini masih menjadi penghambat dalam pembangunan ekonomi. Islam diidentikkan dengan menghambat pembentukan modal manusia, pembatasan pada eksperimen dan inovasi, bahkan memfasilitasi otoritarianisme negara. Berbagai persepsi negatif tersebut muncul karena di banyak negara berpenduduk mayoritas muslim yang mengalami berbagai masalah tersebut dengan sangat parahnya (Kuran, 2018). Penduduk negara-negara di Timur Tengah yang beragama Kristen dan Yahudi-lah yang menjadi mesin penggerak perekonomian utama.

Ajaran Islam memiliki paling tidak 3 institusi/lembaga ekonomi yang didasarkan pada sumber hukumnya, yaitu (Kuran, 2004):

1. Ibadah haji: ibadah ini merupakan salah satu dari 5 rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim yang mampu, baik secara kesempatan maupun keuangan. Orang-orang yang berniat untuk melaksanakan ibadah haji ini memiliki semangat dan etos kerja yang tinggi sehingga mereka mampu membiayainya. Selain itu, orang-orang Islam yang sudah menunaikan ibadah haji memiliki perilaku yang mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi, seperti persamaan dan harmoni hidup di lingkungan yang beragam, menerima wanita di bidang pendidikan dan pekerjaan, serta toleren terhadap orang yang berlainan agamanya.
2. Puasa bulan Ramadhan: ibadah ini memakan waktu 1 bulan penuh dalam setiap tahunnya, sehingga tentu memiliki dampak terhadap produktifitas tenaga kerja. Beberapa penelitian menyimpulkan bahwa lamanya waktu bulan Ramadhan dapat menurunkan tingkat produksi dan juga pertumbuhan ekonomi, walaupun secara individu akan meningkatkan kebahagiaan. Dalam hal kesehatan pun ditemukan bahwa anak yang lahir dari ibu yang melaksanakan puasa mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik, kemampuan akademik yang lebih rendah, serta memiliki kinerja yang lebih rendah di pasar kerja. Namun demikian, temuan ini tentu saja memunculkan kontroversi sehingga masih memerlukan kajian lebih lanjut.
3. Zakat. Kewajiban membayar zakat bagi seorang muslim yang memenuhi syarat berdampak secara ekonomi, khususnya bagi masyarakat miskin di sekitarnya. Pengalokasian zakat untuk 8 pihak

yang berhak menerimanya menyebabkan pemanfaatannya menjadi tidak fleksibel. Selain itu, besaran zakat sebesar 2,5% terasa sangat kurang dan tidak akan memenuhi keuangan negara dalam konteks ekonomi makro.

Selain ada institusi/lembaga yang sudah muncul bersamaan dengan kedatangan Islam, terdapat pula beberapa institusi yang merupakan inovasi dari ajaran Islam. Institusi ini merupakan respon umat Islam atas perkembangan zaman sehingga Islam tidak selalu identik dengan ketertinggalan, sebagaimana yang disampaikan para aktivis anti-Islam. Lembaga sosial ekonomi keumatan tersebut di antaranya adalah (Kuran, 2004):

1. Lembaga pengelola infak dan sedekah (*Islamic Charities*). Selain kewajiban membayar zakat, umat Islam juga didorong untuk mengeluarkan infak dan sedekah yang biasanya dikelola oleh kelompok masyarakat maupun organisasi keagamaan. Di berbagai negara, pengelolaan dana infak dan sedekah yang profesional dapat digunakan untuk membangun berbagai fasilitas sosial seperti rumah sakit, sekolah, bahkan pemberdayaan ekonomi umat.
2. Madrasah (*Islamic Education*). Sistem pengajaran Islam di berbagai negara biasanya berbentuk sekolah-sekolah keagamaan yang disebut madrasah. Institusi ini tidak hanya mengajarkan pengetahuan keIslaman, namun juga mengajarkan keilmuan umum modern yang bersumber dari Barat. Tentu saja dengan proporsi yang berbeda-beda di setiap tempat dan waktunya. Sebagai contoh di Indonesia, organisasi Muhammadiyah mengembangkan madrasah yang muatan kurikulumnya 30% berisi pengetahuan keagamaan, sedangkan 70% berisi pengetahuan umum.
3. Keuangan Islam (*Islamic Finance*). Lembaga keuangan berbasis prinsip-prinsip ajaran Islam mulai berkembang di berbagai negara berpenduduk muslim, seperti perbankan, asuransi, pegadaian, dan lain sebagainya. Tentu saja lembaga ini berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi di negara mereka masing-masing.

Secara umum, pengajaran Islam dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum, hal ini tentu saja menuntut pemerintah mampu menyediakan berbagai fasilitas publik dan pelayanan yang baik. Namun pada sisi lain, pendidikan Islam menyebabkan meningkatnya intoleransi terhadap pendatang dan

kelompok lain, kurang mendukung pendidikan terhadap perempuan, apalagi dalam bidang pekerjaan publik.

Sumber-sumber ketertinggalan ekonomi di berbagai negara muslim pada masa lalu adalah (Kuran, 2004):

1. Ketertinggalan secara komersial dan finansial, terbukti sangat jarangunya perusahaan besar (multinasional) di berbagai negara muslim. Hal ini termasuk pula di bidang keuangan, seperti bank dan asuransi, yang mayoritas dikuasai oleh orang Kristen dan Yahudi.
2. Pembangunan kota dan penyediaan barang-barang publik yang tidak memadai. Pemerintah di negara-negara muslim (dulu kerajaan) tidak mampu menyediakan kebutuhan masyarakat dengan baik karena disibukkan dengan usaha memperkaya diri sendiri, keluarga, dan kelompoknya.
3. Penegakan hukum oleh pengadilan yang seringkali belum bisa memberikan kepastian hukum dan keadilan. Dalam istilah ekonomi modern, hal ini disebut sebagai ekonomi politik kelembagaan (*institutional political economy*). Kepastian hukum akan memunculkan kepastian dalam menjalankan bisnis oleh para pelaku usaha. Selain itu, hal ini juga akan menciptakan efisiensi dalam perekonomian.
4. Menurunnya pengetahuan saintifik, karena umat Islam terjebak dalam perdebatan keagamaan yang tidak jarang menimbulkan konflik. Catatan sejarah kegemilangan umat Islam di bidang pengetahuan umum di masa awal pemerintahan Islam menjadi tidak berbekas lagi.
5. Perbandingan antara muslim dan nonmuslim di dalam negara, khususnya dalam hal pilihan hukum, pendidikan, juga sistem perwarisan turut pula berkontribusi dalam ketertinggalan ekonomi umat Islam.

Dalam kehidupan umat Islam saat ini, aspek politik juga turut berperan dalam menghambat kemajuan ekonomi. Pemerintahan yang cenderung otoritarian dan penegakan hukum yang lemah menjadikan perkembangan ekonomi turut terhambat. Perilaku anti-demokrasi di beberapa negara yang cenderung otoriter pemerintahannya sering memunculkan ketidakstabilan kehidupan sosial politik, yang pada gilirannya menyebabkan ketidakstabilan dalam bidang ekonomi (Kuran, 2004).

Sebagai contoh, krisis sosial, politik, dan keamanan yang melanda di sebagian negara Arab di tahun 2011 (Arab Spring) berdampak luas

terhadap perekonomian di berbagai negara. Krisis yang diawali dengan kekacauan politik di Tunisia pada akhir tahun 2010 merembet dengan cepak ke berbagai negara di sekitarnya, seperti Libya, Maroko, Mesir, dan lain sebagainya. Berbagai negara tersebut mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi, peningkatan inflasi serta melonjaknya tingkat pengangguran (Qadirmushtaq & Afzal, 2017). Rezim otoritarian di sebagian besar negara Arab yang memiliki kinerja ekonomi buruk menyebabkan terjadinya gejolak sosial dan memunculkan krisis multidimensi (Luciani, 2015).

Todaro & Smith (2015) mendefinisikan pembangunan ekonomi sebagai proses multidimensi yang melibatkan bermacam-macam perubahan mendasar dalam struktur sosial, sikap masyarakat, dan lembaga nasional seperti halnya percepatan pertumbuhan, pengurangan ketimpangan, dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan ekonomi pembangunan adalah studi tentang bagaimana perekonomian ditransformasikan dari stagnasi ke pertumbuhan dan dari berpendapatan rendah ke negara berpendapatan tinggi serta mengatasi permasalahan kemiskinan absolut. Pada sisi lain, Ekonomi Islam didefinisikan sebagai sebuah perilaku atau sistem ekonomi yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits (KNEKS, 2021). Oleh karena itu, Ekonomi Pembangunan Islam dapat difahami sebagai studi tentang bagaimana perekonomian ditransformasikan dari stagnasi ke pertumbuhan dan dari berpendapatan rendah ke negara berpendapatan tinggi serta mengatasi permasalahan kemiskinan absolut yang mengacu pada aturan-aturan yang ditetapkan dalam agama Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadits. Buku ini hadir untuk memperkaya khazanah pengetahuan Ekonomi Islam, khususnya bidang pembangunan ekonomi di negara-negara muslim.

REFERENSI

- Ayuni, S. (2018). *Laporan Perekonomian Indonesia 2018*. Jakarta.
- Filipe R. Campante, D. H. Y. (2013). Does Religion Affect Economic Growth and Happiness. *National Bureau of Economic Research*, 1(19768), 1-45.
- Kahf, M. (1997a). Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy. *IRTI Research Paper*, 42.

- Kahf, M. (1997b). Instruments of Meeting Budget Deficit in Islamic Economy. *IRTI Research Paper*, 42.
- Khalfaoui, H. (2015). Islam and Economic Growth. *International Journal of Social Science Studies*, 3(6), 62–69.
- KNEKS. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. (M. S. N. Hidayat, Sutan Emir, Ed.). Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia.
- Kuran, T. (2004). Why the Middle East is Economically Underdeveloped: Historical Mechanisms of Institutional Stagnation. *Journal of Economic Perspectives*, 18(3), 71–90. <https://doi.org/10.1257/0895330042162421>
- Kuran, T. (2018). Islam and Economic Performance: Historical and Contemporary Links. *Journal of Economic Literature*, 56(4), 1292–1359.
- Lackey, R. (2019). Why Have the Islamic Countries Failed To Develop Even With Resources Like Oil, While Countries With No Resources Like Switzerland Have Flourished? Retrieved January 20, 2019, from <https://www.forbes.com/sites/quora/2013/01/08/why-have-the-islamic-countries-failed-to-develop-even-with-resources-like-oil-while-countries-with-no-resources-like-switzerland-have-flourished/#295b6023282c>
- Luciani, G. (2015). On the Economic Causes of the Arab Spring and Its Possible Developments. In K. Selvik & B. O. Utvik (Eds.), *Oil States in the New Middle East: Uprisings and Stability* (pp. 188– 204). London: Routledge.
- Mankiw, N. G. (2010). *Macroeconomics* (7th edn). New York: Worth Publisher.
- Qadirmushtaq, A., & Afzal, M. (2017). Arab Spring: Its Causes and Consequences. *JPUHS*, 30(1), 1–10.
- Sukirno, S. (2008). *Makroekonomi: Teori Pengantar* (3rd edn). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (11th ed.). New York: New York University.

KEMISKINAN, KETIMPANGAN, DAN PEMBANGUNAN

(Suryani, Mega Musrif, Syahrul Gunawan, Ahmad Musleh Abdul Hamid)

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan masalah Pembangunan yang telah ada sejak dahulu, dan semua negara tidak terkecuali negara-negara maju mengalami hal tersebut. Di kebanyakan negara saat ini ada indikasi gejala kemiskinan semakin memburuk. Terdapat 19,10 juta orang (9,30 persen penduduk usia kerja) yang berdampak covid-19 terdiri dari pengangguran karena covid-19 (1,62 juta orang). Bukan Angkatan kerja karena covid-19 (0,65 juta orang), sementara tidak bekerja karena covid-19 (1,11 juta orang) dan penduduk bekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena covid-19 (15,72 juta orang). Dalam pada itu jumlah pengangguran terbuka masih begitu besar yakni 6,82 juta orang (februari 2019). Hal ini ditenggarai sebagai akibat dari Kebijakan pemerintah yang sangat liberal dalam perdagangan bangsa-bangsa lain di dunia, terutama sejak keberlakuannya perdagangan bebas dengan china (Nujum & Nusran, 2021)

Tabel 1.1 Pertumbuhan Ekonomi & Inflasi Ekonomi Indonesia
2018-2022

Pertumbuhan Ekonomi		Inflasi Ekonomi	
Tahun	Persen	Tahun	Persen
2018	5.17%	2018	0.62%
2019	5.02%	2019	0.34%
2020	2.07%	2020	0.28%
2021	3.69%	2021	0.57%
2022	5.31%	2022	0.61%

PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia pada tahun 2021 triwulan II mencapai Rp. 4. 175,8 triliun jumlah kelas menengah (*middle class income group*) mencapai 45 juta orang. Pada tahun 2030 jumlah kelas menengah itu akan bertambah 95 juta orang dan ekonomi Indonesia diprediksi akan menempati posisi ketujuh terbesar di dunia, mengungguli Jerman dan Inggris pada saat itu Indonesia akan ditopang oleh empat sektor utama yaitu jasa, pertanian, kelautan dan perikanan dan sumberdaya lainnya.

Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pada pemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia, kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya Pendidikan, Nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi (Primadianti & Sugiyanto, 2020).

Daya saing ekonomi Indonesia pada tahun 2019 turun lima peringkat dari 45 ke 50 dari 141 negara yang disurvei. Hal ini tergambar dari turunnya skor indeks daya saing global sebesar 0,3 point menjadi 64,6 point. Sekedar perbandingan Singapura adalah negara dengan peringkat tertinggi di Asia Tenggara dan dunia skor 84,8 dan Malaysia diposisi-2 dengan skor 74,6%.

Masalah ketimpangan ekonomi antar daerah tidak hanya tampak pada wajah ketimpangan perekonomian pulau Jawa dan luar pulau Jawa, melainkan juga Kawasan barat Indonesia dan Kawasan timur Indonesia. Berbagai program yang dikembangkan untuk menjembatani ketimpangan antar daerah selama ini ternyata belum mencapai hasil yang memadai.

Adanya heterogenitas dan beragam karakteristik suatu wilayah menyebabkan kecenderungan terjadinya ketimpangan antar daerah dan antar sektor ekonomi satu daerah. Ekonomi Indonesia sampai dengan triwulan III-2019 tumbuh 5,04%. Dari sisi produksi pertumbuhan didorong oleh semua lapangan usaha, pertumbuhan tertinggi pada lapangan usaha jasa lainnya sebesar 10,49%. Struktur ekonomi Indonesia secara spasial didominasi oleh kelompok provinsi di pulau Jawa dan pulau Sumatera.

Ketimpangan ekonomi masih menjadi tantangan bagi Indonesia, angka ketimpangan antar wilayah masih sangat tinggi, kemiskinan di kawasan timur Indonesia sebesar 18,01 persen, Kawasan barat

Indonesia 10,33 persen, dan dari seluruh permasalahan sosial ekonomi diatas adalah rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (Human Davelopment Indeex), dari tahun ke tahun sebenarnya IPM Indonesia mengalami peningkatan namun peningkatan yang terjadi belum membawa Indonesia pada level menengah. UNDP mencatat, IPM Indonesia berada pada tingkat 113 dari 188 negara didunia. IPM ini meningkat sekitar 30,5 persen dalam 25 tahun terakhir, namun disaat yang bersamaan, UNDP melihat ada sejumlah indicator kesenjangan yang bertolak belakang dengan peningkatan IPM tersebut.

Pertama,tingkat kemiskinan dan kelaparan. UNDP mencatat, ada sekitar 140 juta orang Indonesia yang hidup dengan biaya kurang dari Rp. 20.000 per hari dan 19,4 jjuta orang menderita gizi buruk. Kedua, tingkat Kesehatan dan kematian tercatat sebanyak dua juta anak dibawah usia satu tahun belum menerima imunisasi lengkap. Kemudian angka kematian ibu sebnyak 305 kematian per seratus ribu kelahiran hidup.

Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia tertinggal, mulai dari kelembagaan politik yang menyuburkan budaya instant, premanisme, politik uang, dan korupsi, rendahnya etos kerja banngsa, sampai lemahnya penguasaan dan penerapan IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) dalam berbagai kehidupan bangsa ini. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, seluruh komponen bangsa harus segera bangkit dan Bersatu padu untuk secara cerdas dan Ikhlas mengatasi segenap permasalahan dan secara simultan mendayagunakan semua potensi bangsa menuju satu tujuan, yakni terwujudnya Indonesia yang maju, adil Makmur dan berdaulat. Selama 8 tahun terakhir Sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia dihasilkan oleh sektor jasa keuangan dan sektor rill non-tradeable, seperti perhotelan, apartemen, mall dunia hiburan dan jasa transportasi. Sebagaimana dimaklumi bahwa kedua sektor ekonomi ini pada umumnya berlangsung diwilayah perkotaan, dan hanya menyerap tenaga kerja sekitar 40.000 sampai 150.000 orang tenaga kerja per satu persen pertumbuhan ekonomi. Selain dari itu lebih dari 70 persen pertumbuhan ekonomi berasal dari konsumsi (belanja) pemerintah, swasta dan Masyarakat. Bukan dari investasi sektor riil tradeable yang produktif dan ekspor dengan kandungan nilai tambah dan berdaya saing yang tinggi.

Oleh karena itu agenda Pembangunan ekonomi yang mestinya kita kembangkan adalah sektor-sektor (kegiatan) ekonomi yang mampu

menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar dan memberikan penghasilan (income) yang dapat menyejahterakan pelaku usaha dan seluruh rakyat secara berkeadilan dan berkesinambungan, sehingga setiap warga negara minimal dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, mengingat bahwa Indonesia juga merupakan salah satu negara penghutang terbesar didunia.

TEORI DAN KEBIJAKAN

Kemiskinan

Secara umum definisi mengenai kemiskinan dibentuk berdasarkan identifikasi dan pengukuran terhadap sekelompok masyarakat/golongan yang selanjutnya disebut miskin. Pada umumnya, setiap negara termasuk Indonesia memiliki sendiri definisi seseorang atau suatu masyarakat dikategorikan miskin. Hal ini dikarenakan kondisi yang disebut miskin bersifat relatif untuk setiap negara misalnya kondisi perekonomian, standar kesejahteraan, dan kondisi sosial. Setiap definisi ditentukan menurut kriteria atau ukuran-ukuran berdasarkan kondisi tertentu, yaitu pendapatan rata-rata, daya beli atau kemampuan konsumsi rata-rata, status kependidikan, dan kondisi kesehatan (Jacobus, Kindangen, & Walewangko, 2018).

Angka kemiskinan yang tinggi masih menjadi salah satu masalah dalam pembangunan bagi negara-negara berkembang termasuk di Indonesia. Secara umum, kemiskinan bisa disebabkan oleh banyak hal. Menurut Todaro & Smith dalam (Okuputra, 2022) Di Indonesia dan negara-negara berkembang lainnya, kemiskinan merupakan masalah besar karena hal ini memicu kemiskinan, yang pada gilirannya memicu sejumlah tantangan lainnya (Fadila, 2020) Kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif adalah dua cara untuk mengklasifikasikan tingkat kesulitan ekonomi yang berbeda. Menurut definisi apapun, kemiskinan absolut terjadi ketika sebagian besar penduduk tidak memiliki akses terhadap kebutuhan paling mendasar. seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, sedangkan kemiskinan relatif disebabkan oleh ketidakseimbangan ekonomi yang berkontribusi terhadap kesenjangan.

Kotze dalam Kadji (2021) menyatakan bahwa masyarakat miskin memiliki kemampuan yang relatif baik untuk memperoleh sumber

melalui kesempatan yang ada. Kendatipun bantuan luar kadang-kadang digunakan, tetapi tidak begitu saja dapat dipastikan sehingga masyarakat bergantung pada dukungan dari luar. Pendekatan pemberdayaan ini dianggap tidak berhasil karena tidak ada masyarakat yang dapat hidup dan berkembang bila terisolasi dari kelompok masyarakat lainnya. Pengisolasian ini menimbulkan sikap pasif, bahkan keadaan menjadi semakin miskin.

Ketimpangan

Permasalahan ketimpangan pendapatan merupakan isu yang serius sebagai konsekuensinya pada kebahagiaan, kesehatan (Phuc & Ali, 2021) dan menimbulkan masalah sosial (Mdingi & Ho, 2021). Temuan penelitian beberapa negara menyatakan ketimpangan pendapatan berpengaruh terhadap kemiskinan energi (Phuc & Ali, 2021), menurut (Herrero, 2018) kemiskinan energi yang tinggi terjadi karena dampak banyaknya penduduk yang tidak mengakses listrik dan energi dalam kehidupan sehari-hari, salah satu penduduk yang kesulitan dalam mengakses listrik yaitu penduduk yang berpenghasilan rendah. Selain itu, kemiskinan energi dapat menyebabkan penurunan kesejahteraan sosial dan meningkatnya ketimpangan pendapatan (Churchill & Smyth, 2020).

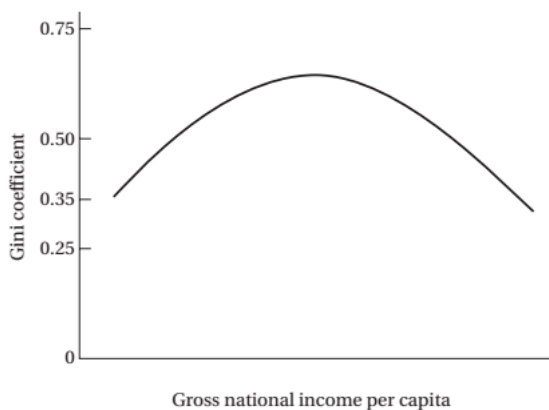
Menurut Todaro & Smith dalam (Wibowo & Pangestuty, 2023) ketimpangan pendapatan adalah terdapatnya perbedaan pendapatan yang diterima atau dihasilkan oleh masyarakat sehingga mengakibatkan tidak meratanya distribusi pendapatan nasional di antara masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa ketimpangan pendapatan ialah adanya kesalahan dalam pemerataan terhadap mengapresiasi suatu kinerja masyarakat (uang).

Kasus ketimpangan pendapatan di Indonesia yang dipengaruhi oleh kemiskinan energi sering terjadi pada penduduk di wilayah pedesaan. Hal ini dikarenakan banyaknya penduduk di daerah pedesaan yang masih menggunakan kayu bakar untuk memasak. Adanya Keterbatasan ekonomi juga menyebabkan ketiadaan akses listrik, bahan bakar dan gas bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang dapat berakibatkan terjadinya penurunan pendapatan. Salah satu alat dalam mengukur ketimpangan pendapatan menurut Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan Indeks Gini Ratio atau indeks gini. Indeks ini menggunakan skala 0-1. Semakin

besar nilai dari indeks gini, semakin besar pula ketimpangannya (Shinetiara & Adry, 2023). Perbedaan pertumbuhan ekonomi akan memberikan dampak perbedaan tingkat kesejahteraan daerah, yang pada akhirnya akan menyebabkan ketimpangan pendapatan antar daerah, dengan kata lain ketimpangan pendapatan suatu daerah semakin besar (Caesarisma, 2023).

Teori “Kuznets Curve”: Teori ini mengusulkan bahwa ketimpangan pendapatan akan mengikuti pola tertentu seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Teori Kuznets Curve menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan ekonomi, ketimpangan pendapatan cenderung meningkat karena sektor-sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi (seperti industri berat) cenderung memberikan manfaat kepada kelompok yang lebih kaya. Namun, seiring dengan waktu, ketika ekonomi mencapai tahap yang lebih matang dan sektorsektor yang lebih inklusif berkembang (seperti sektor jasa), ketimpangan pendapatan akan mulai menurun (Bhagaskara, 2023).

Gambar 1.1. Kurva Kuznets



Menurut Todaro dan Smith (2011), untuk tujuan analitis dan kuantitatif para ekonom biasanya membagi dua ukuran utama dalam distribusi pendapatan menjadi distribusi pendapatan perseorangan dan distribusi pendapatan fungsional. Selain itu juga terdapat beberapa indikator dalam mengukur ketimpangan pendapatan seperti koefisien gini.

Koefisien Gini atau yang biasa dikenal dengan Indeks Gini merupakan alat sederhana untuk mengukur kesenjangan pendapatan suatu daerah.

PenghitungankoefisienGinididasarkanpadakonsentrasipendapatan di suatu wilayah relatif terhadap populasi tertentu, yang biasanya dibagi menjadi penduduk berpenghasilan rendah, berpenghasilan menengah, dan berpenghasilan tinggi. Semakin besar nilai koefisien Gini yang diperoleh suatu daerah maka semakin besar kesenjangan pendapatan. Indeks gini valid digunakan sebagai alat ukur ketimpangan yang umum digunakan karena memenuhi empat kreteria, yaitu prinsip anonimitas (tidak memandang siapa yang dihitung apakah kaya atau miskin), prinsip independensi skala (tidak bergantung pada perekonomian suatu negara), prinsip independensi populasi (tidak bergantung jumlah penduduk), serta prinsip transfer (mengasumsikan semua pendapatan yang lain konstan). Secara matematis rumus koefisien Gini dapat disajikan sebagai berikut:

$$KG = 1 - \sum_{i=1}^n (X_{i+1} - X_i) (Y_i + X_{i+1})$$

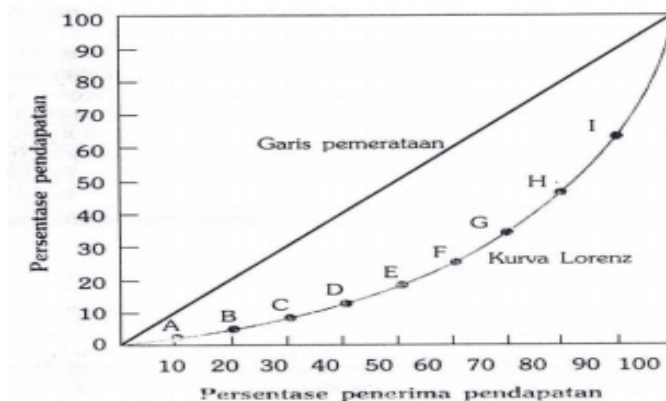
Dimana:

KG = Angka Koefisien Gini

X_i = Proporsi jumlah rumah tangga secara kumulatif kelas i

Y_i = Proporsi pendapatan rumah tangga kumulatif kelas i

Gambar 1.2. Kurva Lorenz



Pada gambar 1.2 jumlah penerimaan pendapatan ditempatkan pada sumbu horizontal, tidak dalam angka absolut tetapi dalam *persentase*

kumulatif. Pada titik 20 kita memiliki 20% kelompok penduduk paling bawah (termiskin), pada titik 60 kita memiliki 60% kelompok penduduk bagian bawah, dan pada ujung sumbu, 100% atau semua penduduk telah diperhitungkan. Pada sumbu vertical terlihat bagian pendapatan total yang diterima oleh setiap persentasi jumlah penduduk. Bagian pendapatan ini juga diakumulasikan sampai 100%, yang berarti bahwa kedua ukuran sumbu itu sama. Gambar tersebut berbentuk bujur sangkar dengan garis diagonal yang ditarik dari sudut bawah bagian kiri (awal garis) ke sudut atas kanan bujur sangkar. Di setiap titik pada garis diagonal itu, persentasi jumlah pendapatan yang diterima sama persis dengan persentase jumlah penerima pendapatan. Pada titik bagian Tengah garis diagonal mewakili 50% bagian pendapatan yang didistribusikan kepada 50% penduduk. Pada titik tiga perempat garis diagonal, 75% pendapatan didistribusikan kepada 75% penduduk. Dengan kata lain, garis diagonal pada gambar 1.2 menunjukkan adanya pemerataan sempurna (*perfect equality*) dari distribusi ukuran pendapatan.

Kurva Lorenz menjabarkan hubungan kuantitatif dan aktual antara persentase pendapatan yang diterima dan pendapatan secara total. Semakin jauh kurva lorenz tersebut dari garis diagonal (kemerataan sempurna), maka semakin tinggi derajat ketidakmerataan yang ditunjukkan. Keadaan yang paling ekstrim dari ketidakmerataan sempurna adalah ditunjukkannya oleh berimpit kurva Lorenz tersebut dengan sumbu horizontal bagian bawah dan sumbu vertikal sebelah kanan.

Pembangunan

Menurut W. W. Rostow dalam (Wardana, 2016) pembangunan ekonomi atau transformasi suatu masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern merupakan proses yang berdimensi banyak. Analisis Rostow ini didasarkan pada keyakinan bahwa pertumbuhan ekonomi akan tercipta sebagai akibat dari timbulnya perubahan yang fundamental bukan saja dalam corak kegiatan ekonomi tetapi juga dalam kehidupan politik dan hubungan sosial dalam suatu masyarakat dan negara. Dalam bukunya "*The Stage of Economic*" (1960).

Pembangunan merupakan suatu proses multidimensi yang mencerminkan perubahan struktur masyarakat secara keseluruhan baik itu struktur nasional, sikap masyarakat dan kelembagaan nasional. Perubahan

tersebut bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi ketimpangan pendapatan dan memberantas kemiskinan sehingga diharapkan terwujudnya kondisi kehidupan yang lebih baik secara material maupun spiritual (Hasan, Hartoto, Abdelina, & Riyaldi, 2020).

Pembangunan ekonomi menjadi salah satu aspek kehidupan yang perlu dikembangkan secara terus menerus di seluruh dunia, karena pembangunan ekonomi berkaitan erat dengan kesejahteraan rakyat. Tujuan utama pembangunan ekonomi yaitu meningkatkan kemakmuran rakyat secara menyeluruh. Keberhasilan pembangunan ekonomi dijabarkan pada pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan berkelanjutan. Todaro dalam Nadya & Aimon (2020), proses multidimensi yang melibatkan perubahan yang besar dalam struktur sosial, kelembagaan nasional, pengurangan dalam ketimpangan, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan dalam kemiskinan, dan sikap masyarakat yang dicapai dalam pembangunan ekonomi.

Teori pertumbuhan ekonomi dengan pendekatan Neo-Klasik yang dikembangkan oleh Robert Solow, pembentukan modal dan pertumbuhan penduduk berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dalam hal pembentukan modal, peranan investasi baik domestik maupun asing melalui investasi asing langsung (FDI) memberi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi. FDI merupakan salah satu faktor yang penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (Nadya & Aimon, 2020).

Ada beberapa faktor yang dianggap sebagai penyebab dari bertambah meluasnya perhatian terhadap pembangunan di negara-negara berkembang dibanding pada sebelumnya antara lain:

1. Berkembangnya keinginan untuk mengejar ketinggalan mereka dalam bidang ekonomi. Beberapa negara seperti Indonesia, Myanmar, Pakistan, Negaranegara Afrika, dan sebagainya bukan saja merupakan negara-negara yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak, tetapi juga merupakan negara yang di mana masalah jumlah penduduk sangat serius sekali keadaannya. Oleh karena itu, mengadakan pembangunan ekonomi di negara-negara tersebut merupakan suatu keperluan yang sangat mendesak, yaitu untuk mengatasi masalah pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan.
2. Perhatian terhadap masalah pembangunan negaranegara berkembang juga berasal dari negara-negara yang sudah maju, karena ada beberapa pertimbangan yaitu perasaan perikemanusiaan

yaitu keinginan untuk membantu negara-negara berkembang agar dapat mempercepat pembangunan ekonomi mereka dan mengejar ketertinggalan mereka dari negara-negara maju dan untuk mendapat dukungan politik, seperti perhatian yang sering diberikan oleh Amerika Serikat terhadap negara-negara berkembang.

Pembangunan ekonomi juga memberikan suatu kebebasan untuk memilih kesenangan yang lebih. Di dalam perekonomian yang masih primitif orang dipaksa bekerja keras hanya untuk mempertahankan hidupnya sekedar untuk tidak mati. Dengan pembangunan ekonomi akan tersedia lebih banyak barang-barang pemuas kebutuhan dan juga lebih banyak kesempatan untuk hidup bersenang-senang dan istirahat yang lama. Pembangunan ekonomi juga memungkinkan orang untuk memikirkan lebih banyak sifat-sifat perikemanusiaan, karena makin banyaknya sarana yang tersedia. Selanjutnya, dengan pembangunan ekonomi diharapkan akan mengurangi jurang perbedaan antara negara-negara yang sedang berkembang dan negara-negara yang sudah maju.

Akhirnya, suatu perekonomian baru dapat dinyatakan berkembang jika pendapatan perkapita menunjukkan kecenderungan yang menaik. Namun demikian tidaklah berarti bahwa pendapatan perkapita akan mengalami kenaikan terus menerus. Adanya resesi ekonomi, kekacauan politik, dan kemunduran ekspor, misalnya dapat mengakibatkan suatu perekonomian mengalami kemunduran tingkat kegiatan ekonominya. Jika keadaan demikian hanya bersifat temporer, dan kegiatan ekonomi secara rata-rata meningkat dari tahun ketahun, maka masyarakat tersebut dapatlah dikatakan mengalami pembangunan ekonomi.

Kebijakan Kemiskinan

Konsep kebijakan yang dilakukan pemerintah sebagai pengentasan kemiskinan dibedakan berdasarkan tradisi dan pendekatan perencanaan dan melandasinya. Tradisi perencanaan ada 4 macam (Yulianto, 2023) :

- 1) Perencanaan sebagai reformasi social (*social reform*), bahwa negara menyusun dan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan untuk diikuti dan di laksanakan oleh masyarakat
- 2) Perencanaan sebagai analisis kebijakan (*policy analysis*), bahwapara penentu kebijakan (pemerintah dan pihak terkait lainnya) berdasarkan analisis data yang ilmiah menyusudan merencanakan berbagai arahan dan pedoman pembangunan yang dapat diterima

dan dilaksanakan oleh masyarakat

- 3) Perencanaan sebagai pembelajaran social (*social learning*), bahwa pengetahuan perencanaan diperoleh lewat pengalaman dan disempurnakan lewat praktik (*learning by doing*), perencanaan serta pelaksanaan pembangunan dijalankan bersama-sama dengan masyarakat dengan bimbingan dari ahli
- 4) Perencanaan pembangunan harus dilaksanakan oleh masyarakat digerakkan dengan berbagai konsep/ideologi yang sudah tertanam di dalam jiwa dan kebudayaan mereka

Strategi pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah dapat dibagi menjadi dua bagian utama. Yang pertama adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang terkena dampak kemiskinan untuk sementara waktu, dan yang kedua adalah melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang terkena dampak kemiskinan kronis dengan memperkuat dan mencegah kemiskinan baru. Strategi ini dituangkan dalam tiga program yang secara langsung menyasar masyarakat miskin:

- 1) Penyediaan kebutuhan pokok
- 2) Pengembangan system jaminan social
- 3) Pengembangan budaya usaha

Berbagai upaya dalam mengatakan kemiskinan telah banyak dilakukan oleh pemerintah yang mengaplikasikannya dalam bentuk kebijakan dan program-program baik secara langsung atau tidak langsung. Kebijakan pemerintah secara langsung, berupa program yang langsung dilakukan dan diberikan kepada penduduk miskin seperti; bantuan langsung tunai (BLT), beras untuk masyarakat miskin (raskin), sedangkan kebijakan tidak langsung, berupa program Jamkesmas, program IDT, BOS (Murdiyana & Mulyana, 2017).

Kebijakan Ketimpangan

Pemerintah Indonesia memfokuskan pada empat program yaitu; Qick Wins dalam Kebijakan Pemerataan Ekonomi (KPE) untuk mengurangi ketimpangan yang ada di masyarakat yang memiliki dampak paling besar. Kebijakan ini memberatkan pada Reforma Agraria termasuk pada legalisasi lahan, transmigrasi, pendidikan dan pelatihan voka, perumahan untuk masyarakat miskin di perkotaan serta ritel modern dan pasar tradisional. KPE memiliki tiga pilar utama, yaitu, lahan, kesempatan dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Hal ini digunakan agar kebijakan

yang dilakukan pemerintah dapat diharmonisasikan menjadi satu desain kebijakan yang efektif dalam mengurangi ketimpangan yang berbasis pemerataan ekonomi (Kominfo, 2023).

Kebijakan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas: (BAPPENAS, 2019)

- 1) Peningkatan pendidikan yang berkualitas melalui sertifikasi guru
- 2) Peningkatan angka partisipasi kasar (APK) pendidikan di daerah 3T melalui penyediaan fasilitas dasar dan akreditasi lembaga pendidikan
- 3) Pelayanan berbasis inklusi social melalui penyediaan literasi khusus dan penyuluhan.

Kebijakan Pembangunan

Pembangunan berkelanjutan memerlukan peran penting SDM dalam menopang pertumbuhan pembangunan SDM menjadi penting bagi pemerintah untuk mendorong kebijakan bagi peningkatan kualitas produktivitas SDM di Indonesia. Perlunya beberapa persiapan salah satunya meningkatkan pengarusutamaan program penduduk terpadu, luasan jangkauan, dan pemerataan pelayanan dasar dan mengembangkan sosialisasi model pembangunan keluarga serta paling penting adalah peningkatan kualitas dalam system pengembangan SDM melalui mikro dan makro (Ginting *et al.*, 2019).

Kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam peningkatan akses perumahan dan permukiman layak yaitu: (BAPPENAS, 2019)

- 1) Peningkatan kualitas hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)
- 2) Peningkatan akses air minum dan sanitasi bagi rumah tangga
- 3) Pemantauan kualitas udara ambien dan pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya (B3)

Kebijakan pembangunan ekonomi melibatkan upaya pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Ini melibatkan perumusan kebijakan, perencanaan strategis, dan implementasi program-program yang dirancang untuk memperkuat sektor ekonomi, mendorong investasi, meningkatkan produktivitas, serta menciptakan kesempatan kerja yang lebih baik (Anugrah Dwi, 2023). Adapun garis besar kebijakan yang saat ini menjadi prioritas Nasional yang dirancang oleh pemerintah dalam waktu dekat di antaranya :

- 1) Meningkatkan konektivitas dan teknologi informasi dan komunikasi
- 2) Mempercepat pembangunan Papua dan Papua Barat
- 3) Memercepat pembangunan daerah tertinggal dan Desa
- 4) Menanggulangi dampak bencana
- 5) Meningkatkan sistem logistik

Kebijakan pembangunan menjadi kunci penting dalam memajukan perekonomian suatu negara. Dengan menggunakan kebijakan yang tepat pemerintah dapat mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, mengurangi tingkat kemiskinan, pemerataan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pentingnya kebijakan pembangunan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan tidak bisa diabaikan.

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Kemiskinan Dalam Perspektif Islam

Menurut bahasa, miskin berasal dari bahasa Arab yang sebenarnya menyatakan kefakiran yang sangat. Menurut Yahya bin Umar, aktivitas ekonomi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ketakwaan seorang Muslim kepada Allah swt., hal ini berarti bahwa ketakwaan merupakan azas dalam perekonomian Islam, sekaligus faktor utama yang membedakan ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional (Karim *et al.*, 2002). Islam memandang bahwa masalah kemiskinan adalah masalah tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan primer secara menyeluruh. Syariat Islam telah menentukan kebutuhan primer itu (yang menyangkut eksistensi manusia) berupa tiga hal, yaitu sandang, pangan, dan papan. Dari perspektif Islam kemiskinan timbul karena berbagai sebab structural.

Pertama, kemiskinan timbul karena kejahatan manusia terhadap alam (QS Ar Ruum [30]:41)

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Artinya: Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. (Melalui hal itu) Allah membuat mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka agar mereka kembali (ke jalan yang benar).

Kedua, kemiskinan timbul karena ketidakpedulian dan kebakhilan kelompok kaya (QS Ali Imran [3]: 180)

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا أَنٰتَهُمُ ٱللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ ٱلَّذِينَ هُمْ يَشْرُوْنَ بِهٖ سَيُطَوَّقُوْنَ مَا بَٰخِلُوْا بِهٖ يَوْمَ ٱلْقِيٰمَةِ ۗ وَلِلّٰهِ مِيرَٰثُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ۗ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ

Artinya: Jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan karunia yang Allah anugerahkan kepadanya mengira bahwa (kekikiran) itu baik bagi mereka. Sebaliknya, (kekikiran) itu buruk bagi mereka. Pada hari Kiamat, mereka akan dikalungi dengan sesuatu yang dengannya mereka berbuat kikir. Milik Allahlah warisan (yang ada di) langit dan di bumi. Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ketiga, kemiskinan timbul karena sebagian manusia bersikap dzalim, eksploitatif, dan menindas kepada sebagian manusia yang lain, seperti memakan harta orang lain dengan jalan yang batil (QS At Taubah [9]:34)

يٰۤاَيُّهَا ٱلَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ ٱلْاَخْبَارِ وَٱلرُّهْبَانِ لِيَٰكُلُوْٓا اَمْوَٰلَ ٱلنَّاسِ ٱلْبَاطِلِ وَيَصُدُوْنَ عَنْ سَبِيْلِ ٱللّٰهِ وَٱلَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ ٱلذَّهَبَ وَٱلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ ٱللّٰهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ اَلِيْمٍ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya banyak dari para rabi dan rahib benar-benar memakan harta manusia dengan batil serta memalingkan (manusia) dari jalan Allah. Orang-orang yang menyimpan emas dan perak, tetapi tidak menginfakkannya di jalan Allah, berikanlah kabar ‘gembira’ kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Keempat, kemiskinan timbul karena konsentrasi kekuatan politik, birokrasi, dan ekonomi di satu tangan. Hal ini tergambar dalam kisah Fir’aun, Haman, dan Qarun yang bersekutu dalam menindas rakyat Mesir di masa hidup Nabi Musa (QS Al Qashash [28]:1-88)

Secara keseluruhan, Islam menyediakan kerangka kerja yang komprehensif untuk menangani kemiskinan, yang mencakup aspek spiritual, moral, dan praktis. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, diharapkan masyarakat Muslim dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan sejahtera bagi semua.

Pembangunan Dalam Perspektif Islam

Pertumbuhan ekonomi dalam perspektif menurut Islam bahwasanya Islam mempromosikan kemakmuran ekonomi, yang bermanfaat (Siregar &

Majid, 2023). Secara keseluruhan, masuk akal untuk percaya bahwa lebih banyak peluang ekonomi akan menghasilkan peningkatan keadilan (Al Umar, 2022). (Ghazali, 1990) menjelaskan pembangunan insan dari perspektif Islam adalah setiap proses pembangunan harus dimulai dengan pembangunan moral, spiritual, fisik dan lingkungan manusia yang akan menjadi agen bagi lingkungan fisik dan sosial ekonominya. Manusia adalah agen perubahan yang aktif dan dialah yang akan bertanggung jawab atas kehidupannya di dunia dan akhirat, baik sukses maupun gagal.

Dari pembahasa tersebut banyak ibroh hingga proses pelaksanaan dalam pembangunan ekonomi Islam. Adapun landasan intelektual budaya Islam ketika menerapkan konsep pertumbuhan Islam (Siregar & Majid, 2023) yaitu:

1. Tauhid menunjukkan keesaan dan kedaulatan Allah.
2. Rububiyah ingin menekankan pentingnya makanan, nutrisi yang tepat, dan perjuangan manusia untuk kesempurnaan.
3. Khalifah dipandang mengambil peran manusia sebagai khalifah Allah di bumi, dan secara khusus bertugas mengabdikan pada Allah dan menyebarkan dampak lingkungan yang positif. Dalam Islam, orang diharapkan menjadi pelindung yang berkomitmen untuk menghilangkan kerusakan dan mempromosikan keuntungan sosial moral, politik, dan ekonomi.
4. Tazkiyah mengandung makna bahwa individu harus mampu menjalin hubungan dengan Tuhan, individu lain, alam, masyarakat, dan negara.
5. Konsep tanggung jawab mengacu pada bagaimana orang melihat peran mereka di akhirat, termasuk efeknya pada kehidupan mereka sekarang dan di masa depan.

Begitu penting pembangunan yang harus dilakukan terhadap suatu negara, dimana hal utama membangun sumber daya manusia (SDM) hingga proses yang harus dilakukan oleh pemerintah. Hal tersebut adalah ciri dimana dalam perspektif Islam manusia sebagai khalifah di muka bumi begitu urgen, namun hal demikian tidaklah mudah untuk dilaksanakan karena banyaknya faktor yang harus dilakukan oleh setiap warga negara tersebut. Maka dari itu, pembangunan ekonomi bisa berhasil dengan adanya kerja keras dari berbagai pihak baik itu pemerintah maupun masyarakat. Sebagaimana tentang anjuran untuk bekerja dalam kegiatan perekonomian disebutkan dalam Al-Qur'an (QS. At-Taubah: 105):

وَقُلْ اَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ اِلٰى عَلِيمٍ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنْشِئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: "Katakanlah (Nabi Muhammad), "Bekerjalah! Maka, Allah, rasul-Nya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada (Zat) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu, Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan."

Dari ayat tersebut sudah jelas bahwasannya dalam pembangunan tuntutan yang mendasar yakni bekerja. Pembangunan dalam perspektif Islam menekankan keseimbangan antara kemajuan materi dan spiritual, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi berjalan seiring dengan peningkatan moral dan etika, serta memberikan manfaat yang merata bagi seluruh anggota masyarakat.

Ketimpangan Dalam Perspektif Islam

Ketimpangan pendapatan dan kemiskinan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Ketimpangan pendapatan merupakan masalah utama yang dihadapi oleh negara-negara berkembang termasuk Indonesia Dalam Islam, ketimpangan bukan hanya masalah ekonomi, tetapi

juga masalah moral dan sosial yang harus ditangani sesuai dengan nilai-nilai agama. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai ketimpangan dalam perspektif Islam:

Konsep Keadilan (Al-'Adl)

Islam menekankan pentingnya keadilan (al-'adl) dalam semua aspek kehidupan. Keadilan bukan hanya berarti persamaan hak, tetapi juga memastikan bahwa setiap individu mendapatkan apa yang menjadi haknya. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an:

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat kebajikan, dan memberikan bantuan kepada kerabat. Dia (juga) melarang perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu selalu ingat." (An-Nahl[16]:90)

Dalam pandangan Islam, ketimpangan harus diatasi dengan cara-cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang menekankan pada keadilan, kesejahteraan sosial, dan perlindungan terhadap hak-hak individu. Dengan menerapkan ajaran-ajaran ini, diharapkan ketimpangan dalam masyarakat dapat diminimalisir, sehingga tercipta harmoni dan kesejahteraan yang lebih merata.

KESIMPULAN

1. Dokumen ini membahas tentang pembangunan ekonomi di Indonesia, terutama mengenai perubahan ekonomi yang terjadi selama lebih dari satu dekade terakhir, serta dampak dari krisis ekonomi yang berulang kali melanda Indonesia.
2. Meskipun Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi yang positif secara konsisten, bahkan di tengah pemulihan ekonomi global, masih terdapat permasalahan yang belum terselesaikan, yaitu ketimpangan pembangunan ekonomi dan kemiskinan.
3. Upaya pemerintah untuk mengatasi krisis ekonomi melalui kebijakan-kebijakan ekonomi belum sepenuhnya berhasil dalam menghapus atau mengurangi kemiskinan dan ketimpangan pendapatan masyarakat.
4. Di tengah prestasi makroekonomi yang gemilang, masih terdapat kenyataan yang memprihatinkan, yaitu tingginya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, yang bahkan semakin meningkat akibat pandemi COVID-19.
5. Secara keseluruhan, dokumen ini menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang tidak hanya berfokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada pengurangan kemiskinan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Umar, A. U. A. (2022). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Menurut Syed Nawab Haider Naqvi. *Ulil Albab: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(3), 226–231.
- Ghazali, A. (1990). *Development: an Islamic perspective*. (No Title). Huda, N. (2015). *Zakat Perspektif Mikro-Makro: Pendekatan Riset*. Prenada Media.

- Karim, A. A., Masruroh, I., & Indonesia, T. I. (2002). *Sejarah pemikiran ekonomi Islam*.
- Mohamed, Y. (1998). *Human nature in Islam*. AS Noordeen.
- Mohd Nor, Z. (1990). *Pembangunan Insan Menurut Perspektif Islam*. Kuala Lumpur: Universiti Malaya.
- Nawawi, H. (1997). *Administrasi Pendidikan*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung.
- Salamon, H. (1999). *Pembangunan Dari Perspektif Islam. Kertas Kerja Dalam Bengkel Pembangunan Menurut Perspektif Islam. Dewan Utama, Fakulti Alam Bina, Universiti Teknologi Malaysia*.
- Salleh, M. S. (1992). *An Islamic approach to rural development-The Arqam way*.
- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 71–82. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.722>
- Yunus, R., Dekrita, Y. A., Yamin, M., & Citta, A. B. (2019). Poverty Reduction Model through Empowerment People's Economy According to Islamic Perspectives (Study on Islamic Village in Sikka-Flores District). *3rd International Conference on Accounting, Management and Economics 2018 (ICAME 2018)*, 127–136.
- Anugrah Dwi. (2023). *Kebijakan Pembangunan Ekonomi*. UMSU. [https:// feb.umsu.ac.id/kebijakan-pembangunan-ekonomi/](https://feb.umsu.ac.id/kebijakan-pembangunan-ekonomi/)
- BAPPENAS. (2019). *Kebijakan Pembangunan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019*. Kementrian PPN.
- Ginting, A. M., Rivani, E., Rasbin, & Budiyaniti, E. (2019). *Pengembangan kebijakan pembangunan berkelanjutan di Indonesia*.
- Kominfo. (2023). *Kebijakan Pemerataan Ekonomi Untuk Atasi Ketimpangan*. Kementrian Komunikasi DanInformatika Republik Indonesia. https://www.kominfo.go.id/content/detail/9566/presiden-kebijakan-pemerataan-ekonomi-untuk-atasi-ketimpangan/0/artikel_gpr
- Murdiyana, M., & Mulyana, M. (2017). Analisis Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia. *Jurnal Politik Pemerintahan Dharma Praja*, 10(1), 73–96. <https://doi.org/10.33701/jppdp.v10i1.384>
- Yulianto, T. (2023). *Memahami Kembali Strategi Pengentasan Kemiskinan Di Indonesia*. Kemenkeu RI Ditjen Perbendaharaan. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sulteng/id/data-publikasi/>

- berita-terbaru/2830-memahami-kembali-strategi-pengentasan-kemiskinan-di-indonesia-sebagai-sumber-penerimaan-negara.html
- Badan Pusat Statistik. (n.d.). Badan Pusat Statistik. <https://www.bps.go.id/indicator>
- Bhagaskara, A. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Kabupaten dan Kota Se-Jawa Timur pada Tahun 2011-2019, 2(4), 827–843.
- Caesarisma, E. (2023). Analisis Ketimpangan Pendapatan Kabupaten / Kota di Jawa Barat 2017-2021, 2, 81–98.
- Churchill, S. A., & Smyth, R. (2020). Ethnic Diversity , Energy Poverty and the Mediating Role of Trust : Evidence from Household Panel Data for Australia, (January). <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2020.104663>
- Fadila, R. (2020). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Sumatera Barat periode tahun, 3(1).
- Hasan, M., Hartoto, Abdelina, & Riyaldi, M. H. (2020). *Ekonomi Pembangunan : Sebuah Tinjauan Teori dan Praktek*.
- Herrero,S.T.(2018).Energy poverty indicators :A critical review of methods, (August 2017). <https://doi.org/10.1177/1420326X17718054>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara, 19(3), 86–103.
- Kadji, Y. (2021). Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya.
- Mdingi, K., & Ho, S. (2021). Literature review on income inequality and economic growth. *MethodsX*, 8(April), 101402. <https://doi.org/10.1016/j.mex.2021.101402>
- Nadya, I., & Aimon, H. (2020). Pertumbuhan Ekonomi Negara ASEAN : Peran Teknologi Informasi, Pendidikan dan Investasi Asing, 9(November), 103–113.
- Okuputra, M. A. (2022). Volume . 18 Issue 1 (2022) Pages 159-166 INOVASI : Jurnal Ekonomi , Keuangan dan Manajemen ISSN: 0216-7786 (Print) 2528-1097 (Online) Pengaruh inovasi daerah terhadap kemiskinan, 18(1), 159–166. <https://doi.org/10.29264/jinv.v18i1.10379>

- Phuc, C., & Ali, M. (2021). An inquiry into the nexus between energy poverty and income inequality in the light of global evidence. *Energy Economics*, 99, 105289. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2021.105289>
- Shinetiara, T., & Adry, M. R. (2023). Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, 12, 25–32.
- Wardana, D. P. (2016). Pengaruh Pemabangunan Ekonomi Terhadap Pembangunan Manusia di Kalimantan Timur, 12, 179–191.
- Wibowo, K. P., & Pangestuty, F. W. (2023). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan di Indonesia, 2(3), 539–549.
- Yusnuri, R. A., & Abubakar, J. (2022). Analysis Of Human Development Index , Unemployment, 346–358.

PERTUMBUHAN PENDUDUK DAN PEMBANGUNAN EKONOMI

(Siti Alfajriyani, Abdullah, Sofia Dina Salsabila, Nuvilu Usman Alatas)

PENDAHULUAN

Penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan, dimana penduduk dapat menjadi modal pembangunan dan juga target dari pembangunan (Rahayu, 2010). Jumlah penduduk dalam perekonomian suatu negara merupakan permasalahan mendasar. Pertumbuhan penduduk yang cepat dan tidak terkendali dapat mengakibatkan tidak tercapainya tujuan pembangunan ekonomi yaitu kesejahteraan rakyat serta menekan angka kemiskinan (Berliani, 2021). Dalam jangka panjang, pertumbuhan penduduk mengarah pada inisiatif produk, yang pada gilirannya meningkatkan produktivitas perekonomian (Adeosun & Popogbe, 2021).

Pertumbuhan penduduk dapat mempunyai pengaruh positif dan negatif terhadap kemajuan perekonomian yang hasilnya akan bergantung pada masukan relatif dari penduduk dan sumber daya manusia terhadap perekonomian (Hutasoit, 2017). Menurut Mulyaningsih (2019), kualitas SDA bisa dilihat dengan ilmu keterampilan, kemampuan kreatif, pelatihan, dan pendidikan yang sudah dimiliki. Jika suatu negara mempunyai SDA yang baik, terampil dan terlatih maka output yang akan dihasilkan pun memiliki kualitas yang tinggi. Adanya kualitas SDA yang baik ini mempengaruhi pembangunan ekonomi dalam mengubah kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam kehidupan masyarakat, seperti: hilangnya rasa komunalitas sehingga masyarakat menjadi bersifat lebih individualistik, hubungan antara anggota masyarakat menjadi lebih formal dan lain sebagainya (Arsyad, 2010).

Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi. Pembahasan ini akan dimulai

dengan teori pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi, dampak pertumbuhan penduduk, kebijakan yang dilakukan untuk menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk, pembangunan ekonomi di Indonesia dan peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, pada pembahasan ini juga, kita akan membahas pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam.

TEORI DAN KEBIJAKAN

Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan bertambahnya jumlah penduduk secara kuantitas, sedangkan perkembangan penduduk merupakan bertambahnya kemampuan atau kualitas penduduk (Hutasoit, 2017). Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu kelahiran (*fertilitas*), kematian (*mortalitas*), migrasi masuk dan migrasi keluar (Majid, 2021). Pertumbuhan penduduk meningkat seiring dengan meningkatnya pemenuhan kebutuhan penduduk yang berasal dari sumber daya alam. Sehingga pertumbuhan dan perkembangan penduduk menjadi acuan penting dalam memperkirakan peningkatan kebutuhan akan SDA dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan (Hutasoit, 2017). Sejarah pertumbuhan dan perkembangan penduduk menjadi penting dan dapat membantu dalam menganalisis kecenderungan pertumbuhan dan perkembangan penduduk di masa yang akan datang dengan membuat perencanaan pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk (Hutasoit, 2017).

a. Teori Pertumbuhan Penduduk

1) Teori Penduduk Modern

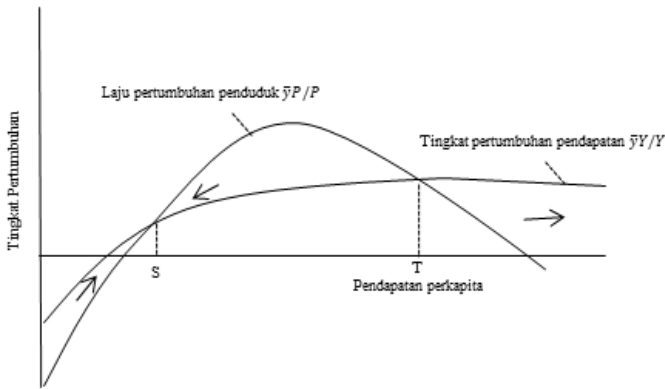
Antara abad 15 sampai 19, dengan adanya perubahan sikap manusia yang pesat dan adanya perubahan yang timbul akibat bangkitnya negara baru, penemuan bidang ilmiah, ekspansi wilayah baru, pertumbuhan perdagangan, perubahan sistem feodal dan perkembangan aliran kapitalisme yang menjadi titik tolak revolusi industri merupakan elemen penting dalam tahap munculnya “Merkantilisme” (Suwito, 2020). Penulis merkantilisme menekankan pentingnya pertumbuhan penduduk yang besar dan kebijaksanaan perkawinan, pembentukan keluarga besar, perbaikan dan mencegah

emigrasi keluar negeri. Batero berpendapat bahwa kekuatan suatu negara terletak pada jumlah penduduk yang banyak yang didominasi oleh industri dan pertanian. Hal ini di dukung oleh para ahli, seperti: Coke, Davenam dan Boussuet yang mengemukakan bahwa kekayaan itu terdapat didalam jumlah penduduk yang banyak dan merupakan sumber yang tak ternilai (Suwito, 2020). Namun, Aliran fisiokrat tidak setuju memperbanyak penduduk seperti yang dianut oleh golongan Merkantilisme (Suwito, 2020). Aliran ini merupakan golongan yang mengadakan reaksi terhadap ide Merkantilisme. Cantilon menambahkan bahwa penambahan penduduk harus sesuai dengan kesempatan penambahan produksi makanan. Sehingga ketika ekonomi merosot, mereka mampu untuk menunda perkawinan dan mempertahankan tingkat hidup (Suwito, 2020).

2) Teori Malthusian

Teori Malthus tentang sejarah kependudukan dimulai dengan progresif negara yang entah bagaimana telah meningkatkan produksi perkapita di atas kebutuhan (Maitra, 1981). Menurut Malthus pertumbuhan penduduk yang tinggi disebabkan karena hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan yang tidak dapat dihentikan, sedangkan laju pertumbuhan bahan makanan tidak dapat mengikuti laju pertumbuhan penduduk. Pendapatan perkapita akan cenderung menurun sedemikian rendahnya sehingga hanya memungkinkan orang-orang untuk menjalani hidupnya setingkat atau sedikit di atas tingkat sekadar bisa bertahan hidup (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, Malthus berpendapat bahwa satu-satunya cara untuk menghindari timbulnya kondisi taraf hidup yang sangat rendah ialah dengan mendorong setiap orang untuk melakukan pengendalian moral dan membatasi jumlah anak (Todaro & Smith, 2015). Kelompok Neo-Malthusian yang menyokong aliran Malthus tetapi lebih radikal, mengajurkan penggunaan alat kontrasepsi untuk mengurangi jumlah penduduk (Alma, 2019). Adapun model dasar dari perangkap populasi Malthus ialah sebagai berikut:

Gambar 1
Model Perangkap Populasi Malthus



Sumber: Todaro & Smith, (2015)

Perangkap populasi Malthus atau perangkap populasi ekuilibrium tingkat rendah merupakan tingkat ambang batas populasi yang diantisipasi oleh Thomas Malthus. Perangkap populasi Malthus menggambarkan terkait pertambahan penduduk yang akan berhenti dengan sendirinya ketika sumber daya penopang hidup meningkat namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia yang jumlahnya terus meningkat (Todaro & Smith, 2015).

3) Aliran Marxist

Aliran ini dipelopori oleh Karl Marx dan Friedrich yang tidak sependapat dengan teori Malthus. Menurut Marx, tekanan dalam suatu negara bukanlah bahan pangan melainkan kesempatan kerja. Ia menentang usaha-usaha *moral restraint* yang disarankan oleh Malthus dan berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia maka semakin tinggi produksi yang akan dihasilkan, sehingga tidak perlu di adakan pembatasan pertumbuhan penduduk (Alma, 2019). Marx juga menyatakan bahwa hukum kependudukan di negara sosialis merupakan antithesa hukum kependudukan di negara kapitalis. Artinya apabila di negara kapitalis tingkat kelahiran dan kematian rendah, maka di negara sosialis mengalami kebalikannya (Alma, 2019).

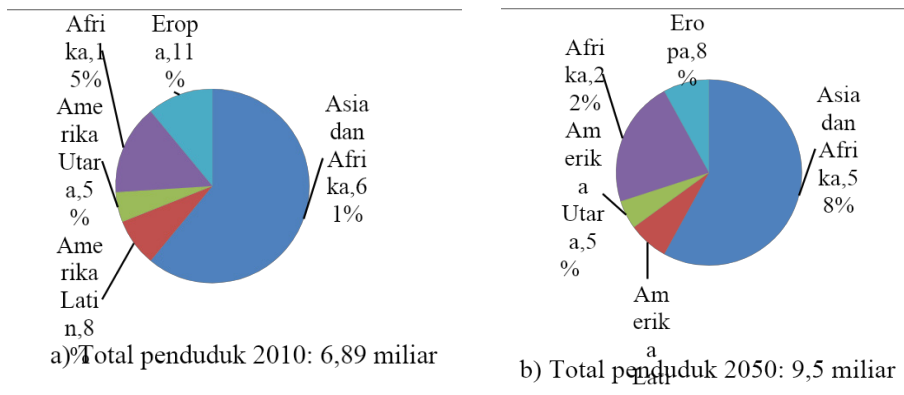
b. Struktur Penduduk

Menurut Todaro & Smith (2015) terdapat tiga unsur yang membentuk struktur penduduk dunia, diantaranya:

1) Wilayah Geografi

Wilayah geografis dalam struktur penduduk mengacu pada pengelompokan penduduk berdasarkan letak tempat tinggalnya (Lubis, 2021). Lebih dari tiga perempat penduduk dunia hidup di negara-negara berkembang. Kurang dari seperempat jumlah itu, hidup di negara yang perekonomiannya maju (Todaro & Smith, 2015). Hal ini dijelaskan sebagaimana dalam gambar berikut:

Gambar 2
Distribusi Penduduk Wilayah



Sumber: *World Population Date*, 2010 dalam Todaro & Smith, (2014)

Gambar di atas menunjukkan distribusi regional penduduk dunia pada tahun 2010 dengan total penduduk sebanyak 6,98 miliar dan angka proyeksinya pada tahun 2050 dengan total penduduk sebanyak 9,5 miliar.

2) Tingkat Fertilitas dan Mortalitas

Fertilitas merupakan hasil reproduksi yang nyata dari seorang wanita dimana fertilitas mengacu pada jumlah bayi yang lahir hidup (Alma, 2019). Sedangkan mortalitas atau kematian merupakan hilangnya

tanda-tanda kehidupan manusia secara permanen (Bidarti, 2020). Secara kumulatif, tingkat pertumbuhan penduduk (*rate of population increase*) diukur sebagai presentase pertambahan (pengurangan) relatif neto dari jumlah penduduk pertahun karena pertambahan alamiah (*natural increase*) dan migrasi internasional neto (*net international neto*) (Todaro & Smith, 2015).

Migrasi merupakan perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan tujuan untuk menetap (Bidarti, 2020). Sedangkan migrasi internasional neto merupakan selisih antara orang-orang yang bermigrasi kedalam suatu negara dan orang-orang yang bermigrasi dari negara tersebut (Todaro & Smith, 2015). Dimana pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang hampir seluruhnya bergantung pada selisih antara tingkat kelahiran kasar (*icrude birth rate*) dan tingkat kematian (*death rate*) (Todaro & Smith, 2015).

3) Struktur Usia dan Beban Ketergantungan

Jumlah penduduk yang dominan berusia muda merupakan tantangan berat bagi pembangunan (Siahaan, 2004). Semakin cepat laju pertumbuhan penduduk maka semakin besar jumlah anak-anak yang harus di tanggung. Sehingga semakin berat tanggungan orang-orang yang bekerja untuk menopang mereka (Todaro & Smith, 2015). Gejala ketergantungan ini berkaitan dengan konsep momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk (*hidden momentum of population growth*). Momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk merupakan jumlah penduduk yang terus meningkat, sekalipun tingkat kelahiran menurun. Hal ini dikarenakan keberadaan jumlah penduduk berusia muda memperbesar basis penduduk yang menjadi calon orang tua (ayah/ibu) (Todaro & Smith, 2015). Terdapat tiga faktor penting sebagai dampak dari struktur usia (Siahaan, 2004), diantaranya:

- a) Penduduk yang berusia muda memiliki berbagai kebutuhan yang relatif lebih besar untuk dipenuhi terutama dalam sandang, pangan, pendidikan dan kesejahteraan lainnya. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, dimana struktur penduduknya dominan golongan usia muda, ini merupakan suatu beban nasional.
- b) Golongan usia muda merupakan golongan penduduk yang belum produktif, terutama bagi penduduk yang berusia 15

tahun ke bawah.

- c) Golongan usia muda akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Padahal untuk jumlah ini belum tentu tersedia lapangan kerja, karena yang berusia di atas itu pun banyak yang belum mendapatkan kerja.

c. Dampak Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk dapat berdampak buruk dan dapat mempengaruhi negara dalam beberapa cara (Azam, *et al.*, 2020). Pertumbuhan penduduk yang cepat merupakan hambatan dalam mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi di suatu negara (Brida, *et al.*, 2023). Pertumbuhan penduduk tidak hanya memberikan dampak yang negatif terhadap perkembangan penduduk, namun juga dapat memberikan dampak yang positif terhadap perkembangan penduduk di suatu negara (Hutasoit, 2017). Kaum klasik mengemukakan bahwa pertumbuhan penduduk yang cepat pada negara maju memberikan dampak yang positif, sedangkan pertumbuhan penduduk yang cepat pada negara berkembang akan memberikan dampak yang negatif. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penduduk yang cepat di negara berkembang tidak diimbangi dengan kualitas dan produktivitas manusianya (Hutasoit, 2017).

Pertumbuhan penduduk yang berlebihan dinyatakan sebagai penyebab utama kemiskinan, rendahnya taraf hidup, kurang nutrisi, kesehatan buruk, kerusakan lingkungan hidup dan berbagai masalah sosial (Todaro & Smith, 2015). Model dasar yang digunakan oleh para ekonom untuk menunjukkan konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang cepat ialah:

Keterangan:

$$y - l = \alpha (k - l) + t$$

y = Tingkat pertumbuhan GNI

l = Tingkat pertumbuhan tenaga kerja (penduduk)

k = Tingkat pertumbuhan persediaan modal

α = Elastisitas output

t = Efek perubahan teknologi

Model ini merupakan penyederhanaan dari persamaan pertumbuhan neoklasik tipe Solow standar (Todaro & Smith, 2015). Karena parahnya kemiskinan absolut dan rendahnya taraf hidup dipandang sebagai penyebab utama besarnya ukuran keluarga dan keluarga besar menghambat pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dan sosial merupakan syarat yang diperlukan untuk memperlambat dan/atau menghentikan pertumbuhan penduduk pada tingkat fertilitas dan moralitas yang rendah (Todaro & Smith, 2015). Sehingga Todaro & Smith, (2014) dalam bukunya mengelompokkan tujuh konsekuensi negatif pertumbuhan penduduk, diantaranya:

1) Pertumbuhan ekonomi

Meskipun pertumbuhan penduduk yang cepat bukan penyebab kemandekan ekonomi, namun hal ini akan memperlambat pertumbuhan pendapatan perkapita di hampir semua negara berkembang, khususnya negara-negara yang memang sudah miskin yang perekonomiannya bergantung pada pertanian dan menghadapi tekanan persoalan lahan dan sumber daya alam.

2) Kemiskinan dan Ketimpangan

Konsekuensi negatif dari pertumbuhan penduduk yang cepat telah menimpa hampir seluruh orang-orang miskin. Mereka merupakan orang pertama yang merasakan kerugian karena pengurangan dana untuk melaksanakan program-program kesehatan dan pendidikan, dan memikul beban terberat akibat kerusakan lingkungan hidup. Lagi-lagi perempuan miskin menanggung resiko terparah dari penghematan anggaran belanja pemerintah, sehingga terjadilah lingkaran setan lainnya.

3) Pendidikan

Keluarga berukuran besar dengan pendapatan yang rendah akan membatasi ruang gerak orang tua untuk mendidik anak-anak mereka. Pada tingkat nasional, pertumbuhan yang bergerak cepat menyebabkan pengeluaran pemerintah untuk pendidikan semakin menipis. Hal ini menyebabkan rendahnya kualitas pendidikan dan mengganggu pertumbuhan ekonomi karena persediaan modal manusia berkurang akibat pertumbuhan penduduk yang cepat.

4) Kesehatan

Tingginya fertilitas merugikan kesehatan ibu dan anak. Fertilitas

yang tinggi memperbesar resiko kesehatan saat kehamilan. Jarak kehamilan yang dekat menyebabkan penurunan berat badan bayi saat lahir dan memperbesar tingkat moralitas anak.

5) Pangan

Memberi makan penduduk dunia semakin sukar dilakukan karena pertambahan penduduk yang cepat. Besarnya kebutuhan makanan penduduk di negara-negara berkembang disebabkan oleh peningkatan jumlah penduduk, sehingga perlu untuk dilakukan segera penerapan teknologi baru karena semua lahan terbaik telah diolah.

6) Lingkungan hidup

Cepatnya pertumbuhan penduduk ikut berkontribusi terhadap kerusakan lingkungan dalam bentuk perambahan hutan, penebangan hutan, menepisnya kayu bakar, erosi tanah, menyusutnya persediaan ikan dan hewan, kurang memadai dan tidak sehatnya air, pencemaran udara dan menumpuknya penduduk di daerah perkotaan.

7) Migrasi internasional

Migrasi internasional merupakan salah satu konsekuensi pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang. Berlebihnya jumlah pekerja dibandingkan peluang pekerjaan menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya migrasi. Tidak seperti keenam konsekuensi sebelumnya, sebagian dari biaya ekonomi dan sosial migrasi internasional dipikul oleh negara-negara maju.

d. Kebijakan Ekonomi dan Sosial Untuk Menurunkan Tingkat Pertumbuhan Penduduk

Menurut Todaro & Smith, (2014), terdapat empat kebijakan khusus yang dapat diterapkan negara berkembang untuk menurunkan pertumbuhan penduduk, diantaranya:

- 1) Pemerintah negara berkembang dapat mencoba membujuk penduduknya untuk memiliki keluarga yang lebih kecil melalui media massa dan proses pendidikan, baik formal maupun nonformal.
- 2) Pemerintah dapat meningkatkan program-program keluarga berencana dengan menyediakan layanan kesehatan dan kontrasepsi untuk mendorong upaya mengendalikan kelahiran.

- 3) Pemerintah secara sengaja dapat memanipulasi *insentif* (penguatan) dan *disinsentif* (pelemahan) ekonomi dalam hal memiliki anak. Hal ini dapat dilakukan dengan cara meniadakan anak atau mengurangi cuti dan tunjangan kehamilan, mengurangi atau meniadakan insentif keuangan atau mengenakan denda karena memiliki anak lebih dari jumlah yang ditentukan dan lain sebagainya.
- 4) Pemerintah dapat memaksa warga negaranya untuk memiliki keluarga kecil melalui peraturan perundang-undangan dan denda.

Pelaksanaan kebijakan dalam mengendalikan pertumbuhan penduduk ini tidak akan berhasil jika tidak ada upaya meningkatkan status sosial dan ekonomi perempuan yang dapat menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk menunda perkawinan dan mengurangi kelahiran dalam perkawinan (Todaro & Smith, 2015).

Pembangunan Ekonomi

Ekonomi pembangunan dan Pembangunan ekonomi merupakan sebuah konsep yang berbeda. Ekonomi pembangunan adalah suatu bidang dalam ilmu ekonomi yang berfokus pada pemeriksaan tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang dan merancang strategi untuk memfasilitasi kemajuan ekonomi untuk mempercepat pertumbuhan perekonomian. Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi dan meningkatkan standar hidup individu. Upaya ini mengarah pada peningkatan pendapatan per kapita dalam jangka panjang (Mulyaningsih, 2019).

Pembangunan ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertumbuhan penduduk dan disertai dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara. Pembangunan ekonomi tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Pembangunan ekonomi mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga pertumbuhan ekonomi dapat memperlancar proses pembangunan ekonomi (Mulyaningsih, 2019). Pembangunan ekonomi didefinisikan sebagai kemampuan ekonomi nasional dalam menaikkan dan mempertahankan laju pertumbuhan GNP hingga mencapai angka 5 sampai 7 persen atau lebih per tahun (Arsyad, 2010). Seiring dengan perkembangan zaman, pembangunan ekonomi mengalami perubahan, dimana pembangunan

yang berorientasi pada pertumbuhan GNP saja tidak dapat mampu memecahkan banyak permasalahan pembangunan secara mendasar di Negara Sedang Berkembang (NSB) (Arsyad, 2010). Oleh karena itu, Smith (2020) menyatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara ditunjukkan oleh tiga nilai pokok, yaitu: berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*sustenance*), meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia dan meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*) salah satu dari hak asasi manusia dan tujuan pembangunan ekonomi.

a. Teori Pembangunan Ekonomi

1) Teori Klasik

Adam Smith dalam teori pembangunan ekonomi membagi masa atau tahapan dalam lima tahap, yaitu: tahap berburu, tahap berternak, tahap bercocok tanam, tahap berdagang dan tahap industrialisasi. Tahap pembangunan Adam Smith lebih menekankan pada faktor produksi modal dan pemilih modal (kapitalis), karena pemilik modal mampu mengakumulasi modal yang diperoleh dari laba atau keuntungan usaha untuk kemudian ditanamkan kembali sebagai perluasan atau tambahan produksi dan kapasitas produksi perusahaan (Mulyaningsih, 2019).

Sama halnya dengan teori Adam Smith, Teori David Ricardo berfokus kepada keunggulan komparatif dimana jumlah faktor produksi (SDA dan tanah) tidak bisa bertambah, sehingga ini menjadi faktor pembatas dalam proses pertumbuhan suatu masyarakat. Terbatasnya jumlah tanah (faktor produksi) membuat pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) menurunkan produk marjinal atau yang dikenal dengan istilah *the law of diminishing returns*. Sehingga peran akumulasi modal dan kemajuan teknologi diperlukan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja agar memperlambat bekerjanya *the law of diminishing returns* dan pada akhirnya akan memperlambat penurunan tingkat hidup ke arah tingkat hidup minimal (Mulyaningsih, 2019).

2) Teori Neo-Klasik

a) Teori Keynesian

Teori Keynesia dikembangkan oleh Evsey Domar dan R. F Harrod. Teori ini menganalisa syarat-syarat yang diperlukan agar perekonomian tumbuh dalam jangka panjang, dimana perbandingan efektivitas investasi diformulasikan dalam ICOR. Adapun asumsi teori Harrod-Domar ialah perekonomian dalam keadaan *full-employment* dan barang modal dalam masyarakat digunakan secara penuh, perekonomian terdiri dari sektor rumah tangga dan swasta (perusahaan), besarnya tabungan masyarakat proporsional dengan besarnya pendapatan nasional dan kecenderungan menabung (MPS) besarnya tetap, sehingga ratio antara kapital output ratio juga tetap (Mulyaningsih, 2019).

b) Teori Schumpeter

Teori Schumpeter menjelaskan peranan pengusaha dalam proses pembangunan. Faktor utama perkembangan ekonomi adalah proses inovasi yang dilakukan oleh para entrepreneur (pengusaha). Inovasi yang dilakukan dapat memberikan pengaruh terhadap produk baru, cara berproduksi yang baru, daerah pemasaran yang baru, sumber bahan mentah yang baru dan perubahan organisasi yang lebih efisien (Mulyaningsih, 2019).

c) Teori Ketergantungan

Teori ini melihat bahwa NSB mengalami kekakuan institusional politik dan ekonomi baik dari dalam maupun luar negeri dan terjebak dalam hubungan ketergantungan yang didominasi oleh negara-negara industri. Terdapat tiga model ketergantungan dalam teori ini, yaitu model ketergantungan *neocolonial*, model paradigma keliru dan model pembangunan dualistik (Mulyaningsih, 2019).

b. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi

Selama abad ke-19, pemerintah memainkan peran sentral dan luas dalam membangun kondisi ekonomi dan kelembagaan yang diperlukan untuk terjadinya revolusi industri. Pemerintah mengurangi risiko transaksi swasta dengan memberlakukan undang-undang yang membatasi tanggung

jawab wirausaha, meningkatkan keamanan hak milik, dan menegakkan kontrak swasta (Adelman, 1999). Pemerintah meningkatkan pasokan dengan menghilangkan hambatan hukum terhadap mobilitas tenaga kerja antar wilayah dan sektor dengan menetapkan undang-undang imigrasi, menetapkan kondisi bagi penanaman modal asing dan masuknya modal asing. Pemerintah meningkatkan pasokan keterampilan dalam negeri dengan mendorong investasi di bidang pendidikan dan, jika perlu, mengimpor pekerja terampil asing. Pemerintah meningkatkan pasokan pembiayaan dalam negeri dengan mendorong pendirian bank investasi, pembentukan perantara keuangan dan, bila perlu, pembiayaan langsung perusahaan industri. Pemerintah juga mendorong impor teknologi ke negara Eropa yang kurang maju dan menghambat ekspor teknologi dari negara pendatang pertama pada masa revolusi industri (Adelman, 1999). Di Inggris, misalnya, ekspor teknologi dilarang oleh hukum dan teknisi ahli ditangkap di perbatasan jika mereka ingin beremigrasi. Pemerintah merupakan sumber eksternalitas bagi investasi swasta dimana mereka mendorong pembangunan infrastruktur transportasi melalui berbagai cara, seperti: investasi langsung pada berbagai moda transportasi, penyediaan pembiayaan untuk pembangunan kanal dan rel kereta api dan pemberian insentif yang besar, seperti hak jalan untuk pembangunan transportasi oleh sektor swasta (Adelman, 1999).

Dalam penelitian Adelman (1999), Peran pemerintah dibagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat pembangunan.

1) Kelompok Rendah (*the low group*)

Untuk kelompok pembangunan rendah pemerintah memiliki tugas penting dalam tingkat pembangunan sosio-ekonomi dengan membangun modal sosial. Dimana pemerintah perlu mendorong peningkatan jumlah kelas menengah yang profesional, wirausaha dan birokratis, menghilangkan hambatan sosial dan pendidikan untuk memasuki pekerjaan kelas menengah dan memperjuangkan peningkatan derajat modernisasi pandangan. Mereka juga dapat meningkatkan derajat modernisasi cara pandang dengan mendorong komersialisasi pertanian, mengurangi sebagian besar penduduk yang bekerja di sektor pertanian subsisten dan dengan melakukan investasi pada pengembangan sumber daya manusia. Fungsi utama pemerintahan kelompok negara paling terbelakang,

terdiri dari: pembangunan sosial dan penciptaan institusi, baik ekonomi maupun politik. Negara-negara dalam kelompok ini belum pernah melalui proses protoindustrialisasi, peningkatan teknologi pertanian, dan marketisasi yang sebanding.

2) Kelompok Menengah (*the intermediate group*)

Bagi negara yang berada pada tahap perkembangan menengah, pemerintah harus berkonsentrasi pada penyediaan kondisi kelembagaan dan fisik serta lingkungan kebijakan yang diperlukan untuk mendorong tahap awal industrialisasi. Pemerintah harus mendukung perkembangan industri modern, mendorong peningkatan variasi barang-barang konsumsi yang diproduksi, mendorong pengolahan ekspor berbasis sumber daya alam dalam negeri dan berupaya meningkatkan proporsi barang-barang manufaktur dalam total ekspor.

3) Kelompok Tinggi (*the high group*)

Negara dalam kelompok ini terdiri dari negara berkembang yang paling maju secara sosio-institusional dan ekonomi, dimana pemerintah mendorong industrialisasi sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian.

4) Negara Maju (*developed countries*)

Secara umum pemerintah harus membatasi diri pada penyediaan kerangka kebijakan makroekonomi untuk kalkulus ekonomi rasional dan pemanfaatan sumber daya secara penuh, peningkatan persaingan ekonomi dan politik, penyediaan jaring pengaman dan perlindungan terhadap kelompok lemah di pasar dan pembendungan eksternalitas sosial, lingkungan hidup dan keselamatan yang negatif yang melekat dalam maksimalisasi keuntungan tanpa batas.

Beberapa pencapaian pembangunan ekonomi di Indonesia, diantaranya:

- 1) Pertumbuhan ekonomi: ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan rata-rata 5% per tahun dalam dekade terakhir dan menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara
- 2) Peningkatan Pendapatan Per Kapita: pendapatan per kapita Indonesia meningkat secara signifikan dari USD 1.100 pada tahun 2000 menjadi USD 4.300 pada tahun 2023

- 3) Pengurangan kemiskinan: angka kemiskinan di Indonesia menurun drastis dari 21% pada tahun 2000 menjadi 9% pada tahun 2023
- 4) Meningkatnya investasi: investasi asing langsung (FDI) ke Indonesia terus meningkat dan menunjukkan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia
- 5) Perkembangan Infrastruktur: pemerintah Indonesia telah melakukan investasi besar-besaran dalam infrastruktur seperti jalan raya, pelabuhan, bandara dan pembangkit listrik
- 6) Meningkatnya daya saing: daya saing Indonesia dalam perdagangan global terus meningkat, hal ini ditunjukkan dengan peningkatan ekspor non-migas.

Adanya peningkatan yang sudah dicapai, tidak terlepas dari tantangan-tantangan yang dihadapi. Adapun tantangan yang dihadapi Indonesia dalam proses pembangunan ekonomi seperti: ketimpangan pendapatan, infrastruktur yang belum merata, kualitas pendidikan yang masih rendah serta korupsi. Dengan adanya tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia terdorong untuk mengambil beberapa langkah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi, seperti: menerapkan program-program pengentasan kemiskinan, membangun infrastruktur di wilayah pedesaan, meningkatkan kualitas pendidikan dan memperkuat pemberantasan korupsi.

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pertumbuhan Penduduk dalam Perspektif Islam

Dalam Islam ada sebuah hadis yang memerintahkan bahwa banyak anak merupakan *mafhum mukholafah* atau yang disebut dengan pemahaman tersirat dari sebuah hadis tentang seorang pemuda yang meminta pendapat kepada Nabi bagaimana perempuan yang memiliki kedudukan sekaligus nasab yang baik di dalam sebuah keluarga akan tetapi tidak bisa memiliki keturunan. Kemudian Nabi SAW menasehati pemuda itu untuk menikahi perempuan yang bisa memberikan keturunan dan penyayang. Hadis tersebut sebagai berikut:

عن معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله - عليه الصلاة والسلام - فقال: إني أصبْتُ امرأة ذات حَسَبٍ وَجَمَلٍ، وَإِنَّهَا لَا تَلِدُ، أَفَأَتَزَوَّجُهَا، قَالَ: لَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةُ فَتَهَا، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّالِثَةُ، فَقَالَ: تَزَوَّجُوا الْوُدَّ وَالْوُدَّ فَإِنِّي مُكَاثِرٌ بِكُمْ الْأُمَمَ

Artinya: Dari Ma'qal bin Yasar berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah SAW kemudian berkata: "Sesungguhnya aku bertemu perempuan yang memiliki garis keturunan dan kecantikan yang baik hanya saja dia tidak bisa memiliki anak, apakah saya boleh menikahnya. Lalu Nabi SAW mencegahnya, kemudian laki-laki itu datang untuk kedua kalinya tetapi Nabi SAW tetap melarangnya, kemudian laki-laki tersebut tetap mendatangi Nabi SAW ketiga kalinya, tetapi Nabi SAW tetap melarangnya. Kemudian beliau bersabda: nikahilah perempuan yang bisa memiliki banyak anak dan penyayang. Sesungguhnya aku senang dengan jumlah kalian yang banyak (dibanding umat yang lain)" (Abu Dawud, 1997, Juz 2, 374).

Hadis diatas banyak yang menafsirkan seperti al-Hafid ibnu Hajar dalam Fatkhul Bari, sementara Imam Syafi'I meriwayatkan dari Abdullah bin Umar dengan redaksi sedikit berbeda yaitu "nikahilah kalian dan perbanyaklah keturunan, karena aku bangga dengan jumlah kalian yang banyak" (Warsito, 2018). Rohim (2017) mengatakan bahwa banyak yang mendukung hadis tersebut dari para kau muslim dan dapat dipandang dari nilai eskalogis, karena dengan banyak keturunan kelak akan memperbanyak jumlah umat Nabi pada hari kiamat.

Menurut Willya (2012) kebanggaan yang dimaksud Rasul tentu saja tidak bisa dilepaskan dari kualitas yang dibanggakan, karena kualitas inilah yang harus diutamakan. Jika banyak tanpa kualitas, maka hal tersebut tidak akan mungkin membanggakan tetapi justru sebaliknya. Kemajuan dan kesejahteraan bangsa saat ini tidak ditentukan oleh kuantitas, tetapi kualitas dengan mendidik anak sejak dini melalui pendidikan yang berkualitas agar dapat menunjang perekonomian. Alangkah banyaknya kelompok kecil yang berkualitas mampu mengalahkan kelompok besar yang tidak berkualitas. Atas dasar inilah pengaturan kelahiran dapat dibenarkan demi kualitas pendidikan anak, bahkan imam Ghazali membenarkan 'azl walaupun dengan alasan memelihara kecantikan perempuan.

Ada kritikan dari hadis Nabi yang mengatakan, beliau bangga dengan umat yang banyak (*ana mukasirun bikum al-anbiya'*). Namun, umat yang banyak belum tentu memberikan kualitas yang baik dan malah merendahkan atau melemahkan. Melihat penduduk muslim yang tersebar di Indonesia sekitar 236 juta jiwa penduduk muslim, namun tidak secara keseluruhan membuat kita bangga sama sekali. Hal ini dikarenakan jumlah yang banyak belum tentu memberikan kontribusi

pada pembangunan peradaban yang damai dan sejahtera (Saputri, 2019). Sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 9:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا
قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar”.

Seluruh masyarakat mempunyai impian dan harapan agar hidupnya sejahtera di muka bumi baik secara materi maupun spiritual. Sodik (2016) mengemukakan bahwa salah satu aspek dari indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan rayat adalah kependudukan, meliputi: jumlah penduduk, laju pertumbuhan penduduk, sebaran dan kepadatan penduduk, dan migrasi dan fertilitas.

Bagaimana pandangan Islam tentang Keluarga Berencana?

Secara historis, para cendekiawan Islam telah memperdebatkan keabsahan kontrasepsi dan keluarga berencana. Namun keluarga berencana kini telah diadopsi secara luas oleh negara muslim dan umumnya didukung oleh negara Muslim termasuk Indonesia. Alasan tradisional muslim untuk memiliki banyak anak antara lain: pertama, karena banyak yang percaya bahwa menghasilkan anak dalam jumlah besar merupakan kewajiban agama ummah. Hal ini mengacu pada sabda Nabi Muhammad SAW: “Menikahlah dan berkembang biaklah karena aku akan bangga padamu pada hari kiamat di hadapan bangsa-bangsa lain”. Kedua, anak dianggap sebagai aset ekonomi, khususnya di masyarakat pertanian. Hal ini dikarenakan jika salah satu dari anak tersebut sukses maka bisa mengangkat derajat perekonomian keluarga. Ketiga, karena tingginya angka kematian bayi. Keyakinan bahwa dengan banyaknya kelahiran, setidaknya ada beberapa yang akan bertahan hidup. Keempat, anak memberikan ‘jaminan sosial’ bagi orang tuanya di hari tua (Abdul-Fattah, 2019). Para ulama yang mempelajari keluarga berencana, telah menghalalkan kontrasepsi karena Al-Qur’an tidak melarang orang tua yang ingin mempunyai anak lebih sedikit dan Islam adalah agama

kasih sayang dan kemudahan. Sehingga dalam hal ini orang tua dapat mencari kontrasepsi dan penjarakan kelahiran untuk menghindari risiko kesehatan.

Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Dalam konteks Islam, pembangunan ekonomi dilaksanakan dengan berlandaskan pada pondasi al-Qur'an dan Hadits. Pembangunan ekonomi haruslah berpatokan pada nilai fundamental yang terkandung dalam ajaran Islam yang tidak hanya berfokus pada tujuan materi, tetapi juga memandang sisi spiritual sebagai bagian darinya. Sedangkan dalam konvensional, pembangunan ekonomi dilakukan dengan berlandaskan pada teori dan rumusan yang dikemukakan oleh ekonom yang sifatnya sekuler. Perbedaan pandangan terkait pembangunan ini menjadikan arah pembangunan ekonomi Islam dan Konvensional hadir dalam membentuk paradigma yang berbeda. Perbedaan paradigma sudut pandang suatu pembangunan akan berdampak terhadap konsep dan implementasi yang dikemukakan. Suatu pembangunan dianggap berhasil tergantung kepada tujuan yang dilahirkan dari paradigma itu sendiri. Sebagai contoh, indikator pembangunan dalam pandangan konvensional mengarah pada Produk Domestik Bruto (PDB), ketimpangan, kemiskinan dan indikator lainnya. Sehingga, ketika PDB sebuah negara naik, ketimpangan dan kemiskinan menurun maka hal tersebut bisa dikatakan bahwa negara sukses dalam membangun perekonomian. Namun, meski indikator-indikator yang sifatnya material sudah sesuai dengan target pertumbuhan dan memberikan dampak baik kepada masyarakat, hal tersebut tidak bisa dipandang sepenuhnya sesuai dengan prinsip pembangunan ekonomi Islam.

Pembangunan ekonomi Islam memandang bahwa kesuksesan tidak hanya dilihat dari terpenuhinya aspek materi, namun sisi spiritual (keimanan dan ketakwaan) kepada Tuhan merupakan hal terpenting yang tidak boleh dikesampingkan. Keduanya sudah seperti uang dengan dua sisi yang tidak bisa dipisahkan. Kemajuan material saja hanya akan melahirkan masyarakat yang rakus terhadap materi, keinginannya yang banyak tidak bisa diakomodasi oleh SDA yang melimpah, sehingga melahirkan sebuah teori bahwa kemauan manusia tidak terbatas sedangkan SDA terbatas. Akibatnya, negara-negara maju banyak melakukan eksploitasi terhadap

sumber daya alam secara besar-besaran yang berimbas pada kerusakan alam yang dianggap normal demi meningkatkan perekonomian dan tercapainya tujuan materi (Todaro & Smith, 2015). Pentingnya pembangunan ekonomi yang berbasis spiritualitas akan mendidik masyarakat untuk mengelola kekayaan dengan bijak sesuai dengan kebutuhan dan bukan bersandar kepada keinginan. Seperti Amerika Serikat yang merupakan salah satu negara maju secara ekonomi, justru melegalkan judi sebagai bagian dari penyokong PDBnya (Bybee, 2014). Padahal, kemungkaran yang dilegalkan akan berdampak pada rusaknya masyarakat di sebuah negara dan ini merupakan kemunduran ditengah-tengah kemajuan.

a. Teori Pembangunan Ekonomi Islam

Secara umum, model pembangunan ekonomi dalam Islam mengacu kepada dua tokoh besar yaitu Ibn Khaldun dan As-Syatibi. Kedua tokoh ini memiliki pandangan yang berbeda dalam fokus dan kajiannya, namun tetap berpegang pada aturan keagamaan.

Pembangunan Ekonomi Ibn Khaldun

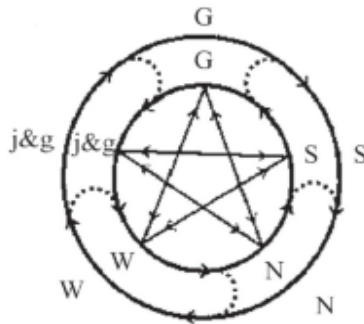
Abdurrahman Ibnu Khaldun Al-Maghribi Al-Hadrami Al-Maliki atau dikenal dengan Ibn Khaldun merupakan seorang ilmuwan dan bapak ekonomi Islam yang lahir di Tunisia pada 1 Ramadan 732 H (Insany & Fauzi, 2020).

Ibn Khaldun memfokuskan model pembangunannya pada hubungan dari elemen pembangunan ekonomi dalam mencapai tujuannya (Mahri *et al.*, 2021). Dalam hal ekonomi, Ibn Khaldun menyajikan delapan nasihat penting terkait dengan pembangunan (Arifqi, 2019), diantaranya:

- a) Pemerintah yang kuat tidak akan terwujud kecuali melalui pelaksanaan syariah Islam
- b) Syariah tidak dapat diwujudkan kecuali melalui pemerintahan
- c) Pemerintahan tidak akan meningkatkan kekuatan kecuali melalui masyarakat
- d) Masyarakat tidak akan bisa bertahan kecuali dengan adanya kekayaan
- e) Kekayaan tidak bisa diperoleh kecuali dengan Pembangunan
- f) Pembangunan tidak akan terwujud kecuali dengan adanya keadilan

- g) Keadilan adalah indikator tuhan dalam menilai manusia
- h) Pemerintahan diberi tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Delapan nasihat ini dikenal dengan *hikamiyah* atau “*eight wise principle*” yang kemudian dimodelkan oleh Umar Chapra dengan gambaran sebagai berikut:

Gambar 3
Model Pembangunan Ibn Kholdun



Sumber: Chapra, 2006 dalam Mahri *et al.*, (2021)

Secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$G = f(S, N, W, j \text{ \& } g)$$

Keterangan

- G : Negara
- f : Institusi
- S : Sumber daya manusia
- W : Kekayaan
- j : Keadilan
- g : Pembangunan

Model pembangunan ini merupakan kontruksi yang sangat dinamis, sehingga mampu mengakomodir berbagai disiplin ilmu, meliputi politik, ekonomi, demografi, psikologi dan moral.

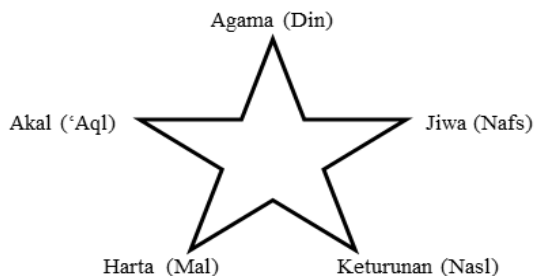
Indikator ini yang menjadi penentu maju dan mundurnya sebuah peradaban (Mahri *et al.*, 2021).

Pembangunan Ekonomi As-Syatibi

Abu Ishaq ibn Musa ibn Muhammad Al-Lakhmi Asy-Syatibi atau yang dikenal dengan Asy-Syatibi merupakan seorang tokoh ekonomi Islam yang berasal dari wilayah Kerajaan Nashr, Granada, yang menjadi bagian dari Spanyol.

Pandangan As-Syatibi dalam persoalan pembangunan ekonomi memfokuskan pada model berdasarkan tujuan pembangunan yang harus dicapai dengan mengadopsi konsep *maqashid syariah* (Mahri *et al.*, 2021). Menurut As-Syatibi, konsep *maqashid syariah* merupakan tujuan dari ekonomi Islam yang terdiri dari lima aspek, yakni: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Kelima aspek ini menunjukkan bahwa pembangunan dan kesejahteraan dipengaruhi oleh seberapa besar lima aspek *maqashid syariah* dapat dipenuhi agar dapat mewujudkan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Selain itu, model ini juga menggambarkan bahwa ke lima aspek ini bersifat saling mempengaruhi atau interdependen antara satu sama lain (Mahri *et al.*, 2021). Hubungan interdependensi yang membentuk suatu keutuhan diilustrasikan pada gambar berikut.

Gambar 4
Satu kesatuan Aspek Maqashid Syariah



Sumber: (Chapra, 2008)

Pemenuhan lima kebutuhan dasar dalam *maqashid syariah* yang didasarkan pada pandangan Imam al-Syatibi akan dijadikan sebagai

dasar teoritis untuk membangun I-HDI (Mahri *et al.*, 2021).

b. Orientasi, Tujuan dan Ruang Lingkup Pembangunan dalam Perspektif Islam

Pembangunan dalam Islam memiliki beberapa orientasi yang merupakan tujuan inti dari pembangunan itu sendiri, yang meliputi:

1) Orientasi terhadap manusia

Pembangunan ekonomi dalam Islam berorientasi terhadap kepentingan manusia. Hal ini dikarenakan manusia merupakan subjek dan objek dalam sebuah pembangunan. Sebagai subjek, manusia merupakan pelaku dalam pembangunan ekonomi, sehingga perannya sangat menentukan maju tidaknya sebuah perekonomian. Sebagai objek, manusia menjadi sasaran pembangunan untuk mendapatkan hak kesejahteraan (Harahap, *et al.*, 2021). Berdasarkan konsep teori pembangunan Ibn Kholdun dan Asy-Syatibi, keduanya sepakat bahwa inti dari pembangunan ekonomi adalah dari segi manusianya. Jika Ibn Kholdun lebih ke sektor pemerintah yang harus bersikap adil dalam menjalankan jabatannya, Asy-Syatibi lebih melihat dari aspek pemenuhan kebutuhan manusia yang tidak hanya material, melainkan juga non-material yang mencakup kejiwaan, spiritualitas dan ketenangan batin.

2) Orientasi terhadap kesejahteraan umum

Orientasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan pembangunan memberikan dampak positif terhadap segala aspek, tidak hanya bisa dinikmati oleh sebagian orang atau golongan saja dan harus bisa memberikan kesejahteraan umum yang tidak memberikan mudharat kepada yang lain (Mahri *et al.*, 2021).

3) Orientasi falah

Falah artinya kemenangan. Orientasi kemenangan ini merupakan kemenangan yang tidak hanya didapat di dunia saja, melainkan juga kemenangan di akhirat. Keyakinan terhadap kehidupan setelah kematian menjadikan seseorang lebih peduli terhadap sesama makhluk dan alam sekitar, ia akan merefleksikan keyakinan itu dalam bentuk kebaikan, karena keyakinannya bahwa kebaikan yang ditanamkan selama hidup di dunia akan dipanennya ketika di akhirat.

Berdasarkan apa yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa orientasi dari pembangunan ekonomi dalam perspektif Islam bertujuan untuk menjamin kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, menjamin kelangsungan hidup dan meningkatkan spiritualitas.

c. Indikator Pembangunan dalam Islam

Indikator pembangunan merupakan sesuatu yang penting, karena kita bisa menilai sesuatu pembangunan sukses atau tidak berdasarkan kriteria yang ada. Terdapat beberapa indikator dalam menilai sebuah pembangunan ekonomi Islam, diantaranya:

1) Indeks Kelslaman Ekonomi (*Economic Islamicity Index*)

Indeks ini dirumuskan oleh Rehman dan Ashari (2010) yang berisi tentang pengukuran Tingkat kesesuaian kebijakan, pencapaian dan realitas dengan suatu perangkat yang sesuai dengan prinsip ekonomi, yaitu: pencapaian keadilan dan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, terciptanya kesejahteraan dan lapangan kerja, dan mengadopsi praktik ekonomi dan keuangan yang berbasis syariah.

2) Indeks Pembangunan Manusia Islami (I-HDI)

Islamic human development index (I-HDI) adalah pengukuran yang dibuat untuk mengetahui sejauh mana sebuah negara atau kawasan dalam hal pembangunan manusia. Dalam indeks ini, setidaknya terdapat lima indikator yang diambil dari *maqashid syariah* yang mencakup kesejahteraan material dan non-material. Kesejahteraan material merupakan kebutuhan terhadap harta, sedangkan non-material yaitu lingkungan dan nilai Islam, pemenuhan jiwa, akal, keturunan dan agama (Anto, 2013). Berdasarkan pada pemahaman tersebut, maka kesejahteraan dalam Islam dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut:

$$Wh = f(MW, NW)$$

$$MW = f(PO, DE)$$

$$NW = f(IEV)$$

$$IEV = f(LE, E, FSR, R)$$

Keterangan:

Wh	=	<i>Holistic Wealfare</i> (Kesejahteraan Holistik)
MW	=	<i>Material Wealfare</i> (Kesejahteraan Material)
NW	=	<i>Non-material Welfare</i> (Kesejahteraan Non-material)
PO	=	<i>Property Ownership</i> (Kepemilikan Kekayaan)
DE	=	<i>Distributional Equity</i> (Distribusi Pendapatan)
IEV	=	<i>Islamic Environment and Values</i> (Lingkungan dan Nilai Islam)
LE	=	<i>Life Expectancy</i> (Tingkat Harapan Hidup)
E	=	<i>Education</i> (Pendidikan)
F	=	<i>Family and Social Relationship</i> (Hubungan Keluarga dan Sosial)
R	=	<i>Religiosity</i> (Religiusitas)

3) Indeks Zakat Nasional

Dalam pembangunan ekonomi perspektif Islam, zakat tidak bisa ditinggalkan. Zakat menjadi bagian dari sistem ekonomi Islam. Indeks zakat terbagi menjadi dua sektor, yakni makro dan mikro. Pada sektor makro, zakat memiliki tiga indikator yang terdiri dari: regulasi, dukungan anggaran pemerintah dan database lembaga zakat resmi muzakki dan mustahiq. Sedangkan untuk sektor mikro, terdiri dari kelembagaan dan dampak dari zakat itu sendiri.

4) *Islamic Finance Development Indicator* (IFDI)

IFDI dikeluarkan oleh *Islamic Corporation for the Development* (ICD) sebagai upaya untuk mempertimbangkan pengukuran keseluruhan industri keuangan dengan melihat semua kinerja bagian-bagiannya sejalan dengan tujuan dari basis keyakinan yang melekat. Informasi ini diambil dari 135 negara dan diukur di lebih dari 10 metrik utama termasuk pengetahuan, tata kelola, CSR dan kesadaran. Lima indikator dari IFDI terdiri dari perkembangan kuantitatif, pengetahuan, tata kelola, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kesadaran (Mahri *et al.*, 2021).

d. Peran Pemerintah dalam Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam

Dalam konsep ibn Khaldun, seorang pemimpin harus bisa berbuat adil dengan memberikan kebijakan yang bermanfaat kepada semua golongan, bukan kepada sebagian kelompok atau individu dan tidak pula memberikan mudharat kepada yang lain. Seperti halnya dalam pemberian subsidi, seorang pemerintah harus bisa berlaku adil dengan mempertimbangkan hidup layak bagi masyarakat yang membutuhkan dan sangat butuh. Pemerintah harus bisa menjadi mediator yang menghubungkan si kaya dan si miskin. Kepada si kaya, pemerintah harus menjadi penarik atau penerima, dan kepada si miskin, pemerintah harus menjadi pemberi (Muhajir, 2017). Ketika hal ini bisa dijalankan oleh pemerintah, maka akan tercipta pemerataan ekonomi, dan ketimpangan antara si kaya dan si miskin bisa diminimalisir, sebagaimana dalam QS. al-Hasyr ayat 7:

كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ

Artinya: “agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu”.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan bahwa pertumbuhan penduduk memiliki hubungan yang erat dengan pembangunan ekonomi di suatu negara. Pertumbuhan penduduk dapat memberikan dampak positif maupun negatif terhadap pembangunan ekonomi tergantung pada faktor pendukungnya. Pertumbuhan penduduk dapat berpengaruh positif apabila didukung oleh kualitas sumber daya manusia yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitas ekonomi. Namun, pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dapat menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi dan meningkatkan berbagai masalah, seperti: menurunnya pertumbuhan ekonomi, meningkatnya kemiskinan dan ketimpangan, berkurangnya anggaran untuk pendidikan dan kesehatan, kerusakan lingkungan, serta migrasi internasional. Oleh karena itu, berbagai kebijakan diperlukan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk seperti sosialisasi keluarga berencana, peningkatan pendidikan dan ekonomi masyarakat, serta peningkatan

kualitas sumber daya manusia.

Dalam Islam, banyak memiliki keturunan diperbolehkan asalkan mampu memberikan kualitas pendidikan dan taraf hidup yang layak bagi anak-anak. Kebanggaan Nabi saw tidak semata karena kuantitas melainkan merujuk pada kualitas umat yang bermanfaat bagi peradaban. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk perlu diimbangi dengan kualitas sumber daya manusia agar dapat mendukung pembangunan ekonomi secara berkelanjutan. Pembangunan ekonomi dalam Islam juga tidak hanya terfokus pada aspek material. Pembangunan ekonomi harus memperhatikan aspek spiritual agar kesejahteraan umat manusia terpenuhi secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi maupun spiritual. Dalam hal ini, Islam mendorong umatnya untuk bekerja keras, produktif, dan memanfaatkan sumber daya yang ada secara efisien, namun tetap memperhatikan aspek keadilan, pemerataan, dan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul-Fattah, D. (2019). Islamic Perspectives on Curbing Population Growth to Promote Earth's Sustainability. *ICR Journal*, 10(1), 21–46. <https://doi.org/10.52282/icr.v10i1.70>
- Adelman, I. (1999). *The Role Of Goverment In Economic Development*. (890), 323–336.
- Adeosun, O. T., & Popogbe, O. O. (2021). Population growth and human resource utilization nexus in Nigeria. *Journal of Humanities and Applied Social Sciences*, 3(4), 281–298. <https://doi.org/10.1108/jhass-06-2020-0088>
- Alma, L. R. (2019). *Ilmu Kependudukan* (1st ed.). Malang: Wineka Media.
- Anto, M. H. (2013). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, 19(2), 69–95.
- Arifqi, M. M. (2019). Konsep Empowerment Sebagai Instrumen Pembangunan Ekonomi Islam (Telaah Kritis Pemikiran Ibnu Khaldun dan Umer Chapra). *AlTijary*, 4(2), 125–138. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1356>
- Arsyad, L. (2010). Ekonomi Pembangunan dan Pembangunan Ekonomi. *Ekonomi Pembangunan Berkelanjutan*, 05(01), 1–37.

- Azam, M., Khan, H. N., & Khan, F. (2020). Testing Malthusian's and Kremer's Population Theories in Developing Economy. *International Journal of Social Economics*, 47(4), 523–538. <https://doi.org/10.1108/IJSE-08-2019-0496>
- Berliani, K. (2021). Pengaruh Tingkat Pengangguran, Tingkat Pendidikan dan Laju Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Kemiskinan Penduduk Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2020. *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 872. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2244>
- Bidarti, A. (2020). *Teori Kependudukan* (1st ed.). Bogor: Linda Bestari.
- Brida, J. G., Alvarez, E., Cayssials, G., & Mednik, M. (2023). How Does Population Growth Affect Growth Economic Growth and Vice Versa? An Empirical Analysis. *Review of Economics and Political Science*. <https://doi.org/10.1108/REPS-11-2022-0093>
- Bybee, S. (2014). *History, Development, and Legislation of Las Vegas Casino Gaming*. In *Legalized Casino Gaming in the United States*. Routledge.
- Chapra, M. U. (2008). *Islam and The Economic Challenge* (17th ed.). Riyadh: International Islamic Publishing House.
- Harahap, S. A. R., Azmi, M. U., & Syamsuri. (2021). Pembangunan Ekonomi Islam Melalui Peran Sumber Daya Manusia. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah*, 6(1). <https://doi.org/10.24235/jm.v6i1.7305>
- Hutasoit, I. (2017). *Pengantar Ilmu Kependudukan* (1st ed.). Bandung: Alfabeta.
- Insany, M. A. Al, & Fauzi, R. M. Q. (2020). Konsep Ekonomi Politik Dalam Perspektif Ibnu Khaldun. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 6(1), 154–169. <https://doi.org/10.20473/vol6iss20191pp154-169>
- Lubis, A. F. (2021). *Studi Perencanaan Wilayah Pertahanan Dalam Tinjauan Antropologi Hukum* (1st ed.). Jawa Timur: Qiara Media.
- Mahri, A. J. W., Cupian, Arif, M. N. R. Al, Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., ... Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam* (1, ed.). Jakarta: Departemen ekonomi dan Keuangan Syariah-Bank Indonesia.
- Maitra, P. (1981). Malthus Revisited – Population , Poverty and Pollution.

- International Journal of Social Economics*, 8(3), 47-61. <https://doi.org/10.1108/eb013885>
- Majid, R. (2021). *Dasar Kependudukan* (1st ed.). Jawa Tengah: Nasya Expanding Management.
- Muhajir, A. (2017). *Fiqh Tata Negara: Upaya Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam* (1st ed.). Yogyakarta: IRCiSoD.
- Mulyaningsih. (2019). *Pembangunan Ekonomi*.
- Rahayu, T. E. (2010). *Pertumbuhan dan Persebaran Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistika.
- Rohim, S. (2017). Argumen Program Keluarga Berencana (KB) Dalam Islam. *Al-Ahkam Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 2(2). <https://doi.org/10.22515/alahkam.v2i2.501>
- Saputri, A. (2019). *Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Eekonomi dan Upah Minimum Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka dalam Perspektf Ekonomi Islam (Studi Kasus di Provinsi Lampung)*.
- Siahaan, N. H. T. (2004). *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan* (2nd ed.). Jakarta: Erlangga.
- Smith, A. (2020). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations. *Knowledge and Postmodernism in Historical Perspective*, 62-72. <https://doi.org/10.2307/2221259>
- Sodiq, A. (2016). Konsep Kesejahteraan Dalam Islam. *Equilibrium*, 3(2), 380-405.
- Suwito. (2020). *Pengantar Demografi* (1st ed.). Malang: Ediide Infografika.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Retrieved from www.pearsonhighered.com
- Warsito. (2018). Hadis Perintah Memperbanyak Keturunan Tinjauan Tekstual dan Kontekstual dalam Perspektif Ekonomi. *Riwayah Jurnal Ilmu Hadis*, 4(1), 9-15.
- Willya, E. (2012). Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam. *Marwah: Jurnal Perempuan, Agama Dan Jender*, 11(1), 1. <https://doi.org/10.24014/marwah.v11i1.497>

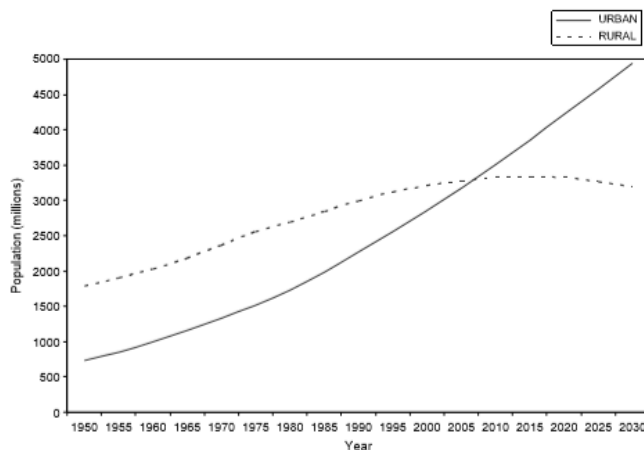
URBANISASI DAN MIGRASI DESA-KOTA

(Dafelia Qodhari; Adelina Nurianingtyas Arwanto; Bagus Prayogi;
Maulana Ali Akbar)

PENDAHULUAN

Diakui atau tidak kemudian urbanisasi dan rural-migran memberikan persoalan dilema yang kompleks dan penuh dengan nuansa proses pembangunan yang efektif. Perpindahan penduduk dari desa-kota semakin masif dilakukan saat ini bahkan belum pernah tercatat sebelumnya dalam sejarah desa-kota. Perpindahan penduduk dialami oleh berbagai negara baik yang berada dikawasan Afrika, Asia, hingga Amerika latin. PBB pada tahun 2008 memprediksi 66% penduduk di dunia akan tinggal di daerah perkotaan (W. J. Zhang, 2008). Dalam beberapa dekade kedepan mayoritas penduduk yang berada di perkotaan akan semakin meningkat setiap tahunnya. Berikut data urbanisasi dan rural-migran dunia selama beberapa dekade terakhir:

Grafik 1. Estimasi Pertumbuhan urbanisasi dan rural-migran dunia 1950-2030



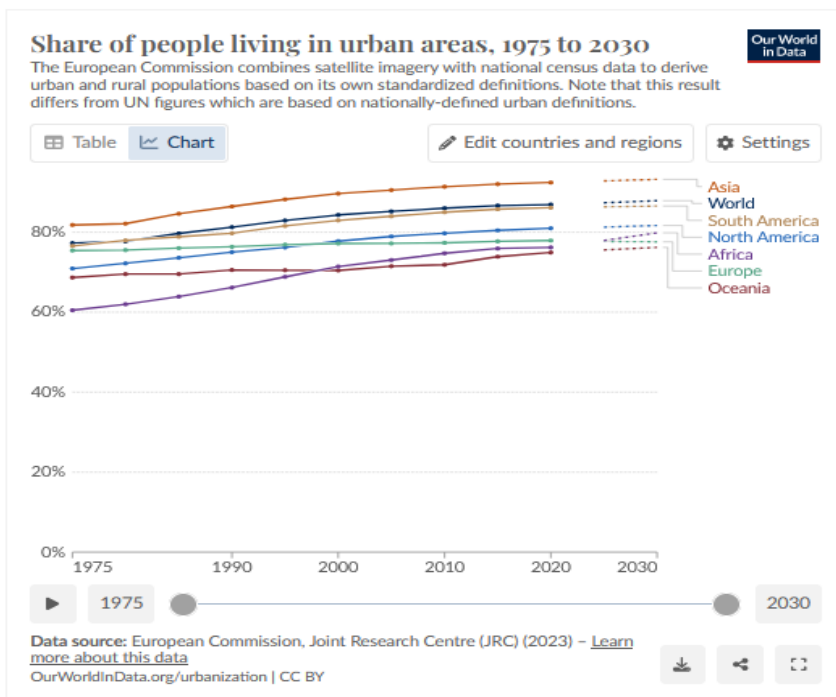
Dalam visualisasinya, diperkirakan bahwa jumlah orang secara global yang tinggal diperkotaan berjumlah 4 miliar (Cohen, 2006). Berarti separuh dari penduduk bumi akan tinggal di perkotaan. selain itu, sebagian besar negara dengan pendapatan tinggi seperti Eropa Barat, Amerika, Australia dan Timur Tengah. Lebih dari 80% penduduknya tinggal di daerah perkotaan. Di sebagian negara lain dengan pendapatan menengah keatas seperti Eropa Timur, Asia Timur, Afrika Utara dan Selatan serta Amerika Selatan penduduknya tinggal di perkotaan berkisar 50% hingga 80% (Ritchie *et al.*, 2018). Berikut Gambar penyebaran Urbanisasi setiap tingkatan:

Gambar 1: pangsa penduduk yang tinggal di perkotaan, 2021



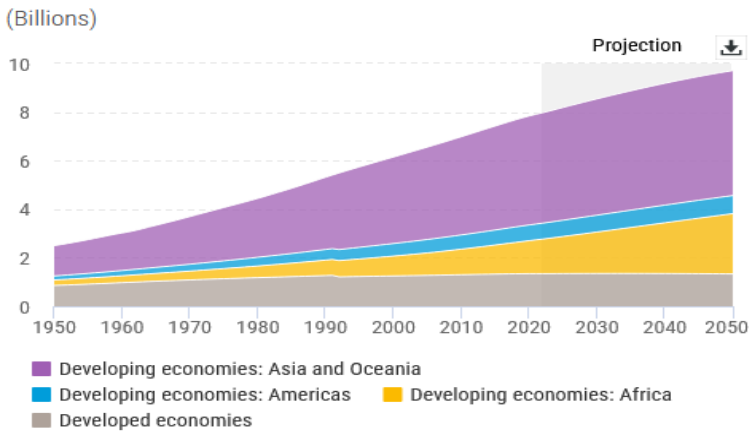
Beberapa dekade ke depan kawasan peningkatan urban bukan lagi berada di barat melainkan berada di Asia seperti China, Vietnam, Filipina, Indonesia, Korea Selatan dan India. Bahkan selama 25 tahun terakhir populasi meningkat sekitar 2.1 miliar orang. hampir pertumbuhan ini terjadi di negara-negara berkembang, terutama di Asia dan Oseania (1,1 miliar) dan Afrika (0.7 miliar) pada tahun 2022, lima dari enam orang di dunia hidup di negara berkembang (Unctad, 2023).

Grafik 2. Persentase penduduk tinggal di perkotaan 1975 hingga 2030



Tentunya perkembangan penduduk tinggal di perkotaan semakin mengalami peningkatan akan berakibat pada kesiapan perkotaan untuk menampung jumlah penduduk yang semakin meningkat. perpindahan penduduk disebabkan oleh adanya kesempatan kerja, standar hidup yang lebih baik dan fasilitas pendidikan serta layanan yang memadai dan juga baik (Ritchie *et al.*, 2018). Ini tercermin dalam pembangunan Kawasan asia yang mendominasi dalam proses pembangunan:

Grafik 3. Negara-negara berkembang mendorong pertumbuhan populasi



Setelah meninjau tren dan Prospek pertumbuhan populasi perkotaan secara keseluruhan, kemudian akan mengkaji potensi peran kota yang baik dari sektor modern dan sektor informal perkotaan dalam mendorong pembangunan ekonomi. kemudian akan beralih pada model secara teoritis mengenai perpindahan tenaga kerja dari desa-kota dalam konteks pertumbuhan yang pesat dan tingginya pengangguran di kota. kemudian akan menyajikan dan mengevaluasi berbagai pilihan kebijakan yang mungkin diambil oleh negara-negara yang berkembang dalam upaya mengurangi derasnya arus migrasi dari desa-kota dan memperbaiki masalah pengangguran yang serius dan terus melanda kota yang padat penduduk. Kami juga berupaya untuk mengkaji potensi besar dinamisme dan produktivitas kota-kota berkembang dapat dimanfaatkan dengan lebih baik untuk pembangunan ekonomi yang cepat dan inklusif. Bagian terakhir akan menyajikan perpindahan penduduk dalam konseptualisasi Islam, serta pembangunan dan kebijakan dalam Islam.

TEORI DAN KEBIJAKAN

Pembangunan ekonomi Eropa barat dan Amerika Serikat terkait erat dengan perpindahan tenaga kerja dari desa ke kota. Karena sektor pedesaan didominasi oleh aktivitas pertanian dan sektor perkotaan berfokus pada industrialisasi, secara menyeluruh pembangunan ekonomi

di negara-negara ini dicirikan dengan realokasi bertahap tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri melalui migrasi desa-kota (Busso *et al.*, 2021). Maka, sejarah pertumbuhan ekonomi di negara-negara itu menunjukkan urbanisasi dan industrialisasi sebagai dua hal yang sinonim. Model sejarah ini kemudian berfungsi sebagai blueprint yang dapat diterapkan bagi perubahan structural di negara-negara berkembang, sebagaimana terlihat jelas misalnya melalui teori tentang transfer tenaga kerja Lewis yang asli. Dimana model dua-sektor Lewis menyatakan teori pembangunan yang mengemukakan bahwa surplus tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional ditransfer ke sektor industri modern yang pertumbuhannya menyerap kelebihan tenaga kerja, mendorong industrialisasi dan menggerakkan pembangunan berkelanjutan (Oyvatt, 2020).

Akan tetapi, banyaknya bukti yang muncul sejak beberapa tahun silam, ketika negara-negara berkembang mengalami migrasi besar-besaran penduduk pedesaan ke perkotaan meski terjadi peningkatan jumlah pengangguran terbuka dan tersembunyi di perkotaan, telah mengurangi kesahihan model pembangunan dua sektor Lewis. Oleh sebab itu, penjelasan mengenai gejala itu serta kebijakan untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul harus ditemukan di tempat lain (Massey *et al.*, 1993). Sebuah teori yang menjelaskan hubungan yang tampak bersifat paradoks mengenai adanya akselerasi migrasi desa-kota dalam konteks meningkatnya jumlah pengangguran di perkotaan dikenal sebagai model migrasi Todaro dan bentuk ekuilibriumnya sebagai model Harris-Todaro. Berdasarkan asumsi bahwa migrasi pada dasarnya adalah gejala ekonomi sehingga bagi para migran secara perorangan dapat menjadi keputusan yang cukup rasional terlepas dari adanya pengangguran di perkotaan, model Todaro membuat dalil bahwa migrasi terjadi sebagai respons terhadap perbedaan antara kota dan desa dalam hal pendapatan yang diharapkan. Premis dasarnya adalah para migran mempertimbangkan berbagai peluang pasar tenaga kerja yang tersedia bagi mereka di sektor pedesaan dan di sektor perkotaan kemudian memilih sektor yang dipandang dapat memaksimalkan hasil yang diharapkan dari bermigrasi (Todaro & Smith, 2013).

Pada dasarnya teori ini berasumsi bahwa para tenaga kerja actual ataupun potensial akan membandingkan pendapatan yang mereka

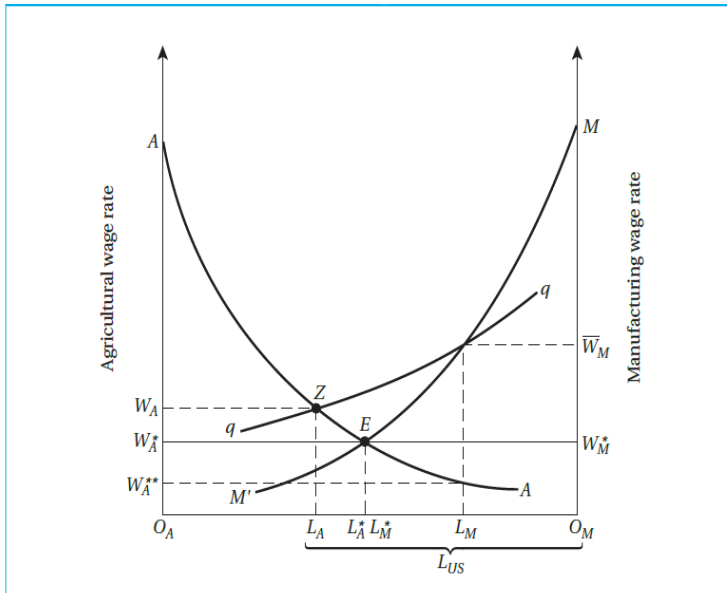
harapkan selama waktu tertentu di sektor perkotaan dengan rata-rata pendapatan yang umumnya bisa diperoleh di pedesaan. Para pekerja ini akan bermigrasi jika peluang pendapatan yang diharapkan di perkotaan lebih besar dari pada pendapatan di pedesaan. Dalam lingkungan lapangan kerja penuh, keputusan bermigrasi dapat didasarkan hanya pada keinginan untuk mendapatkan pekerjaan bergaji tinggi kapan saja peluang itu tersedia. Teori ekonomi sederhana selanjutnya akan mengemukakan bahwa migrasi seperti itu dapat mengakibatkan berkurangnya perbedaan upah melalui interaksi kekuatan penawaran dan permintaan, baik dalam konteks emigrasi maupun imigrasi. Sayangnya, analisis seperti itu tidak realitis dalam konteks kerangka Lembaga dan ekonomi di kebanyakan negara berkembang. Sebab, dalam memutuskan apakah akan bermigrasi atau tidak orang-orang ini harus menakar probabilitas dan risiko menganggur baik secara terbuka maupun terselubung dalam waktu yang relative cukup lama terhadap selisih positif dari pendapatan riil kota-desa.

Dengan demikian, migrasi desa-kota bukanlah suatu proses yang memperhitungkan perbandingan antara tingkat upah di kota dan di desa seperti yang diungkapkan oleh sebuah model kompetitif, melainkan memperhitungkan perbandingan antara pendapatan yang diharapkan di pedesaan dan di perkotaan.

Proses untuk mencapai ekuilibrium pengangguran antara upah perkotaan yang diharapkan dan rata-rata pendapatan pedesaan dapat juga dijelaskan melalui diagram model Harris-Todaro, yang berbeda dari model pasar bebas neoklasik tradisional yang membandingkan upah pedesaan dan diperkotaan.

Asumsikanlah dalam suatu perekonomian dalam suatu negara hanya ada dua sektor, yaitu sektor pertanian di pedesaan dan sektor industri diperkotaan. Tingkat permintaan tenaga kerja (kurva marginal tenaga kerja) di dalam sektor pertanian dilambangkan oleh garis yang melengkung ke bawah, AA' . Adapun tingkat permintaan tenaga kerja di sektor industri ditunjukkan oleh garis yang melengkung dari kanan ke kiri, MM' . Total angka kerja yang tersedia disimbolkan oleh $O_A O_M$. Dalam perekonomian pasar neoklasik, upah ditentukan oleh mekanisme pasar dan segenap tenaga kerja akan dapat terserap, tingkat upah ekuilibrium akan tercipta bila $W_A^* = W_M^*$ dengan pembagian tenaga kerja sebanyak $O_A L^* A$ untuk sektor pertanian, dan $O_M L^* M$ untuk sektor industri.

Sesuai dengan asumsi *full employment*, segenap tenaga kerja yang tersedia akan terserap habis oleh kedua sektor ekonomi tersebut (Todaro & Smith, 2013).



Namun apa yang akan terjadi jika tingkat upah ditentukan oleh pemerintah (bukanya oleh mekanisme pasar lagi, sehingga garis lengkungnya tidak lagi fleksibel), sebagaimana telah diasumsikan oleh model Todaro, katakanlah sebesar W_A^* , jika kita juga berasumsi bahwa dalam perekonomian tersebut tidak ada pengangguran, maka tenaga kerja sebanyak $O_M L_M$ akan berkerja di sektor industri manufaktur di perkotaan, sedangkan sisanya sebanyak $O_A L_M$ akan berkecimpung dalam sektor pertanian di pedesaan dengan tingkat upah sebanyak $O_A W^{**}$ (ini lebih kecil daripada tingkat upah pasar yang mencapai $O_A W_A^*$). Maka tercipta suatu kesenjangan tingkat upah antara kota dan desa sebesar $W_M - W_A^{**}$ (W_M adalah tingkat upah yang ditentukan oleh pihak pemerintah jika para pekerja di pedesaan bebas melakukan migrasi), maka meskipun di desa tersedia lapangan kerja sebanyak $O_M L_M$ mereka akan pergi ke kot-kota guna memburu tingkat upah yang lebih tinggi. Jika peluang bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan kita

nyatakan sebagai rasio antara penyerapan tenaga kerja di sektor industri manufaktur atau L_M dan total angkatan kerja desa atau L_U maka nilai peluang itu bisa kita hitung berdasarkan rumus berikut ini:

$$W_A = \frac{L_M}{L_U} (W_M)$$

Nilai peluang perolehan pekerjaan itulah yang selanjutnya akan menyamakan tingkat upah di pedesaan, yakni W_A dengan tingkat pendapatan yang diharapkan di perkotaan sebesar:

$$\frac{L_M}{L_U} (W_M)$$

Adanya selisih tingkat upah desa-kota tersebut kemudian mendorong terjadinya arus migrasi dari desa ke kota. Titik ekuilibrium pengangguran yang baru kini berada di titik Z, di mana selisih pendapatan actual antara desa dan kota sama dengan M. Jumlah tenaga kerja yang masih ada di sektor pertanian adalah OALA sedangkan tenaga kerja sebanyak OMLM ada di sektor manufaktur dengan tingkat upah M. Sisanya yakni LU = OMLA - OMLM akan menganggur atau memasuki kegiatan sektor informal yang berpendapatan rendah.

Model migrasi Todaro memiliki empat karakteristik dasar sebagai berikut (Todaro & Smith, 2013):

1. Migrasi terutama didorong oleh pertimbangan ekonomi rasional mengenai manfaat dan biaya, yang meski hamper semua bersifat keuangan tetapi juga mencakup pertimbangan psikologis.
2. Keputusan bermigrasi bergantung pada pertimbangan mengenai selisih atau perbedaan antara upah pedesaan dan perkotaan yang diharapkan, bukan pada posisi actual, selisih yang diharapkan itu ditentukan oleh interaksi antara dua variabel, selisih actual upah desa kota dan probabilitas keberhasilan mendapatkan pekerjaan di sektor perkotaan.
3. Probabilitas mendapatkan pekerjaan di perkotaan secara langsung berkaitan dengan tingkat lapangan kerja perkotaan, sehingga berbanding terbalik dengan tingkat pengangguran di perkotaan.
4. Tingkat migrasi yang melebihi tingkat pertumbuhan kesempatan kerja di perkotaan tidak hanya ungkin terjadi, tetapi juga rasinal dan bahkan cenderung terjadi jika terdapat selisih yang besar antara pendapatan yang diharapkan di perkotaan dan di pedesaan. Oleh

karena itu, tingkat pengangguran yang tinggi di perkotaan merupakan akibat yang tak terhindarkan dari sangat tidak seimbangnya peluang ekonomi antara kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di kebanyakan negara terbelakang.

Tidak sedikit negara-negara terbelakang mengalami urbanisasi yang diakibatkan tingkat migrasi dari desa ke kota yang tinggi. Hal ini mengakibatkan permukiman kumuh di perkotaan, kondisi kesehatan yang buruk, ketergantungan pada sektor pekerjaan informal dan kemiskinan (Wang *et al.*, 2015). Sehingga perlu kebijakan yang tepat untuk menanggulangi ketimpangan tersebut. Selain itu, perlu adanya perbaikan kerusakan ekologis dengan menciptakan lingkungan layak huni yang selaras antara manusia dan alam (Peng *et al.*, 2021).

Meskipun teori Todaro semula tampak seperti tidak memandang migrasi desa-kota sebagai faktor yang sangat penting dan menggambarkan sebagai mekanisme penyesuaian di mana para pekerja mengalokasikan diri mereka di antara pasar tenaga kerja pedesaan dan perkotaan, sebenarnya teori ini memiliki implikasi kebijakan yang penting bagi strategi pembangunan dalam kaitannya dengan upah dan pendapatan, pembangunan pedesaan, serta industrialisasi (Todaro & Smith, 2013). Bias perkotaan dan perluasan lapangan kerja mendorong terjadinya migrasi, sehingga sangat penting untuk memperhitungkan kebijakan terhadap pedesaan ketika merancang kebijakan perkotaan. Beberapa kajian terkait kebijakan yang dirancang untuk memperbaiki situasi migrasi dan lapangan kerja yang mungkin sangat parah dinegara berkembang sebagai berikut:

Pertama, ketimpangan dalam kesempatan kerja desa-kota yang disebabkan oleh strategi pembangunan yang cenderung bias perkotaan harus dikurangi. Karena para migran diasumsikan merespon perbedaan pendapatan yang diharapkan, sehingga sangat penting bahwa ketidakseimbangan antara kesempatan ekonomi di sektor pedesaan dan perkotaan diminimalkan. Apabila tingkat upah perkotaan meningkat lebih cepat daripada pendapatan di desa, keadaan ini akan mendorong lebih banyak migrasi desa kota meski tingkat pengangguran di perkotaan semakin tinggi. Banyaknya orang yang berduyun-duyun memasuki kawasan perkotaan tidak hanya mempertinggi masalah sosio-ekonomi di kota, tetapi juga akhirnya menimbulkan masalah kekurangan tenaga kerja

di kawasan pedesaan, khususnya pada musim-musim sibuk. Semua biaya social ini melebihi manfaat pribadi dari bermigrasi (Todaro & Smith, 2013). Sehingga perlu adanya keseimbangan peluang ekonomi yang lebih sesuai antara pedesaan dan perkotaan untuk menanggulangi masalah pengangguran di pedesaan dan di perkotaan, seta untuk memperlambat laju migrasi desa-kota. Penekanan utama aktivitas ini harus diletakkan pada pembangunan terpadu sektor pedesaan, perluasan kesempatan kerja nonpertanian, akses kredit yang lebih baik, pelatihan pertanian yang lebih baik, reorientasi investasi social terhadap kawasan pedesaan, peningkatan infrastruktur pedesaan, serta penanggulangan kelemahan faktor kelembagaan pedesaan yang menimbulkan dampak membesarnya biaya penundaan migrasi (Guan *et al.*, 2018).

Kedua, pengadaan lapangan kerja perkotaan bukanlah solusi yang memadai untuk mengatasi masalah pengangguran di perkotaan. Solusi ekonomi tradisional (Keynesian) terhadap masalah pengangguran di perkotaan tanpa upaya serentak untuk meningkatkan pendapatan dan kesempatan kerja di pedesaan dapat menimbulkan situasi paradoks ketika meningkatnya lapangan kerja justru menyebabkan semakin tingginya tingkat pengangguran di perkotaan. Setiap selisih positif antara upah perkotaan dan upah pedesaan akan memperbesar selisih yang diharapkan dan mendorong tingkat migrasi desa-kota yang semakin tinggi. Oleh sebab itu, kebijakan yang dirancang untuk mengurangi pengangguran di perkotaan, tetapi juga menyebabkan semakin rendahnya tingkat output pertanian karena migrasi dorongan (Todaro & Smith, 2013). Sebagai salah satu solusi, yaitu memperluas industry skala kecil padat karya. Komposisi atau produk mix output memiliki akibat yang jelas terhadap besaran dari kesempatan kerja karena beberapa produk mengharuskan lebih banyak tenaga kerja per satuan output dan persatuan modal ketimbang produk lainnya. Perluasan industry yang kebanyakan berskala kecil dan padat karya ini di kawasan pedesaan dan perkotaan dapat dilakukan melalui dua cara. Pertama, secara langsung melalui investasi dan insentif pemerintah serta meningkatkan akses perolehan kredit, terutama untuk aktivitas dalam sektor informal perkotaan, dan kedua, secara tidak langsung, melalui redistribusi pendapatan ke kaum miskin pedesaan yang struktur permintaan konsumennya tidak banyak bergantung pada produk impor dan lebih padat karya dibandingkan

dengan mereka yang kaya (Busso *et al.*, 2021). Dalam kondisi yang tepat, industry itu dapat beraglomerasi sebagai distrik-distrik industry dengan cara-cara yang dapat menghasilkan produk ekspor.

Ketiga, perluasan pendidikan yang dilakukan secara serampangan akan mendorong lebih banyak orang yang bermigrasi dan membengkaknya pengangguran. Model Todaro juga mengandung implikasi kebijakan penting untuk membatasi investasi public dalam pendidikan tinggi. Banjirnya migran dari kawasan pedesaan ke kawasan perkotaan melebihi jumlah kesempatan kerja baru menyebabkan proses seleksi penerimaan karyawan baru akan semakin ketat. Setiap upah perkotaan tertentu, jika probabilitas keberhasilan memperoleh pekerjaan di sektor modern lebih besar bagi orang-orang yang berpendidikan tinggi, selisih pendapatan yang diharapkan juga akan lebih tinggi dan kemungkinan besar mereka akan bermigrasi ke kota. Oleh karena itu, model dasar Todaro memberikan penjelasan ekonomi bagi fakta yang terjadi di hampir semua negara berkembang, yaitu orang-orang desa yang berpendidikan tinggi lebih mungkin untuk bermigrasi ketimbang orang yang kurang berpendidikan. Adanya gejala pengangguran terdidik menimbulkan pertanyaan mengenai perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, khususnya di tingkat pendidikan tinggi. Pendidikan formal telah menjadi sarana untuk menyeleksi calon pegawai (Todaro & Smith, 2013). Salah satu cara untuk mengurangi permintaan yang berlebihan terhadap pendidikan yang lebih tinggi (yang dalam realitasnya adalah permintaan untuk mendapatkan pekerjaan-pekerjaan di sektor modern) adalah dengan mendorong kalangan pemerintah, yang sering kali menjadi pemberi kerja terbesar untuk menggunakan kriteria lain dalam praktik perekrutan pegawai dan struktur gaji mereka. Selain itu, penciptaan kesempatan ekonomi yang menarik di kawasan pedesaan akan mempermudah upaya mengarahkan kembali sistem pendudukan pada kebutuhan pembangunan pedesaan, dimana sampai sekarang sebagian besar keterampilan yang dibutuhkan untuk pembangunan di pedesaan masih terabaikan.

Keempat, subsidi upah dan penetapan harga tradisional atas faktor yang langka boleh jadi akan kontraproduktif. Apabila kita memperhitungkan sektor perkotaan dan sektor pedesaan, dampak kebijakan subsidi upah terhadap kesejahteraan menyeluruh tidak langsung tampak jelas. Sebagian besar dampak bergantung

pada ingkat pengangguran di perkotaan, besarnya selisih pendapatan yang diharapkan antara perkotaan dan pedesaan, dan dorongan migrasi ketika semakin banyak pekerjaan yang tersedia di perkotaan (Todaro & Smith, 2013). Menghilangkan distorsi harga yang terwujud berupa subsidi upah, terutama dengan menghilangkan berbagai subsidi modal dan membatasi pertumbuhan upah perkotaan melalui penetapan harga berbasis pasar akan meningkatkan kesempatan kerja dan penggunaan sumber daya modal yang langka secara lebih baik. Akan tetapi, masih belum jelas seberapa besar atau cepatnya hasil dari kebijakan ini. Selain itu, implikasinya terhadap migrasi harus dapat dipastikan. Kebijakan penetapan harga yang tepat saja tidak akan memadai untuk mengubah secara mendasar situasi lapangan kerja saat ini (Bhagat, 2020).

Kelima, menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk merupakan upaya paling efisien dicapai melalui pengurangan kemiskinan absolut dan ketimpangan, terutama bagi perempuan, sejalan dengan perluasan penyediaan layanan keluarga berencana dan kesehatan pedesaan. Jumlah tenaga kerja dalam beberapa tahun kedepan sudah ditentukan oleh tingkat kelahiran saat ini, dan momentum tersembunyi pertumbuhan penduduk juga berdampak pada pertumbuhan angkatan kerja. Adanya kebijakan kependudukan dan pengurangan dari sisi penawaran tenaga kerja merupakan unsur penting dalam setiap strategi untuk menanggulangi masalah besar dalam penyediaan lapangan kerja. Kebijakan ini pernah dilaksanakan oleh pemerintah China pada tahun 2014-2020 membuat tingkat kesenjangan di penduduk perkotaan dan pedesaan berkurang (Wang *et al.*, 2015). Selain itu penting untuk dilakukannya pembangunan masyarakat desa yang meliputi dua unsur, yaitu ikut sertanya penduduk sendiri dalam usaha untuk memperbaiki tingkat hidupnya dengan inisiatif mereka sendiri dibarengi dengan bantuan-bantuan teknik serta lain-lain bantuan sedemikian rupa sehingga memajukan inisiatif mereka untuk berusaha sendiri dan saling membantu (Irawan & Suparmoko, 2002). Hal serupa juga pernah dilakukan di negara India pada tahun 1946, Amerika Latin seperti Equador, Bolivia, dan Haiti. Pada pokoknya pembangunan masyarakat ditujukan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat agar meninggalkan ekonomi primitif yang subsisten.

Keenam, program-program pembangunan pedesaan terpadu harus didorong. Semua kebijakan yang hanya berfokus pada sisi permintaan

situasi pengangguran perkotaan, seperti subsidi upah, perekrutan pegawai untuk berkerja disektor pemerintahan, peniadaan distorsi harga faktor, dan insentif keringanan pajak, mungkin jauh lebih tidak efektif dalam jangka panjang untuk menanggulangi masalah pengangguran, dibandingkan dengan kebijakan yang secara langsung dirancang mengatur penawaran tenaga kerja ke kawasan perkotaan. Meskipun demikian, tampak jelas bahwa yang paling menguntungkan adalah kombinasi kedua jenis kebijakan tersebut (Todaro & Smith, 2013).

Kebijakan-kebijakan diatas pada dasarnya dilakukan untuk pengendalian pertumbuhan kota yang menghasilkan dampak negatif bagi kota itu sendiri. Cara-cara tersebut dilakukan untuk mengurangi penduduk migrasi dari kota ke desa, kesenjangan kesejahteraan antara penduduk desa dan kota, yang pada dasarnya memperbaiki kualitas hidup penduduk di perkotaan dalam mencapai pembangunan urbanisasi yang berkelanjutan dan ekonomi rendah karbon (G. Zhang *et al.*, 2018). Dan untuk mencapainya pemerintah harus merumuskan dan menerapkan kebijakan-kebijakan pembangunan, serta rangsangan ekonomi yang selama ini mendorong terjadinya migrasi dari desa ke kota.

Kota-kota diperlukan agar memungkinkan adanya ekonomi aglomerasi yang memadai, begitu juga dengan skala ekonomi, untuk memproduksi dan terjadinya pertukaran banyak barang dan jasa yang diperlukan di kawasan pedesaan. Pada gilirannya, ketika pendapatan di pedesaan tumbuh, pasar untuk produk manufaktur perkotaan pun akan meluas (Liao *et al.*, 2020). Orang-orang datang dari tempat tinggal mereka di desa untuk bekerja di kota-kota secara harian atau mingguan. Penghuni kota secara kontemporer bermigrasi ke wilayah pertanian di sekitar kota mereka selama puncak musim-musim tanam dan panen. Dengan demikian, keterkaitan antara desa dan kota menjadi ekstensif. Jika investasi di kawasan perkotaan dapat meningkatkan (Sancar & Akbas, 2022).

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Hijrah Sebagai Historisitas Urban Dan Rural Migran: Sebuah Studi Pendahuluan

Istilah hijrah umumnya dipakai dalam pendefinisian meninggalkan suatu negeri yang tidak aman menuju negeri lain yang menjanjikan

keselamatan dan kenyamanan, khususnya dalam menjalankan ajaran agama. meskipun secara fisik peristiwa hijrah dikaitkan dengan aktivitas Nabi SAW dan para sahabat, bagi umat Islam masa kini tetap terbuka kesempatan melakukan hijrah. Dalam konteks ini hijrah bermakna melakukan upaya-upaya transformasi dan rekontruksi diri dan masyarakat menuju kualitas yang lebih beradab (Wahyu Alfian, 2023). Dalam realitas sejarah hijrah senantiasa dikaitkan dengan meninggalkan suatu tempat, yaitu adanya peristiwa hijrah nabi dan para sahabat meninggalkan tempat yang tidak kondusif untuk berdakwah. Bahkan peristiwa hijrah itulah yang dijadikan dasar utama Islam sebagai permulaan tahun Hijriyyah (Priyanto, 2022). Fenomena hijrah banyak dimaknai sempit oleh segelintir umat muslim masa kini. Hijrah sejatinya meliputi aspek yang cukup luas mengenai perubahan diri dan jiwa, dari arah yang kurang baik menjadi lebih baik dengan tujuan hanya kepada Allah SWT. Secara makna, kata hijrah merupakan lawan kata dari *al-washal* (sampai/tersambung). Kata hijrah merupakan bahasa yang asal katanya *hajarahu-yahjuru-hi-jran-hi-jranan* (Kuncoro, 1997). Bentuk isim atau kata benda dari kata ini adalah *al-hijrah*. Dalam buku hijrah dalam pandangan Al-Quran karya Ahzami Saimun Jazuli disebutkan, makna hijrah secara *syar'i* ialah memiliki ragam aspek yang cukup luas jika ditinjau dari berbagai definisi. Para ulama umumnya memiliki pendapat yang berbeda mengenai makna hijrah ini (Ulum, 2016).

Pendapat *pertama*, hijrah diartikan sebagai perpindahan dari negeri kaum kafir atau kondisi peperangan (*daarul kufri wal-harbi*) ke negeri Muslim (*daarul Islam*). pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Arabi, Ibnu Hajar al-Aswani, dan Ibnu Taimiyah. Adapun yang dimaksud dengan negeri kaum kafir menurut mereka adalah negeri yang dikuasai atau pemerintahannya dijalankan oleh orang-orang kafir dan hukum yang dilaksanakan oleh mereka. Adapun Ibnu Taimiyah berpendapat, sebuah negeri yang dikategorikan sebagai *daarul kufri*, *daarul uman*, atau *daarul fasik*, bukan karena hakikat yang ada pada negeri itu, melainkan karena sifat dari para penduduknya.

Pendapat *kedua*, Hijrah berdasarkan makna *syar'i* ialah perpindahan dari negara orang zalim (*daarul zulmi*) ke negeri orang-orang adil (*daarul adli*) dengan maksud untuk menyelamatkan agama, *Daarul Adli* dapat diartikan suatu negeri yang dipimpin oleh kafir akan tetapi ia memberi

toleransi yang tertinggi. Kelompok ini menekankan bahwa *hijrah* dan tuntutananya ditujukan bagi mereka yang betul-betul berada dibawah tekanan sistem non-Islam (Mudhiyah, 2015). Hal ini sebagaimana yang dicontohkan Rasulullah ketika memerintahkan kaum muslimin untuk berhijrah ke Habasyah dengan pertimbangan bahwa di sana ada seseorang raja yang tidak pernah menzalimi seorang pun (Nurhasanah, 2023).

Pendapat *ketiga*, Ibnu Arabi menyetujui pendapat pertama sebagaimana yang disebutkan di atas. Akan tetapi beliau lebih condong kepada makna yang lebih luas mengenai hijrah yang terdiri dari berbagai aspek. *Pertama*, meninggalkan negeri yang diperangi menuju negeri Islam. *kedua*, meninggalkan negeri yang dihuni oleh para ahli *bid'ah*. *Ketiga*, meninggalkan negeri yang dipenuhi oleh hal-hal yang haram sementara mencari suatu yang halal merupakan kewajiban setiap muslim. *Keempat*, melarikan diri demi keselamatan jiwa (Hadi, 2019). *Kelima*, khawatir terkena penyakit di negeri yang sedang terdampak wabah, maka ia pergi meninggalkan negeri itu menuju yang sehat tanpa wabah dan, *keenam*, melarikan diri demi keselamatan harta (Aini, 2019).

Hijrah juga telah mengantarkan pada terwujudnya negara madani yang sangat modern, bahkan dalam konteks masyarakat ketika saat itu. demikian pendapat oleh Robert N Bellah seorang ahli sosiologi agama terkemuka dalam bukunya (Beyond Belief (1976, h 150). Ismail Faruqi menyebut *Hijrah* sebagai langkah awal dan paling menentukan untuk menata masyarakat muslim yang berperadaban. Jadi, *hijrah* bukanlah pelarian untuk mencari suaka politik atau aksi peretasan keprihatinan karena kegagalan mengembangkan Islam di Mekkah, melainkan sebuah praktis reformasi yang penuh strategi dan taktik jitu yang terencana dan sistematis. Tegasnya substansi hijrah merupakan strategi besar (*grand strategy*) dalam membangun peradaban Islam. oleh sebab itu tepat kiranya apa yang disampaikan oleh Huston Smith didalam bukunya *The Religion Man* bahwa hijrah merupakan titik balik dari sejarah dunia. Berdasarkan pada kenyataan itulah sayyidina Umar Bin Khattab menetapkan sebagai awal tahun Hijriyah. Dalam konteks ini menuturkan: “*al hijrah faraqt bainal haq wal bathil*” (Hijrah telah memisahkan antara *haq* dan yang *bathil*).

J.H. Kramers dalam *Shorter Encyclopedia of Islam* menobatkannya sebagai pembangunan imperium Arab yang paling handal dan cerdas.

Maka sangat relevan ungkapa Prof Dr Fazlur Rohman yang menyebut Hijrah sebagai *Marks of the Fouding of Islamic Community*. Dalam catatan Nurcholis Madjid (1993), peristiwa hijrah di samping bersifat metafisis sebagai perintah tuhan juga merupakan lambing peristiwa kesejarahan karena dampaknya yang demikian besar dan dahsyat pada perubahan sejarah seluruh umat manusia. kalau sebuah buku yang membahas tokoh-tokoh umat manusia sepanjang sejar menempatan Nabi Muhammad SAW sebagai yang terbesar dan paling berpengaruh daripada sekalian tokoh, bukti dan alasan penilaian dan pilihan itu antara lain didasarkan kepada dampak kehadiran nabi dan agama Islam, yang momentum kemenangannya terjadi karena peristiwa hijrah (Murtadho, 2013). Hijrah menjadi *Turning Point* (titik balik) untuk membentuk masyarakat yang berperadaban. Upacara hijrah sebagai tahun Islam diperingati untuk menginjeksikan ingatan-ingatan tentang nilai kejuangan. Tentang etos dalam fragmen sejarah kenabian yang telah mencapai puncak keadaban itu (Suardi, 2021a).

Kondisi masyarakat Madinah yang penuh dengan permusuhan dan kebencian antar suku, serta perasaan superioritas kelompok tertentu terhadap kelompok lainnya, menjadi tantangan awal yang dihadapi Nabi setelah berhijrah (Karim, 2004). Untuk menghaapi kondisi tersebut, Rasulullah memiliki strategi yang sederhana namun mencakup secara keseluruhan, yaitu mempersaudarkan satu orang dengan orang lain tanpa memperdulikan asal usul mereka. Kemudian Nabi SAW melakukan upaya perbaikan akhlak pengikutnya, yang pada saat itu masih mewarisi mental jahiliyah, sebagai upaya untuk melakukan proses transformasi sosial di tengah komunitas masyarakat Madinah (Amalia, 1996). Beliau menekankan pada setiap sahabat untuk berlaku sopan terhadap siapa saja, saling menghormati, bekerja keras untuk mencukupi kebutuhannya dan bukan dengan meminta-minta, serta keharusan membantu tetangga yang membutuhkan tanpa memandang agama dan suku. Penguatan akhlak dan moralitas para sahabat ternyata menjadi sarana yang efektif di dalam mengakselerasi proses transformasi sosial pada tataran individual, sehingga perlahan pasti, peradaban Madinah pun mulai tumbuh dan berkembang (Deliarnov, 2003).

Pada tataran masyarakat, perubahan dilakukan melalui proses *islah* (perbaikan) terhadap berbagai suku yang ada. Rasul SAW menekankan

perlunya toleransi terhadap penganut agama lain, kebebasan untuk beribadah, perlindungan terhadap tempat-tempat ibadah dan perlakuan yang sama di depan hukum (Hidayat, 2009). Pada tingkatan ini, yang dilakukan oleh rasul adalah bagaimana membangun sebuah sistem di Madinah, sebagai upaya pelembagaan masyarakat dalam sebuah institusi yang lebih formal, yaitu negara. Syekh Ibnu Abbad menjelaskan bahwa hijrah yang dimaksudkan ialah tuntutan secara eksplisit terhadap manusia yang membukakan hati semata-mata untuk Allah dan larangan secara implisit untuk memberikan hati untuk segala hal duniawi (Amalia, 1996).

Ikatan Persaudaraan: Sebagai Modal Sosial Pembangunan Urban Dan Rural-Migran

Di madinah Nabi SAW mulai menata kehidupan umat yang diikat melalui *ukhuwah* dan tali persaudaraan. menarik dicatat Nabi SAW buka hanya memperkenalkan *ukhuwah Islamiyah* melainkan *ukhuwah wathaniyah* dan *ukhuwah basyariyah* (Karim, 2002). Melalui ikatan persaudaraan kemanusiaan. Nabi mengajarkan umat untuk menghayati keragaman dan diferensiasi antara mereka sebagai sebuah rahmat tuhan, bukan suatu ancaman apalagi bencana. Setidaknya terdapat tiga peristiwa penting dalam mentransformasikan dalam konteks kekinian (Mudhiiah, 2015).

Pertama, Makna Hijrah adalah transformasi keumatan. Bahwa nilai penting atau misi utama hijrah Rasulullah beserta kaum muslimin adalah untuk penyelamatan nasib kemanusiaan (Masruroh *et al.*, 2018). Betapa serangkaian peristiwa hijrah, selalui didahului oleh fenomena penindasan dan kekejaman oleh orang-orang kaya atau penguasa terhadap rakyat kecil. pada spektrum ini, orientasi keumatan mengadakan suatu transformasi ekonomi dan politik. kebijaksanaan hijrah, sebagai sunnatullah dan sunnatur rasul, di mana masyarakat mengalami ketertindasan adalah suatu kewajiban (Prof.Dr.Veithzal R., S.E. & Nizar Usman, S.E, 2012).

Kedua, Makna hijrah adalah transformasi kebudayaan. Hijrah dalam konteks ini telah mengentaskan masyarakat kebudayaan jahuli menuju kebudayaan Islami. Jika sebelum hijrah, kebebasan masyarakat dipasung oleh struktur budaya feodal, otoritarian dan sekstruktif-permissistik, maka setelah hijrah hak-hak asasi mereka dijamin secara perundang-undangan (syariah) (Sanrego Nz, 2014). Nilai trasnformatif

kebudayaan berasal dari ajaran hijrah Rasulullah, dengan demikian pada dasarnya ditujukan untuk mengembalikan keutuhan moral dan martabat kemanusiaan secara universal (*rahamatan li-alamin*). Ketiga, Makna Hijrah adalah transformasi keagamaan. Transformasi inilah yang dalam konteks hijrah, dapat dikatakan sebagai pilar utama keberhasilan dakwah Rasulullah (Qorib *et al.*, 2016).

Berlandaskan sejarah hijrah, menurut ulama syafi'i Al-Mawardi, setelah terjadi penaklukan Mekah oleh Nabi Muhammad dan teman-temannya, Hijrah menjadi kewajiban bagi orang-orang muslim yang tidak dapat menjalankan agama mereka. persepsi ini menyatakan pada zaman Nabi, pelaksanaan perintah dan tugas agama adalah tujuan utama hijrah. Peristiwa hijrah terlihat dari bagaimana Rasulullah saw. Membangun sosikultural Islami di Madinah dengan Melaksanakan *Muakhat* (mempersaudarakan) antara muhajirin dan kaum ansar.

Hijrah, Urban: Spirit Reformasi Ekonomi

Banyak upaya yang dilakukan Nabi Muhammad Saw dalam melakukan reformasi ekonomi, baik di bidang moneter, fiskal, mekanisme pasar (harga), peranan negara dalam menciptakan pasar yang adil (*hisbah*), membangun etos *entrepreneurship*, penegakan etika bisnis, pemberantasan kemiskinan, pencatatan transaksi (akuntansi), pendirian *Baitul Mal*, dan sebagainya (Ridwan *et al.*, 2023). Beliau juga mereformasi akad-akad bisnis dan berbagi praktik bisnis yang *fasid* (rusak), seperti *gharar*, *ihtikar*, *talaqqi rukban*, *ba'i najasy*, *ba'i al-'inah*, *bai' munabazah*, *mulamasah* dan berbagai bentuk bisnis *maysir* atau spekulasi lainnya dsb. Dari berbagai reformasi yang dilakukan Nabi Muhammad saw, praktik riba mendapat sorotan dan tekanan cukup tajam, banyak ayat dan hadist yang mengecam riba dan menyebutnya sebagai perbuatan terkutuk dan dosa besar yang membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Paradigma pemikiran masyarakat yang telah terbiasa dengan sistem riba akan menumbuhkan perekonomian, tetapi justru merusak ekonomi (Mulawarman, 2019).

Selanjutnya Nabi Muhammaad juga mengajarkan konsep transaksi valas (*sharf*) yang sesuai syariah, pertukaran secara *forward* atau tidak spot (kontan) dilarang, karena sangat rawan kepada praktik riba *fadhl*. Kemudian, untuk melahirkan kekuatan ekonomi umat di Madinah. Nabi melakukan sinergi dan integrasi potensi ummat Islam. beliau integrasikan

suku Aus dan Khazraj serta muhajirin dan Anshar dalam bingkai *ukhuwah* yang kokoh membangun kekuatan ekonomi umat (Maleha, 2016). Kerjasama ekonomi tersebut membuahkan hasil gemilang dalam peningkatan kesejahteraan ekonomi umat. Akhirnya banyak kaum muslimin yang membayar zakat, berwaqaf dan berinfaq untuk kemajuan Islam. Kebijakan ekonomi Nabi Muhammad saw di Madinah juga terlihat dari upaya Nabi saw membangun pasar yang dikuasai umat Islam. (sebelumnya pasar-pasar dominan dikuasai kaum Yahudi) (Ridwan *et al.*, 2023), sehingga konsumen muslim dapat berbelanja kepada pedagang muslim. dampaknya, semakin tumbuhlah perekonomian kaum muslimin mengimbangi dominasi pedagang Yahudi.

Spirit reformasi yang dipraktikkan Nabi Muhammad saw bersama para sahabatnya dalam berhijrah, harus kita tangkap dan aktualisasikan dalam konteks kekinian, suatu konteks zaman yang penuh ketidakadilan ekonomi, rawan krisis moneter, kemiskinan dan pengangguran yang masih menggurita di bawah sistem dan dominasi ekonomi kapitalisme (Susanto, 2022). Ibnu Khaldun mengatakan bahwa kemajuan ekonomi merupakan pilar kemajuan *tamaddun* (peradaban) Islam. jika ekonomi lemah (pangsa pasarnya hanya 1,8%), kebangkitan umat sulit terwujud. Dengan demikian, dapat disimpulkan mereka yang menghambat dan tidak mendukung gerakan ekonomi Islam, dan masih berkuat dalam sistem ekonomi *ribawi*, berarti mereka penghambat kebangkitan Islam (Maleha, 2016).

Hijrah, Urban Dan Pembangunan Ekonomi

Yang menjadi menarik lainnya adalah Rasulullah melakukan transformasi ekonomi dengan menjadikan masjid dan pasar sebagai sentral pembangunan negara. Rasul menyadari bahwa kegiatan ekonomi merupakan bagian yang tidak boleh diabaikan. Setelah mendirikan masjid, fokus perhatian Rasul pun ditujukan kepada pasar. Mengetahui bahwa pasar di Madinah dikuasi oleh orang-orang yahudi, dan mereka berusaha untuk menciptakan *barrier* terhadap masuknya pedagang muslim, maka Rasulullah pun merespon dengan segera membangun pasar baru (Nopiardo, 2016). Maka terjaadilah proses transisi penguasaan aset-aset ekonomi dari kaum yahudi kepada kaum muslimin, meski demikian, pasar kaum muslimin ini terbuka bagi siapa saja. Akan tetapi, keadilan, kebebasan dan akses pasar

sangat dijamin oleh Rasulullah dan juga memberikan kesempatan bagi siapa saja untuk berdagang, dengan menyediakan tempat (pasar) sebagai media bertransaksi melalui sistem bagi hasil (Suardi, 2021).

Historisitas dari nilai perdagangan yang dilakukan oleh masyarakat Arab juga cukup besar. misal sebuah kafilah perdagangan membutuhkan rata-rata 2 ribu ekor unta sebagai alat transportasi untuk mengangkut barang senilai lebih dari 50 ribu dinar (Suardi, 2021). Selanjutnya diantara para sahabat muncullah sinergi dalam bentuk *mudarah* dan *musyarakah*. Filosofi ekonomi syariah adalah sebuah sistem ekonomi yang dibangun atas nilai-nilai Islam, dengan prinsip tauhid yaitu nilai-nilai *ilahiyah* menjadi 'inti' dari sistem ini. ekonomi bukanlah sebuah entitas yang berdiri sendiri, melainkan dari sebuah bagian kecil dari bingkai ibadah kepada Allah swt

Oleh sebab itu pengadopsian pada nilai moralitas Islam dalam sistem ekonomi Islam adalah syarat mutlak dalam membangun sistem ekonomi yang kuat dan berkah. Perlu disadari atau tidak bahwa salah satu prinsip utama berjalannya sistem ekonomi syariah pada tata operasional adalah prinsip keadilan ('*al-advl*). diharamkannya riba juga merupakan bingkai dari keadilan. Kebijakan rasul untuk membuka pasar baru juga dalam konteks keadilan. Jika mekanisme pasar berjalan dalam bingkai keadilan, maka intervensi pemerintah tidak diperlukan. Hal ini dapat dilihat ketika Rasulullah menolak permintaan sahabat, sebagaimana diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra, untuk menurunkan harga pada saat harga bergerak naik (Jayanti, 2021). Intervensi malah justru menciptakan ketidakadilan. Tetapi sebaliknya, jika terjadi kolusi antara oknum penguasa dan kalangan dunia bisnis, maka akan terjadi ketidakseimbangan pasar yang akan menyebabkan kehancuran perekonomian. Untuk itu, intervensi negara menjadi sebuah kebutuhan. Jadi, tindakan pemerintah atau negara dalam mengintervensi perekonomian harus dilakukan dengan kacamatan keadilan (Maleha, 2016).

Sistem ekonomi syariah juga menjamin keselarasan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan distribusi. Selama ini kita melihat seolah-olah ada *trade-off* antara pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan. Tingginya pertumbuhan tidak otomatis menjamin adilnya distribusi pendapatan. Bahkan sebaliknya, keduanya seringkali bertolak belakang (Karim, 2002). Islam disatu sisi mendorong pengikutnya untuk

mencari rezeki dan karunia Allah hingga ke berbagai penjuru bumi. Tetapi di sisi lain, ia pun mengingatkan pengikutnya untuk memiliki kepedulian terhadap sesama manusia. bentuk kepedulian tersebut antara lain melalui mekanisme zakat, infak dan shadaqah yang berfungsi sebagai penjamin keadilan distribusi pendapatan dan kekayaan.

Sejumlah ayat Al-Quran secara tegas memotivasi orang-orang beriman agar berjuang dan berusaha meningkatkan kualitas hidup, kalau perlu berpindah lokasi mencari tempat kehidupan yang lebih baik, lebih kondusif, jangan terpaku hanya pada suatu tempat perspektif ini mengesankan Islam sangat mengapresiasi perkembangan global ditandai tingginya dinamika dan mobilitas penduduk. Islam menghendaki umat yang dinamis dan *progress*, bukan umat yang terbelakang dan terkungkung, apalagi statis, apatis, pasif dan pasrah menerima nasib.

Pesan penting *hijrah* adalah umat Islam harus berani dan mampu melakukan transformasi diri ke arah yang lebih positif dan konstruktif sehingga menjadi umat yang *rahmatan lil alamin* (Sagaf, 2020). Umat yang selalu membawa manfaat bagi semua makhluk di alam semesta, bukan membawa bencana dan berbagai kondisi destruktif. Hijrah ke Madinah merupakan momentum perubahan dan pembebasan umat Islam dari semua belenggu diskriminasi dan kezaliman. Hijrah Rasul ke Madinah bersama sahabatnya membawa perubahan signifikan dalam sejarah Islam (Priyanto, 2022). Ketika di Mekah umat Islam teraniaya, tertindas, diboikot, berada di bawah kuasa politik kaum musyrik Quraisy. Sebaliknya, di Madinah umat Islam menjadi pemegang kendali politik kekuasaan. Nabi SAW diangkat menjadi kepala negara dengan masyarakat yang heterogen.

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi di Eropa Barat dan Amerika Serikat sangat dipengaruhi oleh migrasi tenaga kerja dari desa ke kota, di mana sektor pedesaan berfokus pada pertanian dan sektor perkotaan pada industrialisasi. Urbanisasi dan industrialisasi berlangsung seiring, menjadi model bagi negara berkembang. Namun, model dua sektor ini, seperti teori Lewis tentang transfer tenaga kerja, terbukti kurang akurat karena meningkatnya pengangguran di perkotaan meskipun ada migrasi besar-besaran. Teori Todaro menawarkan penjelasan alternatif,

menyatakan bahwa migrasi didasarkan pada perbandingan pendapatan yang diharapkan antara kota dan desa, bukan hanya perbedaan upah aktual. Untuk mengatasi masalah migrasi dan pengangguran, kebijakan yang diusulkan meliputi pengurangan ketimpangan kesempatan kerja, perluasan industri padat karya, penyesuaian pendidikan dengan kebutuhan pedesaan, penghapusan subsidi upah kontraproduktif, pengendalian pertumbuhan penduduk, dan program pembangunan pedesaan terpadu. Kebijakan ini bertujuan mengurangi tekanan migrasi, memperbaiki kualitas hidup, serta mencapai pembangunan berkelanjutan dan ekonomi rendah karbon.

Hijrah, dalam konteks historisitas urban dan rural, merujuk pada perpindahan dari tempat yang tidak aman menuju tempat yang lebih menjanjikan keselamatan dan kenyamanan, terutama dalam menjalankan ajaran agama. Selain mengacu pada peristiwa fisik Nabi Muhammad SAW dan para sahabat, hijrah juga mencakup upaya transformasi diri dan masyarakat menuju kualitas yang lebih baik. Terdapat dua jenis hijrah: hijrah makiyah (fisik) dan hijrah maknawiyah (spiritual), yang melibatkan perubahan diri dari yang buruk menjadi lebih baik demi keridhaan Allah SWT. Dalam sejarah Islam, hijrah menandai awal tahun Hijriyah dan merupakan titik balik penting dalam pembangunan peradaban Islam. Para ulama memandang hijrah sebagai perpindahan dari negeri kafir ke negeri Muslim, dari negeri zalim ke negeri adil, atau melarikan diri dari keadaan berbahaya demi keselamatan. Hijrah juga diartikan sebagai proses spiritual meninggalkan syahwat, akhlak buruk, dan dosa menuju kebaikan dan kesadaran kemanusiaan.

Rasulullah SAW mengajarkan pentingnya persaudaraan (*ukhuwah Islamiyah*, *wathaniyah*, dan *basyariyah*) di Madinah, yang menjadi fondasi transformasi sosial, ekonomi, politik, budaya, dan agama. Hijrah tidak hanya melibatkan perpindahan fisik, tetapi juga perubahan mental dan spiritual menuju kesadaran baru dan martabat kemanusiaan. Transformasi ini mencakup penyelamatan dari penindasan, transisi dari budaya jahiliyah ke budaya Islami, dan promosi kerukunan antaragama. Nabi Muhammad SAW memimpin reformasi ekonomi di Madinah, memperbaiki sistem moneter, fiskal, dan pasar, serta membangun etos kewirausahaan dan etika bisnis yang berlandaskan nilai-nilai Islam. Beliau menghapus praktik riba dan mengajarkan transaksi sesuai syariah. Integrasi antara suku Aus dan

Khazraj serta Muhajirin dan Anshar menciptakan sinergi ekonomi yang meningkatkan kesejahteraan umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, A. K. (2004). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Abdul Karim, A. H. (2020). Islam and Urbanisation Economics: The Khaldūnian Perspective. *Journal of Business and Economic Analysis*, 03(03), 309–326. <https://doi.org/10.36924/sbe.2020.3305>
- Adiwarman Karim. (2007). *Ekonomi Makro Islam*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Aini, I. (2019). Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 17(2), 43–50. <https://doi.org/10.32694/010760>
- Amalia, E. (1996). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Pustaka Asatrus.
- Armanto, N. (2020). Prinsip Dan Landasan Hukum Ekonomi Islam. *Iqtishodiyah*, 6(1), 63–79.
- Bhagat, R. B. (2020). *Migration Theories : A Critical Evaluation and Synthesis*. October, 1–17. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.14713.90722>
- Budiman, H. (2019). Istanbul, The Development of Islamic City Thinking. *MATEC Web of Conferences*, 280, 02005. <https://doi.org/10.1051/mateconf/201928002005>
- Busso, M., Chauvin, J. P., & Herrera L., N. (2021). Rural-urban migration at high urbanization levels. *Regional Science and Urban Economics*, 91(March 2020). <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2021.103658>
- Chapra, M. U. (2001). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*, terj. Ikhwan Abidin, *Masa Depan Ilmu Ekonomi: Sebuah Tinjauan Islam*. Gema Insani Press.
- Chapra, M. U. (2008). Ibn Khaldun's theory of development: Does it help explain the low performance of the present-day Muslim world? *Journal of Socio-Economics*, 37(2), 836–863. <https://doi.org/10.1016/j.socrec.2006.12.051>
- Chapra, U. (2006). Global Economic Challenges and Islam. *Pluto Journals*, 3(2), 5–24.

- Cohen, B. (2006). Urbanization in developing countries: Current trends, future projections, and key challenges for sustainability. *Technology in Society*, 28(1-2), 63-80. <https://doi.org/10.1016/j.techsoc.2005.10.005>
- Deliarnov. (2003). *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Elkabir, Y. A. (1983). The study of urbanization in the Arab world: a theoretical perspective. *Ekistics*, 50(300), 232-236.
- Engineer, A. A. (1975). Origin and Development of. *Jstor*, 3(9), 22-44.
- Fanni, Z. (2006). Cities and urbanization in Iran after the Islamic revolution. *Cities*, 23(6), 407-411. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2006.08.003>
- Fazlurrahman. (1958). Economic Principles of Islam. *Jstor*, 8(1), 1-8.
- Gharib, R. Y. (2017). Preservation of built heritage: an Islamic perspective (1). *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 7(4), 366-380. <https://doi.org/10.1108/JCHMSD-04-2016-0026>
- Ghofur, R. A. (2016). Peran Instrumen Distribusi Ekonomi Islam Dalam Menciptakan Kesejahteraan Di Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam (Journal of Economics and Business Economics Islam)*, 1(1), 27-39.
- Guan, X., Wei, H., Lu, S., Dai, Q., & Su, H. (2018). Assessment on the urbanization strategy in China: Achievements, challenges and reflections. *Habitat International*, 71(June 2017), 97-109. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2017.11.009>
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- Hadad, L. (1977). A fourteenth-century theory of Economic Growth and Development. *Kyklos*, 30(2), 195-213.
- Hadi, N. (2019). Transaksi Pedagang Asongan Menurut Ekonomi Syariah. *Jurnal Pemikiran KeIslaman*, 30(2), 308-323. <https://doi.org/10.33367/tribakti.v30i2.815>
- Hidayat, M. (2009). *Pengantar Ekonomi Islam*. Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah.
- Irawan & Suparmoko. (2002). *Ekonomi Pembangunan*. BPFE- Yogyakarta.
- Jayanti, D. (2021). Analisis Sejarah Ekonomi Islam Pada Masa

- Rasulullah dan Khulafah Al-Rasyidin. *Al-Bayan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 1, 17.
- Karim, A. A. (2002). *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (ketiga). PT Raja Grafindo Persada.
- Khan, A. (1994). *An Introduction to Islamic Economics* (IIIT). Islamabad.
- Kuncoro, M. (1997). Ekonomi Islam Konsep dan metodologi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Indonesia*, 12(1).
- Liao, P.-J., Wang, P., Wang, Y.-C., & Yip, C. K. (2020). *To Stay or to Migrate?*
- Masruroh, S., Ermawati, E., & Dimiyati, M. (2018). Jurnal Riset Akuntansi Jurnal Riset Akuntansi. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(2), 44-53.
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pellegrino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of International Migration : A Review and Appraisal Published by : Population Council Stable URL: <https://www.jstor.org/stable/2938462> Theories of International Migration : A Review and Appraisal. *Population and Development Review*, 19(3), 431-466.
- Meftah, J. B. T. (2011). The meaning and dialectics of education, teaching, refinement, urbanisation and civilisation: a Khaldounic point of view. *International Journal of Arab Culture, Management and Sustainable Development*, 2(1), 3. <https://doi.org/10.1504/ijacmsd.2011.044892>
- Mohamad, J. bte. (1995). Building Heaven on Earth: Islamic Values in Urban Development1. *Cities of the World*, December 1995, 11-13.
- Mudhiiah, K. (2015). Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Masa Klasik. *Iqthishadia*, 8(2), 189-210.
- Muhammad Nejatullah Siddiqi. (1978). Contemporary Literature on Islamic Economics. In *Leicester: The Islamic Foundation* (Issue 1).
- Mulawarman, A. D. (2019). Masa Depan Ekonomi Islam: Dari Paradigma Menuju Metodologi. *IMANENSI: Jurnal Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi Islam*, 1(1), 1-13. <https://doi.org/10.34202/imanensi.1.1.2013.1-13>
- Murtadho, A. (2013). Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 4(1), 33-50. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>

- Nurhasanah, T. (2023). Mengenal Riba dalam Etika Ekonomi Islam. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 164. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.940>
- Oyvat, C., & wa Githĩnji, M. (2020). Migration in Kenya: beyond Harris-Todaro. *International Review of Applied Economics*, 34(1), 4–35. <https://doi.org/10.1080/02692171.2019.1620702>
- Peng, J., Liu, Y., Wang, Q., Tu, G., & Huang, X. (2021). The impact of new urbanization policy on in situ urbanization—policy test based on difference-in-differences model. *Land*, 10(2), 1–16. <https://doi.org/10.3390/land10020178>
- Priyanto, A. (2022). Interpretasi Hijrah dalam Rebranding Normativasi Islam. *Syariat: Jurnal Studi Al-Quran Dan Hukum*, VIII(2), 9–15. Prof. Dr.Veithzal R., S.E., M. M., & Nizar Usman, S.E, M. E. (2012). *Islamic Economic & finance. Ekonomi dan Keuangan Islam Bukan Alternatif Tapi Solusi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Qorib, A., Harahap, I., Fakultas Ekonomi, M. A., Bisnis, D., Uin, I., & Medan, S. U. (2016). Penerapan Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam. *Analytica Islamica*, 5, 55–80.
- Ritchie, H., Samborska, V., & Rose, M. (2018). *Urbanization. Our World in Data*.
- Sagaf, U. (2020). Hijrah Dan Transformasi Ekonomi. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 3(1), 1–22.
- Shatzmiller, M. (2011). Economic performance and economic growth in the early Islamic world. *Journal of the Economic and Social History of the Orient*, 54(2), 132–184. <https://doi.org/10.1163/156852011X586831>
- Sidani, Y. M. (2008). Ibn Khaldun of North Africa: An AD 1377 theory of leadership. *Journal of Management History*, 14(1), 73–86. <https://doi.org/10.1108/17511340810845499>
- Sinn, A., & Ibrahim, A. (2008). *Manajemen Syariah: Kajian Histories dan Kontemporer*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Sivers, P. . Von. (1980). Back to Nature : The Agrarian Foundations of Society according to Ibn Khaldūn *Brill*, 1(May 2024), 68–91.
- Suardi, D. (2021a). Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam. *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Perbankan Syariah*, 6(2), 321–334. <https://doi.org/10.36908/>

isbank.v6i2.180

- Suardi, D. (2021b). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 20(02), 68–80. <https://doi.org/10.32939/Islamika.v20i02.693>
- Suhaeri, S. (1997). Strategi Hijrah Rasulullah Saw. Dalam Menyebarkan Da'Wah Agama Islam. *Alqalam*, 11(63), 20. <https://doi.org/10.32678/alqalam.v11i63.476>
- Susanto, A. (2022). Entrepreneurial Leadership Nabi Muhammad Saw Dalam Peristiwa Hijrah. *INTELEKSIA - Jurnal Pengembangan Ilmu Dakwah*, 3(2), 335–356. <https://doi.org/10.55372/inteleksiajpid.v3i2.191>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Economic Development. Economic Development 12th edition*.
- Unctad. (2023). *Total and Urban Population*. Handbook of Statistics.
- Wang, X. R., Hui, E. C. M., Choguill, C., & Jia, S. H. (2015). The new urbanization policy in China: Which way forward? *Habitat International*, 47, 279–284. <https://doi.org/10.1016/j.habitatint.2015.02.001>
- Weiss, D. (1995). IBN khaldun on economic transformation. *International Journal of Middle East Studies*, 27(1), 29–37. <https://doi.org/10.1017/S0020743800061560>
- Zhang, G., Zhang, N., & Liao, W. (2018). How do population and land urbanization affect CO2 emissions under gravity center change? A spatial econometric analysis. *Journal of Cleaner Production*, 202, 510–523. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2018.08.146>
- Zhang, W. J. (2008). A forecast analysis on world population and urbanization process. *Environment, Development and Sustainability*, 10(6), 717–730. <https://doi.org/10.1007/s10668-007-9081-8>

MODAL MANUSIA: PENDIDIKAN DAN KESEHATAN DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI

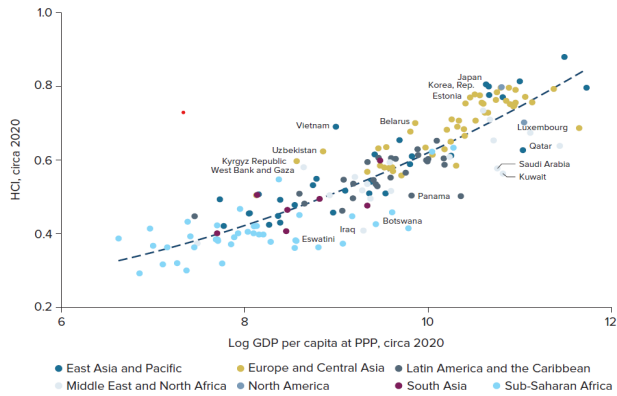
(Ayu Wandirah, Andri Juansya, Iko Penantu Nate, Irdlonia Robba)

PENDAHULUAN

Salah satu indikator yang dijadikan dasar keberhasilan pembangunan ekonomi suatu negara adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan *output* (produk domestik bruto atau total nilai barang dan jasa yang diproduksi) perekonomian suatu negara dari tahun ke tahun berikutnya, semakin tinggi nilai pertumbuhan ekonomi berarti semakin cepat kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa (Soejoto *et al.*, 2022). Pertumbuhan ekonomi suatu negara dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pengembangan modal manusianya (Sairmaly, 2023). Pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan modal manusia. Jika suatu negara mempunyai skor *human Capital Index* (HCI) 0.50, maka produk domestik bruto (PDB) per pekerja bisa dua kali lipat jika negara tersebut mencapai tolak ukur pendidikan lengkap dan kesehatan penuh (World Bank, 2021).

Gambar 1 Indeks Modal Manusia dan PDB per kapita Tahun 2020

Figure 1.1: The Human Capital Index 2020



Sumber: World Bank (2021)

Gambar 1 menunjukkan bahwa indeks modal manusia di negara-negara berpendapatan rendah lebih rendah dibandingkan negara-negara berpendapatan tinggi, hal ini juga menunjukkan hubungan positif antara indeks modal manusia dengan PDB per kapita beberapa negara di dunia tahun 2020 (World Bank, 2021). Menurut data dari *World Bank* tahun 2021 di negara-negara termiskin di dunia, anak yang terlahir saat ini hanya akan bertumbuh sebesar 30 persen seproduktif mungkin, sedangkan di negara-negara terkaya bertumbuh sebesar 80 persen atau lebih. Tabel 1 menunjukkan bahwa dibandingkan dengan anak-anak di Eropa dan Asia Tengah, anak-anak yang terlahir di Afrika Sub-Shara diperkirakan hanya 58 persen yang produktif (World Bank, 2021).

Tabel 1 Rata - Rata Skor Indeks Modal Manusia Tahun 2020
Berdasarkan Wilayah

Indicator	East Asia and Pacific	Europe and Central Asia	Latin America And Caribbean	Middle East and North Africa	North Amerika	South Asia	Sub-Saharan Africa
<i>HCI Component 1: Survival</i>							
<i>Probability of Survival to Age 5</i>	0.98	0.99	0.98	0.98	0.99	0.96	0.93
<i>HCI Component 2: School</i>							
<i>Expected Years of School</i>	11.9	11.3	12.1	11.6	13.3	10.8	8.3
<i>Harmonized Test Scores</i>	432	479	405	407	523	374	374
<i>HCI Component 3: Health</i>							
<i>Survival Rate from Age 15 to 60</i>	0.86	0.90	0.86	0.91	0.91	0.84	0.74
<i>Fraction of Children Under 5 Not Stunted</i>	0.76	0.90	0.85	0.82	-	0.69	0.69
<i>Human Capital Index (HCI) 2020</i>	0.59	0.69	0.56	0.57	0.75	0.48	0.40

Sumber: World Bank (2021)

Lebih lanjut, Tabel 1 juga menampilkan rata-rata skor indeks modal manusia tahun 2020 wilayah yang memiliki indeks modal manusia tertinggi adalah wilayah Amerika Utara sebesar 0.75 dan yang terendah adalah wilayah Sub-Sahara Afrika sebesar 0.40. Artinya wilayah Sub-Sahara Afrika masih memiliki tingkat sumber daya manusia yang rendah

dibandingkan dengan wilayah lain.

Sumber daya manusia memainkan peran penting dalam pertumbuhan dan pembangunan ekonomi suatu negara. Karena buruknya sumber daya manusia dapat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat serta menghambat pencapaian kesejahteraan, maka permasalahan pembangunan manusia menjadi salah hal yang perlu ditangani secara berkelanjutan (Triatmanto & Bawono, 2023). Sumber daya manusia yang berkualitas dan produktif menjadi kunci utama dalam mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan (Sairmaly, 2023). Berinvestasi pada sumber daya manusia akan meningkatkan kohesi dan kesetaraan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi (World Bank, 2021).

Pendidikan dapat secara langsung meningkatkan produktivitas angkatan kerja, sehingga berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi. Pendidikan dan pelatihan yang tepat bagi masyarakat merupakan persyaratan bagi kemakmuran ekonomi dan pembangunan sosial, oleh karena itu pembangunan sumber daya manusia merupakan kunci pembangunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang (Islam, 2020). Penduduk dengan tingkat pendidikan rendah, maka pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya terbatas, karena itu kualitas tenaga kerja pun akan relatif rendah. Ketika tenaga kerja rendah, maka produktivitas yang dihasilkan juga rendah, yang artinya sumbangan pada pendapatan nasional akan rendah pula. Untuk itu, pendidikan memberikan keuntungan secara ekonomi dalam bentuk economic returns pada investasi modal manusia (Mulyani, 2017). Negara-negara yang berinvestasi di bidang pendidikan pelatihan cenderung mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, dan sumber daya manusia menjadi faktor penentu utama (Triatmanto & Bawono, 2023). Hal ini dapat kita lihat pada Gambar 1, di mana negara yang memiliki rata-rata indeks modal manusia lebih tinggi cenderung memiliki pendapatan per kapita yang tinggi pula.

Selain itu, pembangunan ekonomi dan kesehatan menunjukkan hubungan dua arah. Pembangunan pada umumnya memperbaiki sistem kesehatan, sedangkan kesehatan yang lebih baik akan meningkatkan produktivitas, kohesi sosial, dan kesejahteraan ekonomi (Nafziger, 2006). Penduduk yang sehat merupakan persyaratan bagi pembangunan

yang berhasil (Todaro & Smith, 2015). Menurut Nafziger (2006) kesehatan yang buruk berkontribusi tidak hanya pada penderitaan fisik dan mental tetapi juga pada rendahnya produktivitas tenaga kerja. Kesehatan bukan hanya tujuan utama itu sendiri, tetapi juga berdampak signifikan terhadap tingkat pendapatan. Untuk itu, penduduk yang sehat merupakan persyaratan bagi pembangunan yang berhasil (Todaro & Smith, 2015). Investasi pemerintah dibidang kesehatan tidak hanya dapat melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (Shuyong *et al.*, 2024). Menurut Islam (2020) kesehatan yang buruk dan malnutrisi dapat menyebabkan potensi penurunan pendapatan seumur hidup setiap individu sebesar 10 persen dan yang pada akhirnya menyebabkan hilangnya PDB sebesar 2-3 persen setiap tahunnya.

Dalam beberapa penelitian menyebutkan bahwa investasi pemerintah pada bidang pendidikan maupun kesehatan merupakan langkah yang penting untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang merata. Shuyong *et al.* (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa di China peningkatan investasi pada sumber daya manusia di bidang kesehatan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasionalnya. Selain itu, Wijaya *et al.* (2021) dalam penelitian juga menemukan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Romania. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyudi *et al.* (2023) yang menemukan bahwa indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berpendapatan menengah ke bawah di Asia. Islam (2020) dalam penelitiannya yang mengeksplorasi dampak pendidikan dan kesehatan terhadap pertumbuhan ekonomi dan ketahanan pangan di Bangladesh, menemukan bahwa terdapat hubungan positif jangka pendek dan panjang antara belanja pendidikan dan pertumbuhan ekonomi di Bangladesh. Semakin banyak pengeluaran untuk pendidikan, seluruh negara akan mengalami tingkat melek huruf yang lebih tinggi dan perekonomian akan semakin tumbuh.

Meskipun pemerintah sudah menyadari pentingnya berinvestasi pada sumber daya manusia warga negaranya, tetapi proses merancang kebijakan dan membangun institusi yang mendorong akumulasi sumber

saya manusia bisa jadi rumit, dan manfaatnya memerlukan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun untuk terwujudnya. Hal ini terlihat dari rata-rata kemajuan sumber daya manusia relatif rendah dalam satu dekade terakhir (World Bank, 2021).

Mengatasi kesenjangan antara kaya dan miskin dalam sumber daya manusia harus tetap menjadi prioritas bagi pemerintah karena, dalam banyak kasus, keuntungan yang diperoleh dari investasi sumber daya manusia bagi kelompok masyarakat yang kurang beruntung, terutama pada usia dini, adalah yang tertinggi (World Bank, 2021). Studi yang dilakukan oleh *World Bank* (2021) pada empat negara (Ghana, Maroko, Filipina, dan Singapura) menemukan bahwa, di antara negara berpendapatan rendah dan menengah, kebijakan *redistributif* pemerintah rata-rata mampu mengurangi kesenjangan sumber daya manusia dan meningkatkan pendapatan nasional. Pendekatan keseluruhan pemerintah mempunyai potensi yang sangat besar untuk membangun sumber daya manusia dalam berbagai macam pembangunan.

TEORI DAN KEBIJAKAN

Modal Manusia

Schultz (1961) mengatakan bahwa semua kemampuan manusia yang bersifat bawaan atau diperoleh, atribut dan dapat ditingkatkan dengan investasi yang tepat akan menjadi modal manusia. Menurut World Bank (2021) modal manusia terdiri dari pengetahuan, keterampilan, dan kesehatan yang dikumpulkan manusia sepanjang hidup mereka. Modal manusia merupakan kemampuan dan kapasitas manusia yang mencakup semua keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperoleh melalui proses dari waktu ke waktu, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas manajemen kehidupan yang produktif baik sebagai individu, anggota organisasi formal maupun anggota masyarakat (Jajang *et al.*, 2021). Menurut teori modal manusia, manusia menjadi lebih produktif karena adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan (Abdeldayem *et al.*, 2022).

Tujuan investasi pada modal manusia adalah untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya tanggap insentif ekonomi dan meningkatkan kapasitas pengambilan keputusan (Schultz, 1961). Adam Smith dalam bukunya yang berjudul *Wealth of the Nation* tahun 1776

menyatakan bahwa pendidikan dalam unsur manusia meningkatkan peluang kemajuan, mengurangi korupsi dan keterbelakangan, dan selanjutnya dapat meningkatkan pembangunan (Abdeldayem *et al.*, 2022). Jika individu memiliki akses yang baik terhadap pendidikan yang berkualitas, pelatihan keterampilan, dan layanan kesehatan, yang akan mereka dapatkan adalah peluang yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup mereka, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi (Triatmanto & Bawono, 2023). Untuk itu modal manusia merupakan hal yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi di pembangunan manusia (Todaro & Smith, 2015).

Modal manusia memiliki nilai intrinsik yang sangat penting namun sulit untuk diukur, sehingga menjadi sebuah tantangan untuk menggabungkan berbagai komponen sumber daya manusia ke dalam satu (World Bank, 2021). Indeks Modal Manusia atau Human Capital Index (HCI) merupakan ukuran yang dapat digunakan untuk mengukur sumber daya manusia di suatu negara. Indeks ini mencakup 3 komponen utama yakni *survival*, *school*, dan *health* (World Bank, 2021). Dengan persamaan sebagai berikut:

$$\text{Human Capital Indeks} = \text{Survival} \times \text{School} \times \text{Health}$$

- a. *Survival* (keberlangsungan hidup) adalah probabilitas hidup hingga 5 tahun, anak-anak yang tidak dapat bertahan hidup pada masa kanak-kanak tidak akan pernah menjadi orang dewasa yang produktif, akibatnya produktivitas yang diharapkan sebagai pekerja masa depan bagi anak yang lahir saat ini berkurang.

$$\text{Survival} = \frac{1 - \text{Under} - 5 \text{ Mortality Rate}}{1}$$

- b. *School* (sekolah/pendidikan) terdiri dari harapan lama sekolah dan *harmonized test score*. Dengan tolak ukur seorang anak memperoleh pendidikan penuh 14 tahun pada usia 18 tahun, anak yang hanya memperoleh pendidikan 10 tahun diperkirakan akan mengalami penurunan produktivitas sebesar 32% saat dewasa (selisih selama 4 tahun pendidikan dikalikan dengan 8% per tahun).

$$\text{School} = e^{\phi(\text{expected years of school})} \frac{\text{Harmonized Test Score}}{625} - 14$$

- c. *Health* (Kesehatan) terdiri dari tingkat keberlangsungan hidup dari usia 15 tahun hingga 60 tahun serta fraksi anak di bawah 5 tahun tidak kerdil. Kontribusi kesehatan terhadap produktivitas dinyatakan relatif terhadap tolak ukur kesehatan penuh yang didefinisikan sebagai tidak sunting dan tingkat kelangsungan hidup orang dewasa sebesar 100%.

$$Health = e^{(\gamma_{ASR} \times (Adult\ Survival\ Rate - 1) + \gamma_{Stunting} \times (Not\ Stunted\ Rate - 1))/2}$$

Selain itu, indikator yang paling luas digunakan untuk mengukur status komparatif pembangunan sosio-ekonomi disajikan dalam laporan-laporan tahunan UNDP yakni *Human Development Report*. *Human Development Indeks* (HDI) merupakan bagian dari pembangunan ekonomi. *Human Development Indeks* (HDI) merupakan indeks yang mengukur pencapaian pembangunan sosio-ekonomi suatu negara, yang mengombinasikan pencapaian di bidang pendidikan, kesehatan, dan pendapatan riil per kapita yang disesuaikan (Todaro & Smith, 2015). Sementara Badan Pusat Statistik (BPS) mengartikan HDI sebagai kemampuan penduduk untuk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya (Jajang *et al.*, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia mengelompokkan negara dengan skala 0 (pembangunan manusia terendah) sampai 1 (pembangunan manusia tertinggi) berdasarkan pada tiga tujuan atau produk akhir pembangunan yakni umur panjang yang diukur melalui angka harapan hidup (*life expectancy at birth*), pengetahuan merupakan cerminan dari harapan lama sekolah (*expected years of schooling*) dan rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*), dan standar hidup layak yang dicerminkan dengan *gross national income* per kapita (GNI per kapita) (Jajang *et al.*, 2021; Todaro & Smith, 2015).

Pendidikan dan Kesehatan dalam Pembangunan Ekonomi

Pendidikan dan kesehatan bagi pembangunan mengacu pada peran sentral yang dimainkan oleh pendidikan dan kesehatan dalam menciptakan fondasi yang kokoh bagi pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif (Bengtsson *et al.*, 2018). Pendidikan memiliki peran penting

dalam memberikan akses terhadap pengetahuan, keterampilan, dan kualifikasi yang diperlukan bagi individu untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pembangunan (Khasanzyanova, 2017). Dengan meningkatkan tingkat literasi, keterampilan teknis, dan pengetahuan umum, pendidikan memungkinkan individu untuk lebih efektif dalam memanfaatkan peluang ekonomi, berkontribusi pada inovasi dan pengembangan, serta berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Sebagai hasilnya, pendidikan berperan sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Sharma *et al.*, 2016).

Sementara itu, kesehatan menjadi faktor kunci dalam memastikan kualitas hidup yang baik bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan. Kesehatan yang baik meningkatkan produktivitas angkatan kerja, mengurangi beban penyakit, dan memperpanjang harapan hidup (Rastogi *et al.*, 2021). Selain itu, kesehatan yang memadai juga membantu mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi dengan memberikan akses yang lebih merata terhadap layanan kesehatan dan melindungi masyarakat dari risiko kemiskinan yang disebabkan oleh biaya perawatan kesehatan yang tinggi (Naik *et al.*, 2020). Kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas, dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan yang memadai. Dengan demikian, kesehatan dan pendidikan juga dapat dipandang sebagai komponen pertumbuhan dan pembangunan yang vital sebagai *input* bagi fungsi produksi agregat (Weil, 2014).

Menurut Todaro dan Smith (2015) kesehatan berkaitan erat dalam pembangunan ekonomi. Di satu sisi, modal kesehatan yang semakin besar dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan maupun kesehatan, sebagian karena kesehatan merupakan faktor penting dalam kehadiran di sekolah dan dalam proses pembelajaran formal seorang anak. Usia lebih panjang meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang pendidikan; kesehatan yang lebih baik dalam masa kerja seseorang dapat mempengaruhi penurunan tingkat penyusutan modal pendidikan. Di lain sisi, semakin besarnya modal pendidikan dapat meningkatkan pengembalian atas investasi di bidang kesehatan karena banyak program kesehatan yang bergantung pada keterampilan dasar yang sering dipelajari di sekolah, meliputi kesehatan dan kebersihan pribadi, terlebih lagi kemampuan dasar membaca dan berhitung pendidikan juga diperlukan bagi pembentukan dan pelatihan

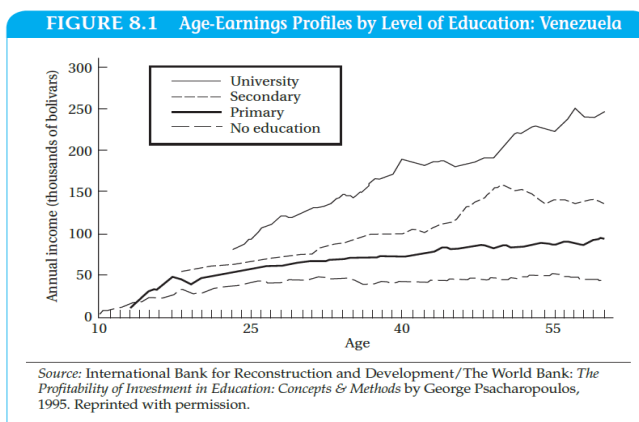
petugas kesehatan. Terakhir, peningkatan efisiensi produktif dari investasi pendidikan mempertinggi pengembalian atas investasi kesehatan yang meningkatkan harapan hidup.

Pendekatan Modal Manusia: Investasi pada Pendidikan dan Kesehatan

Modal manusia adalah aset penting bagi suatu bangsa. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas modal manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi (Abdeldayem *et al.*, 2022). Pendekatan modal manusia memandang pendidikan dan kesehatan sebagai investasi yang memberikan manfaat jangka panjang bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan (Pritchett, 2024).

Pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, sehingga mereka lebih produktif dan berpenghasilan lebih tinggi. Hal ini dapat meningkatkan standar hidup individu dan keluarga mereka. Selain itu, pendidikan juga dapat meningkatkan partisipasi politik dan *civic engagement*, serta mempromosikan toleransi dan kohesi sosial. Kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja secara produktif dan berkontribusi pada masyarakat, serta dapat meningkatkan harapan hidup dan mengurangi pengeluaran untuk perawatan kesehatan (World Health Organization, 2018).

Gambar 2 Profil Pencari Nafkah berdasarkan Pendidikan Venezuela



Sumber: World Bank dalam Todaro dan Smith (2015)

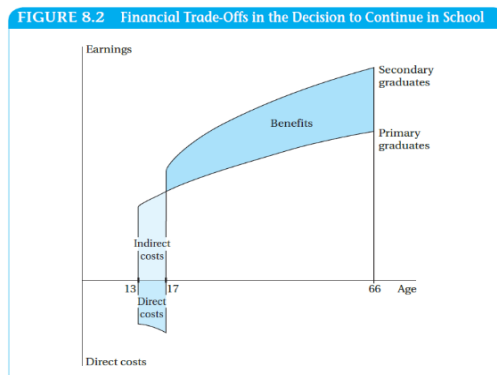
Gambar 2 di atas menunjukkan profil usia-pendapatan berdasarkan tingkat pendidikan di Venuzuela. Gambar tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan bervariasi dalam siklus hidup orang-orang dengan tingkat pendidikan yang berbeda-beda. Mereka yang memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi memulai pekerjaan penuh waktu pada usia lebih tua, tetapi sebagaimana yang terlihat pada gambar 2, pendapatan mereka dengan cepat melampaui mereka yang bekerja lebih awal.

Namun agar dapat memahami nilai modal manusia sebagai sebuah investasi, keuntungan pendapatan di masa depan dari pendidikan ini harus dibandingkan dengan biaya total yang diperlukan untuk memperoleh pendidikan itu. Biaya pendidikan mencakup uang sekolah atau pengeluaran lain yang secara khusus berkaitan dengan pendidikan seperti buku dan seragam sekolah, dan biaya tidak langsung terutama pendapatan yang hilang karena siswa tidak dapat bekerja sementara bersekolah (Todaro & Smith, 2015).

$$\Sigma = \frac{E_t - N_t}{(1 + i)^t}$$

Secara formal, keuntungan pendapatan yang diperoleh dapat ditulis sebagai berikut, di mana E adalah pendapatan dengan pendidikan tambahan, N adalah pendapatan tanpa pendidikan tambahan, t adalah tahun, dan i adalah tingkat diskonto, dan penjumlahannya adalah selama usia produktif yang diharapkan (Todaro & Smith, 2015).

Gambar 3 Trade-Off Keuangan untuk Melanjutkan Sekolah



Sumber: Todaro dan Smith (2015)

Gambar 3 menyajikan ilustrasi skematis dari *trade-off* yang terjadi dalam keputusan untuk meneruskan sekolah. Diasumsikan bahwa orang bekerja segera setelah menyelesaikan pendidikan sampai ia tidak dapat bekerja, pensiun, atau meninggal dengan perkiraan rata-rata harapan hidup 66 tahun (Todaro & Smith, 2015).

Sistem Pendidikan dan Pembangunan

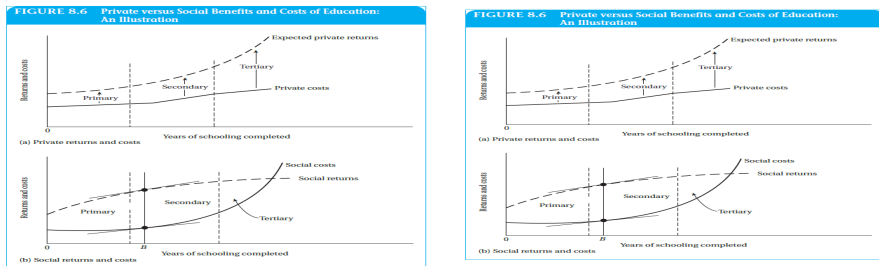
Menurut Todaro dan Smith (2015) dalam bukunya menyebutkan bahwa tingkat pendidikan yang diperoleh seseorang secara umum dapat dipandang sebagai hasil yang ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran-seperti komoditas dan jasa lainnya.

- a. Pada sisi permintaan, dua faktor utama yang memengaruhi tingkat pendidikan yang diinginkan adalah prospek pelajar yang lebih berpendidikan untuk menghasilkan pendapatan lebih besar melalui pekerjaan sektor modern di masa depan atau manfaat pribadi atau individu (*private benefit*) keluarga dari pendidikan dan biaya pendidikan, langsung maupun tidak langsung, yang harus ditanggung seorang peserta didik atau keluarganya. Dengan demikian, tingkat pendidikan yang diminta sesungguhnya adalah permintaan turunan (*derived demand*) untuk mendapatkan kesempatan kerja berupa tinggi di sektor modern, karena kesempatan untuk memperoleh pekerjaan tersebut sebagian besar ditentukan oleh tingkat pendidikan seseorang.
- b. Pada sisi penawaran, kuantitas pendidikan di tingkat sekolah dasar, menengah, dan perguruan tinggi sebagian besar ditentukan oleh proses politik, yang sering kali tidak berkaitan dengan kriteria ekonomi. Karena besarnya tekanan politik di seluruh negara berkembang untuk menyediakan jumlah sekolah yang lebih banyak di tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dapat diasumsikan bahwa penawaran publik atas tingkat pendidikan ini ditetapkan oleh pengeluaran pemerintah untuk pendidikan yang pada gilirannya dipengaruhi oleh tingkat permintaan pribadi agregat terhadap pendidikan. Permintaan atas tingkat pendidikan yang cukup bagi seseorang untuk memperoleh pekerjaan sektor modern tampaknya berkaitan dengan atau ditentukan oleh kombinasi pengaruh empat variabel: selisih upah atau pendapatan, probabilitas keberhasilan

memperoleh pekerjaan sektor modern, biaya langsung pendidikan yang ditanggung individu, dan biaya tidak langsung atau biaya oportunitas pendidikan.

Biaya pribadi (*private costs*) pendidikan (biaya yang ditanggung peserta didik sendiri) meningkat lebih lamban atau bahkan menurun. Semakin lebarnya kesenjangan antara biaya sosial dan biaya pribadi bahkan menimbulkan dorongan permintaan lebih besar terhadap pendidikan tinggi dibandingkan pada tingkat-tingkat pendidikan yang lebih rendah. Akan tetapi, kesempatan untuk memperoleh pendidikan hanya dapat mengakomodasi permintaan yang terdistorsi ini pada beban yang sepenuhnya di tanggung dengan biaya sosial (Todaro & Smith, 2015).

Gambar 4 Ilustrasi Manfaat dan Biaya Pribadi versus Biaya Sosial Pendidikan



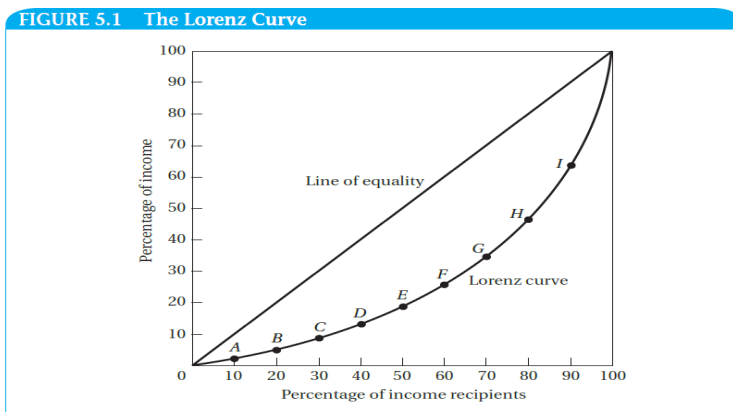
Sumber: Todaro dan Smith (2015)

Gambar 4 memberikan ilustrasi divergensi antara manfaat dan biaya pribadi serta manfaat dan biaya sosial. Pada Gambar 4a, pengembalian pribadi yang diharapkan dan biaya pribadi aktual diplotkan terhadap lamanya sekolah yang diselesaikan. Untuk memaksimalkan selisih antara manfaat dan biaya yang diharapkan (dan dengan demikian pengembalian pribadi atas investasi pendidikan), strategi yang perlu dilakukan peserta didik adalah mendapatkan pendidikan setinggi mungkin (Todaro & Smith, 2015). Sedangkan pada Gambar 4b, pengembalian pribadi dan biaya sosial diplotkan terhadap lamanya sekolah yang diselesaikan. Laju peningkatan manfaat sosial marginal meningkat semakin lamban dengan bertambahnya pendidikan dan kurva pengembalian sosial pun

mulai mendatar. Strategi yang dapat dilakukan adalah harus berfokus pada upaya menyediakan tingkat pendidikan selama B tahun bagi semua peserta didik. Karena di atas (Todaro & Smith, 2015).

Selain itu, untuk menggambarkan dan membahas tentang distribusi pendidikan dapat menggunakan kurva Lorenz. Di mana semakin dekat kurva Lorenz ke garis diagonal, makin merata pula distribusi pendidikan (Todaro & Smith, 2015).

Gambar 5 Kurva Lorenz



Sumber: Todaro dan Smith (2015)

Pengukuran dan Distribusi Kesehatan

Pengukuran dan distribusi kesehatan adalah aspek penting dalam ilmu kesehatan masyarakat (Mansour, 2016). Dengan memahami cara mengukur kesehatan serta bagaimana kesehatan didistribusikan di berbagai kelompok populasi, hal ini dapat mengidentifikasi masalah kesehatan, menentukan kebutuhan pelayanan kesehatan, dan merancang intervensi yang efektif untuk meningkatkan kesehatan masyarakat (Robinson *et al.*, 2016).

Indikator kesehatan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai status kesehatan individu atau populasi (Rumawas, 2021). Indikator kesehatan mencakup berbagai aspek, seperti *mortalitas* (kematian), *morbiditas* (penyakit), dan faktor risiko kesehatan (Mokdad *et al.*, 2018). Mereka digunakan oleh pembuat kebijakan, peneliti, dan

profesional kesehatan untuk merancang, mengimplementasikan, dan menilai efektivitas program kesehatan. Selain itu, indikator kesehatan juga memungkinkan perbandingan antara berbagai kelompok populasi, baik di tingkat lokal, nasional, maupun internasional, sehingga dapat mengungkap ketidakselarasan kesehatan dan membantu dalam perencanaan intervensi yang lebih tepat sasaran.

Beberapa indikator utama yang sering digunakan antara lain (Mokdad *et al.*, 2018): Angka harapan hidup (mengukur rata-rata umur yang diharapkan seseorang akan hidup); Angka kematian bayi (jumlah kematian bayi di bawah satu tahun per seribu kelahiran hidup); Angka kematian ibu (jumlah kematian ibu selama kehamilan, persalinan, atau dalam periode *postpartum* per seratus ribu kelahiran hidup); dan Prevalensi dan *insidensi* penyakit (mengukur jumlah kasus penyakit dalam populasi pada waktu tertentu (*prevalensi*) dan jumlah kasus baru dalam periode tertentu).

Distribusi kesehatan tidak merata di seluruh populasi dan sering dipengaruhi oleh faktor sosial dan ekonomi (Adiyasa & Meiyanti, 2021). Beberapa faktor utama yang mempengaruhi distribusi kesehatan antara lain (Jacobus *et al.*, 2018):

- a. Pendapatan dan status ekonomi, individu dengan pendapatan lebih rendah cenderung memiliki akses terbatas ke pelayanan kesehatan dan kondisi hidup yang lebih buruk.
 - b. Pendidikan, tingkat pendidikan yang lebih tinggi sering kali dikaitkan dengan perilaku kesehatan yang lebih baik dan akses yang lebih baik ke informasi kesehatan.
 - c. Pekerjaan dan kondisi kerja, jenis pekerjaan dan kondisi kerja dapat mempengaruhi kesehatan seseorang, dengan pekerjaan yang berisiko tinggi cenderung meningkatkan risiko cedera dan penyakit.
- Selain itu distribusi kesehatan juga dipengaruhi oleh faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan lokasi geografis (Kifle *et al.*, 2018).

- a. Usia, kelompok usia tertentu, seperti bayi dan lansia, mungkin lebih rentan terhadap masalah kesehatan tertentu.
- b. Jenis kelamin, laki-laki dan perempuan mungkin mengalami risiko kesehatan yang berbeda karena faktor biologis dan peran sosial.
- c. Lokasi geografis, penduduk di daerah pedesaan mungkin memiliki

akses yang lebih terbatas ke fasilitas kesehatan dibandingkan dengan penduduk di daerah perkotaan.

Kebijakan Pemerintah dalam Sistem Kesehatan dan Pendidikan

Kebijakan pemerintah, berkaitan dengan dasar dukungan politik untuk kebijakan *redistributif* terhadap anak-anak dan orang tua. Pengeluaran untuk pendidikan merupakan *redistribusi* kepada kaum muda; pengeluaran untuk pelayanan kesehatan dan kesehatan asuransi mentransfer sumber daya kepada orang lanjut usia (Poterba, 1996). Investasi pemerintah di bidang pendidikan berdampak pada teknologi akumulasi sumber daya manusia. Investasi riil agregat dalam pendidikan adalah sebuah variabel kebijakan, dan tingkatnya ditentukan oleh pemerintah. Menurut Milton Friedman (1955) terdapat beberapa kebijakan terkait dengan pendidikan:

a. Sistem Voucher Pendidikan

Inti dari kebijakan ini adalah memberikan dana kepada orang tua melalui voucher. Dana tersebut dapat digunakan untuk membiayai pendidikan anak mereka di sekolah mana pun yang mereka pilih, baik sekolah negeri maupun swasta. Friedman percaya bahwa sistem ini akan meningkatkan persaingan di antara sekolah, mendorong inovasi, dan menghasilkan pendidikan yang lebih berkualitas untuk semua siswa.

b. Peningkatan Akuntabilitas Sekolah

Sekolah akan lebih bertanggung jawab atas kinerja mereka karena mereka harus bersaing untuk menarik siswa. Kinerja sekolah akan diukur berdasarkan pencapaian akademik siswa dan kepuasan orang tua. Sekolah yang berkinerja buruk akan kehilangan dana dan siswa, sedangkan sekolah yang berkinerja baik akan mendapatkan lebih banyak dana dan menarik lebih banyak siswa.

c. Kebijakan pemerintah

Pemerintah menetapkan standar pendidikan minimum yang harus dipenuhi oleh semua sekolah. Memastikan bahwa semua anak memiliki akses ke pendidikan yang berkualitas. Memberikan informasi kepada orang tua tentang pilihan pendidikan yang tersedia.

Dalam laporan *World Bank* tahun 1993 mengusulkan tiga pendekatan terhadap kebijakan pemerintah untuk meningkatkan

kesehatan yakni: menciptakan lingkungan yang memungkinkan rumah tangga meningkatkan kesehatan; meningkatkan belanja pemerintah di bidang kesehatan; serta mendorong keberagaman dan kompetisi (World Bank, 1993). Selain itu, pemerintah memainkan peran sangat krusial dalam sistem kesehatan karena setidaknya empat alasan penting (Todaro & Smith, 2015):

- a. Kesehatan sangat penting, artinya untuk mengentaskan kemiskinan karena orang-orang sering kali sering kurang mendapat informasi mengenai kesehatan akibat dari kemiskinan
- b. Rumah tangga mengeluarkan dana yang terlalu sedikit untuk kesehatan karena mereka mungkin mengakibatkan *eksternalitas* (misalnya kemungkinan tertular penyakit).
- c. Pasar berinvestasi terlalu sedikit dalam infrastruktur, penelitian, dan pengembangan, serta transfer teknologi kesehatan ke negara-negara berkembang karena adanya kehalalan pasar.
- d. Program-program kesehatan masyarakat di negara-negara berkembang telah banyak yang terbukti berhasil.

Masing-masing pemerintah di berbagai negara memainkan peran yang berbeda-beda tetapi secara umum WHO menyimpulkan bahwa kesehatan penduduk selamanya menjadi prioritas nasional di mana tanggung jawab pemerintah atas hal ini akan terus berkelanjutan dan bersifat permanen (Todaro & Smith, 2015).

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Modal manusia dalam pemahaman Islam disebut *ahliyah*. Para ahli hukum Islam dan tafsir Al-Quran menggunakan istilah *ahliyah*, yang berarti kepastian dan kebugaran manusia untuk melaksanakan kewajiban sosial dan keagamaan tertentu. Secara harfiah, *ahliyah* berarti bakat, kebugaran, validitas kompensasi, wewenang, dan kualifikasi yang secara kolektif berarti kemampuan dan kualitas manusia untuk melaksanakan tugas tertentu dengan tekun (Hashi & Bashiiir, 2009). *Ahliyah* menunjukkan kemampuan individu untuk memenuhi tugas sosial dan agama mereka. Pada dasarnya, keahlian dapat didefinisikan sebagai

bakat bawaan, kemahiran, otoritas, dan kualifikasi yang memungkinkan individu untuk dengan hati-hati melaksanakan tugas-tugas tertentu (Jajang *et al.*, 2021).

Dalam pandangan para ulama hukum Islam, *ahliyah* mewakili kemampuan untuk secara aktif meningkatkan kehidupan, dipercayakan dengan tanggung jawab, dan memiliki hak yang sah atas properti. Selain itu, dalam hukum Islam, *ahliyah* menggambarkan potensi manusia untuk mencapai tingkat kedewasaan intelektual dalam mengambil tanggung jawab penuh untuk meningkatkan kehidupan (Jajang *et al.*, 2021). Dalam kategori pengembangan sumber daya manusia *ahliyah* terdiri dari berbagai kategori yakni (Hashi & Bashiir, 2009; Jajang *et al.*, 2021):

1. *Ahliyah Al-wujud*, yakni kemampuan untuk menikmati segala hak sebagai manusia mencakup hak asasi manusia mendasar seperti hak atas kepemilikan, perlindungan, dan keamanan. Jenis sumber daya manusia ini sangat penting untuk memelihara bakat manusia dalam berbagai upaya produktif. Mengakui hak-hak dasar individu sangat penting untuk merenungkan pertumbuhan dan kemajuan.
2. *Ahliyah Al-ada'a Al-naqisah*, yakni kemampuan untuk melaksanakan tugas tertentu. Pada tahap ini, individu tidak sepenuhnya mandiri tetapi beroperasi di bawah pengawasan saat melaksanakan tugas-tugas tertentu. Tindakan yang dilakukan di bawah pengawasan tersebut tidak memiliki dampak hukum.
3. *Ahliyah Al-ada'a Al-kamilah*, yakni berhubungan dengan kualitas sumber daya manusia yang mengharuskan individu untuk bertanggung jawab atas tindakan dan perkataan mereka, sehingga memiliki implikasi hukum. Kategori modal manusia ini memenuhi empat kriteria kematangan: kedewasaan (*bulugh*), intelek (*aql*), pengetahuan (*ilm*), dan kapasitas (*qudrah*). Di masa dewasa, sumber daya manusia individu mencapai keadaan kesempurnaan di mana semua aspek spiritual dan intelektual berfungsi penuh.
4. *Ahliyah Al-ada'*, yakni mencakup seluruh aset manusia seperti keterampilan kerja, sikap belajar dan bekal pengetahuan yang terkandung dalam diri individu sebagai hasil pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang menjadikan individu lebih kompetitif dan fleksibel.

Karakteristik utama teori pembangunan ekonomi Islam terletak

pada pendekatannya yang luas terhadap peningkatan sumber daya manusia, yang melampaui fokus semata-mata pada peningkatan kualitas penduduk, kesehatan, gizi, dan pendidikan. Menurut Islam, konsep pembangunan manusia tidak memiliki signifikansi tanpa pencapaian *tazkiyah* (penyucian batin) (Jajang *et al.*, 2021). Nilai-nilai seperti takwa (kesalehan), ihsan (kebajikan), *adl* (integritas), dan ikhlas (ketulusan) tidak hanya berkontribusi pada kesejahteraan dan kebahagiaan individu tetapi juga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk kemajuan materi. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa pembangunan ekonomi terkait erat dengan kemajuan moral dan sosial-politik suatu masyarakat (Jajang *et al.*, 2021).

Menurut Jajang (2021) terdapat beberapa dimensi yang diperlukan dalam pengembangan sumber daya manusia adalah sebagai berikut:

1. Kesehatan dan Nutrisi dalam Pengembangan SDM

Muslim yang kuat dan sehat lebih disukai daripada muslim yang lemah. Kebersihan merupakan setengah bagian dari iman. Al-Quran hanya mengizinkan makanan yang baik dan melarang anggur dan alkoholisme (Jajang *et al.*, 2021). Allah SWT berfirman dalam Al-Quran surat Al-Maidah [5] ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا لَكُمْ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ وَنَفْسِكُمْ مَا تَحْكُمُونَ
فَاجْتَنِبُوا لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras (mabuk) dan berjudi, (pengabdian) batu, dan (ramalan) panah adalah kekejian dari hasil karya setan. Hindari itu (kekejian) agar kamu makmur” (Q.S Al-Maidah [5]:90)

Perintah dalam Islam memiliki perlindungan bawaan untuk kesehatan dan kebersihan dan perlindungan dari berbagai penyakit (fisik, mental, dan spiritual). Dalam perspektif Islam, kesehatan dalam ekonomi pembangunan memiliki peran penting sebagai aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berlandaskan pada nilai-nilai agama Islam. Islam mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan sebagai amanah dan tanggung jawab individu terhadap diri sendiri dan masyarakat. Kesehatan dipandang sebagai karunia dari Allah yang harus dijaga dengan baik (Dorojatun, 2018).

Kesehatan juga menjadi hal penting dalam ajaran Islam. Menjaga Kesehatan tubuh dianggap sebagai kewajiban agar individu dapat menjalankan perintah agama dan berkontribusi secara maksimal dalam masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk hidup sehat dan menjaga tubuh sebagai amanah yang diberikan oleh Allah SWT (Irawan & Puspaningtyas, 2022).

Kesehatan yang baik merupakan modal utama bagi seseorang untuk berpartisipasi secara aktif dalam pembangunan ekonomi. Individu yang sehat cenderung lebih produktif, memiliki daya tahan yang lebih baik, dan dapat memberikan kontribusi yang lebih besar dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, investasi yang strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperkuat fondasi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Dorojatun, 2018).

2. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan mendorong kemampuan negara berkembang dalam pengembangan teknologi dan membangun kapasitas pertumbuhan yang mandiri. Sementara itu, kesehatan yang baik akan meningkatkan produktivitas dan tercapainya pendidikan yang diharapkan (Jajang *et al.*, 2021). Pendidikan yang baik akan meningkatkan produktivitas individu dan masyarakat secara keseluruhan. Individu yang terdidik dengan baik cenderung memiliki keterampilan dan pengetahuan yang lebih luas, sehingga mampu memberikan kontribusi yang lebih besar dalam aktivitas ekonomi (Islam, 2020). Dalam perspektif Islam, Pendidikan dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Pendidikan yang berkualitas akan membawa berkah dalam kehidupan individu, masyarakat, dan negara.

Pendidikan yang berkualitas akan menciptakan individu yang cerdas, kreatif dan inovatif. Individu yang terdidik dengan baik akan memiliki pemahaman yang lebih luas tentang dunia dan mampu berkontribusi secara positif dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, investasi dalam bidang Pendidikan dianggap sebagai investasi jangka panjang yang memberikan manfaat besar bagi kemajuan ekonomi umat (Yuspiani & Hidayat, 2022).

Peran yang sangat penting tersebut menjelaskan kesehatan dan pendidikan merupakan hal dasar dalam pembangunan ekonomi. Al-Quran dimulai dengan arahan '*iqra*' yang diterjemahkan menjadi 'baca'.

Sepanjang ayat-ayatnya, Al-Quran menganjurkan kontemplasi, penalaran, dan refleksi tentang kosmos dan seluk-beluk keberadaan manusia. Ini menggarisbawahi perbedaan antara mereka yang memiliki pengetahuan dan mereka yang tidak, tidak mungkin sama (Jajang *et al.*, 2021).

3. *Tazkiyah*/Penyucian Batin

Tazkiyah merupakan fitur yang paling membedakan pendekatan Islam terhadap sumber daya manusia dalam pembangunan. Islam menghendaki manusia berkembang menjadi makhluk yang memiliki kepribadian yang terintegrasi, dan senantiasa melakukan *tazkiyah* dalam setiap hubungan dengan Khalik-Nya, sesama manusia, lingkungan alam, maupun masyarakat sekitar (Jajang *et al.*, 2021). Seseorang harus dapat membuang gagasan, perilaku, penyembahan terhadap berhala, citra serta nafsu akan kemewahan dunia untuk melakukan pemurnian batin. Karena sumber daya manusia yang memegang nilai-nilai agama akan lebih tangguh secara rohaniyah, di mana manusia akan lebih mempunyai rasa tanggung jawab spiritual terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi modal pembangunan suatu bangsa (Jajang *et al.*, 2021).

Modal manusia yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan, memainkan peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda pembangunan ekonomi suatu negara. Dengan memperhatikan dan meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, masyarakat dapat menciptakan modal manusia yang kompeten dan sehat. Islam, secara keseluruhan, menempatkan penekanan yang signifikan pada hal-hal yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi. Namun demikian, perkembangan ekonomi Islam harus memfasilitasi pembangunan manusia dengan cara yang tepat dan etis (Siregar & Majid, 2023).

Pembangunan ekonomi dalam Islam didefinisikan sebagai sebuah keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan manusia dari sisi materi dan non-materi. Hal tersebut merupakan gambaran proses pembangunan yang multidimensi yang terkandung di dalamnya peningkatan kesejahteraan, reorganisasi dan reorientasi keseluruhannya sistem sosial dan ekonomi, dan peningkatan spiritual menurut ajaran Islam (Jajang *et al.*, 2021).

Keunikan perspektif Islam tentang sifat manusia, serta pembinaan sumber daya manusia, terletak pada konsep *tauhid*. Konsep ini

membangun hubungan antara setiap aspek jiwa manusia, termasuk sumber daya manusia, dan Tuhan, yang diakui sebagai pencipta semua individu dan segala sesuatu yang ada (Hashi & Bashiir, 2009). Sistem ekonomi Islam yang berlandaskan tauhid tidak hanya sebagai pedoman tetapi juga sebagai ibadah dalam mencapai kehidupan, kesejahteraan, dan pengetahuan (Jajang *et al.*, 2021). Ini sesuai dengan Hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari:

Hadits nabi :

حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَلَى غَيْرِ مَا حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ رَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ مَالًا فَسَلَّطَ عَلَى هَلَكَةٍ فِي الْحَقِّ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Al Humaidi berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan berkata, telah menceritakan kepadaku Isma’il bin Abu Khalid -dengan lafaz Hadits yang lain dari yang dia ceritakan kepada kami dari Az Zuhri- berkata, aku mendengar Qais bin Abu Hazim berkata, aku mendengar Abdullah bin Mas’ud berkata, Nabi SAW bersabda: Tidak boleh mendengki kecuali terhadap dua hal; (terhadap) seorang yang Allah berikan harta lalu dia pergunakan harta tersebut di jalan kebenaran dan seseorang yang Allah berikan hikmah lalu dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain”. (HR. Bukhari: 71)

Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari menjelaskan bagaimana manusia dapat mengembangkan diri menjadi makhluk yang unggul seperti yang disebutkan dalam Al-Quran. Oleh karena itu, tujuan utamanya adalah menciptakan manusia yang sempurna, dengan kenikmatan sebagai hadiah atas pencapaian ini (Jajang *et al.*, 2021). Pendidikan dan kesehatan dipandang sebagai komponen penting dari kemajuan ekonomi berkelanjutan menurut ajaran Islam, didukung oleh prinsip-prinsip kesetaraan sosial dan kesejahteraan masyarakat (Hashi & Bashiir, 2009). Pemahaman Islam tentang pengembangan sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia (*ahliyah*) dari keadaan kebodohan (*jahal*) menjadi pengetahuan, dari kemalasan (*kasal*) menjadi pekerja keras (*amal da'im*), dari kecerobohan (*hazal*)

menjadi fokus, dan akhirnya dari paksaan (*ikrah*) untuk kebebasan (Jajang *et al.*, 2021).

Maqashid syariah merupakan tujuan dari kesejahteraan dalam Islam, yang tujuan akhirnya adalah *maslahat*. *Maqashid syariah* memberikan gambaran sempurna yang dapat digunakan untuk mengukur pembangunan manusia yang diwakili oleh konsep *maslahat* (Jajang *et al.*, 2021). *Maqashid syariah* terdiri dari lima komponen pengukuran yakni: *din* (agama), *nafs* (jiwa), *'aql* (akal), *nasl* (keturunan), dan *maal* (harta) sesuai dengan lima aspek dari *maqashid syariah* (Anto, 2018; Jajang *et al.*, 2021).

Konsep *maqashid syariah* inilah kemudian menjadi komponen pengukuran pembangunan manusia dalam Islam yang disebut I-HDI (*Islamic-Human Development Index*). I-HDI merupakan alat yang digunakan untuk mengukur pembangunan manusia dalam perspektif Islam, di mana mengukur tingkat kesejahteraan material maupun kesejahteraan non-material yang dikaitkan dengan *maqashid syariah* (Anto, 2018). Adanya I-HDI yang lebih *holistik* mencakup semua aspek kebutuhan manusia yang berlandaskan *maqashid syariah* diharapkan dapat memberi sumbangan bagi pengembangan konsep yang lebih menyeluruh terhadap pola-pola pembangunan yang akan dilakukan khususnya negara-negara dengan populasi mayoritas muslim (Jajang *et al.*, 2021). Pembangunan manusia dalam Islam dapat dirumuskan ke dalam persamaan berikut ini (Anto, 2018):

$$Wh = f(MW, NW)$$

$$MW = f(PO, DE)$$

$$NW = f(IEV)$$

$$IEV = f(LE, E, FSR, R)$$

Keterangan:

Wh : *Holistic Welfare* (Kesejahteraan Holistik)

MW : *Material Welfare* (Kesejahteraan Material)

NW : *Non-Material Welfare* (Kesejahteraan Non-material)

PO : *Property Ownership* (Kepemilikan Kekayaan)

DE : *Distribution Equity* (Distribusi Pendapatan)

IEV : *Islamic Environment and Values* (Lingkungan dan Nilai - Nilai Islam)

LE : *Life Expectancy* (Tingkat Harapan Hidup)

E : *Education* (Pendidikan)

F : *Family and Sosial Relationship* (Hubungan Keluarga dan Sosial)

R : *Religiosity* (Religiositas)

KESIMPULAN

Modal manusia merupakan kemampuan dan kapasitas manusia yang mencakup semua keterampilan, pengetahuan, dan keahlian yang diperoleh melalui proses dari waktu ke waktu, yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan kapasitas manajemen kehidupan yang produktif baik sebagai individu, anggota organisasi formal maupun anggota masyarakat. Modal manusia adalah aset penting bagi suatu bangsa. Investasi dalam pendidikan dan kesehatan merupakan kunci untuk meningkatkan kualitas modal manusia dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pendidikan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan individu, sehingga mereka lebih produktif dan berpenghasilan lebih tinggi. Sedangkan kesehatan yang baik memungkinkan individu untuk bekerja secara produktif dan berkontribusi pada masyarakat. Berinvestasi pada sumber daya manusia akan meningkatkan kohesi dan kesetaraan sosial sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap institusi.

Pembangunan ekonomi dalam Islam didefinisikan sebagai sebuah keseimbangan dan kemajuan yang berkelanjutan dalam mencapai kesejahteraan manusia dari sisi materi dan non-materi. Hal tersebut merupakan gambaran proses pembangunan yang multidimensi yang terkandung di dalamnya peningkatan kesejahteraan, reorganisasi dan reorientasi keseluruhannya sistem sosial dan ekonomi, dan peningkatan spiritual menurut ajaran Islam. Modal manusia dalam pemahaman Islam disebut *ahliyah*. Istilah *ahliyah*, berarti kepastian dan kebugaran manusia untuk melaksanakan kewajiban sosial dan keagamaan tertentu. Pemahaman Islam tentang pengembangan sumber daya manusia berusaha untuk meningkatkan sumber daya manusia (*ahliyah*) dari keadaan kebodohan (*jahal*) menjadi pengetahuan, dari kemalasan (*kasal*) menjadi pekerja keras (*amal da'im*), dari kecerobohan (*hazal*) menjadi fokus, dan akhirnya dari paksaan (*ikrah*) untuk kebebasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdeldayem, M. M., Aldulaimi, S., & Kharabsheh, R. (2022). Development of Human Capital Resources to Increasing Economic Growth and Innovation in the GCC Countries. *International Journal of Green Management and Business Studies*, 1(11), 62–79.

- Adiyasa, M. R., & Meiyanti, M. (2021). Pemanfaatan obat tradisional di Indonesia: distribusi dan faktor demografis yang berpengaruh. *Jurnal Biomedika Dan Kesehatan*, 4(3), 130–138. <https://doi.org/10.18051/jbiomedkes.2021.v4.130-138>
- Anto, M. H. (2018). Introducing an Islamic Human Development Index (I-HDI) to Measure Development in OIC Countries. *Islamic Economic Studies*, Vol. 19 No.2, 19(2), 69–95.
- Bengtsson, S. E. L., Barakat, B., & Muttarak, R. (2018). *The Role of Education in Enabling the Sustainable Development Agenda*. Routledge.
- Dorojatun, N. M. (2018). Education, Health, and Public Service in Indonesia : An Islamic Economics View. *Airlangga International Journal of Islamic Economics And Finance*, 1(1), 51–60. <https://doi.org/https://doi.org/10.20473/aijief.v1i1.10146>
- Friedman, Mi. (1955). Economics and the Public Interest. *Economics and the Publik Interest*, 123–144. <https://doi.org/10.2307/3159624>
- Hashi, A. A., & Bashiir, A. (2009). Human Capital Development from Islamic Perspective. *International Conference on Human Capital Development*, 25–27. <https://www.researchgate.net/publication/277234198%0AHuman>
- Irawan, C. B., & Puspaningtyas, M. (2022). The Importance of Education with Health in Increasing Economic Growth and Investment in Denmark. *Tamasnsiswa Accounting Journal International*, 7(1), 21–27. <https://doi.org/10.54204/TAJI/Vol712022004>
- Islam, M. S. (2020). Do education and health influence economic growth and food security Evidence from Bangladesh. *International Journal of Happiness and Development*, 6(1), 59. <https://doi.org/10.1504/ijhd.2020.10030680>
- Jacobus, E. H., Kindangen, P., & Walewangko, E. N. (2018). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan Rumah Tangga di Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 86–103.
- Jajang, A., Mahri, W., Cupian, Al Arif, M. N. R., Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarok, F., Fajri, M., Azizon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi Pembangunan Islam*. Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia.

- Khasanzyanova, A. (2017). How Volunteering Helps Students to Develop Soft Skills. *International Review of Education*, 63, 363–379.
- Kifle, M. M., Kesete, H. F., Gaim, H. T., Angosom, G. S., & Araya, M. B. (2018). Health facility or home delivery? Factors influencing the choice of delivery place among mothers living in rural communities of Eritrea. *Journal of Health, Population and Nutrition*, 37(1), 1–15. <https://doi.org/10.1186/s41043-018-0153-1>
- Mansour, S. (2016). Geo-spatial Information Science Spatial analysis of public health facilities in Riyadh Governorate , Saudi Arabia : a GIS-based study to assess geographic variations of service provision and accessibility. *Geo-Spatial Information Science*, 19(1), 26–38. <https://doi.org/10.1080/10095020.2016.1151205>
- Mokdad, A. H., Ballestros, K., Echko, M., Glenn, S., Olsen, H. E., Mullany, E., Lee, A., Khan, A. R., Ahmadi, A., & Ferrari, A. J. (2018). The state of US health, 1990-2016: burden of diseases, injuries, and risk factors among US states. *Jama*, 319(14), 1444– 1472.
- Mulyani, E. (2017). Ekonomi Pembagunan. In *Angewandte Chemie International Edition* (Vol. 6, Issue 11). UNY Press.
- Nafziger, E. W. (2006). *Economic Development* (Fourth). Cambridge University press.
- Naik, Y., Abbs, I., Elwell-Sutton, T., Bibby, J., Spencelayh, E., Shafique, A., Burbidge, I., Antink, B., Alanko, L., & Rsa, J. A. (2020). Using economic development to improve health and reduce health inequalities. *The Health Foundation*, September, 3–37.
- Poterba, J. M. (1996). Government Intervention in the Markets for Education and Health Care: How and Why ? In *Individual and social responsibility: Child care, education, medical care, and long-term care in America* (Issue January, pp. 277–308). University of Chicago Press. <http://www.nber.org/books/fuch96-1>
- Pritchett, L. (2024). Investing in Human Capital in Africa: A framework for research. *International Journal of Educational Development*, 107(April), 103048. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2024.103048>
- Rastogi, C., Rube, H. T., Kribelbauer, J. F., Crocker, J., Loker, R. E., Martini, G. D., Laptenko, O., Freed-Pastor, W. A., Prives, C., Stern, D. L., Mann, R. S., & Bussemaker, H. J. (2021). Counteracting

- age-related VEGF signaling insufficiency promotes healthy aging and extends life span. *Science*, 373(533), E3692–E3701. <https://doi.org/10.1126/science.abc8479>
- Robinson, L. A., Hammitt, J. K., & Zeckhauser, R. J. (2016). Attention to distribution in U.S. regulatory analyses. *Review of Environmental Economics and Policy*, 10(2), 308–328. <https://doi.org/10.1093/reep/rew011>
- Rumawas, M. E. (2021). Pengukuran Kualitas Hidup Sebagai Indikator Status Kesehatan Komprehensif Pada Individu Lanjut Usia. *Jurnal Muara Medika Dan Psikologi Klinis*, 1(1), 71–78.
- Sairmaly, F. A. (2023). Human Capital Development and Economic Growth: A Literature Review on Information Technology Investment, Education, Skills, and Productive Labour. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(1), 679–693. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i1.12491>
- Schultz, T. W. (1961). Investment in Human Capital. *The American Economic Review*, 51(1), 1–17.
- Sharma, R., Fantin, A. R., Prabhu, N., Guan, C., & Dattakumar, A. (2016). Digital literacy and knowledge societies: A grounded theory investigation of sustainable development. *Telecommunications Policy*, 40(7), 628–643. <https://doi.org/10.1016/j.telpol.2016.05.003>
- Shuyong, F., Shuyu, C., & Maimaituxun, M. (2024). Discussion on the Relationship Between Chinese Government ' s Investment in Health Human Capital and Economic Growth. *Journal of the Knowledge Economy*, 103. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-01771-w>
- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen Teknologi (EMT)*, 7(1), 71–82. <https://doi.org/https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.722>
- Soejoto, A., Ghofur, M. A., & Rachmawati, L. (2022). The Effect of Population Density, Educational Access Inequality and Health Access Inequality on Economic Growth. *Al-Islah: Jurnal Pendidikan*, 14(3), 4011–4022. <https://doi.org/10.35445/alishlah.v14i3.1674>

- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (12th Editi). Pearson.
- Triatmanto, B., & Bawono, S. (2023). The interplay of corruption, human capital, and unemployment in Indonesia: Implications for economic development. *Journal of Economic Criminology*, 2(2). <https://doi.org/10.1016/j.jeconc.2023.100031>
- Wahyudi, H., Husain, F. R., & Palupi, W. A. (2023). The Impact of Control of Corruption , Human Development Index , and Macroeconomics on Economic Growth Rates in Low-Middle Income Countries. *WSEAS Transactiton on Business and Economics*, 20, 1030–1041. <https://doi.org/10.37394/23207.2023.20.94>
- Weil, D. N. (2014). Health and economic growth. In *Handbook of economic growth* (Vol. 213, pp. 623–682). Elsevier.
- Wijaya, A., Tasenle, T., Darma, D. C., & Kasuma, J. (2021). Labor Force and Economic Growth Based on Demografic Pressure, Happiness, and Human Development: Empirical From Romania. *Journal of Eastern European and Central Asian Research*, 8(1), 40–50. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15549/jeecar.v8i1.571>
- World Bank. (1993). *World Development Report 1993: Investing in Health*. World Bank.
- World Bank. (2021). The Human Capital Index 2020 Update: Human Capital in the Time of COVID-19. In *World Bank*. World Bank.
- World Health Organization. (2018). A vision for Primary health care in the 21st Century. In *World Health Organizarion*. World Health Organization (WHO). http://www.who.int/docs/default-source/primary-health/vision.pdf?sfvrsn=c3119034_2
- Yuspiani, & Hidayat, M. (2022). Manajemen Keuangan Pendidikan (Analisis Investasi Pendidikan). *Jurnal Idaarah*, 6(11), 101–114.

TRANSFORMASI PERTANIAN DAN PENGEMBANGAN DESA

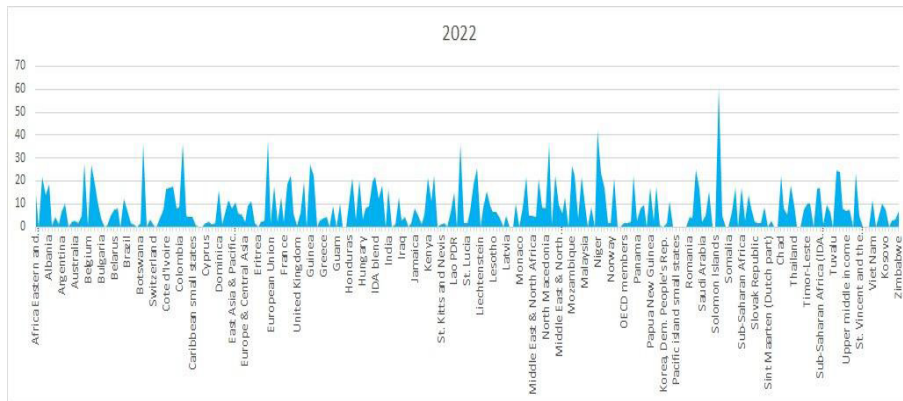
(Fahrul Hudatil Atkiyan, Natasya Ul-Ashwat, Andi Putradi, St. Marlianti)

PENDAHULUAN

Pertanian merupakan sektor yang memiliki peran penting bagi negara-negara agraris. Di negara-negara agraris sektor pertanian dianggap sebagai tulang punggung ekonomi dan memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang (Byerlee *et al.*, 2009). Pertanian hampir menyediakan 40 persen lapangan kerja bagi penduduk dan menyumbangkan porsi sekitar 13,56 persen terhadap pertumbuhan ekonomi (Aini *et al.*, 2022). Menurut Erwin (2009) peran pertanian adalah sebagai berikut. 1) sebagai penyedia bahan pangan yang diperlukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pangan 2) penyedia bahan baku industri 3) sebagai pasar potensial atas produk-produk yang dihasilkan industri 4) sebagai sumber tenaga kerja dan pembentukan modal, 5) sumber prolehan devisa, 6) mengurangi kemiskinan dan peningkatan ketahanan pangan dan, 7) menyumbang pembangunan pedesaan dan pelestarian lingkungan hidup (Arimbawa & Widanta, 2017).

Menurut *history* di negara-negara barat, pembangunan ekonomi identik dengan transformasi struktural yang cepat terhadap perekonomian yakni dari perekonomian yang bertumpu pada kegiatan pertanian (Tobing Fahri *et al.*, 2023). Banyak literatur empiris maupun teoritis yang mengkaji proses transformasi struktural perekonomian, mulai dari negara kurang berkembang yang kegiatan ekonominya sebagian besar bertumpu pada pertanian hingga negara berpendapatan tinggi yang sektor pertaniannya biasanya menyumbang kurang dari 5% PDB (Byerlee *et al.*, 2009).

Grafik 1.1 : Agriculture on PDB



Sumber: www.worldbank.com, 2022

Berdasarkan data dari *world bank* pada tabel 1, pada tahun 2022 PDB negara-negara maju meningkat tinggi yang didorong oleh sektor pertanian (*World Bank*, 2022). pengembangan sektor pertanian melalui transformasi pertanian terus meningkat di seluruh dunia. Walaupun pada kenyataannya sektor pertanian yang didorong melalui transformasi pertanian tidak memberikan hasil yang merata, terutama di negara-negara dengan pendapatan rendah. Saat ini, sebagian ekonom pembangunan sepakat bahwa sektor pertanian khususnya, dan perekonomian pedesaan pada umumnya, tidak hanya sekedar berperan pasif dan mendukung proses pembangunan ekonomi, tetapi juga harus memainkan peran yang sangat diperlukan dalam keseluruhan strategi perekonomian, kemajuan, khususnya di negara-negara dengan pendapatan rendah (Todaro & Smith, 2012).

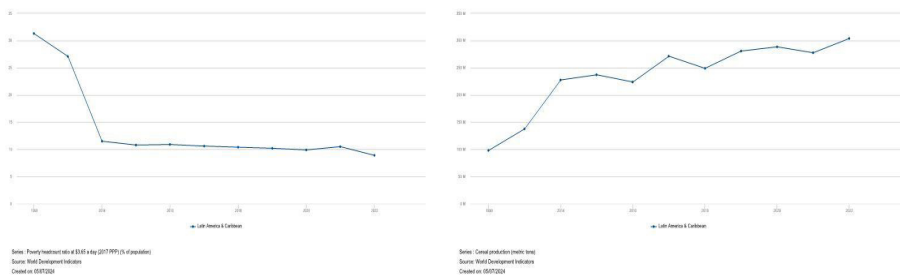
Perkembangan pertanian di negara-negara kerja sama Islam (OIC) mengalami penurunan secara signifikan yang disebabkan oleh berbagai faktor. Namun, penting untuk digarisbawahi bahwa meskipun terjadi penurunan secara keseluruhan, negara-negara OKI tertentu telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam sektor pertanian mereka selama dua dekade terakhir, secara khusus Yordania, Tajikistan, Irak, Qatar, Iran, Mali, Nigeria, Niger, dan Kazakhstan telah menunjukkan tingkat pertumbuhan tahunan tertinggi dalam nilai tambah pertanian antara tahun 2000 dan 2021 (Fathurrahman, 2023). Sejak tahun 2016,

produksi pertanian di negara-negara OKI mengalami peningkatan sebesar 13,2% melampaui produksi negara-negara berkembang non-OKI(10,8%), negara maju (0,1%), dan rata-rata global (9,9%) (Fathurrahman, 2023). Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa ada tren positif yang dialami oleh sebagian besar negara OKI dalam beberapa dekade terakhir.

Daerah dengan kondisi pertanian yang kurang menguntungkan, cenderung mempunyai tingkat kemiskinan yang tinggi. Ketimpangan pedesaan yang tinggi menghambat kemajuan di bidang-bidang ini, baik karena berkurangnya akses masyarakat miskin terhadap kredit dan masukan lainnya. Terlebih lagi, migrasi dari desa ke kota terjadi secara tidak proporsional di kalangan masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi, dan akibatnya adalah penduduk pedesaan menjadi lebih tua, lebih banyak perempuan dan lebih banyak penduduk asli (Todaro & Smith, 2012). Hal ini merupakan faktor yang menyebabkan tingkat kemiskinan masyarakat pedesaan di negara-negara berpendapatan rendah menjadi lebih tinggi.

Pada negara-negara yang memiliki pendapatan tinggi, cenderung memiliki tingkat produktivitas pertanian yang tinggi. Hal ini didukung oleh penggunaan teknologi yang memadai yang digunakan oleh negara-negara maju. Penggunaan teknologi maju dalam sektor pertanian di negara-negara dengan pendapatan tinggi mampu memberikan dorongan terhadap tingkat produktivitas pertanian dan mampu mengurangi kemiskinan.

Grafik 1.2: Produktivitas pertanian dan kemiskinan di Amerika Latin



Sumber: www.worldbank.com, 2022

Pada tabel 1.2 menggambarkan bahwa produktivitas pertanian di negara dengan pendapatan tinggi cenderung semakin meningkat. Tentu

hal ini didukung karena adanya proses transformasi pertanian yang di mana hal tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap tingkat produksi pertanian. produktivitas pertanian yang semakin tinggi pasti memberikan kontribusi yang semakin tinggi terhadap perekonomian. Ditunjukkan pada tabel 1.2 bahwasanya tingkat kemiskinan di negara-negara dengan sistem pertanian yang maju cenderung mengalami penurunan dalam hal kemiskinan.

Berbeda dengan negara-negara dengan pendapatan rendah. Khususnya pertanian di bagian sub sahara Afrika, mereka cenderung menggunakan pertanian tradisional. Dalam beberapa literatur empiris menjelaskan bahwa sektor pertanian di bagian Afrika masih bersifat tradisional serta pengabaian terhadap sektor pertanian mengakibatkan eksodus massal penduduk pedesaan dan pada gilirannya telah membuat daerah pedesaan semakin ditinggalkan (Francis & David, 2012).

Penjelasan di atas memberikan gambaran bahwa adanya ketimpangan yang terjadi dalam sektor pertanian pada negara-negara agraris. Hal ini menjadi fokus utama penelitian ini untuk mengkaji bagaimana karakteristik transformasi pertanian. Kemudian penulisan ini akan berfokus kepada bagaimana perspektif Islam terhadap sektor pertanian dan pengembangan pedesaan serta teori dan kebijakan pemerintah dalam sektor pertanian.

TEORI DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dalam konsep negara agraris, sektor pertanian merupakan tumpuan utama dalam mendukung ekonomi dan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. *Food and Agriculture Organization* (FAO) menjelaskan bahwa lahan pertanian merupakan suatu tempat yang berada di permukaan bumi yang mempunyai sifat tertentu yang meliputi biosfer, atmosfer, tanah, lapisan geologi, hidrologi, populasi tanaman dan hewan serta aktivitas manusia pada masa lampau dan masa sekarang hingga kepada tingkat sifat-sifat tertentu tersebut memiliki pengaruh yang sangat berarti dalam penggunaan fungsi lahan oleh manusia pada masa sekarang dan masa yang akan datang (Soetoprawiro *et al.*, 2021).

Seperti yang kita ketahui, beberapa dekade terakhir sektor pertanian mulai mengalami perubahan. Sektor pertanian tradisional kini mulai bertransisi ke arah model pertanian modern. Fenomena perubahan ini

menunjukkan bahwa setiap negara memiliki peluang yang sama dalam mengembangkan sektor pertanian. Seperti yang dijelaskan oleh Todarro bahwa saat ini sebagian besar ekonom pembangunan sepakat bahwa saat ini, sektor pertanian, khususnya, memiliki peranan yang penting dalam mendukung proses pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2012).

Menurut Tambunan (2003), setidaknya ada beberapa faktor yang bisa diungkapkan bahwa sektor pertanian menjadi penting dalam proses pembangunan yaitu:

1. Sektor pertanian menghasilkan produk-produk yang diperlukan sebagai input sektor lain, terutama sektor industri, seperti: industri tekstil, industri makanan dan minuman
2. Sebagai negara agraris (kondisi historis) maka sektor pertanian menjadi sektor yang sangat kuat dalam perekonomian dalam tahap awal proses pembangunan. Populasi di sektor pertanian (pedesaan) membentuk sesuatu proporsi yang sangat besar. Hal ini menjadi pasar yang sangat besar bagi produk-produk dalam negeri baik untuk barang produksi maupun barang konsumsi, terutama produk pangan. Sejalan dengan itu ketahanan pangan yang terjamin merupakan prasyarat kestabilan sosial dan politik.
3. Karena terjadi transformasi struktural dari sektor pertanian ke sektor industri maka sektor pertanian menjadi sektor penyedia faktor produksi (terutama tenaga kerja) yang besar bagi sektor non pertanian (industri).
4. Sektor pertanian merupakan sumber daya alam yang memiliki keunggulan komparatif dibanding bangsa lain. Proses pembangunan yang ideal mampu menghasilkan produk-produk pertanian yang memiliki keunggulan kompetitif terhadap bangsa lain, baik untuk kepentingan ekspor maupun substitusi impor (Tambunan, 2003).

Pada saat ini ketahanan pangan merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh seluruh negara di dunia. Ketahanan pangan dan air merupakan isu utama bagi kelangsungan dan pembangunan suatu negara (Beithou *et al.*, 2022). Menurut statistika Bank Dunia (World Bank) populasi global diproyeksi mencapai 9,7 miliar pada tahun 2050, yang mengakibatkan permintaan pangan meningkat dua kali lipat (Kitole *et al.*, 2024). Kebutuhan akan konsumsi pangan yang semakin tinggi perlu didukung oleh sistem pertanian yang berkelanjutan. Pembangunan

pertanian yang berkelanjutan tentu akan meningkatkan hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan ketahanan pangan (Liu *et al.*, 2024).

Dalam menghadapi tantangan terkait ketangguhan dan ketahanan pangan diperlukan strategi pengelolaan daya saing sektoral, baik tingkat regional, nasional, maupun di tingkat global. Secara historis, pertanian telah memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pengurangan ekonomi kemiskinan dan kelaparan di banyak negara berkembang. Kemampuan pertanian dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu didukung oleh sistem pertanian yang lebih modern. Sistem pertanian yang lebih modern, tentu akan meningkatkan produktivitas pertanian.

Sistem pertanian modern lebih dikenal dengan sebutan transformasi pertanian. Timmer (1988) menjelaskan bahwa transformasi pertanian adalah proses di mana sistem pertanian pangan-pangan bertransformasi dari waktu ke waktu dari yang berorientasi sub sistem dan berpusat pada pertanian menjadi sistem yang berorientasi pada pertanian, lebih dikomersialkan, produktif, dan berpusat di luar pertanian (Peter Timmer, 1988).

Bahasa lain dapat dilihat dari Motes (2010), yang menyatakan pertanian modern sebagai:

“In modern agricultural systems farmers believe they have much more central roles and are eager to apply technology and information to control most components of the system. modern agriculture tends to see its success as dependant on linkages—access to resources, technology, management, investment, markets and supportive government policies...”

Dohm (2005) melihat bahwa pembangunan pertanian modern tidak hanya terkait dengan bagaimana petani menggunakan teknologi terbaru dalam menopang peningkatan produktivitas usaha pertanian, namun yang lebih penting justru bagaimana kegiatan pertanian dikelola sebagai sebuah bisnis yang sukses (Pasandaran *et al.*, n.d.).

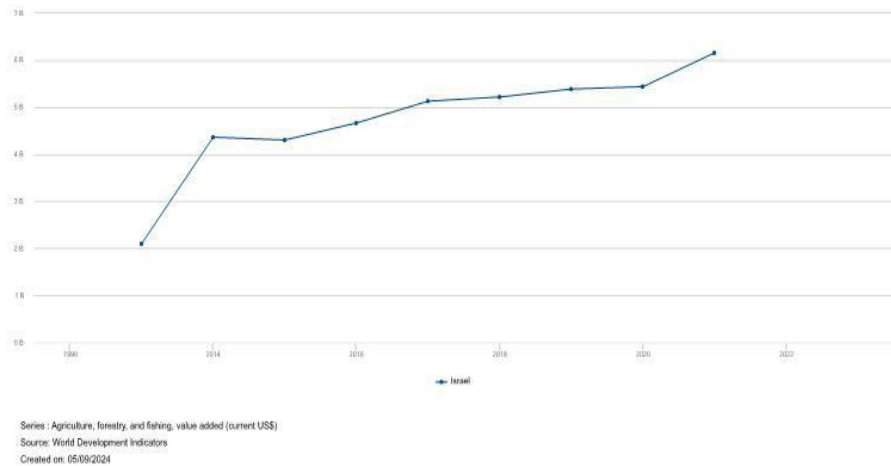
Menurut Todaro strategi pembangunan ekonomi berbasis pertanian dan lapangan kerja memerlukan tiga elemen dasar yang saling melengkapi:

(1) percepatan pertumbuhan *output* melalui perubahan insentif teknologi, kelembagaan, dan harga dirancang untuk meningkatkan produktivitas petani kecil; (2) meningkatnya permintaan dalam

negeri terhadap hasil pertanian yang berasal dari pembangunan yang berorientasi pada lapangan kerja strategi manajemen; dan (3) kegiatan pembangunan pedesaan yang terdiversifikasi, non-pertanian, dan pada karya secara langsung dan tidak langsung mendukung dan didukung oleh komunitas petani (Todaro & Smith, 2012).

Beberapa batasan yang sudah dijelaskan di atas, menggambarkan bahwa setiap negara yang memiliki peluang potensial dalam sektor pertanian memiliki peluang yang besar dalam mengembangkan sektor pertanian. Kita coba mengambil contoh negara Israel. Jika ditilik lebih dalam, Israel dapat dianggap sebagai negara yang memiliki peluang kecil dalam mengembangkan sektor pertanian. Negara Israel merupakan negara yang berada di daerah gersang, dan tanah suburnya sekitar 15% saja, ditambah curah hujan yang rendah yang hanya 0,01% menjadi kendala utama dalam kegiatan pertanian (Pasandaran *et al.*, n.d.).

Tabel 1.3: *Agriculture in Israel*



Sumber: *World Bank*

Pada tabel 1.3, dapat dilihat bahwa nilai tambah negara Israel dalam hal pertanian memiliki peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Jika dilihat dari kondisi geografis negaranya, Israel memiliki peluang yang minim dalam mengembangkan sektor pertanian. Negara

yang berdiri di daerah gersang dengan kondisi air yang kurang memadai tentu memberikan masalah yang besar terhadap sektor pertanian Israel. Namun, ini tidak menjadi halangan bagi negara Israel untuk mengembangkan sektor pertaniannya.

Gambar 1.1: Gambar Kondisi Pertanian Israel



Sumber: iStock

Dalam gambar 1.1, memperlihatkan kondisi pertanian di Israel, sebagian besar tanah Israel terdiri dari gurun pasir yang kering dan tandus. Yang menjadi pertanyaan bahwa, apakah pertanian di Israel maju?. Abraham *et al.*, (2019) menjawab dalam temuannya bahwa Israel menjadi pemimpin dunia di pertanian dan air. Elemen kunci keberhasilan Israel menjadi pemimpin global di bidang pertanian dan pengelolaan air adalah pola pikir petani, pendekatan pembangunan desa, visi para pemimpinnya dan gabungan peran pemerintah, orientasi pasar dan fokus pada penyelesaian masalah. Keberhasilan Israel di sektor air memungkinkan pengambilan keputusan strategis jangka panjang selama bertahun-tahun. Misalnya, para petani di wilayah gurun mulai menggunakan air garam untuk kapas dan sayuran mereka, dikarenakan mereka tidak memiliki alternatif lain. Dalam hal ini pemerintah menyiapkan anggaran khusus untuk meneliti bagaimana tanaman dapat memanfaatkan air limbah. Karna saat ini sebagian besar pertanian Israel menggunakan air limbah dan Israel adalah pemimpin dunia dalam penggunaannya.

Elemen-elemen dasar pertanian Israel yang menjadi landasan keberhasilan diantaranya: kepemimpinan yang kuat dan komitmen pemerintah terhadap pertanian, pemerintahan yang efektif, inovasi/pendekatan pemecahan masalah, organisasi petani, pendekatan yang dipimpin pasar dan dukungan dari luar negeri. Pembangunan pertanian dapat didefinisikan sebagai suatu proses perubahan sosial. Implementasinya tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan status dan kesejahteraan petani semata, tetapi sekaligus juga dimaksudkan untuk mengembangkan potensi sumber daya manusia baik secara ekonomi, sosial, politik, budaya, lingkungan, maupun melalui perbaikan (*improvement*), pertumbuhan (*growth*) dan perubahan (*change*) (Alifvia *et al.*, 2021).

Menurut Todaro & Smith (2012) persyaratan inti dari strategi pembangunan pertanian dan pedesaan yaitu:

1. Reformasi pertahanan;
Struktur pertanian dan pola kepemilikan lahan harus disesuaikan dengan tujuan ganda peningkatan produksi pangan dan mendorong distribusi manfaat kemajuan pertanian yang lebih luas, sehingga mempercepat proses pengentasan kemiskinan.
2. Kebijakan-kebijakan pendukung;
Manfaat penuh dari pembangunan pertanian skala kecil tidak dapat direalisasikan tanpa adanya dukungan pemerintah yang memberikan insentif, peluang ekonomi, dan akses ke kredit dan *input* yang dibutuhkan untuk memungkinkan pembudidaya kecil memperluas *output* mereka dan meningkatkan produktivitas mereka.
3. Tujuan-tujuan pembangunan yang terintegrasi, seperti;
 - Upaya untuk meningkatkan pendapatan riil pedesaan pertanian dan non pertanian lainnya serta peningkatan penyediaan pendidikan, kesehatan dan gizi, perumahan dan berbagai layanan sosial dan kesejahteraan terkait.
 - Berkurangnya ketimpangan dalam distribusi pendapatan pedesaan dan berkurangnya ketidakseimbangan perkotaan-pedesaan dalam pendapatan dan peluang ekonomi.
 - Perhatian yang berhasil terhadap kebutuhan akan kelestarian lingkungan – membatasi perluasan lahan pertanian ke hutan yang tersisa dan daerah rapuh lainnya, mempromosikan

konservasi, dan mencegah penyalahgunaan agrokimia dan *input* lainnya yang berbahaya.

- Kapasitas sektor pedesaan untuk mempertahankan dan mempercepat laju perbaikan ini dari waktu ke waktu.

Kebijakan Pertanian

Menuju pembangunan pertanian modern memerlukan dukungan kebijakan dan berbagai regulasi atau tata peraturan formal serta dukungan politis yang kuat. Program pengembangan desa dan pembangunan infrastruktur pertanian, peningkatan kualitas produk pertanian melalui bantuan teknologi dan pendidikan pertanian, serta program bantuan modal dan subsidi harga pupuk adalah beberapa contoh kebijakan pemerintah yang berpengaruh dalam meningkatkan produksi pertanian dan memperkuat kebijakan yang mendukung.

Ada dua macam praktik pertanian yang berkembang: Teknologi Revolusi Hijau dan Teknologi kering. Teknologi revolusi hijau cukup berhasil di wilayah dengan infrastruktur mendukung, sedangkan teknologi tanah kering pengembangannya masih sangat terbatas dan ada kesan masih terabaikan (Efendi, 2016). Meskipun cukup banyak kritik yang dilontarkan dengan teknologi hijau, tetapi melalui IPTEK telah membawa Indonesia dari negara pengimpor beras terbesar menjadi negara swasembada pangan pada tahun 1984.

Di Indonesia sendiri Presiden Jokowi dalam kebijakannya pada swasembada pangan menginstruksikan Menteri Pertanian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, dan beberapa menteri lain di kabinetnya untuk bekerja sama dalam menerapkan pembatasan impor beras dan hanya mengizinkan impor jika produksi beras dalam negeri tidak mencukupi untuk menstabilkan harga beras di pasar. Selama masa jabatan pertamanya (2014-2019), Jokowi sebagian besar menggunakan undang-undang Pangan dan Petani sebagai payung hukum untuk kebijakan swasembada pangannya. Atas dasar dua undang-undang ini, Widodo menugaskan Menteri Pertanian dan Menteri Perdagangan untuk mengeluarkan serangkaian peraturan menteri yang menetapkan pembatasan impor bahan makanan yang dianggapnya “strategis”, seperti beras, daging sapi, gula, dan jagung (Respatiadi, 2023).

Sejak orde lama, pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mendukung sektor pertanian, kebijakan tersebut sebagai berikut:

Tabel 1.1: Kebijakan Pertanian Indonesia

No	Pemerintahan	Kebijakan	Upaya Ril
1	Orde lama (1952-1964)	1. Swasembada beras melalui program kesejahteraan kasimo. 2. Pengembangan program padi sentra.	1. Pengembangan usaha pertanian padi skala luas di luar Jawa. 2. Intensifikasi di Jawa. 3. Usaha pembibitan dan pengaturan ternak.
2	Pemerintah Transisi (1965-67)	Pemenuhan kebutuhan dalam negeri melalui impor.	Pembentukan komando logistik nasional (1965) dan Badan Urusan Logistik (1967)
3	Orde Baru (1968-1998)	1. Pencapaian swasembada pangan melalui pelaksanaan pembangunan terencana lima tahunan (pelita I-VI). 2. Kebijakan pangan murah (jangka pendek) dan swasembada mutlak (jangka panjang)	1. Pengembangan Bimas dan Bimas yang disempurnakan. 2. Upaya komando langsung dari presiden penerapan secara penuh Panca usaha tani
4	Orde Reformasi:		
	1. Era Habibie	<i>Swasembada on Trend</i>	Gerakan mandiri padi jagung dan kedelai (Gema Pelagung)
	2. Era Gus Dur	Kecukupan Pangan dan Kesejahteraan Petani.	<i>Corporate Farming</i>

3. Era Megawati	Pencapaian Swasembada	Sistem Agribisnis
4. Era SBY	Ketahanan Pangan dan Swasembada	Diawali Revitalisasi Pertanian sampai Tujuh Gema Revitalisasi
5. Era Joko Widodo	Swasembada pangan	Pembuatan undang-undang pangan dan petani sebagai payung hukum. Instruksi pembuatan peraturan menteri untuk menetapkan pembatasan impor pada bahan pangan yang dianggapnya strategis.

Mulai dari orde lama sampai era reformasi kebijakan untuk mendukung sektor pertanian terus berlanjut. Jika dilihat dari beberapa kebijakan pemerintah Indonesia sejak zaman orde lama sampai sekarang masih terfokus pada kegiatan produktivitas pertanian dan abai untuk melakukan perbaikan pada struktur sosial pertanian..

Tabel 1.2 : Pencapaian pembangunan pertanian Indoensia ditinjau dari kemampuan menyediakan Padi, Jagung dan Kedelai selama setahun

Tahun	Padi	Kedelai	Jagung
2018	11.377.934	493.546	4.069.935
2019	10.677.887	285.265	4.089.482
2020	10.657.275	182.072	2.337.868
2021	10.441.801	134.700	2.328.058
2022	10.452.672	180.922	2.764.368

Sumber: *Statistiak Pertanian 2023*

Jika dilihat dari total hasil pertanian di Indonesia semenjak tahun 2018-2022 mengalami pertumbuhan yang fluktuatif. Data tersebut menunjukkan bahwa hasil produksi pertanian di Indonesia secara grafik tidak mengalami peningkatan secara intens setiap tahunnya. Padahal mempertahankan produktivitas dan pertumbuhan pertanian di negara ini sangat penting untuk mencapai ketahanan pangan, pengentasan kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi berbasis luas (Rusliyadi *et al.*, 2018).

Gambar 1.2: Jumlah Tenaga Kerja Pertanian Indonesia

No.	Provinsi/Province	Tahun/Year			Tahun/Year			Pertumbuhan/Growth 2022 over 2021 (%)		
		Agustus/August 2021			Agustus/August 2022					
		Laki-Laki/ Man	Perempuan/ Woman	Total	Laki-Laki/ Man	Perempuan/ Woman	Total	Laki-Laki/ Man	Perempuan/ Woman	Total
1	Aceh	493.087	260.315	753.402	568.000	308.573	876.573	15,19	18,54	16,35
2	Sumatera Utara	1.385.360	912.933	2.298.293	1.434.353	895.528	2.329.881	3,54	-1,91	1,37
3	Sumatera Barat	535.873	296.680	832.553	579.292	317.566	896.858	8,10	7,04	7,72
4	Riau	874.313	268.009	1.142.322	946.538	229.130	1.175.668	8,26	-14,51	2,92
5	Jambi	516.344	256.788	773.132	573.094	257.091	830.185	10,99	0,12	7,38
6	Sumatera Selatan	1.180.710	633.025	1.813.735	1.280.239	644.824	1.925.063	9,25	8,43	6,14
7	Bengkulu	297.697	155.839	453.536	324.644	157.479	482.123	9,05	1,05	6,30
8	Lampung	1.226.552	535.230	1.761.782	1.281.006	543.159	1.824.165	4,44	1,48	3,54
9	Kepulauan Bangka Belitung	103.785	46.652	150.437	105.511	48.677	154.188	1,66	4,34	2,49
10	Kepulauan Riau	30.761	9.513	40.274	27.875	9.337	37.212	-9,38	-1,85	-7,60
11	DKI Jakarta	14.654		18.143	12.508	2.969	15.477	-14,64		-14,69
12	Jawa Barat	2.171.231	1.080.254	3.251.485	2.258.601	1.123.801	3.382.402	4,02	4,03	4,03
13	Jawa Tengah	2.402.150	1.539.710	3.941.860	2.736.330	1.559.663	4.295.993	13,91	1,30	8,98
14	D.I. Yogyakarta	216.981	172.256	389.237	219.244	168.165	387.409	1,04	-2,37	-0,47
15	Jawa Timur	3.795.286	2.482.204	6.277.490	3.957.319	2.528.004	6.485.323	4,27	1,85	3,31
16	Banten	371.999	206.212	578.211	424.503	186.449	610.952	14,11	-9,58	5,66
17	Bali	290.999	214.846	505.845	280.147	211.333	491.480	-3,73	-1,64	-2,84
18	Nusa Tenggara Barat	480.195	316.537	796.732	519.218	348.861	868.079	8,13	10,21	8,95
19	Nusa Tenggara Timur	708.942	567.131	1.276.073	721.464	580.453	1.301.917	1,77	2,35	2,03
20	Kalimantan Barat	631.195	451.314	1.082.509	712.652	455.491	1.168.143	12,91	0,93	7,91
21	Kalimantan Tengah	283.680	137.852	421.532	318.273	145.200	463.473	12,19	5,33	9,95
22	Kalimantan Selatan	369.254	227.037	596.291	387.917	231.408	619.325	5,05	1,93	3,86
23	Kalimantan Timur	213.496	77.340	290.836	223.462	46.420	269.882	4,67	-39,98	-7,20
24	Kalimantan Utara	47.506	20.111	67.617	48.568	20.713	69.281	2,24	2,99	2,46
25	Sulawesi Utara	187.341	54.318	241.659	192.983	47.751	240.734	3,01	-12,09	-0,38
26	Sulawesi Tengah	390.081	168.741	558.822	422.479	185.850	608.329	8,31	10,14	8,86
27	Sulawesi Selatan	914.105	442.453	1.356.558	951.670	507.804	1.459.474	4,11	14,77	7,59
28	Sulawesi Tenggara	226.478	140.115	366.593	239.191	130.001	369.192	5,61	-7,22	0,71
29	Gorontalo	111.935	35.186	147.121	134.298	49.820	184.118	19,98	41,59	25,15
30	Sulawesi Barat	200.537	92.576	293.113	229.545	115.708	345.253	14,47	24,99	17,79
31	Maluku	125.642	82.046	207.688	128.819	80.032	208.851	2,53	-2,45	0,56
32	Maluku Utara	85.245	51.754	136.999	83.900	53.300	137.200	-1,58	2,99	0,15
33	Papua Barat	62.110	56.845	118.955	75.880	66.836	142.716	22,17	17,58	19,97
34	Papua	626.429	547.698	1.174.127	665.110	592.112	1.257.222	6,17	8,11	7,08
Indonesia		21.571.953	12.539.520	34.114.962	23.064.633	12.849.508	35.914.141	6,92	2,47	5,27

Sumber : Badan Pusat Statistik
Source : BPS - Statistics Indonesia

Sumber: Statistika Pertanian 2023

Pada gambar 1.2, menggambarkan bahwa tingkat tenaga kerja dalam sektor pertanian semakin meningkat. Faktanya kondisi pertanian di Indonesia masih belum mampu mengatasi masalah kemiskinan pertanian di pedesaan. Sebanyak 10,62 % atau sebanyak 35.914.141 jumlah pekerja pertanian pada tahun 2022 dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 34.114.962 jumlah pekerja pertanian pada tahun 2021. Kebijakan pemerintah Indonesia dinilai belum mampu mengatasi masalah pertanian dan kemiskinan pedesaan di Indonesia.

Problematisasi kemiskinan petani pedesaan di Indonesia masih mengalami masalah yang memprihatinkan. Masalah pertanian di pedesaan disebabkan banyak hal yakni akses lahan yang kurang dan juga keterbelakangan teknologi di pertanian pedesaan (Arifah *et al.*, 2023). Kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasi masalah kemiskinan petani di pedesaan dinilai belum mampu memberikan dampak secara signifikan terhadap kemiskinan petani di pedesaan. Kondisi tersebut kurang mampu dibaca oleh pemerintah Indonesia melalui kebijakan yang efisien dan efektif karena kendati kebijakan telah ada namun belum mampu menjawab persoalan pertanian dan kemiskinan di pedesaan (Arifah *et al.*, 2023).

PERSPEKTIF ISLAM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN

Islam sebagai *din* dan peradaban (*tamaddun*) memiliki ajaran yang menyeluruh dan sempurna. Di antara sektor kehidupan yang tidak bisa lepas dari perhatian Islam adalah pertanian. Secara tradisi keilmuan, Ibn Khaldun dalam "*Mukhoddimah*" menyebutkan, pertanian adalah ilmu yang paling tua dan diperhatikan juga oleh ulama' sejak dahulu. Lalu, di zaman *Golden Age* juga berkembang keilmuan dan teknologi pertanian. Saat itu, ditemukan manuskrip-manuskrip dari ulama Islam yang membahas pertanian dan peternakan (Nurmala, 2020).

Mengutip pendapat Imam Al-Qurtubi, Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Al-Bari bahwa kegiatan menanam atau pertanian tersebut sebagai panggilan keagamaan yang bermanfaat untuk orang banyak. Islam memandang profesi petani sebagai profesi yang mulia dan terhormat. Hal ini disebabkan karena Allah Swt. menciptakan bumi beserta isinya untuk kemudahan bagi manusia. Dalam kadar tertentu tanaman dan tumbuhan di muka bumi dapat tumbuh dengan mudah dan berproduksi

sendiri. Allah Swt. telah menghamparkan bumi, mencurahkan air hujan, angin dan lain-lain untuk memudahkan manusia bercocok tanam. Allah Swt., berfirman: “Nikmat Tuhanmu yang mana kamu dustakan?” (Syaparuddin & Nuzul, 2021).

Pertanian Pada Zaman Nabi Yusuf

Islam memandang pertanian merupakan sektor yang penting dan sangat memberikan manfaat yang begitu tinggi bagi perekonomian dan keberlangsungan hidup manusia. Hal ini dibuktikan dengan firman-firman Allah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan pertanian. Kisah Nabi Yusuf A.S juga menjadi fakta eksplisit bagaimana Islam memandang sektor pertanian mampu memberikan pengaruh terhadap kondisi perekonomian suatu negeri.

Kisah Nabi Yusuf A.S yang di mana suatu ketika raja Mesir kala itu adalah Ar-Rayyan ibn al-Walid, suatu ketika ia bermimpi ajaib yang membuat hatinya sangat gelisah. Sebelumnya ia belum pernah bermimpi seperti itu dalam hidupnya. Maka ia mengumpulkan para orang-orang yang cerdas dan pandai, juru-juru tenun dan pembesar-pembesar kerajaannya. Lalu ia berkata: “Aku bermimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus, aku melihat 7 butir gandum yang subur dan 7 butir pula yang kering. Cobalah kalian ceritakan ta'bir mimpiku itu jikalau ada yang mempunyai ilmu ta'bir mimpi.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبْسُتٍ لَّعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ

Artinya: “Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (ta'wi) l mimpi tentang 7 ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau dan 7 tangkai lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui” (QS. Yusuf: 46). (LPMQ, 2022)

Aneka pendapat keluar dari mulut mereka, ada yang mengatakan itu adalah mimpi permainan tidur saja dan ada pula yang mengatakan bahwa itu adalah pengaruh angan-angan di waktu tidur yang tidak mempunyai

arti atau mimpi kosong (*adlghatsu ahlam*). Terhadap mimpi yang seperti itu, mereka tidak mempunyai ilmu untuk menta'birkannya. Walhasil, tidak seorang pun yang mampu dapat memecahkan permintaan sang raja terkait tafsir dari mimpinya itu. Raja pun tak puas mendengarkan jawaban mereka bahkan nampaknya raja semakin gelisah. Dia sangat ingin mengetahui ta'bir mimpinya itu, tetapi tidak tahu kepada siapa harus bertanya. Tukang kebun mendengar kabar ini dari istana, saat itu ia langsung teringat kepada orang yang sangat bijak bernama Yusuf yang sedang meringkuk di penjara., Yusuf berhasil menakwilkan mimpinya dengan tepat. Dengan cepat tukang kebun itu menghadap kepada raja (Hadi, 2022).

“Wahai tuanku, di dalam penjara ada seorang pemuda yang bernama Yusuf. Dia seorang yang mulia, mempunyai pikiran yang dalam, dan pandangan yang luas dan dapat menakbirkan mimpi dengan tepat. Kalau tuanku utus aku kepadanya, saya akan kembali dengan membawa ta'bir mimpi tuanku dan tuanku akan percaya dengan kebenarannya,” ucap tukang kebun untuk meyakinkan raja. Raja pun sangat gembira terhadap ucapan dari tukang siram kebunnya itu, ia kemudian mengutusnyanya untuk menemui Yusuf di penjara.

“Hai Yusuf, saudaraku yang mulia yang dapat dipercaya, saya datang kepadamu untuk suatu ta'bir mimpi, yaitu 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk dimakan 7 ekor sapi yang kurus-kurus dan 7 butir gandum yang subur dan 7 butir gandum yang kering, mudah-mudahan saya kembali membawa ta'bir mimpi itu dari engkau dan dapat diketahui oleh orang banyak tentunya mereka akan berterima kasih kepadamu atas segala kelebihan dan kebaikan yang engkau berikan itu,” ujar tukang kebun memohon kepada Nabi Yusuf.

Dengan segala kemurahan hati, Nabi Yusuf menerangkan ta'bir mimpi raja itu, seolah-olah Nabi Yusuf menyampaikan kepada raja dan para menteri. “Wahai raja dan pembesar-pembesar negara semuanya, kalian akan menghadapi kemakmuran dan keamanan selama 7 tahun lamanya. Ternak akan berkembang baik, aneka tanaman tumbuh dengan subur, dan semua orang akan merasa senang dan bahagia,” kata Nabi Yusuf di hadapan tukang kebun. Ia kemudian menjelaskan bahwa dimasa subur ini pemerintah untuk meminta rakyat untuk memanfaatkan situasi ini dengan baik, yaitu dengan bertanam selama 7 tujuh tahun. Hasil dari tanaman harus disimpan, gandum disimpan dengan tangkai- tangkainya supaya tahan lama. Sebagian kecil boleh dikeluarkan untuk dimakan saja.

“Sehabis masa subur itu akan datang masa yang penuh kesengsaraan dan penderitaan selama 7 tahun. Pada waktu itu ternak akan habis musnah, tanam- tanaman tidak

berbuah, udara panas dan kemarau panjang. Sumber-sumber air akan kering dan rakyat menderita kekurangan makanan. Semua simpanan makanan akan habis, kecuali tinggal sedikit akan dijadikan benih,” terang Nabi Yusuf.

Setelah masa sulit yang penuh kesengsaraan itu berlaku, kata Nabi Yusuf, akan datang masa di mana hidup akan kembali makmur, aman dan sentosa. Di masa itu bumi akan subur, hujan turun lebat, manusia akan beramai-ramai memeras anggur dengan aman dan gembira. Mereka telah duduk bersantai menikmati buah-buahan hasil kebunnya bersama anak-anak dan keluarganya (Hadi, 2022).

“Itulah ta’bir mimpi dari raja sampaikanlah kepada raja dan para pembesar-pembesar raja,” pungkas Nabi Yusuf. Kisah tentang musim paceklik ini dan kekeringan yang melanda Negeri Mesir telah diabadikan dalam Al-Qur’an surat Yusuf ayat 43-49. Berkat kepandaian dan kebeningan hati Nabi Yusuf dalam menakwilkan mimpi raja, masa paceklik pun bisa dilewati dengan baik. Dari kisah Nabi Yusuf menjelaskan bahwa sektor pertanian yang dimanfaatkan dan dikelola dengan kebijakan-kebijakan yang tepat akan mampu memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian. Kisah tersebut menekankan bagaimana Islam memberikan gambaran bahwa sektor pertanian memiliki peran dan manfaat yang besar sampai-sampai hal tersebut dijelaskan dalam Al-Qur’an dan dimasukkan ke dalam perjalanan hidup para Nabi yang di utus ke dunia.

Pertanian merupakan kegiatan yang mengolah dan menanaminya dengan tanaman yang bermanfaat. Kegiatan pertanian memanfaatkan tanah yang subur di dataran yang rendah. Dalam Q.S Al-An’am ayat 141. Menjelaskan tentang sumber daya alam sebagaimana firman Allah:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Dan dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung, pohon kurma tanaman-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan ke fakir miskin): dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak suka orang yang berlebih-lebihan” (Q.S Al-An’am:141) (LPMQ, 2022).

Pertanian (bercocok tanam) merupakan mata pencaharian yang paling baik menurut para Ulama dengan alasan bercocok tanam adalah hasil usaha tangan sendiri, Nabi SAW bersabda:

Artinya: “Tidaklah seseorang memakan makanan yang lebih baik dari orang yang memakan dari hasil usaha tangannya, dan adalah Nabi Daud ‘Alaihi Salam makan dari hasil tangannya sendiri (HR. Bukhari no. 1966).

Anjuran Islam dalam bercocok tanam dijelaskan juga bahwa Agama Islam rupanya menganjurkan untuk memakmurkan bumi dan memanfaatkan lahan supaya produktif dengan cara di tanami. Dalam Q.S An-Nahl Ayat 10: yang diingatkan tentang kekayaan flora dan fauna dengan Firman Allah:

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ

Artinya: “Dia-lah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu, sebahagiannya menjadi minuman dan sebahagiannya (menyebutkan) tumbuh-tumbuhan, yang ada pada (tempat tumbuhnya) kamu mengabaikan ternakmu (Q.S An-Nahl:10) (LPMQ, 2022).

Karakteristik Islam dalam Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Tariqi (2004) Islam harus mempunyai karakteristik tersendiri agar tujuan pertumbuhan ekonominya bisa tercapai (At-Tariqi Husain Abdul, 2004). Karakteristik tersebut ialah:

1. Konferensi (*alsyumul*); Islam melihat bahwa pertumbuhan lebih sekedar dari persoalan materi dan memiliki tujuan yang lebih universal dibandingkan dengan orientasi terbatas yang ingin dicapai oleh sistem-sistem kontemporer, yaitu untuk menciptakan keadilan sosial. Pertumbuhan harus berorientasi pada tujuan dan nilai aspek material, moral, ekonomi, sosial, spiritual dan fiskal tidak dapat dipisahkan. Kebahagiaan yang ingin dicapai di dunia, tetapi juga di akhirat.
2. Berimbang (*Tawazun*); Pertumbuhan tidak hanya diorientasikan untuk menciptakan pertambahan produksi, namun ditunjukkan berdasarkan asas keadilan distribusi sesuai dengan firman Allah: “Berbuat adillah kamu, sesungguhnya hal itu yang paling dekat dengan ketakwaan” (Q.S Al-Maidah:8). Pertumbuhan juga memerlukan adanya kuberimbangan usaha-usaha pertumbuhan.

Oleh karena itu Islam tidak menerima langkah kebijakan pertumbuhan perkotaan dengan mengabaikan pedesaan, industri yang mengabaikan pertanian atau dengan mengonsentrasikan percepatan pembangunan program tertentu dengan mengabaikan semua umum dengan prasarana pokok lainnya.

3. Realistis (*Waqi'iyah*); Realistis adalah suatu pandangan terhadap permasa panen sesuai dengan kenyataan. Dalam teori-teori sosial secara umum, realistis merupakan pernyataan yang harus ada di dalamnya, karena teori yang utopis yang jauh dari kondisi riil akan sulit diterima oleh masyarakat. Islam merupakan agama yang berasal dari Allah tidak mungkin menetapkan aturan-aturan yang idealis yang jauh dari kehidupan manusia dan kemungkinan penerapannya. Realistis Islam adalah idealistis, dan idealistis Islam adalah realistis.
4. Keadilan ('Adalah); Seperti yang dikemukakan di atas bahwa pertumbuhan harus disertai dengan adanya keadilan distribusi. Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: "Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kerabat, dan Allah melarang dari berbuat keji, kemungkaran dan permusuhan" (Q.S. An-Nahl: 90) (LPMQ, 2022).

Dari realistis yang ada kita bias melihat betapa kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin di negeri ini telah sedemikian hebatnya. Realita disparitas ekonomi ini tidak saja terjadi di Indonesia dan Negara-negara berkembang lainnya, tetapi juga Negara-negara maju yang menjadi pendekar kapitalisme, seperti Amerika Serikat. Maka di sinilah pentingnya pertumbuhan yang disertai dengan pemerataan yang adil.

5. Bertanggung jawab (*Mas'uliyah*); Ketika Islam memberikan ruang kebebasan terhadap individu dalam bidang apa pun dengan ekspresi yang mencerminkan penghormatan kepada manusia untuk menikmati kenikmatan duniawi, maka kebebasan ini tidak diberikan secara absolut tanpa batas. Kebebasan itu dibatasi oleh berbagai aturan yang menunjukkan adanya jaminan kebahagiaan

seluruh masyarakat. Karakteristik ini juga berkaitan dengan aspek lain dalam pertumbuhan, yaitu bahwa pertumbuhan harus *sustainable*. Pertumbuhan harus memperhatikan faktor teknologi dengan tidak mengeksploitasi seluruh sumber daya yang ada tanpa memperhatikan kelestariannya.

6. Mencukupi (*Kifayah*); Islam tidak hanya menetapkan adanya karakteristik tanggung jawab seperti yang telah diungkapkan, namun tanggung jawab itu haruslah mutlak dan mampu mencakup realisasi kecukupan bagi umat manusia. Dalam hal ini para ahli Fiqih telah menetapkan dalam bidang pengalokasian harta dengan ukuran yang dapat mencukupi kebutuhan berupa pangan, sandang dan papan dalam batas yang seharusnya.
7. Berfokus pada manusia (*Ghayatuha al-Insan*); ini berbeda dengan konsep pembangunan ekonomi modern yang menegaskan bahwa wilayah operasi pembangunan adalah lingkungan fisik saja. Dengan demikian Islam memperluas jangkauan objek pembangunan dari lingkungan fisik kepada manusia. Islam sangat memperhatikan masalah pembangunan ekonomi, namun tetap menempatkannya pada persoalan pembangunan umat manusia. Fungsi utama Islam adalah membimbing manusia pada jalur yang benar dan arah yang tepat. Semua aspek yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi harus menyatu dengan pembangunan umat manusia secara keseluruhan.

Dalam proses pengembangan ekonomi, Islam menekankan bahwa dalam proses pengembangan sektor ekonomi, terutama yang mengandalkan sektor pertanian tidak hanya mementingkan atau memfokuskan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian. Namun, yang terpenting yaitu bagaimana pengembangan sektor pertanian harus berdampak kepada perekonomian masyarakat sehingga mampu meningkatkan nilai ekonomi masyarakat.

KESIMPULAN

Proses transformasi pertanian memang diperlukan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian bagi setiap negara. Beberapa negara yang menerapkan transformasi pertanian cenderung memiliki tingkat produktivitas pertanian yang tinggi, terutama negara-negara dengan pendapatan yang tinggi. Sementara itu, negara-negara dengan pendapatan

yang rendah cenderung memiliki tingkat produktivitas pertanian yang rendah. Hal ini tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti penggunaan teknologi, pupuk berkualitas dan infrastruktur yang memadai.

Dengan adanya transformasi pertanian memberikan peluang bagi semua negara yang memainkan sektor pertanian sebagai tumpuan perekonomian untuk mengembangkan sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi. Dukungan kebijakan-kebijakan pemerintah juga memainkan peran penting dalam sektor pertanian agar dampak dari pengembangan pertanian mampu mengatasi masalah kemiskinan pedesaan, terutama di negara-negara berpendapatan rendah dan mengandalkan sektor pertanian dalam perekonomian.

Islam memandang bahwa sektor pertanian merupakan sektor yang penting bagi perekonomian dan keberlangsungan hidup. Hal ini dibuktikan dengan firman-firman Allah dalam Al-Qur'an. Dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui sektor pertanian harusnya memerhatikan berbagai aspek penting, terutama menekankan pada prinsip keadilan ('Adalah) dan berimbang (Tawazun). Prinsip ini tentu memiliki makna bahwa dalam proses peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya berfokus pada meningkatkan produksi namun harus memperhatikan hal-hal lain seperti kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abraham, D., Ngoga, T., Said, J., & Yachin, M. (2019). How Israel became a world leader in agriculture and water. *London: Tony Blair Institute for Global Change, October, 9*(September), 2019.
- Aini, K., Hartono, D., The, T., Between, R., Policy, F., Sari, V. K., Cahyadin, M., Wahyudi, S. T., Kurniawati, L., Setyadharma, A., Rahmawati, A., Rahmawati, A., Dwiputri, I. N., Prastiwi, L. F., & Agustin, G. (2022). *JEKT Volume 15 Nomor 1*. 15(1).
- Alifvia, N., Sulastri, Aisah, S., & Mega Jaya, B. (2021). Improving Food Security In The Agricultural Sector As The Foundation Of National Defense In The Implementation Of The Archipelago Insight. *Perpustakaan Waqaf Ilmu Nusantara*. <https://www.waqafilmunusantara.com>
- Arifah, K. N., Novita, D., & Sunarso, H. (2023). Analisis Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Petani Di Indonesia Untuk

- Mewujudkan Keadilan Pertanian. *Jatijajar Law Review*, 2(1), 97–104.
- Arimbawa, P. D., & Widanta, A. . B. P. (2017). Pengaruh Luas Lahan, Teknologi dan Pelatihan Terhadap Pendapatan Petani Padi dengan Produktivitas sebagai Variabel Intervening di Kecamatan Mengwi. *Arimbawa, Dika Putu*, 6, 1601–1627.
- At- Tariqi Husain Abdul, A. (2004). *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan*. Magistra Insani Press.
- Beithou, N., Qandil, A., Khalid, M. B., Horvatinec, J., & Ondrasek, G. (2022). *Tinjauan Ketahanan Air Terkait Pertanian dalam Kelangkaan Air Negara : Studi Kasus Yordania*.
- Byerlee, D., de Janvry, A., & Sadoulet, E. (2009). Agriculture for Development: Toward a New Paradigm. *Annual Review of Resource Economics*, 1(1), 15–31. <https://doi.org/10.1146/annurev.resource.050708.144239>
- Efendi, E. (2016). Implementasi Sistem Pertanian Berkelanjutan dalam Mendukung Produksi Pertanian. *Jurnal Warta*, 47, 1689–1699.
- Fathurrahman, F. (2023). *Agriculture and Food Security in OIC Member Countries 2023 Enhancing Resilience of Agricultural and Food Systems Organization of Islamic Cooperation Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries*.
- Francis, F., & David, K. (2012). The Challenges of Agriculture and Rural Development in Africa : The Case of Nigeria. *International Journal of Academic Research in Progressive Education and Development*, 1(3), 45–61.
- Hadi, M. A. S. (2022). Telaah Takwil Kisah Mimpi Raja Dalam Surat Yusuf Ayat 43-49 (Analisis Semiotika Charles Sander Pierce). *An-Nur: Jurnal Studi Islam*, 14(1), 44–61.
- Kitole, F. A., Mkuna, E., & Sesabo, J. K. (2024). Digitalization and agricultural transformation in developing countries: Empirical evidence from Tanzania agriculture sector. *Smart Agricultural Technology*, 7(August 2023), 100379. <https://doi.org/10.1016/j.atech.2023.100379>
- Liu, M., Chen, X., & Jiao, Y. (2024). Sustainable Agriculture: Theories, Methods, Practices and Policies. *Agriculture (Switzerland)*, 14(3), 10–13. <https://doi.org/10.3390/agriculture14030473>
- LPMQ. (2022). *Al-Qur'an*. Qur'an Kemenag. <https://quran.kemenag>.

- go.id/quran/per-ayat/surah/12?from=46&to=111
- Nurmala, rika, & dkk. (2020). *Membangun Kejayaan Pertanian Dengan Al-Qur'an* (M. Jannah & C. Nisa (eds.)).
- Pasandaran, E., Syakir, M., & Heriawan, R. (n.d.). *Menuju Pertanian Modern Berkelanjutan*.
- Peter Timmer, C. (1988). Chapter 8 The agricultural transformation. *Handbook of Development Economics*, 1, 275–331. [https://doi.org/10.1016/S1573-4471\(88\)01011-3](https://doi.org/10.1016/S1573-4471(88)01011-3)
- Respatiadi, H. (2023). *The pursuit of food self-sufficiency in Indonesia: Food-trade policy preferences during the administrations of Yudhoyono (2004-2014) and Widodo (2014-present)*. November. <https://ourarchive.otago.ac.nz/handle/10523/15450%0Ahttps://ourarchive.otago.ac.nz/bitstream/handle/10523/15450/RespatiadiHizkia2023PhD.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Rusliyadi, M., Bin Hj Mohd Jamil, A., Maseleno, A., & Tri Kumalasari, R. (2018). Agricultural extension policy, agricultural growth and poverty reduction in Indonesia. *International Journal of Engineering & Technology*, 7(4), 5539–5550. <https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.13337>
- Soetoprawiro, K., Aridhayandi, M. R., Mulyadi, D., Mulyana, A., & Ramdhi, M. F. (2021). Kewenangan Pemerintah Daerah Mengenai Pelestarian Lahan Pertanian Padi Pandanwangi Cianjur Sebagai Bagian Dari Indikasi Geografis. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 9(2), 351–363. <https://doi.org/10.29303/ius.v9i2.900>
- Syaparuddin, & Nuzul, A. (n.d.). *Islam Dan Ketahanan Pangan* (Jumriani (ed.)). Trusmi Media Publishing.
- Tambunan, T. T. (2003). *Perkembangan Sektor Pertanian Di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Ghalia Indonesia.
- Tobing Fahri, I., Siahaan Rahmah Zakia, D., Siregar Utari Sarminata, B., & Harahap, I. (2023). Transformasi Pertanian dan pembangunan perdesaan. *Edunomika*, 07(01), 1–9.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development Twelfth Edition (12th ed.)* Pearson.
- World Bank. (2022). *Agriculture, Forestry, And Fishing, Value added of (GDP%)*. World Bank.

EKONOMI LINGKUNGAN DAN PEMBANGUNAN

(Basri, Oka Musir, Anggita Renata Sari, Salwa Nabella Aksi Humanita)

PENDAHULUAN

Dinamika perkembangan ekonomi global seringkali meminta individu dan masyarakat untuk memilih antara pembangunan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Penelitian di bidang ekonomi-lingkungan memiliki cakupan luas dan dinamis, menunjukkan bagaimana perekonomian kita berinteraksi dengan lingkungan alam (Victor & Jackson, 2020). Namun, degradasi lingkungan dan sumber daya alam dapat terjadi jika tidak menerapkan strategi lingkungan yang tepat. Pembangunan berkelanjutan membutuhkan pertumbuhan ditambah strategi lingkungan yang tepat, serta aspek lain seperti perencanaan jangka panjang, efektivitas biaya, penetapan harga, dan integrasi kebijakan. Hal ini menjadi perhatian banyak negara berkembang, termasuk negara-negara OKI (Konac, 2004). Dunia Islam menghadapi tantangan ganda, yaitu melestarikan lingkungan dan mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Negara-negara anggota OKI memiliki keragaman geografis, sumber daya alam, dan tingkat pembangunan, tetapi mereka juga menghadapi masalah lingkungan yang serupa, seperti perubahan iklim, degradasi lahan, dan kelangkaan air (SESRIC, 2021).

Kekhawatiran degradasi lingkungan meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Revolusi industri memperkenalkan fokus pada pertumbuhan ekonomi, mendorong teknologi dan kesejahteraan sosial. Namun, dibalik ini, tantangan keberlanjutan lingkungan memburuk. Meski demikian, pembangunan ekonomi tidak selalu berdampak buruk pada lingkungan. Pembangunan dapat memperluas pilihan alternatif, seperti alternatif yang lebih bersih, untuk meningkatkan kualitas lingkungan (Ikram *et al.*, 2021). Masalah utama yang sedang dihadapi adalah bagaimana pemahaman masyarakat terkait arti penting sumber

daya alam dan lingkungan sebagai pilar utama bagi pembangunan ekonomi baik di masa sekarang maupun di masa mendatang (Erdolan *et al.*, 2021). Namun, yang terjadi adalah analisis pertumbuhan ekonomi hanya sebagian besar mengacu pada perubahan teknologi dan tenaga kerja, tetapi masih kurang mempertimbangkan sumber daya alam dan lingkungan. Konsep perekonomian modern tidak hanya menyoroti indikator tersebut, tetapi juga sumber daya yang tidak ternilai yang diberikan lingkungan alam kepada manusia.

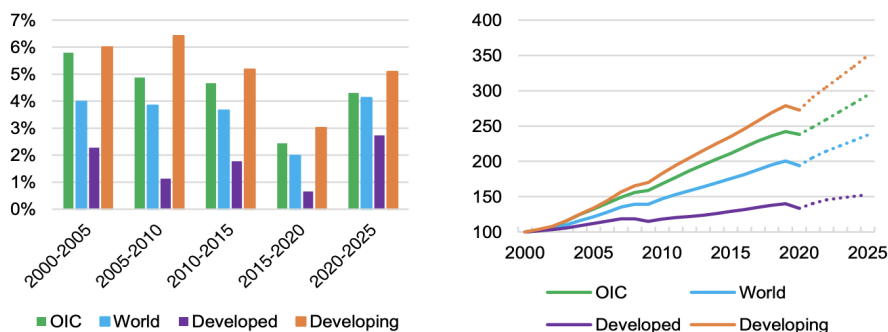
Pentingnya hubungan yang seimbang antara lingkungan dan ekonomi semakin jelas di abad ke-21. Fenomena perubahan iklim yang semakin mengancam keberlangsungan manusia, kerusakan keanekaragaman hayati, dan kekhawatiran persediaan sumber daya alam (Kushawaha *et al.*, 2021). Karena itu, dibutuhkan pendekatan yang holistik yang didasarkan pada gagasan harmoni, keadaan alam (*fitra*), menghormati keseimbangan (*mizan*), dan proporsi (*mikdar*) dalam sistem alam semesta. Standar moral terkait konsumsi dan pelestarian, yang didalilkan oleh agama, berpotensi menjadi pendorong keberlanjutan (Bsoul *et al.*, 2022). Integrasi perspektif agama dalam perilaku manusia terhadap lingkungan dapat memperkuat kebijakan dan tindakan melalui peningkatan etika dan moral terhadap lingkungan.

TEORI DAN KEBIJAKAN

Lingkungan dan Pembangunan: Isu-isu Dasar

Sebagian besar negara-negara yang menganut konsep kapitalisme berfokus pada peningkatan pertumbuhan ekonomi tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Kualitas lingkungan global masih menurun, dan sebagian besar manusia hidup jauh dari tingkat pemenuhan kebutuhan dan aspirasinya. Sementara sebagian lain hidup di luar batas kemampuan lingkungan dan sumber daya alamnya (Mulyani, 2017).

Grafik 1. Pertumbuhan PDB Riil Rata-rata Lima Tahun (Kiri) dan PDB Riil (2000=100) (Kanan)



Source: SESRIC staff calculation based on data from IMF, World Economic Outlook Database, April 2021.

Statistik pada grafik 1. menunjukkan bahwa negara-negara berkembang dan negara-negara OKI telah tumbuh lebih cepat daripada negara-negara maju dalam dua dekade terakhir dan diperkirakan akan terus meningkat hingga tahun 2025. Meskipun PDB dunia meningkat dua kali lipat selama periode 2000-2020, negara-negara berkembang dan negara-negara OKI telah meningkat lebih besar, masing-masing 2,7 kali dan 2,4 kali. Dengan perkiraan tingkat pertumbuhan rata-rata untuk lima tahun ke depan, output negara berkembang diperkirakan akan meningkat 5,1% per tahun dan output negara-negara OKI 4,3% per tahun. Kinerja pertumbuhan yang tinggi ini membutuhkan perhatian lebih pada refleksi lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, terutama bagi negara-negara yang sedang tumbuh dari kemiskinan (SESRIC, 2023).

Pembangunan Berkelanjutan dan Akuntansi Lingkungan

Istilah keberlanjutan mengacu pada keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan. Pembangunan berkelanjutan dapat dipelajari dengan menggunakan analisis ekonomi yang mempertimbangkan manfaat sosial masa depan, kegagalan pasar, dan sumber daya alam sebagai stok modal (Todaro & Smith, 2015). Pertumbuhan ekonomi masa depan dan kualitas kehidupan manusia sangat dipengaruhi oleh kualitas lingkungan hidup saat ini. Oleh karena

itu, perencanaan pembangunan harus melibatkan perhitungan lingkungan dalam kebijakannya. Kelestarian lingkungan harus diperhitungkan sebagai faktor penambah, sementara kerusakan lingkungan sebagai faktor pengurang pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan penduduk secara agregat (Sukarniati *et al.*, 2021). Atas dasar itu, perhitungan GNP harus dikoreksi menjadi NNP* (*sustainable national income*) atau pendapatan nasional neto yang berkesinambungan sebagai berikut:

$$NNP^* = GNP - D_m - D_n$$

Keterangan:

NNP* = Pendapatan nasional neto berkesinambungan

D_m = Depresiasi aset-aset/modal manufaktur

D_n = Depresiasi aset-aset/ modal lingkungan yang dinyatakan dalam satuan moneter ‘uang’ tahunan

Jika dirinci lagi menjadi

$$NNP^* = GNP - D_m - D_n - R - A$$

Keterangan:

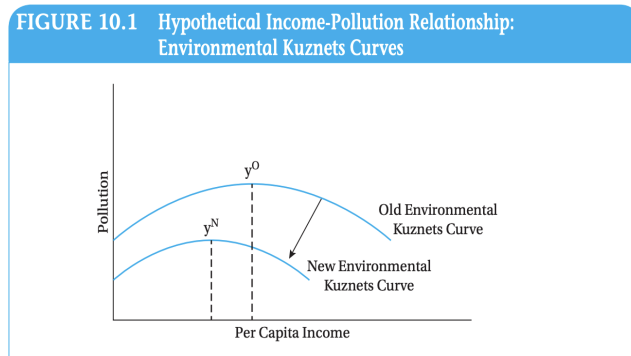
R = Pengeluaran atau belanja yang diperlukan untuk mengembalikan modal lingkungan.

A = Biaya yang harus dikeluarkan untuk memperbaiki kerusakan modal.

Teori Pertumbuhan Ekonomi dengan Lingkungan

Kurva Kuznets Lingkungan (EKC) digunakan untuk menganalisis kinerja lingkungan dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. Awalnya dibuat oleh Kuznets pada 1955, EKC awalnya untuk analisis pendapatan per kapita dan ketimpangan pendapatan, tetapi kemudian digunakan dalam lingkungan hidup. EKC mendefinisikan lintasan polusi dari waktu ke waktu dan pendapatan yang dihasilkan dari pembangunan ekonomi. EKC terbagi menjadi tiga fase: tahap awal pembangunan ekonomi yang ditandai dengan penggunaan sumber daya intensif dan peningkatan degradasi lingkungan, titik balik, dan tahap akhir pembangunan ekonomi yang ditandai dengan mitigasi degradasi lingkungan melalui teknologi dan inovasi ramah lingkungan. (Leal & Marques, 2022).

Grafik 2. Hubungan Hipotesis Pendapatan-Polusi:
Kurva Kuznets Lingkungan



Sumber: Todaro dan Smith, 2015

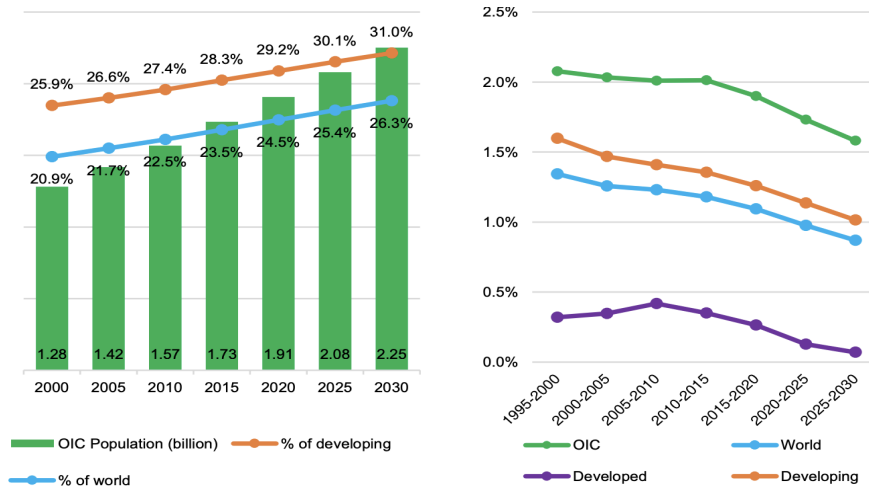
Kurva Kuznets Lingkungan (*Environmental Kuznet Curve*)

Grafik 2. yang mencerminkan konsep bahwa polusi dan degradasi lingkungan lainnya pertama-tama meningkat dan kemudian menurun seiring dengan peningkatan pendapatan per kapita. Terdapat bukti bahwa hal ini berlaku untuk beberapa polutan, seperti sulfur dioksida dan partikel di udara, namun tidak untuk polutan lainnya, seperti emisi gas rumah kaca (Todaro & Smith, 2015).

a. Hubungan Lingkungan Hidup dengan Populasi, Kemiskinan, dan Pertumbuhan Ekonomi

Kemiskinan merupakan permasalahan universal yang terjadi di hampir seluruh negara dari berbagai belahan dunia. Kemiskinan adalah faktor utama penyebab degradasi atau penurunan kualitas lingkungan hidup (Reswita *et al.*, 2021). Salah satunya disebabkan oleh pertumbuhan penduduk di berbagai penjuru. Jika dilihat dari tingkat populasi penduduk dunia, menurut publikasi *World Population Review* negara-negara mayoritas penduduk muslim yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam (OKI) termasuk Indonesia merupakan salah satu dari sepuluh negara dengan populasi penduduk tertinggi di dunia (Firmani & Aif, 2020).

Grafik 3. Populasi OKI dan Pangsanya di Dunia (Kiri) dan Tingkat Pertumbuhan Rata-Rata Lima Tahun Populasi (Kanan)



Source: UN, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2019). World Population Prospects 2019, Online Edition. Rev. 1. population.un.org/wpp/

Grafik 3. Populasi OKI meningkat dua kali lipat dalam 33 tahun, mencapai 1,9 miliar pada tahun 2020, dan sekarang mencapai 29,2% dari populasi negara berkembang dan 24,5% dari populasi global. Meskipun pertumbuhan populasi OKI menurun, rasio ini diperkirakan meningkat hingga 31,0% dan 26,3% pada tahun 2030 dan seterusnya. Hal ini menunjukkan bahwa populasi OKI akan tumbuh lebih cepat daripada negara berkembang lainnya, sehingga perlu perhatian lebih untuk mengendalikan dampak terhadap lingkungan. Penduduk OKI yang meningkat akan meningkatkan polusi udara rumah tangga, menyebabkan penyebaran wabah penyakit di negara berkembang (SESRIK, 2019).

Bukti dari penelitian Safriwan dan Idris (2021), menyatakan bahwa kepadatan penduduk, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap degradasi lingkungan. Selain itu menurut Ridena (2020), penduduk miskin di perkotaan dan ketimpangan pendapatan signifikan menurunkan kualitas lingkungan. Begitu juga diperkuat dengan penelitian Akhirul *et al.* (2020); Pribadi dan Kartiasih (2020);

Purjayanto (2022); Yulin dan Dita (2022), bahwa orang-orang miskin bergantung hidup dari sumber daya alam sehingga memperburuk kualitas lingkungan dan tidak peduli pada manajemen lingkungan untuk menjaga keberlangsungannya dimasa depan.

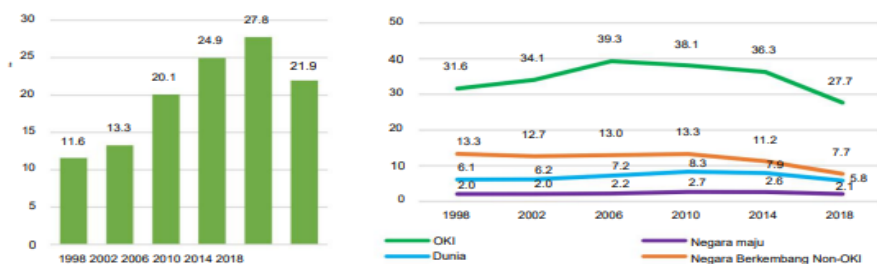
b. Mata Pencaharian Berbasis Sumber Daya Alam Sebagai Jalan Keluar dari Kemiskinan: Peluang dan Hambatan

Terdapat pemahaman yang luas bahwa negara-negara anggota OKI memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah. Dalam konteks ini, sumber daya alam sering kali dianggap sebagai kunci untuk mencapai kemakmuran ekonomi, baik melalui produksi langsung maupun perdagangan (Erum & Hussain, 2019). Data yang tersedia menunjukkan bahwa nilai aset modal alam negara-negara anggota OKI meningkat hampir dua kali lipat (90%) pada periode 1998 hingga 2018, mencapai hingga US\$21,9 triliun namun porsinya dalam total kekayaan menurun dari 32% pada tahun 1998 menjadi 28% pada tahun 2018.

Grafik 4. Modal Alam Negara Anggota OKI (Kiri) dan Bagian Modal Alam dalam Total Kekayaan (Kanan), 1998-2018

Peran Modal Alam dalam Perekonomian

Gambar 4.1. Modal Alam Negara Anggota OKI (Kiri) dan Bagian Modal Alam dalam Total Kekayaan (Kanan), 1998-2018



Sumber: Perhitungan staf SESRIC berdasarkan data dari database Wealth Accounts Bank Dunia.

Hampir seluruh peningkatan modal alam negara-negara OKI berasal dari peningkatan aset subsoil yang tidak terbarukan (137,4%), sehingga aset-aset ini menyumbang hingga 76,5% dari modal alam pada tahun 2018 dibandingkan dengan 61,1% pada tahun 1998. (Gambar 4.2). Pertanian menyumbang lebih dari seperempat modal alam pada tahun 1998, dan pertanian hanya meningkat sebesar 16,8% pada tahun 2018, yang mengakibatkan penurunan porsi modal alam hingga 17%. Hutan menghadapi penurunan tidak hanya pada bagiannya – dari 8,9% menjadi 4,3% – namun juga pada nilainya (-7,8%), yang mengindikasikan ancaman berkurangnya aset hutan di negara-negara OKI.

Berdasarkan grafik 4 Pertanian menyumbang lebih dari seperempat modal alam pada tahun 1998, dan pertanian hanya meningkat sebesar 16,8% pada tahun 2018, yang mengakibatkan penurunan porsi modal alam hingga 17%. Hutan menghadapi penurunan tidak hanya pada bagiannya – dari 8,9% menjadi 4,3% – namun juga pada nilainya (-7,8%), yang mengindikasikan ancaman berkurangnya aset hutan di negara-negara OKI (SESRIC, 2023).

Pendapatan dari sektor lingkungan ini, beserta pengumpulan bahan makanan dan kegiatan sejenisnya, sangatlah penting bagi mayoritas kalangan miskin dan melalui kondisi kebijakan yang tepat dapat menawarkan jalan keluar dari kemiskinan. Namun, di beberapa negara, sebagian besar eksploitasi sumber daya alam tidak lagi berkelanjutan dan telah terjadi dengan cara dan skala yang sering kali mengabaikan kaum miskin. Di Afrika dan Asia, lahan yang tadinya merupakan lahan desa umum mungkin “secara spontan” diprivatisasi. Salah satu solusinya adalah “pemerintahan yang berpihak pada masyarakat miskin,” yaitu pemberdayaan masyarakat miskin dan komunitasnya untuk menuntut hak-hak mereka. Hal ini memperbesar dampak pelatihan yang membantu memadukan pengelolaan ilmiah dengan praktik masyarakat tradisional (Todaro & Smith, 2015).

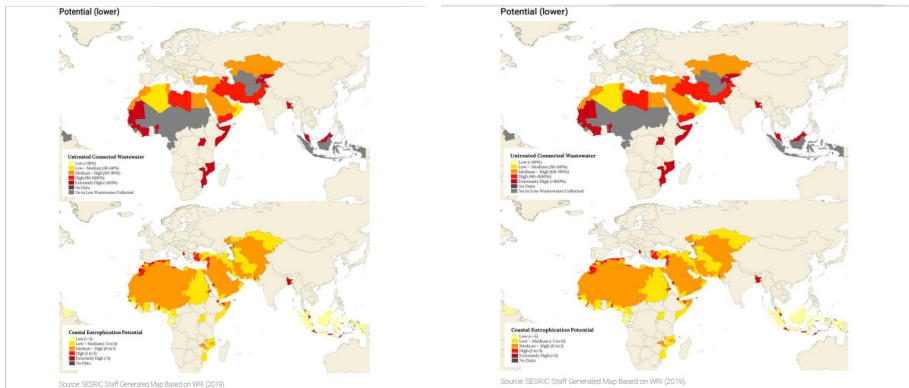
Teori tata kelola sumber daya alam menekankan pentingnya tata kelola yang baik untuk memastikan bahwa sumber daya alam dikelola secara adil, berkelanjutan, dan bermanfaat bagi semua orang. Tata kelola yang buruk dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, kerusakan lingkungan, dan konflik, yang dapat memperparah kemiskinan (Ulum & Ngindana, 2017).

c. Cakupan Kerusakan Lingkungan yang Berasal dari Ranah Komedistik: Suatu Tinjauan

Ada banyak daerah di mana sumber daya air tawar tidak memadai, baik untuk memenuhi kebutuhan domestik dan lingkungan maupun untuk mempertahankan pembangunan ekonomi. Di wilayah seperti itu, orang menderita masalah tekanan air dan kelangkaan air, yang diperburuk oleh banyak faktor seperti meningkatnya permintaan, polusi, infrastruktur yang buruk, perubahan global dengan peristiwa cuaca ekstrem, dan salah urus (SESRIC, 2021). Ketahanan air, kesehatan, dan

pangan membutuhkan air yang cukup dan berkualitas. Pencemaran air dan perubahan hidromorfologi membahayakan kesehatan masyarakat, seperti penyakit yang berhubungan dengan air umum terjadi di negara-negara berkembang dimana air limbah jarang diolah sebelum dibuang ke lingkungan (Dianti, 2017). Di sebagian besar sungai di wilayah OKI, polusi air semakin memburuk sejak tahun 1990-an. Polusi patogen yang parah dan meningkatnya tingkat nutrisi dan salinitas telah terjadi tercatat di berbagai sungai besar di Amerika Latin, Afrika, dan Asia, tempat negara-negara OKI berada.

Gambar 1. Air Limbah Terhubung yang Tidak Diolah (kiri) dan Potensi Eutrofikasi Pesisir (kanan)



Sumber: Peta yang Dibuat Staf SESRIC Berdasarkan WRI (2019)

Gambar 1. menggambarkan status pengolahan air limbah di negara-negara anggota OKI melalui indikator “air limbah terhubung yang tidak diolah”. Indikator ini mengukur persentase air limbah domestik yang terhubung melalui sistem saluran pembuangan dan tidak diolah setidaknya pada tingkat pengolahan primer. Nilai yang lebih tinggi menunjukkan persentase air limbah yang dibuang tanpa pengolahan lebih tinggi (SESRIC, 2021). Dalam teori gaya hidup berkelanjutan menekankan pada pentingnya perubahan gaya hidup individu untuk mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Hal ini dapat mencakup pengurangan konsumsi barang dan jasa, penggunaan energi yang lebih hemat, dan daur ulang sampah (Barr & Gilg, 2006).

d. Pembangunan Daerah Pedesaan dan Lingkungan: Kisah Dua Desa

Negara-negara OKI berpendapatan rendah sebagian besar berada di Afrika Sub-Sahara dan Amerika Latin bergantung pada modal alam pertanian, tidak mampu mendanai infrastruktur kesehatan masyarakat dan lingkungan secara memadai atau memitigasi dampak negatif terhadap lingkungan (SESRIC, 2023)

1) Desa di Afrika Sub-Sahara

Di sebuah desa Afrika Sub-Sahara, ketakutan akan kelangkaan air dan tanah subur menghantui penduduknya. Penebangan hutan dan pengolahan lahan marginal memperparah erosi dan kekeringan, mengancam ketahanan pangan dan kelestarian lingkungan. Para ahli memperingatkan bahaya ini, namun penduduk desa terdesak untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kayu bakar dari hutan menjadi sumber energi utama untuk memasak, dan hilangnya hutan berdampak buruk pada kesuburan tanah dan hasil panen. Desertifikasi, perambahan gurun, semakin mengancam wilayah mereka (Todaro & Smith, 2015).

2) Permukiman di Sekitar Hutan Amazon

Di tepi hutan hujan Amazon, sebuah desa dihuni para petani pendatang yang tergiur janji pemerintah tentang tanah dan kemakmuran. Program permukiman ini sayangnya mendorong pembukaan hutan untuk lahan pertanian. Meskipun subur di awal, kesuburan tanah cepat menurun, memaksa para petani untuk terus membakar hutan demi mencari lahan baru. Praktik ini merusak keanekaragaman hayati hutan hujan yang kaya dan berakibat fatal dalam jangka Panjang (Todaro & Smith, 2015).

Teori Ekologi Manusia mempelajari interaksi antara manusia dan lingkungannya, menekankan bagaimana manusia bergantung dan mempengaruhi lingkungan di pedesaan (Abdullah, 2017).

e. Pemanasan Global dan Perubahan Iklim: Cakupan, mitigasi, dan Adaptasi

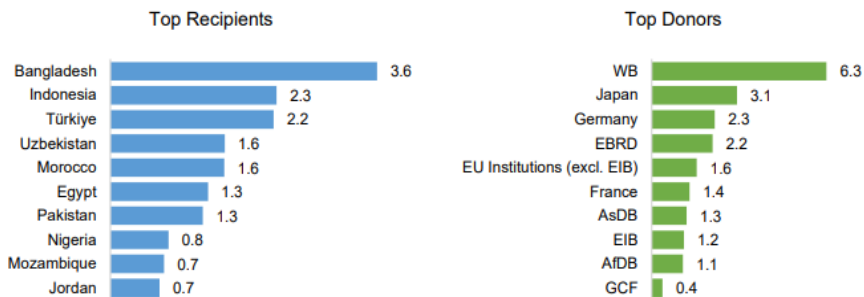
Perubahan iklim terus menimbulkan ancaman besar, termasuk peningkatan suhu, kejadian cuaca ekstrem, kenaikan permukaan laut, dan gangguan terhadap ekosistem dan mata pencaharian. Selama dekade

terakhir, pemanasan global telah mencapai $1,1^{\circ}\text{C}$ di atas tingkat pra-industri dengan berbagai dampak yang sudah sangat luas dan lebih parah dari yang diperkirakan. OKI adalah salah satu negara yang paling rentan karena tingkat keterpaparan yang tinggi dan kapasitas adaptasi yang rendah. Berdasarkan hasil pemodelan (IPCC, 2014), beberapa kenaikan suhu tertinggi diperkirakan terjadi di wilayah kering dan semi-kering, khususnya di SSA, MENA, dan Asia Tengah, dimana banyak negara OKI berada. Wilayah-wilayah tersebut juga harus menanggung dampak negatif perubahan iklim terhadap sumber daya air terbarukan, karena perubahan iklim global diperkirakan akan meningkatkan frekuensi kejadian ekstrim (seperti gelombang panas, kekeringan, dan banjir) dan variabilitas iklim (SESRI, 2023).

Grafik 6. Penerima Pendanaan Perubahan Iklim Terbesar (Kiri) dan Donor untuk Negara-negara OKI (Kanan), Miliar US\$, Rata-rata Tahunan 2018-2019

OIC Environment Report 2023

Figure 9.2. Top 10 Largest Climate Finance Recipients (Left) and Donors for OIC Countries (Right), Billion US\$, Yearly Average 2018-2019



Note: WB=World Bank; EBRD= European Bank for Reconstruction and Development; EIB= European Investment Bank; AsDB=Asian Development Bank; AfDB=African Development Bank; GCF=Green Climate Fund
Source: SESRIC staff calculation based on OECD (2021)

Climate finance includes financial support provided through bilateral (country to country), multilateral (via international institutions), regional and other channels. The

Sumber: Perhitungan staf SESRIC berdasarkan OECD (2021)

Berdasarkan pendanaan iklim, sektor energi menerima porsi pendanaan iklim terbesar sebesar US\$1,71 miliar, diikuti oleh sektor air, sanitasi, dan layanan perkotaan sebesar US\$1,3 miliar, transportasi sebesar US\$908,83 juta, dan pertanian sebesar US\$810,33 juta. Di antara pendanaan perubahan iklim, 48% ditujukan untuk mitigasi iklim, 40% untuk adaptasi iklim, dan 12% untuk proyek yang bertujuan memberikan manfaat adaptasi dan mitigasi (SESRIC, 2023).

Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim tidak hanya berkontribusi dalam mengurangi tekanan terhadap lingkungan namun juga memberikan berbagai manfaat sosial ekonomi dan meningkatkan ketahanan pangan. Pengurangan emisi GRK melalui perbaikan praktik pertanian berpotensi mengurangi total emisi hingga 4,6 Gt CO₂e pada tahun 2050 sekitar 20% dari total emisi dari pertanian, kehutanan, dan perubahan penggunaan lahan. Selain itu, upaya-upaya tersebut akan meningkatkan produksi pangan dan ketahanan terhadap perubahan iklim di masa depan. Hal ini mungkin juga mempunyai manfaat tambahan (peningkatan efisiensi, pengurangan biaya, manfaat tambahan terhadap lingkungan hidup) yang dapat memberikan dampak positif terhadap sektor-sektor lain dalam perekonomian (McKinsey & Company, 2020).

Teori efek rumah kaca merupakan dasar untuk memahami pemanasan global. Teori ini menjelaskan bagaimana gas rumah kaca di atmosfer, seperti karbon dioksida (CO₂), metana (CH₄), dan nitrogen oksida (N₂O), memerangkap panas matahari dan menyebabkan suhu bumi meningkat. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan praktik pertanian intensif memperkuat efek rumah kaca dan mempercepat pemanasan global (Pinontoan *et al.*, 2022).

Model Ekonomi Permasalahan Lingkungan

Pada dasarnya tidak negara yang kebal terhadap risiko lingkungan. Karena itu, investigasi tentang hubungan rumit antara kemakmuran ekonomi dan pelestarian lingkungan telah memberikan tawaran model inovatif dan memberikan panduan yang dibutuhkan mengenai strategi untuk memitigasi kompleksitas problematika lingkungan. Realitas kehidupan manusia modern di negara maju maupun negara berkembang menunjukkan tingkat konsumsi yang tinggi dan berlebihan. Dampak dari

hedonisme dan konsumerisme telah melahirkan keserakahan. Akibatnya telah mengancam kelestarian lingkungan hidup dan sekitarnya. Laporan *United Environment Programme 2022* telah memberikan peringatan keras dampak buruk dari krisis tiga planet yaitu perubahan iklim, hilangnya alam dan keanekaragaman hayati, serta polusi dan limbah diperburuk melebarnya kesenjangan, kenaikan energi dan harga pangan (Lange & Reimagined, 2020).

Situasi yang sama, negara-negara anggota OKI secara kelompok sangat rentan terhadap perubahan lingkungan yang disebabkan oleh meningkatnya aktivitas antropogenik. Situasi ini sangat mengkhawatirkan terutama negara-negara anggota berpendapatan rendah dan kurang berkembang yang memiliki karakteristik rendahnya kapasitas mitigasi dan adaptasi ditambah dengan tingginya kerentanan terhadap degradasi lingkungan. Dengan demikian, sebagai bentuk preventif, negara-negara OKI mengusung program inti tentang keberlanjutan sebagai program Aksi 2025 yang memandu anggota negara untuk melindungi dan melestarikan lingkungan, dan mendorong pola produksi dan konsumsi berkelanjutan serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim (SESRIC, 2021).

Grafik 8. Enviromental Performance Index



Sumber: SESRIC 2021

Grafik 8. jika diamati lebih lanjut mengenai kinerja lingkungan hidup dalam dekade terakhir di dunia dan anggota negara OKI, skor performa lingkungannya mengalami peningkatan. Namun, hal yang menjadi krusial adalah negara-negara OKI yang berpendapatan rendah memiliki skor kinerja lingkungan yang rendah dengan skor rata-rata 30,8 dan ketika dibandingkan dengan negara yang OKI yang memiliki pendapatan tinggi mencapai 47,8. Dengan demikian, fakta ini mengafirmasi bahwa negara-negara OKI berpendapatan rendah sebagian besar berada di Sub-Sahara yang bergantung pada sektor pertanian dan memiliki tantangan pembiayaan pemeliharaan lingkungan.

a. Teori Neo-Klasik

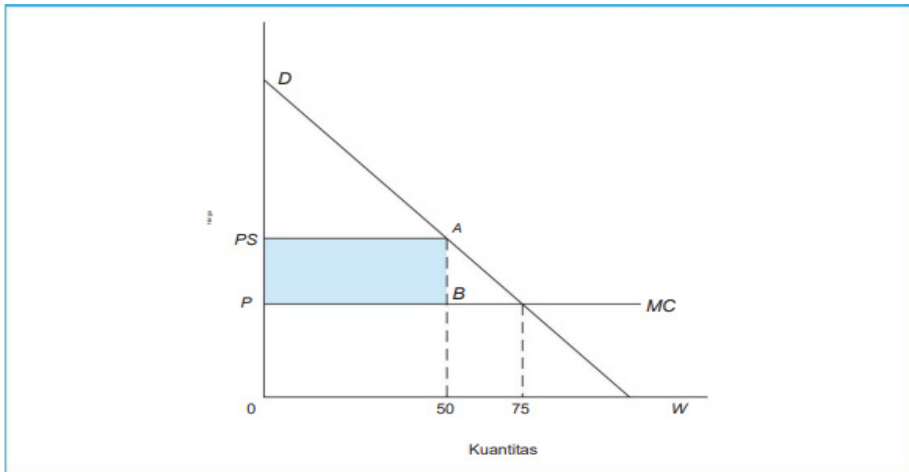
Salah satu kebijakan paling ampuh yang digagas oleh ekonom lingkungan adalah konsep instrumen berbasis pasar bebas. Teori neo-klasik telah diterapkan pada isu-isu lingkungan untuk menentukan kondisi yang dibutuhkan untuk mengalokasikan sumber daya yang efisien dan bagaimana kegagalan pasar menyebabkan inefisiensi, dan memberikan solusi agar tidak terjadi distorsi. Teori neo-klasik pasar bebas menekankan bahwa penyebab utama terjadinya inefisiensi alokasi sumber daya diakibatkan oleh *barier* dalam berjalannya pasar bebas atau ketidaksempurnaan dalam sistem kepemilikan (Todaro & Smith, 2015). Oleh karena itu, pasar hak milik yang sempurna harus memenuhi syarat:

a) Universalitas: semua sumber daya adalah milik pribadi; b) Eksklusivitas: menjunjung tinggi kepemilikan pribadi dan mencegah pihak lain memanfaatkan sumber daya pribadi; c) Transferabilitas: pemilik sumber daya dapat memanfaatkan sumber daya tersebut kapan saja diinginkan; dan d) Keberlakuan: distribusi pasar dari manfaat sumber daya harus ditegakkan.

Gambar 1.3 menunjukkan bagaimana alokasi sumber daya dari waktu ke waktu, dengan asumsi pemilik sumber daya memiliki 75 unit yang tersedia. Kemudian bersedia menawarkan 50 unit untuk di jual pada hari ini. Konteks ini, harga pasar untuk sumber daya yang langka tersebut disebut sebagai *ps* (harga pasar). Pemilik sumber daya akan mengumpulkan sewa kelangkaan yang disebut sebagai *psab* (sewa kelangkaan yang diambil oleh pemilik). Sementara diagram yang diarsir menunjukkan hubungan antara biaya dan marginal. Kemampuan

pemilik untuk mengumpulkan sewa yang bertujuan untuk menciptakan efek penjatahan demi memastikan alokasi sumber daya yang efisien. Namun, jika tidak terjadi kelangkaan, sumber daya akan dijual dengan biaya ekstraksi yang ditentukan oleh biaya marginal (MC). Dalam hal ini, biaya ekstraksi adalah 75 untuk dikonsumsi tanpa ada sewa yang dipungut.

Grafik 9. Efisiensi Statis dalam Alokasi Sumber Daya



Sumber: Todaro dan Smith, 2012

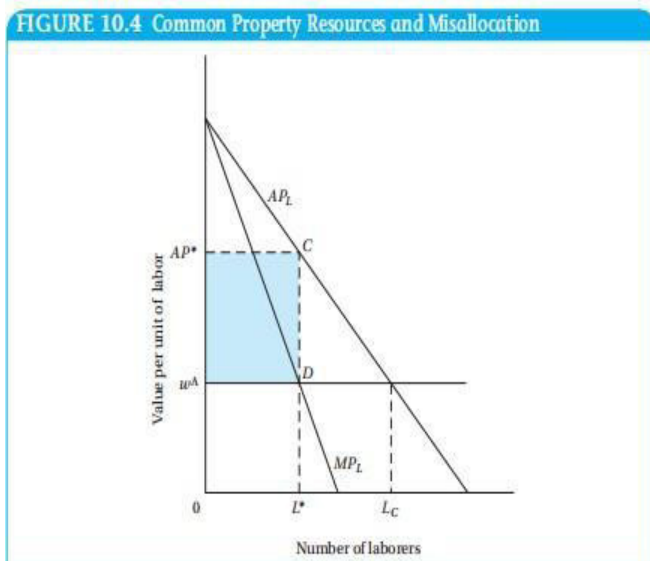
b. Sumber Daya Properti Bersama

Di seluruh dunia terdapat aset-aset yang bukan milik pribadi atau negara, melainkan milik bersama. Istilah ini merujuk pada sekelompok institusi yang mengendalikan kepemilikan dan hak akses terhadap aset (Encyclopedia, 1968).

Sebagai contoh, grafik 10 menunjukkan hubungan antara nilai per unit tenaga kerja pada sebidang tanah dan jumlah pekerja yang mengelolanya. Kebijakan konvensional menyatakan bahwa pemilik tanah akan mempekerjakan tenaga kerja tambahan untuk menggarap tanah tersebut sampai produk marginal pekerja terakhir sama dengan pasar atau upah alternatif ($W_A L^*$). Jika ada pekerja tambahan yang dipekerjakan melebihi L^* , biaya yang ditanggung produsen W_A akan lebih besar dibandingkan dengan produk marginalnya, dan selisih merupakan

kerugian bersih bagi pemilik tanah. Pemaksimalan keuntungan akan mempekerjakan L^* , dengan total output sama dengan produk rata-rata AP^* dikali dengan jumlah pekerja L^* . kelangkaan sewa yang dikumpulkan oleh pemilik tanah akan sama dengan AP^*CDWA .

Grafik 10. Sumber daya milik bersama dan kesalahan alokasi



Sumber: Todaro dan Smith, 2012

Sumber daya milik bersama dalam teori neolasik menyatakan bahwa tanpa adanya kelangkaan sewa, inefisiensi akan muncul. Pada dasarnya neoklasik hanya mementingkan efisiensi dan tidak membahas masalah yang berkaitan dengan keadilan. Distribusi pendapatan bukan sesuatu yang harus dipertibangkan (Todaro & Smith, 2015).

Barang dan Keburukan Publik: Degradasi Lingkungan Regional dan Masalah Penunggang Bebas

Keburukan publik diartikan segala produk atau kondisi yang menurunkan kesejahteraan orang lain secara tidak menyeluruh. Sebagai contoh yang konkrit adalah polusi udara dan pencemaran air, kasus kerusakan lingkungan regional yang disebabkan oleh penggundulan hutan, meningkatnya kekuatan erosi, pengeringan tanah yang berlebihan,

dan potensi perubahan iklim merupakan dampak buruk aktivitas masyarakat yang terkait dengan penebangan hutan atau pembakaran pohon (Todaro & Smith, 2015). Laporan *World Economic Forum* mengungkapkan bahwa bumi memerlukan kewajiban yang mengikat secara hukum untuk membatasi penunggang bebas dan memitigasi iklim. Pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas manusia merupakan kontributor signifikan terhadap frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrem yang mengancam kehidupan.

Konferensi perubahan iklim PBB menghasilkan perjanjian iklim seperti Protokol Kyoto dan Perjanjian Paris. Oleh karena itu, Mitigasi perubahan iklim (CCM) adalah barang publik global. Karakteristik mitigasi perubahan iklim yang tidak dapat dikecualikan ini menciptakan masalah penumpang bebas (*free-rider problem*). Misalnya suatu negara menerima manfaat dari pengurangan emisi GRK tanpa berkontribusi terhadap biaya yang timbul. Negara yang menerapkan kebijakan ramah lingkungan menanggung 100% biaya dalam bentuk penerapan teknologi rendah karbon atau biaya transisi lingkungan. Ketika sejumlah negara mengikuti tindakan yang bersifat rasional dan mementingkan pribadi, hal ini akan menciptakan bencana kolektif-eksploitasi lingkungan yang tidak berkelanjutan. Salah satu kebijakan yang dirancang oleh Uni Eropa “Mekanisme Penyesuaian Perbatasan Karbon” (CBAM) untuk mencegah kebocoran karbon, hal ini menciptakan insentif yang tepat bagi perlindungan iklim. Langkah tersebut bertujuan mencapai emisi GRK *net-zero* pada tahun 2050 (Shukla *et al.*, 2023).

Keterbatasan Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Permasalahan dalam mekanisme penetapan harga barang publik adalah bagaimana mengetahui harga yang harus ditetapkan. Masyarakat tidak mempunyai insentif untuk mengungkapkan seberapa besar manfaat yang sebenarnya mereka peroleh dari suatu barang publik karena dengan mengabaikannya mereka dapat dengan bebas mengambil keuntungan dari kontribusi orang lain dan menghindari membayar bagian mereka secara penuh. Chin (2021), mengungkapkan bahwa barang publik selalu kekurangan pasokan diakibatkan beberapa alasan: individu tidak dikenakan biaya atas penggunaannya, sebagian besar barang publik manfaatnya bagi setiap individu sangatlah kecil, bagi

sebagian besar barang publik, manfaatnya akan dirasakan jauh di masa depan, sedangkan biayanya akan dirasakan saat ini. Oleh karena itu, barang publik akan cenderung kekurangan pasokan jika di diserahkan kepada swasta. Sebagai solusi, pemerintah perlu menegakkan peraturan dan perpajakan, memobilisasi sumber daya untuk menyediakan barang publik dan menghilangkan masalah penumpang bebas.

Pembangunan Perkotaan dan Lingkungan

Kegiatan permukiman perkotaan awal sebagian besar mencakup berburu, meramu, bertani, memancing, berkebun, dan menggembala (Childe, 1950). Kota-kota awal berbeda dari pemukiman desa sebelumnya dalam banyak hal. Pertama, jumlah dan kepadatan penduduk lebih besar di perkotaan. Kedua, semua kota awal memperoleh status sebagai pusat keagamaan, budaya dan ekonomi. Lebih jauh lagi, kota-kota awal melayani perekonomian pertanian lokalnya, menyediakan pasar dan barang yang memungkinkan terjadinya spesialisasi dan pertukaran local (Organisation Of Islamic Cooperation, 2019).

a. Teori Efisiensi: Energi Terbarukan

Efisiensi energi adalah Upaya untuk mengurangi jumlah energi yang digunakan untuk mencapai hasil yang sama atau meningkatkan hasil yang dicapai dengan menggunakan jumlah energi yang sama. Peningkatan efisiensi energi dapat dilakukan di berbagai sektor, seperti bangunan, transportasi, industri, dan sistem kelistrikan. Efisiensi energi memberikan berbagai manfaat yang penting, baik dari segi lingkungan, ekonomi, maupun sosial. Ada beberapa manfaat diantaranya: pengurangan emisi gas rumah kaca, penghematan biaya, keamanan energi, peningkatan kualitas udara, peningkatan kenyamanan dan produktivitas, penciptaan lapangan kerja, dan inovasi teknologi (Uman *et al.*, 2023).

b. Masalah Lingkungan Permukiman Kumuh Perkotaan

Ada beberapa persamaan antara masyarakat miskin perkotaan dengan masyarakat miskin di perdesaan: keluarga kerja dengan jam kerja yang panjang, pendapatan tidak menentu, dan harus ada *trade-off* sulit antara pengeluaran untuk gizi, perawatan Kesehatan, dan Pendidikan. Karena masyarakat miskin perkotaan kurang mampu melindungi diri mereka dari dampak negatif pencemaran lingkungan

dibandingkan mereka yang terbilang kaya. Selain itu, malnutrisi dan kesehatan yang buruk diantara sebagian besar penduduk perkotaan di daerah kumuh cenderung mengurangi resistensi individu terhadap bahaya lingkungan (Todaro & Smith, 2015).

Gambar 2. Penduduk Daerah Kumuh Perkotaan (2014)



Sumber: Organisation Of Islamic Cooperation, 2019)

Di tingkat negara, meskipun banyak penduduk perkotaan OKI yang masih tinggal di daerah kumuh, beberapa anggota OKI jelas mengalami penurunan jumlah penduduk perkotaan selama dua dekade terakhir. Misalnya, jumlah permukiman kumuh di Suriname dan Tunisia berjumlah kurang dari 10% pada tahun 2014. Namun, 20 negara anggota OKI, dengan data yang tersedia, melaporkan lebih dari 50% populasi permukiman kumuh sebagai persentase penduduk perkotaan pada tahun 2014. Di antara negara-negara tersebut, Sudan (91,6%) mempunyai proporsi tertinggi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh, diikuti oleh Chad, Guinea-Bissau dan Mozambik, dimana proporsi penduduk perkotaan yang tinggal di daerah kumuh mencapai lebih dari 80%. (Organisation Of Islamic Cooperation, 2019).

Industrialisasi dan Polusi Udara Perkotaan

Sumber utama polusi udara, yang merupakan ancaman kesehatan terbesar yang terkait dengan modernisasi, adalah penggunaan energi, emisi

kendaraan, dan produksi industri. Industrialisasi dapat menyebabkan peningkatan limbah baik secara langsung melalui emisi atau secara tidak langsung dengan mengubah pola konsumsi dan meningkatkan permintaan terhadap barang-barang manufaktur (Todaro & Smith, 2015). Karbon dioksida (CO₂) merupakan penyumbang utama emisi Gas Rumah Kaca (GRK) global dan terus meningkat sejak tahun 1990-an (IPCC, 2014). Hal ini terutama dihasilkan dari pembakaran bahan bakar untuk keperluan rumah tangga, transportasi dan industri. Mengingat fakta bahwa konsumsi bahan bakar jauh lebih tinggi di negara-negara industri, negara berkembang, dan pengeksport minyak, negara-negara tersebut juga menghasilkan sejumlah besar emisi. Sebagai pusat kegiatan sosial dan ekonomi, kota merupakan sumber utama emisi dan juga pemanasan global serta perubahan iklim. Menurut perkiraan terbaru (IEA, 2016), lebih dari 75% aktivitas ekonomi global terkonsentrasi di wilayah perkotaan. Akibatnya, perkotaan bertanggung jawab atas dua pertiga (67%) konsumsi energi dan lebih dari 70% emisi karbon dari sektor energi (Organisation Of Islamic Cooperation, 2019).

Mengingat tingginya konsentrasi penduduk, aktivitas ekonomi dan infrastruktur, wilayah perkotaan sangat rentan terhadap suhu yang sangat tinggi. Kota-kota sangat rentan akibat efek pulau panas (Tan *et al.*, 2010). Fenomena ini terkait dengan tiga faktor yang berhubungan dengan urbanisasi menurut (Taha, 1997), (1) meningkatnya jumlah permukaan gelap seperti aspal dan bahan atap dengan albedo rendah dan akses masuk tinggi, (2) berkurangnya permukaan vegetasi dan permukaan terbuka yang permeabel seperti sebagai kerikil atau tanah yang berkontribusi terhadap naungan dan evapotranspirasi dan (3) pelepasan panas yang dihasilkan melalui aktivitas manusia (seperti mobil, kondisi udara, dll.).

a. Masalah Kemacetan, Air Bersih, dan Sanitasi

Ancaman peningkatan tingkat emisi polusi industri terhadap kesehatan penduduk perkotaan di negara-negara berkembang sangatlah serius, ada dua faktor lingkungan terpenting yang mempengaruhi kesehatan masyarakat miskin perkotaan adalah tidak dapat diaksesnya air bersih dan kurangnya sanitasi (Todaro & Smith, 2013). Sebagian besar negara anggota OKI akan sangat terpukul oleh perkiraan meningkatnya kondisi kekeringan ekstrim dan berkurangnya tingkat kelangkaan

air dalam beberapa dekade mendatang, hampir separuh negara-negara OKI sudah menghadapi kelangkaan air pada tingkat tertentu. Di antara anggota tersebut, kelangkaan air absolut terjadi di 14 negara, yaitu Kuwait, Uni Emirat Arab, Qatar, Arab Saudi, Yaman, Maladewa, Bahrain, Libya, Yordania, Palestina, Aljazair, Djibouti, Oman, dan Tunisia. Di sisi lain, kekurangan air kronis terjadi di enam negara OKI, yaitu Mesir, Suriah, Burkina Faso, Maroko, Lebanon dan Sudan. Enam negara OKI antara lain mengalami kekurangan air secara rutin, yaitu Pakistan, Somalia, Uganda, Komoro, Nigeria, dan Uzbekistan (Organisation Of Islamic Cooperation, 2019).

Tanpa akses yang memadai terhadap air, sanitasi, atau pembuangan limbah, populasi miskin semakin menambah polusi di tempat pembuangan sampah dan badan air (UN Habitat, 2015). Akibatnya, tingkat polusi udara rumah tangga, layanan air, sanitasi dan kebersihan (WASH) yang tidak aman, dan bahan-bahan beracun menjadi penyebab peningkatan penyakit tidak menular dan dalam skenario terburuk kematian. Di negara-negara anggota OKI, kematian yang disebabkan oleh polusi rumah tangga dan udara sekitar sangatlah tinggi, bahkan di negara-negara yang relatif lebih maju seperti Albania. (Organisation Of Islamic Cooperation, 2019).

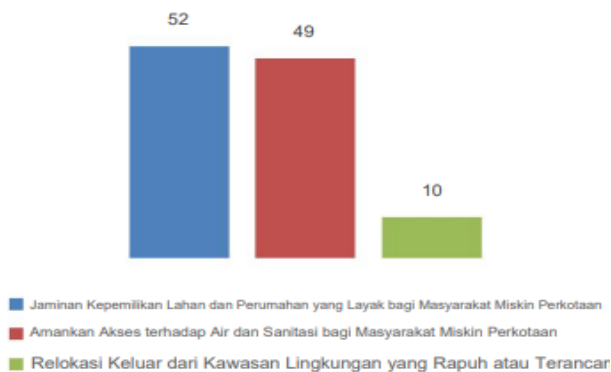
b. Kebijakan Negara OKI

Faktanya, pada tahun 2015, sebagian besar negara OKI telah mengadopsi kebijakan, strategi atau langkah-langkah untuk meningkatkan akses terhadap air dan sanitasi, dan untuk menjamin kepemilikan lahan dan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin perkotaan, seperti yang dapat dilihat pada Gambar 4. Namun, meningkatnya kehadiran permukiman informal di kawasan OKI menunjukkan masalah implementasi yang memadai dari kebijakan tersebut. Pada tahun 2015, Lebanon dan Uzbekistan dilaporkan tidak memiliki kebijakan serupa sama sekali, sementara Brunei, Palestina, Turkmenistan, dan Yaman tidak memiliki kebijakan yang menjamin kepemilikan tanah dan perumahan yang layak bagi masyarakat miskin perkotaan. Untuk membangun kota yang berkelanjutan dan inklusif, penting bagi pemerintah daerah OKI untuk membuat peraturan yang disesuaikan dengan permukiman informal, dan penting untuk bekerja sama dengan penduduknya. Jika

tidak, dampak sosio-ekonomi terhadap seluruh masyarakat mungkin akan sangat negatif (Todaro & Smith, 2013).

Gambar 4. Pemerintah OKI dengan Kebijakan atau Strategi dalam Lima Tahun Terakhir untuk Memperbaiki Kondisi Hidup Masyarakat Miskin Perkotaan (2015)

Gambar 5.1: Pemerintah OKI dengan Kebijakan atau Strategi dalam Lima Tahun Terakhir untuk Memperbaiki Kondisi Hidup Masyarakat Miskin Perkotaan (2015)



Sumber: PBB, *Kebijakan Distribusi Spasial dan Urbanisasi: Buku Data*, PBB, Departemen Ekonomi dan Sosial, Divisi Kependudukan (2016).

Sumber: Organisation Of Islamic Cooperation, 2019

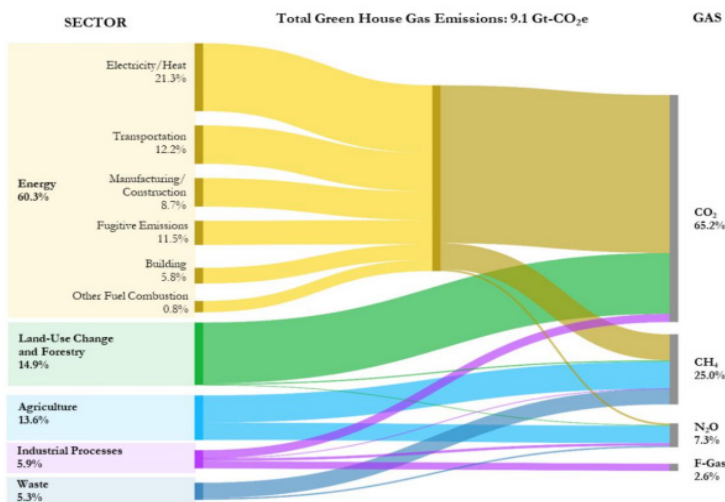
Permukiman kumuh membuat penghuninya (miskin perkotaan) menghadapi risiko-risiko yang dapat dicegah. Risiko-risiko ini mencakup risiko biologis seperti penyakit yang disebabkan oleh air yang tidak aman atau sanitasi yang buruk, risiko kimiawi yang disebabkan oleh polusi, limbah berbahaya, bahan kimia atau proses industri; risiko fisik yang disebabkan oleh kecelakaan atau bencana alam seperti iklim yang keras, banjir, gempa bumi, dll., dan risiko sosial politik seperti insiden terorisme, konflik sosial, kejahatan terorganisir, dan lain lain (Twigg, 2015). Bagi masyarakat miskin perkotaan, sebagian besar risiko perkotaan ini dapat dihindari hanya dengan memperbaiki kondisi perumahan. Namun, seperti yang ditunjukkan Gambar 4. pada tahun 2015 hanya 10 negara OKI (Kamerun, Pantai Gading, Mesir, Indonesia, Maladewa, Mozambik,

Oman, Senegal, Suriname dan Tajikistan) yang telah mengadopsi kebijakan atau strategi dalam lima tahun terakhir, yang bertujuan untuk mencapai tujuan tersebut. merelokasi orang keluar dari daerah yang rentan secara lingkungan dan terancam (SESRIC, 2023).

Biaya Lokal dan Global dari Kerusakan Hutan Hujan

Perubahan pola penggunaan lahan di negara-negara berkembang saat ini memberikan kontribusi terbesar terhadap konsentrasi gas rumah kaca global. Diperkirakan bahwa deforestasi saja menyumbang sekitar 20% emisi karbon dioksida (CO₂) di seluruh dunia. Karena pepohonan mengonsumsi karbon dioksida dan melepaskan oksigen selama proses fotosintesis, hutan hujan tropis mewakili mekanisme penting yang melaluinya ekosistem dapat beregenerasi memakan dirinya sendiri. Penebangan hutan hujan mengurangi kapasitas penyerapan CO₂ oleh lingkungan. Selain itu, percepatan kepunahan menimbulkan ancaman berbahaya terhadap keanekaragaman hayati, dengan perkiraan 12% spesies burung di dunia, 24% spesies mamalia, dan 30% spesies ikan rentan atau berada dalam bahaya kepunahan, sebagian besar berada di kawasan hutan hujan (Todaro & Smith, 2015).

Gambar 5. GRK di OKI berdasarkan Sektor dan Gas, 2019



Sumber: SESRIC, 2023

Seperti terlihat pada Gambar 5. CO₂ Emisi dari sumber antropogenik terutama berasal dari tiga sumber: energi (yaitu pembakaran bahan bakar fosil), perubahan penggunaan lahan dan kehutanan, dan proses industri. Bagian ini secara khusus membahas emisi CO₂ dari pembakaran bahan bakar fosil yang merupakan sumber CO₂ terbesar di negara-negara OKI (SESRIC, 2023).

Berdasarkan Basis Data Emisi untuk Penelitian Atmosfer Global (EDGAR) antara tahun 1990-2020, emisi CO₂ global dari pembakaran bahan bakar fosil meningkat setiap tahunnya sebesar 1,5%, mencapai total 36,0 Gt-CO₂. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama, emisi CO₂ tumbuh lebih cepat di negara-negara OKI yang memiliki rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 3,1%. Tingkat ini juga lebih tinggi dibandingkan tingkat pertumbuhan emisi CO₂ tahunan negara-negara berkembang non-OKI yang sebesar 2,6%. (SESRIC, 2023).

Beberapa langkah harus diambil untuk melestarikan hutan hujan. Negara-negara berkembang dapat meningkatkan efisiensi penggunaan hutan hujan secara ekonomi dengan mengelolanya (kurang dari 1% hutan hujan telah ditanam kembali atau ditebang secara berkelanjutan) dan dengan mengembangkan pasar alternatif untuk produk hutan hujan lainnya, seperti kacang-kacangan, buah-buahan, minyak, pemanis, damar, tanin, serat, bahan bangunan, dan senyawa obat alami. Sebagian besar kayu yang dibakar untuk membuka lahan pertanian dapat dipanen untuk mendapatkan keuntungan finansial (Todaro & Smith, 2015).

LINGKUNGAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM

Allah SWT, telah menciptakan bumi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya sesuai dengan ukurannya. Karena itu, segala sesuatu yang tertakar tidak akan tertukar. Konsep fiqih lingkungan sangat berkaitan dengan *Maqashid Syari'ah* karena menjaga lingkungan merupakan inti dari tujuan syariat sebagaimana yang terakumulasi dalam *ushulul khomsah*

1) menjaga agama (*hifdzu din*) 2) menjaga jiwa (*hifdzu nafs*) 3) menjaga akal (*hifdzu aql*) 4) menjaga keturunan (*hifdzu nasl*) dan 5) menjaga harta (*hifdzu mal*). Kemaslahatan yang dihasilkan harus bersifat universal (mencakup semua) bukan hanya bersifat parsial atau mementingkan golongan saja sehingga memastikan keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan (Jajang *et al.*, 2021).

Islam mengajarkan bahwa manusia adalah khalifah di muka bumi ini. Sebagai ciptaan Tuhan yang monodualis dan monopluralis, sumber daya alam menjadi kebutuhan penting dari kehidupan manusia (Asy'arie & Solissa, 2015). Oleh karena itu, individu mempunyai hak untuk memiliki dan menggunakan properti, mereka pada akhirnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan atas mekanisme mereka mengelola sumber daya alam. Ketika setiap pemimpin negara menyadari betapa pentingnya menyadari dampak dari persoalan lingkungan hidup, Islam memberikan poin penting dan menjadi sorotan akar dari permasalahan tersebut. Al-Jayyousi (2018), Islam memandang bahwa lingkungan sebagai indikator krisis moral dan etika. Oleh karena itu, transisi menuju masyarakat dan ekonomi dengan mengadopsi pembangunan yang bertanggung jawab dan menghormati prinsip keberlanjutan. Perubahan tersebut memerlukan perubahan norma dan praktik. Namun, yang menjadi solusi yang paling ampuh adalah peran agama sebagai perwujudan spiritual yang holistik terhadap manusia, bumi, dan kosmos.

Dalam perkembangannya, kehidupan masyarakat yang plural selalu memunculkan konflik kepentingan untuk memperebutkan peluang dan pendapatan dari sumber daya alam. Kegagalan pasar klasik telah diidentifikasi sebagai penyebab utama yang menimbulkan kerusakan lingkungan (Jackson & Jabbie, 2021). Hal ini, diakibatkan pada pola sistem ekonomi yang menitikberatkan pada pertumbuhan GDP dan mendikotomikan aspek lingkungan hidup. Sejalan dengan wacana privatisasi, Islam sebagai *worldview* yang komprehensif mempunyai pandangan yang khusus mengenai kepemilikan harta benda yang harus di manfaatkan sesuai dengan statusnya. Pada dasarnya kepemilikan pribadi (*al-milkiyah al-fardiyyah*) adalah eksklusivitas syariat yang ada pada setiap individu untuk memanfaatkan barang dan jasa (Suntana, 2010).

Terdapat hakikat penting kepemilikan yang diakui oleh Islam; Pertama, Allah adalah satu-satunya pencipta alam semesta yang memiliki seluruh aset. Kedua, Kekayaan merupakan kemudahan dari Allah SWT untuk memudahkan manusia hidup di muka bumi, Ketiga, Allah telah melimpahkan kepemilikan dalam hal ini meliputi (perseorangan, milik umum, dan milik negara) (Herman, 2019). Sumber daya alam telah dikelola oleh manusia untuk kepentingan masing-masing. Kepemilikan umum dimiliki secara kolektif oleh masyarakat, meliputi hal-hal yang

bermanfaat bagi semua anggota masyarakat. Hukum Islam menempatkan pemerintah sebagai pengelola kepemilikan umum demi rakyat dan kemaslahatan bersama.

Islam memandang sumber daya alam (SDA) sebagai karunia Allah SWT yang diamanahkan kepada manusia untuk dikelola dan dimanfaatkan demi kemaslahatan bersama. Pemanfaatan SDA harus dilakukan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan, dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan keadilan sosial. Kemiskinan, sebagaisalah satu permasalahan krusialumat manusia, dapat diatasi dengan mengoptimalkan pemanfaatan SDA hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Al-An'am (6): 95-99 bahwa Allah SWT menciptakan bumi dan segala isinya untuk dimanfaatkan oleh manusia. Manusia diperintahkan untuk bersyukur atas nikmat tersebut dan menggunakannya dengan bijak (Mangunjaya, 2019).

Islam memandang alam semesta dan segala isinya, termasuk bumi dan iklimnya, sebagai ciptaan Allah SWT yang sempurna dan seimbang. Manusia sebagai khalifah di bumi diamanahkan untuk menjaga keseimbangan tersebut. Pemanasan global dan perubahan iklim, yang disebabkan oleh aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab, merupakan salah satu bentuk kerusakan alam yang serius (Leu, 2021). Hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang menekankan kelestarian lingkungan dan tanggung jawab manusia terhadap alam.

Dijelaskan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 41 :

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ
يَرْجِعُونَ

Artinya: "Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar)." (QS. Ar-Rum: 41)

Ayat di atas menjelaskan tentang kejelasan larangan umat manusia untuk berbuat munkar di muka bumi. Dalam tafsir kemenag menjelaskan bahwa kerusakan di daratan dan lautan berupa pencemaran alam sehingga tidak layak untuk didiamkan. Perusakan yang dilakukan oleh manusia misalnya eksploitasi alam yang berlebihan, peperangan, percobaan senjata, dan lain sebagainya. Kemudian dalam tafsir jalalain oleh Jalaluddin al-

Mahalli & Jalaluddin as-Suyuthi menafsirkan kerusakan yang tampak di darat disebabkan oleh perbuatan tangan manusia nantinya diberi hukuman supaya mereka bertobat. Islam tidak sama sekali melarang pemanfaatan lingkungan hidup untuk kesejahteraan manusia, namun menghendaki pemanfaatan yang berlebihan.

KESIMPULAN

Penyelidikan tentang ekonomi dan lingkungan selalu bersifat dinamis. Fakta ini mencerminkan cara perekonomian berinteraksi dengan sumber daya alam. Isu ini telah memicu berbagai gelombang penelitian dengan hasil yang menonjol, tak terkecuali kebijakan yang harus dioptimalkan dalam menghadapi tantangan tersebut. Alam tidak hanya menempati posisi sebagai objek yang dapat direduksi menjadi nilai tukar pasar. Demikian pula pembangunan berkelanjutan dan akuntansi lingkungan bertujuan untuk menganalisis manfaat sosial ekonomi dan kegagalan pasar di masa yang akan datang. Melibatkan fungsi biaya lingkungan dan dampaknya tentu sangat berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Secara teoritis Kurva Lingkungan Kuznets (EKC) adalah suatu konsep dalam ekonomi yang menjelaskan hubungan antara pertumbuhan ekonomi dan degradasi lingkungan. Dalam arti, EKC menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang lebih lanjut dapat mengurangi degradasi lingkungan, sehingga mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kualitas lingkungan.

Berbagai problematika di perkotaan seperti pencemaran polusi udara dan permukiman kumuh. Sementara itu, yang mempengaruhi kesehatan masyarakat miskin perkotaan adalah tidak dapat diaksesnya air bersih dan kurangnya sanitasi. Oleh karena itu, manfaat penerapan energi terbarukan merupakan hal penting diterapkan. *Pertama*, Penerapan energi terbarukan secara signifikan membantu mengurangi dampak lingkungan. Dengan mengandalkan sumber daya yang dapat diperbarui, kita dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang merusak lingkungan. *Kedua*, pemanfaatan energi terbarukan juga memberikan efisiensi energi yang signifikan. Dengan memanfaatkan sumber daya alam yang berkelanjutan, kita dapat mengurangi biaya energi jangka panjang dan meningkatkan efisiensi penggunaan energi.

Mata pencaharian berbasis sumber daya alam sebagai jalan

keluar dari kemiskinan memerlukan kebijakan tepat, tata kelola baik, pemberdayaan masyarakat miskin, dan upaya berkelanjutan untuk mengatasi dampak perubahan iklim. Potensi ekonomi dari sumber daya alam harus dimanfaatkan secara optimal dan berkelanjutan, dengan kebutuhan untuk keadilan dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Perspektif Islam yang fundamental adalah kemaslahatan bersama, dengan masalah sebagai parameter pembentukan kebijakan alokasi sumber daya yang mengadaptasi rasa keadilan untuk semua orang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, O. S. (2017). *Ekologi Manusia dan Pembangunan Berkelanjutan*. Gramedia Pustaka Utama.
- Akhirul, Witra, Y., Umar, I., & Erianjoni. (2020). Dampak Negatif Pertumbuhan Penduduk Terhadap Lingkungan Dan Upaya Mengatasinya. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Ligkungan*, 1(3), 76–84.
- Al-Jayyousi, O. (2018). *How Islam Can Represent a Model for Environmental Stewardship*. UN Environment Programme.
- Asy'arie, M., & Solissa, A. B. (2015). *Filsafat ekonomi Islam*. LESFI (Lembaga Studi Filsafat Islam).
- Barr, S., & Gilg, A. (2006). Sustainable lifestyles: Framing environmental action in and around the home. *Geoforum*, 37(6), 906–920. <https://doi.org/10.1016/j.geoforum.2006.05.002>
- Bilgen, S. (2014). Structure and environmental impact of global energy consumption. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 38, 890– 902.
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis. *Social Sciences*, 11(6). <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Childe, V. G. (1950). The Urban Revolution (Childe 1950). *The Town Planning Review*, 21(1), 3–17. <http://www.jstor.org/stable/40102108>
- Chin, M. (2021). What Are Global Public Goods? *Finance & Development*, 62–63. <https://www.imf.org/en/Publications/>

- fa nd d / i s s u e s / 2 0 2 1 / 1 2 / G l o b a l - P u b l i c - G o o d s - C h i n - b a s i c s # : ~ : t e x t = P u b l i c g o o d s a r e t h o s e t h a t , l o c a l % 2 C n a t i o n a l % 2 C o r g l o b a l .
- Dianti, Y. (2017). Wastewater The Untapped Resource. In *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Erdolan, S., Çakar, N. D., Ulucak, R., Danish, & Kassouri, Y. (2021). The role of natural resources abundance and dependence in achieving environmental sustainability: evidence from resource based economies. *Sustainable Development*, 29(1), 143–154.
- Erum, N., & Hussain, S. (2019). Corruption, natural resources and economic growth: Evidence from OIC countries. *Resources Policy*, 63(March), 101429. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2019.101429>
- Firmani, I., & Aif, M. T. (2020). Pengaruh Globalisasi Ekonomi, IPM, dan Populasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Tujuh Negara Anggota OKI. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 273–284.
- Herman, B. S. (2019). *Islamic Perspective : Case of Indonesia*. 19(6).
- Hofste, R., Kuzma, S., Walker, S., Sutanudjaja, E., Bierkens, M., Kuijper, M., Faneca Sanchez, M., Van Beek, R., Wada, Y., Galvis Rodríguez, S., & Reig, P. (2019). Aqueduct 3.0: Updated Decision-Relevant Global Water Risk Indicators. *World Resources Institute*, July, 1–53. <https://doi.org/10.46830/writn.18.00146>
- Ikram, M., Ferasso, M., Sroufe, R., & Zhang, Q. (2021). Assessing green technology indicators for cleaner production and sustainable investments in a developing country context. *Journal of Cleaner Production*, 322, 129090.
- IPCC. (2014). Part A: Global and Sectoral Aspects. (Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change). *Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability.*, 1132. https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg2/WGIIAR5-FrontMatterA_FINAL.pdf
- Jackson, E. A., & Jabbie, M. (2021). *Understanding Market Failure in the Developing Country Context*. 1095–1105. https://doi.org/10.1007/978-98-1-10-7000-0_10

- org/10.1007/978-3-319-95867-5_44
- Jajang, Cupian, Arif, M. N. R. Al, Arundina, T., Widiastuti, T., Mubarak, F., Fajri, M., Azozon, & Nurasyiah, A. (2021). *Ekonomi pembangunan Islam* (Edisi 1). KNEKS.
- Kerr, G. (2023). Neo-classical liberalism, 'market freedom', and the right to private property. *Critical Review of International Social and Political Philosophy*, 26(6), 855–876. <https://doi.org/10.1080/13698230.2020.1805192>
- Konac, H. (2004). Environmental issues and sustainable development in OIC Countries. *Journal of Economic Cooperation*, 25(4), 1–60.
- Kushawaha, J., Borra, S., Kushawaha, A. K., Singh, G., & Singh, P. (2021). Climate change and its impact on natural resources. In *Water conservation in the era of global climate change* (pp. 333–346). Elsevier.
- Lange, B. H., & Reimagined, S. (2020). *SMPTE Reimagined!* 2024.
- Leal, P. H., & Marques, A. C. (2022). The evolution of the environmental Kuznets curve hypothesis assessment: A literature review under a critical analysis perspective. *Heliyon*, 8(11). <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11521>
- Leo, U., & Singh, N. (2022). *Why the planet needs legally binding obligations to limit climate-mitigation "free-riders."* World Economic Forum.
- Leu, B. (2021). Dampak Pemanasan Global Dan Upaya Pengen- Daliannya Melalui Pendidikan Lingkungan. *Jurnal At Tadbir STAI Darul Kamal NW Kembang Kerang NTB*, 5(2), 1–15.
- Mahony, T. O. (2021). Cost-Benefit Analysis and the environment : The time horizon is of the essence. *Environmental Impact Assessment Review*, 89, 106587. <https://doi.org/10.1016/j.eiar.2021.106587>
- Mulyani, E. (2017). Ekonomi Pembagunan. In *Angewandte Chemie International Edition* (Vol. 6, Issue 11).
- Ostrom, E., & Gardner, R. (1993). Coping with asymmetries in the commons: self-governing irrigation systems can work. *Journal of Economic Perspectives*, 7(4), 93–112.
- Pearce, D., Atkinson, G., & Mourato, S. (2006). Willingness to Pay vs. Willingness to Accept. In *Cost-Benefit Analysis and the Environment*. <https://doi.org/10.1787/9789264010055-12-en>
- Pinontoan, O. R., Oksfriani, Sumampouw, J., & Nelwan, J. E. (2022).

- Global Perubahan Iklim Dan Pemanasan* (Cetakan I). CV Budi Utama.
- Pribadi, W., & Kartiasih, F. (2020). Enviromental Quality and Poverty in Indonesia. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan*, 10(1), 89–97. <https://doi.org/10.29244/jpsl.10.1.89-97>
- Purjayanto, Y. (2022). Analisis pengaruh pembangunan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan kepadatan penduduk terhadap kerusakan lingkungan di pulau jawa. *BESTARI:Buletin Statistika Dan Aplikasi Terkini*, III, 21–27. <https://bestari.bpskalitim.com/index.php/bestari-bpskalitim/article/view/40%0Ahttps://bestari.bpskalitim.com/index.php/bestari-bpskalitim/article/download/40/28>
- Rapanna, P., & Fajriah, Y. (2018). *Menembus Badai Ekonomi* (Sahidah (ed.); Cetakan 1). Sah Media.
- Reswita, Gita, M., & Reflis. (2021). *Hubungan Degradasi Lingkungan dengan Kemiskinan*. 2(6), 1737–1746.
- Ridena, S. (2020). Kemiskinan Dan Lingkungan: Perspektif Kemiskinan Di Perkotaan Dan Pedesaan. *Jurnal Litbang Sukowati : Media Penelitian Dan Pengembangan*, 5(1), 39–48. <https://doi.org/10.32630/sukowati.v5i1.196>
- Safriwan, S., & Idris, I. (2021). Pengaruh Globalisasi Kepadatan Penduduk dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Degradasi Lingkungan di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 3(1), 57. <https://doi.org/10.24036/jkep.v3i1.13519>
- SESRIC. (2021a). *Oic Environment Report 2021*. SESRIC. (2021b). *OIC Water Report 2021*.
- SESRIC. (2023). *OIC Environment Report 2023 Resilient Recovery for a Sustainable Environment Organisation of Islamic Cooperation Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for Islamic Countries*.
- Shukla, P. ., Skea, J., Slade, A., Al Khourdajie, A., van Diemen, R., McCollum, D., Pathak, M., Some, S., Vyas, P., Fradera, R., Belkacemi, M., Hasija, A., Lisboa, G., Luz, S., & Malley, J. (2023). Summary for Policymakers in Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change. Contribution of Working Group III to the Sixth Assessment Report of the IPCC. In *Climate Change 2022- Mitigation of Climate Change*.

- Suntana, I. (2010). *Politik Ekonomi Islam (siyasah maliyah) : Teori-teori pengelolaan sumber daya alam, hukum pengairan Islam dan undang-undang sumber daya air di indonesia*. CV Pustaka Setia.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economic Development* (Twelfth Ed). Boston : Pearson Education.
- Twigg, J. (2015). Disaster Risk Reduction- Good Practice Review 9. *Good Practice Review 9*, No. 9, 1-382. <https://odihpn.org/wp-content/uploads/2011/06/GPR-9-web-string-1.pdf>
- Ulum, M. C., & Ngindana, R. (2017). *Environmental Governance: Isu Kebijakan dan Tata Kelola Lingkungan Hidup* (Cetakan 1). Universitas Brawijaya Press.
- Victor, P. A., & Jackson, T. (2020). A research agenda for ecological macroeconomics. *Sustainable Wellbeing Futures*, 357-372.
- Yulin, C., & Dita, E. (2022). Analisis Kepadatan Penduduk Yang Berpengaruh Terhadap Kemiskinan Dan Degradasi Lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIIS)*, 01, 1-12.

PERAN PASAR, NEGARA, DAN MASYARAKAT SIPIL DALAM PEMBANGUNAN

(M. A Sahal Baihaqi, Hasan Bisri, Ismayanti, Era Suryadi Putri)

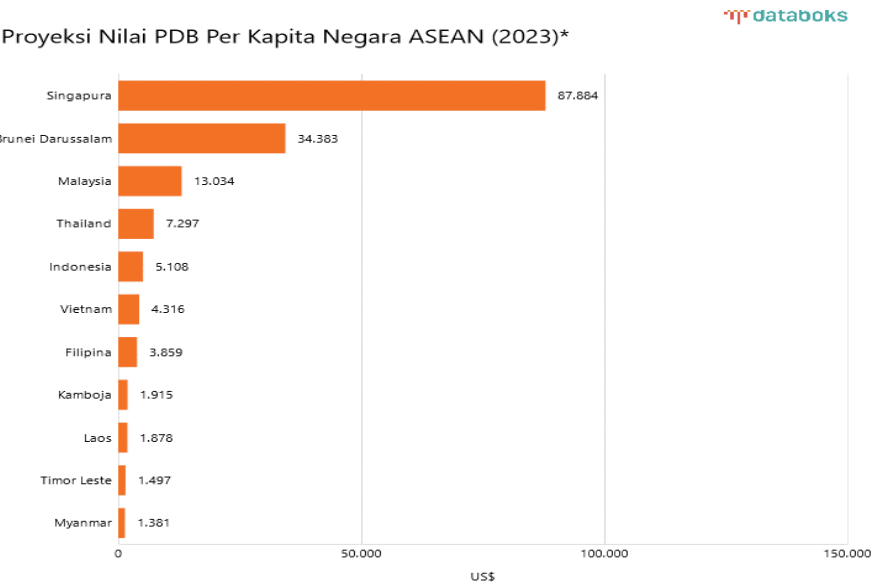
PENDAHULUAN

Isu-isu dalam pembangunan dapat bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan di suatu negara. Dengan memahami isu-isu tersebut secara holistik maka negara dapat mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Pembangunan adalah proses yang bertujuan untuk mencapai kemakmuran bagi masyarakat dengan mengembangkan perekonomian. Keberhasilan pembangunan dapat dinilai dari pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, serta tingkat kesenjangan ekonomi di antara penduduk, wilayah, dan sektor. Selain menciptakan pertumbuhan ekonomi yang optimal, tujuan utama dari upaya pembangunan ekonomi adalah mengurangi atau menghilangkan kemiskinan, kesenjangan pendapatan, dan tingkat pengangguran (Todaro, 1999).

Berbagai negara menghadapi beberapa isu penting dalam pembangunan seperti kemiskinan dan ketimpangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian dan pangan, tata kelola, teknologi dan informasi. Isu-isu tersebut menyoroti kompleksitas pembangunan dan memperlihatkan betapa pentingnya pendekatan holistik dalam mengatasi tantangan pembangunan. Dari pengentasan kemiskinan hingga peningkatan akses terhadap teknologi, setiap aspek memainkan peran kunci dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif. Isu-isu ini juga saling terkait satu sama lain; misalnya, pendidikan berkualitas dapat membantu mengurangi kemiskinan karena pendidikan adalah peluang dan investasi yang memberikan kesempatan untuk bersaing dalam mencapai kehidupan yang lebih baik di masa depan, serta berperan aktif dalam proses pembangunan (Ustama, 2009).

Sementara pertumbuhan ekonomi yang inklusif dapat meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur (Citra Irawan, 2023). Dengan pemahaman yang mendalam tentang isu-isu ini, negara-negara dapat merancang kebijakan yang efektif dan berkelanjutan untuk mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik bagi semua lapisan masyarakat. Ini memerlukan kerja sama antara pemerintah, sektor swasta, masyarakat sipil, dan lembaga internasional untuk mengimplementasikan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan.

Gambar 1. Perbandingan PDB Per Kapita Negara Asean 2023



Sumber : International Monetary Fund

Meskipun Indonesia memiliki ekonomi terbesar di ASEAN, namun jika dilihat dari pendapatan per kapita, Indonesia masih kalah dari negara- negara tetangga di kawasan. Pada tahun 2023, proyeksi nilai PDB Indonesia diperkirakan mencapai US\$1,4 triliun. Angka tersebut setara dengan 36,7% dari total PDB ASEAN, atau 1,4% dari total PDB global. Dengan proyeksi tersebut, Indonesia menjadi negara terbesar di ASEAN dan menempati peringkat ke-16 di dunia menurut nilai PDB. Meskipun demikian, PDB per kapita Indonesia pada tahun 2023 hanya

sebesar US\$5,1 ribu, yang merupakan sekitar 17 kali lebih rendah daripada Singapura. Secara per kapita, ekonomi Indonesia hanya berada di peringkat kelima di ASEAN, masih kalah dari Brunei Darussalam, Malaysia, dan Thailand.

Gambar 2. Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin di Indonesia
Maret 2012-Maret 2023



Sumber : Badan Pusat Statistik

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), sejumlah faktor berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan nasional pada Maret 2023, antara lain:

- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun, dari 5,86% (Agustus 2022) menjadi 5,45% (Februari 2023).
- Nilai Tukar Petani (NTP) mengalami kenaikan, dari 106,82 (September 2022) menjadi 110,85 (Maret 2023).
- Laju inflasi mengalami penurunan, dari 3,6 (Maret 2022-September 2022) menjadi 1,32 (September 2022-Maret 2023).
- Konsumsi rumah tangga pada kuartal I 2023 mengalami peningkatan sebesar 2,21% dibandingkan dengan kuartal III 2022.

Meskipun terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023, Indonesia tetap berada di peringkat kelima di antara negara-

negara ASEAN, di bawah Thailand, Brunei Darussalam, Malaysia, dan Singapura. Hal ini terjadi meskipun Indonesia memiliki luas wilayah yang mencapai 8,3 juta km². Masih menjadi pertanyaan bagaimana, dengan sumber daya alam dan manusia yang melimpah, Indonesia masih memiliki jumlah penduduk miskin yang signifikan.

Pengaruh kualitas sumber daya manusia sangat berperan penting dalam pengentasan kemiskinan utamanya dalam tingkat pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia memiliki pengaruh negatif dan signifikan. Artinya, peningkatan tingkat pendidikan dapat mengurangi jumlah penduduk miskin di Indonesia. Ketika seseorang memiliki pendidikan yang berkualitas tinggi, diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan menghasilkan pendapatan yang optimal. Dengan pendapatan yang tinggi, kebutuhan dasar dapat terpenuhi, yang pada gilirannya dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di negara tersebut (Nila Isroviyah, 2020).

Dalam konteks pembangunan harus menitik beratkan pada sebuah kebijakan publik yang tepat. Kebijakan publik harus diwujudkan dalam bentuk konkret untuk kepentingan negara dan bangsa. Tahapan-tahapan dalam proses kebijakan publik meliputi identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi (Muadi *et al.*, 2016). Pengambilan kebijakan publik yang demokratis memerlukan partisipasi masyarakat yang aktif. Masa kekuasaan otoriter selama lebih dari 30 tahun di Indonesia telah menghambat sosialisasi partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan. Untuk menciptakan kebijakan yang representatif, partisipasi masyarakat secara aktif diperlukan sebagai kontrol terhadap kekuasaan dan sebagai sumber masukan dalam pembuatan kebijakan. Sinergi antara partisipasi melalui struktur mediasi dan partisipasi langsung diperlukan untuk mengatasi ketimpangan akses partisipasi. Partisipasi melalui struktur mediasi dapat meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi mereka, sementara partisipasi langsung dapat digunakan untuk memberikan tekanan sosial kepada pemegang kekuasaan saat proses politik mengalami distorsi (Sutrisna, 2020).

Pembangunan manusia adalah pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup manusia. Oleh karena itu, kebijakan publik di Indonesia terus

berupaya untuk mencakup aspek-aspek tersebut dalam rangka mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selain itu, peran pasar memainkan peran penting dalam pembangunan SDM melalui akses terhadap pendidikan, penentuan upah, inovasi, mobilitas pekerjaan, dan pemberdayaan ekonomi. Namun, perlu ada pengawasan pemerintah dan dukungan masyarakat untuk memastikan bahwa pasar beroperasi secara adil dan efisien serta memberikan perlindungan bagi yang rentan.

TEORI DAN KEBIJAKAN

Peran Pasar

Pasar mempunyai peran yang positif, tidak terkecuali menyediakan barang yang diinginkan konsumen. Pasar membutuhkan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, demi kelancaran transaksi di pasar itu sendiri. Ada beberapa kebijakan yang perlu diterapkan dalam pasar, seperti kondisi sosial yang baik, hukum yang tegas, dan kondisi sosial khusus yang sesuai dengan pasar tersebut. Dalam suatu negara tidak sedikit ditemukan peristiwa seperti penipuan, korupsi, monopoli, dan kegagalan pasar lainnya tidak dapat dihentikan atau dihilangkan dengan teori ekonomi neoklasik (Todaro & Smith, 2005).

Di bawah ini sistem pasar yang berfungsi dengan baik bergantung pada setidaknya 12 yang memfasilitasi praktik hukum dan ekonomi pasar sebagai berikut: 1) Hak milik ditetapkan dan dibatasi dengan jelas, kemudian prosedur untuk menetapkan hak milik dan pengalihan kepemilikan. 2) Hukum komersial dan peradilan yang independen untuk menegakkannya, khususnya hukum kontrak. 3) Kebebasan untuk mendirikan usaha di semua sektor, tanpa persyaratan perizinan yang berlebihan. 4) Mata uang dan sistem perbankan yang stabil, termasuk sistem yang efektif dan efisien untuk melakukan transaksi. 5) Pengawasan publik 6) Penyediaan informasi yang memadai di setiap pasar tentang karakteristik produk yang ditawarkan kepada pembeli maupun penjual. 7) Perlindungan preferensi konsumen dari pengaruh produsen dan pemasok. 8) Pengelolaan eksternalitas publik (baik yang merugikan maupun menguntungkan) dan penyediaan barang publik. 9) Instrumen untuk melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang stabil (Gultom & Tini, 2020). 10) Penyediaan kenyamanan untuk mempertahankan konsumsi yang memadai bagi individu yang terkena dampak kemalangan

ekonomi tertentu, terutama pengangguran paksa, cedera industri, dan cacat kerja. 11) Mendorong inovasi, khususnya penerbitan, penegakan paten dan hak cipta (Gultom & Tini, 2020). 12) Keamanan dari kekerasan yang menjadi fondasi sosial yang paling utama (Todaro & Smith, 2005).

Peran Negara

Peran pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat penting dan meliputi berbagai aspek yakni (Gultom & Tini, 2020) : 1) Kebijakan Fiskal dan Moneter: Pemerintah menggunakan kebijakan fiskal (terkait pendapatan dan pengeluaran) dan moneter (terkait uang dan kredit) untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan pengangguran. Ini melibatkan pengaturan pajak, pengeluaran publik, suku bunga, dan kebijakan lainnya. 2) Pembangunan Infrastruktur :Pemerintah memainkan peran kunci dalam membangun infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan raya, pelabuhan, bandara, dan listrik. Infrastruktur yang baik membuka akses ke pasar, memperlancar perdagangan, dan meningkatkan efisiensi produksi. 3) Pendidikan dan Kesehatan: Investasi dalam pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang yang penting untuk pembangunan manusia. Pemerintah dapat meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia. 4) Kebijakan Regulasi dan Peraturan: Pemerintah bertanggung jawab untuk membuat kebijakan regulasi dan peraturan yang menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif. Hal ini mencakup peraturan tentang persaingan usaha, hak kekayaan intelektual, dan perlindungan konsumen. 5) Pemberdayaan UMKM: Pemerintah sering kali memiliki program untuk mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) melalui pelatihan, pembiayaan, akses pasar, dan fasilitasi bisnis lainnya. UMKM sering kali menjadi tulang punggung ekonomi lokal dan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Peran Warga Sipil

Semakin diakui bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya bergantung pada sektor swasta yang dinamis dan sektor publik yang efisien, tetapi juga pada sektor warga yang kuat. Organisasi sektor

warga biasanya disebut organisasi nonpemerintah (LSM) dalam konteks pembangunan tetapi juga disebut sebagai organisasi nirlaba, sukarela, independen, masyarakat sipil, atau warga (Todaro & Smith, 2005).

Sementara pemerintah memiliki otoritas untuk mencapai hasil, lalu sektor swasta mengandalkan mekanisme pasar untuk mendapatkan keuntungan, dan sektor LSM mengandalkan upaya sukarela dan pengaruh untuk mempromosikan nilai-nilai mereka dan untuk pengembangan sosial dan ekonomi lebih lanjut (Todaro & Smith, 2005). Peran masyarakat sipil dalam pembangunan sangat penting karena mereka memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat, membangun kapasitas lokal, dan memperkuat prinsip-prinsip demokrasi serta keadilan sosial (Herdiansah, 2016).

Salah satu peran utama masyarakat sipil dalam pembangunan adalah sebagai pemantau dan pengawas terhadap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Setidaknya ada tujuh jenis keunggulan komparatif organisasi yang baik dan saling memperkuat untuk LSM internasional atau nasional atau organisasi lokal seperti federasi organisasi berbasis Masyarakat (Todaro & Smith, 2005). 1) Inovasi. 2) Fleksibilitas program 3) Pengetahuan teknis khusus 4) Barang publik lokal yang ditargetkan 5) Desain dan implementasi manajemen sumber daya properti bersama 6) Kepercayaan dan kredibilitas 7) Representasi dan advokasi.

Kebijakan Pembangunan di Indonesia Pembangunan Ekonomi Daerah

Dalam Undang-undang Otonomi Daerah Nomor 23 Tahun 2014, yang menggantikan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, peran pemerintah daerah menjadi lebih dominan dalam mengurus urusan pemerintahannya, termasuk pembangunan ekonomi. Melalui desentralisasi, pemerintah memberikan kewenangan kepada setiap daerah untuk mengembangkan potensi ekonominya sesuai dengan karakteristik lokalnya. Namun, meskipun potensi ekonomi suatu daerah cukup besar, banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam meningkatkan pembangunan ekonominya.

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah dapat diatasi dengan menerapkan langkah-langkah dan strategi dari

teori-teori yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi. Namun, hal yang paling mendasar adalah keinginan yang kuat dari pemangku kepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat setempat, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi daerahnya. Tanpa adanya keinginan yang kuat tersebut, kemajuan ekonomi daerah akan sulit tercapai, yang pada akhirnya akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Pentingnya peran pemerintah daerah yang peduli dan proaktif dalam memajukan ekonomi daerahnya tidak dapat dipungkiri. Ketika pemerintah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pembangunan ekonomi, masyarakat akan merasakan dampak positifnya melalui pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya partisipasi aktif dari semua pihak dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi daerah menjadi hal yang sangat esensial (Djadjuli, 2018).

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Pembangunan menurut perspektif Islam melibatkan aspek material dan spiritual, tidak hanya memusatkan perhatian pada infrastruktur fisik, tetapi juga memperhatikan perkembangan budaya, sosial, dan aspek lainnya seperti tanggung jawab pelaku ekonomi dalam memperkuat nilai-nilai budaya dan sosial dalam masyarakat (Bisma & Hadi, 2024). Salah satu prinsip dinamis dalam kehidupan pembangunan Islam adalah memberikan perhatian khusus pada dua hal, prinsip utama adalah pemanfaatan yang bijaksana terhadap sumber daya yang diberikan Allah kepada manusia, termasuk lingkungan fisiknya. Kedua, prinsipnya adalah penggunaan dan distribusi sumber daya tersebut dengan adil, serta memperkuat hubungan antarmanusia berdasarkan prinsip hak dan keadilan (Ahmad, 1979).

Berdasarkan konsep ini, proses pembangunan didorong dan dipercepat melalui rasa syukur (*shukr*) dan keadilan (*‘adl*). Namun, proses pembangunan juga dapat terhambat dan dilawan oleh kekufuran (*kufur*) dan penindasan (*zulm*). Al-Qur’an menegaskan hal ini.

إِنَّ لِلَّهِ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعْظُمُ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil, berbuat baik, dan memberi kepada kaum kerabat, dan Dia melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.” QS An-Nahl (16:90) (Kementrian Agama Republik Indonesia, 2020).

Pengukuran keseimbangan pembangunan ekonomi dalam Islam dilihat dari perspektif pembangunan fiskal yang berdampak pada kesejahteraan di dunia dan akhirat, serta menjamin kedamaian dan kebahagiaan pribadi.

Pembangunan Menurut Islam = Pembangunan Ekonomi + Pembangunan Sosial + Pembangunan Rohani

Model ini sangat berbeda dari paradigma ekonomi konvensional yang hanya fokus pada pemenuhan kegiatan ekonomi dan pembangunan yang bersifat materiil semata. Mereka mengabaikan dimensi spiritual dan moral. Pembangunan rohani ini dipahami sebagai pengembangan diri untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Meskipun sulit untuk menilai perubahan dan perkembangan rohani ini, pengabaian terhadapnya dapat berdampak pada pelanggaran etika dan moral yang jelas merugikan diri sendiri dan masyarakat luas (Bisma & Hadi, 2024).

Peran Pasar dalam Pembangunan

Pasar telah menarik perhatian yang cukup besar dari ulama klasik seperti Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Ibnu Taimiyah. Pemikiran-pemikiran mereka mengenai pasar tidak hanya memberikan analisis yang tajam terhadap situasi pada masa itu, tetapi juga relevan dan berharga untuk dipertimbangkan hingga saat ini.

Pandangan Abu Yusuf (731-798 M) tentang pasar mencakup prinsip-prinsip keadilan, kebebasan, dan peran negara dalam mengatur aktivitas pasar. Abu Yusuf juga memandang pasar sebagai tempat yang seharusnya bebas dari intervensi yang tidak perlu, sehingga memungkinkan harga dan produksi ditentukan oleh mekanisme pasar yang alami. Namun, dia juga mengakui bahwa negara memiliki peran dalam memastikan bahwa aktivitas pasar berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepatuhan terhadap hukum Islam (Abd Ghafur, 2019).

Pandangan al-Ghazali (1058-1111 M) tentang pasar mencakup

konsep keadilan, etika, dan keseimbangan dalam aktivitas ekonomi. Dia menekankan pentingnya pasar sebagai tempat yang diatur oleh prinsip-prinsip moral dan syariah Islam. Al-Ghazali memandang pasar sebagai sarana untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi, di mana transaksi harus dilakukan dengan jujur, tanpa penipuan atau eksploitasi. Dia menekankan bahwa kegiatan ekonomi di pasar harus selaras dengan nilai-nilai etika Islam, seperti kejujuran, saling menghormati, dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama. Al-Ghazali juga menggarisbawahi pentingnya keseimbangan antara keuntungan individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dalam aktivitas pasar (Abd Ghafur, 2019). Pemikiran Ibnu Taimiyah tentang pasar mencakup konsep-konsep keadilan, kebebasan, dan kepatuhan terhadap hukum syariah. Ibnu Taimiyah menekankan pentingnya pasar sebagai sarana untuk mencapai keseimbangan antara kepentingan individu dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dia memandang pasar sebagai wadah yang diatur oleh prinsip-prinsip syariah Islam, di mana aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan mematuhi hukum-hukum yang telah ditetapkan. Ibnu Taimiyah juga menyoroti perlunya keadilan dalam transaksi pasar, di mana harga dan kualitas barang harus disesuaikan dengan standar moral dan etika Islam. Selain itu, dia menggarisbawahi pentingnya kebebasan pasar dalam menentukan harga dan produksi, namun dengan tetap memperhatikan aspek-aspek keadilan dan kepatuhan terhadap syariah (Abd Ghafur, 2019).

Peran Negara dalam Pembangunan

Peran negara dalam pembangunan sangat krusial, bertujuan untuk mencegah kesenjangan dalam kepemilikan sumber daya pembangunan yang dapat terjadi akibat dominasi sektor swasta. Sebagai pengelola sumber daya alam Indonesia, negara berupaya mengembangkan dan memanfaatkannya secara optimal demi kemakmuran seluruh rakyat dengan mengadopsi prinsip ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat (Hosein, 2016).

Islam berpendapat bahwa tugas pemerintah lebih dari sekedar menjaga keamanan dalam negeri dan pertahanan terhadap serangan luar (Siregar & Majid, 2023). Dalam perspektif Islam, negara juga bertanggung jawab untuk memastikan terwujudnya keadilan sosial dan ekonomi.

Keadilan ini mencakup distribusi hasil-hasil pertumbuhan secara merata, perlindungan hak asasi manusia, serta pengawasan terhadap praktik bisnis yang tidak bermoral (Batubara & Natari Manik, 2023).

Peran Masyarakat Sipil dalam Pembangunan

Masyarakat madani sering dikatakan serupa dengan istilah masyarakat sipil (*civil socieity*). Konsep *civil socieity* sebenarnya berasal dari sejarah masyarakat Barat yang mana istilah ini pertama digunakan oleh Cicero dengan kata *societes civilis* dalam filsafat politiknya. Adapun istilah *civil socieity* pertama kali dicetuskan oleh Ferguson (1767), seorang filosof Skotlandia abad kedelapan belas yang juga menulis buku *An Essay on the History of Civil socieity*. Dalam bukunya Ferguson menggambarkan suatu masyarakat yang terdiri dari lembaga-lembaga otonom yang memiliki kemampuan mengimbangi kekuasaan negara (F. W. Ibrahim, 2012) the Islamic thinkers usually refers to the condition of civil society such as on the condition of Medina under the leadership of the Prophet Muhammad Sallāhu‘alayhi wa Sallam. Ideal concept of civil society is driven by a variety of many aspects including the pattern of the life of society, nation that refers to the rule of law, human rights, and respect for diversity in all its forms (pluralism. Dengan kata lain, gagasan terkait masyarakat madani ini merupakan suatu gambaran bagaimana sebaiknya manusia dalam berperilaku dalam kacah poltik dalam prespektif Islam.

Intelektual Islam Anwar Ibrahim menjelaskan bahwa masyarkaot sipil dapat disebut dengan masyarakat madani karena ada kesamaan karakteristik. Karakteristik masyarakat madani seperti budaya multi etnis, saling mengontrol, dan kesediaan untuk saling menghargai dan memahami menurutnya menjadi sendi dasar dari prinsip-prinsip moralitas, keadilan, keseksamaan masyarakat dan demokrasi (Muhasin, 1996).

Prinsip moralitas merupakan tolak ukur dalam berperilaku bermoral sesuai dengan nilai-nilai, etika, atau kesusilaan sesuai dengan nilai-nilai kaidah atau kebenaran. Moralitas sebagai asas pembangunan di indonesia mengedepankan nilai-nilai moral, terutama nilai-nilai pancasila, karena pancasila merupakan pandangan hidup bangsa yang mampu menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat indonesia (Pradnyani, 2015). Prinsip ini mengedepankan proses pembangunan ekonomi yang

dapat memanusiakan manusia. Pembangunan tersebut harus terfokus terhadap pendidikan, mengutamakan integrasi sosial dan konservasi terhadap lingkungan. Pembangunan ekonomi harus berkelanjutan dan tidak melupakan generasi yang akan datang (*future generation*) (Ibrahim *et al.*, 2011).

Prinsip keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan pembagian yang proporsional terhadap hak dan kewajiban setiap warga negara yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Hal ini memungkinkan tidak adanya monopoli dan pemusatan salah satu aspek kehidupan pada satu kelompok masyarakat. Secara esensial, masyarakat memiliki hak yang sama dalam memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah (penguasa) (Rawani *et al.*, 2020). Masalah pemerataan juga berkaitan dengan upaya pengentasan kemiskinan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat (Arsyad, 2016).

KESIMPULAN

Pembangunan ekonomi adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengembangkan ekonomi, diukur melalui pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi, dan tingkat kesenjangan ekonomi. Pasar penting dalam pembangunan, tetapi prakondisi seperti hak milik yang jelas dan sistem hukum yang independen diperlukan. Pendapat tentang peran pemerintah bervariasi dari yang menganggapnya penting hingga yang lebih mempercayai pasar. Pemahaman pola voting reformasi kebijakan menyoroti bagaimana kebijakan bisa menguntungkan segelintir orang atau mayoritas, serta respon pemilih terhadap risiko dan manfaatnya. Kerangka kerja Douglass North membedakan antara institusi dan organisasi dalam merumuskan kebijakan, dengan jebakan kelembagaan sebagai hasil dari ketidakmampuan mengubah institusi yang tidak efisien.

Perdebatan demokrasi versus otokrasi dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi memunculkan argumen tentang stabilitas politik dan dampak sosial ekonomi. LSM, sebagai pemain kunci, menyediakan inovasi, fleksibilitas program, dan kepercayaan masyarakat. Namun, mereka juga rentan terhadap kegagalan. Oleh karena itu, penguatan kapasitas LSM penting untuk mendukung pembangunan yang

berkelanjutan.

Pembangunan dalam perspektif Islam mencakup aspek material dan spiritual, serta nilai budaya dan sosial. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dengan memperhatikan nilai-nilai yang dituju. Pembangunan ekonomi dalam Islam mencakup keseimbangan antara aspek material dan spiritual, serta pemanfaatan sumber daya dengan bijaksana dan distribusi yang adil berdasarkan prinsip hak dan keadilan.

Pasar dalam Islam diatur oleh prinsip syariah yang mencakup keadilan, larangan terhadap aktivitas yang tidak diperkenankan, dan memperhatikan aspek kemanfaatan. Pandangan ulama klasik seperti Abu Yusuf, al-Ghazali, dan Ibnu Taimiyah menegaskan pentingnya pasar sebagai tempat transaksi yang adil dan diatur oleh nilai-nilai moral Islam. Negara, dalam perspektif Islam, memiliki tanggung jawab untuk memastikan keadilan sosial dan ekonomi serta melindungi hak asasi manusia. Konsep masyarakat madani atau sipil menekankan nilai-nilai moralitas, keadilan, dan keseimbangan dalam perilaku politik serta pembangunan ekonomi yang merata dan berkelanjutan. Sehingga, negara diharapkan untuk memastikan pemerataan akses terhadap sumber daya ekonomi dan keadilan dalam distribusi hasil pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.

REFERENSI

- Abd Ghafur. (2019). Mekanisme Pasar Perspektif Islam. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.36835/iqtishodiyah.v5i1.86>
- Ahmad, K. (1979). *Economic Development in an Islamic Framework*. Islamic Foundation.
- Arsyad, L. (2016). *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN.
- Batubara, M., & Natari Manik, F. (2023). Peran Dan Fungsi Pemerintah Dalam Perspektif Islam. *Journal Of Social Science Research*, 3(2), 6080–6090.
- Bisma, reindra prasista, & Hadi, effed darta. (2024). Perkembangan Economic Development Berteraskan Pandangan Islam. *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 5(1), 168–184. <https://doi.org/10.47476/reslaj.v6i3.48>

- Citra Irawan, N. (2023). *Pertumbuhan Ekonomi Inklusif* (pp. 37–49).
Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan
Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi
Negara*, Vol5(2), 1–14.
- Ferguson, A. (1767). *An Essay on the History of Civil Society*. Edinburgh
University Press.
- Gultom, R. Z., & Tini, A. Q. (2020). Pembangunan Infrastruktur dalam
Islam: Tinjauan Ekonomi dan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi
Islam*, 6(2), 203. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i2.912>
- Herdiansah, A. G. (2016). Peran Organisasi Masyarakat (Ormas) Dan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Dalam Menopang
Pembangunan Di Indonesia. *Sosioglobal : Jurnal Pemikiran Dan
Penelitian Sosiologi*, 1(1). <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>
- Hosein, Z. A. (2016). Peran Negara Dalam Pengembangan Sistem
Ekonomi Kerakyatan menurut UUD 1945. *Jurnal Hukum IUS
QUIA IUSTUM*, 23(3), 503–528. [https://doi.org/10.20885/
iustum.vol23.iss3.art8](https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art8)
- Ibrahim, F. W. (2012). Pembentukan Masyarakat Madani Di Indonesia
Melalui Civic Education. *Jurnal Ilmiah Didaktika*, 13(1). [https://
doi.org/10.22373/jid.v13i1.469](https://doi.org/10.22373/jid.v13i1.469)
- Ibrahim, P., Basir, S. A., & Rahman, A. A. (2011). Sustainable Economic
Development: Concept, Principles and Management from
Islamic Perspective. *European Journal of Social Science*, 24(3).
- Kementrian Agama Republik Indonesia. (2020). *Al-Qur'anulkarim*.
CV.Mulia Abadi.
- Muadi, S., MH, I., & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori
Perumusan Kebijakan Publik. *JRP (Jurnal Review Politik)*, 6(2), 195–
224. <https://doi.org/10.15642/jrp.2016.6.2.195-224>
- Muhasin, A. (1996). *Ruh Islam dalam Budaya Bangsa*. yayasan Festifal
Istiqlal.
- Nila Isroviyah. (2020). Analisis Pengaruh Pendidikan Dan Kesehatan
Terhadap Kemiskinan Di Indonesia Tahun 2016-2020. *Jurnal
Penelitian*, 1–23.
- Pradnyani, N. K. R. (2015). Pendapat Tentang Moral di Zaman Now.
Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial, 1(2), 55–56.

- Rawani, S., Rahmawati, R., & Dimas, I. M. (2020). Masyarakat Madani Sejarah. *Filsafat Pendidikan*.
- Siregar, R., & Majid, M. S. A. (2023). Pembangunan Ekonomi dalam Perspektif Islam. *Jurnal EMT KITA*, 7(1), 71–82. <https://doi.org/10.35870/emt.v7i1.722>
- Sutrisna, I. W. (2020). Partisipasi Masyarakat Dalam Kebijakan Anggaran Daerah. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 1(2), 30–37. <https://doi.org/10.47532/jic.v1i2.14>
- Todaro, M. P. (1999). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga I*. Erlangga.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2005). *economic development*. Pearson Education Limited.

PERDAGANGAN INTERNASIONAL DAN STRATEGI PEMBANGUNAN

(Riska Prasasti, Nesha Rizky Ashari, Ajeng Lestari, Irwan W.)

PENDAHULUAN

Di era modern seperti saat ini, hampir tidak mungkin jika suatu negara dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri tanpa kerjasama dan berhubungan dengan negara lain. Kemajuan di bidang teknologi yang pesat semakin mendorong munculnya pembagian kerja secara internasional. Hal ini mengakibatkan semakin meningkatnya pula produksi barang-barang dan jasa yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Dengan semakin berkembangnya spesialisasi secara internasional berarti perdagangan internasional semakin berkembang pula (Purnastuti, 2007).

Perdagangan internasional sering kali memainkan peranan penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini, banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler dari Asia Timur, Taiwan, Korea Selatan, dan perekonomian negara Asia Timur lainnya mempelopori strategi ini, yang berhasil diikuti oleh tetangganya yang jauh lebih besar, Cina. Pengalaman negara-negara ini menjadi alur penting dalam mengungkapkan drama perdagangan dan pembangunan dan akan dibahas lebih lanjut. Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju (Todaro & Smith, 2012).

Di sejumlah negara berkembang yang lebih kecil, pesentase besar dari pendapatan moneter negara diperoleh dari penjualan ekspor produk pertanian dan produk primer atau komoditas lain seperti kopi, kapas, coklat, gula, minyak sawit, bauksit, dan tembaga. Pada situasi khusus

seperti negara-negara penghasil minyak, penjualan produk minyak bumi mentah dan olahan ke berbagai negara dunia porsinya mencapai lebih dari 70% dari pendapatan nasional mereka. Banyak negara berkembang yang bergantung pada tingkat impor yang lebih besar seperti bahan baku, mesin, barang-barang modal, barang produsen intermediate serta produk-produk konsumen yang berguna menggerakkan ekspansi industri mereka dan memuaskan konsumsi masyarakat yang semakin meningkat. Negara-negara berkembang cenderung mendedikasikan pangsa output mereka lebih besar didalam bentuk ekspor barang ketimbang negara maju. Semakin besarnya pangsa ekspor negara-negara berkembang yang tercatat pada GDP disebabkan oleh semakin tingginya harga relatif jasa non-perdagangan di negara maju ketimbang negara berkembang. Hal ini menekankan bahwa negara berkembang umumnya lebih bergantung pada perdagangan dalam hubungan ekonomi internasional karena sebagian besar perdagangan yang dilakukan adalah transaksi barang, di mana perbedaan harga barang antar negara lebih kecil. Terlebih ekspor negara berkembang kurang terdiversifikasi ketimbang negara maju (Todaro & Smith, 2012).

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) *The Organization of Islamic Countries* (OIC) merupakan organisasi antar pemerintah yang mewakili umat Islam dunia. Organisasi ini beranggotakan 57 negara, termasuk Indonesia, yang mencakup tiga Kawasan yaitu Asia, Timur Tengah atau Arab dan Afrika. Organisasi Kerjasama Islam (OKI) didirikan pada tahun 1969 dengan kerja sama ekonomi di antara 57 negara anggotanya. Selama bertahun-tahun, berbagai inisiatif telah dilaksanakan untuk mempromosikan perdagangan antar negara OKI, termasuk pembentukan pasar bersama Islam, sistem preferensi perdagangan OKI, dan perusahaan Investasi OIC. Namun, upaya-upaya ini menghadapi banyak tantangan, terutama yang berasal dari beragamnya struktur geopolitik dan sosio-ekonomi negara-negara anggota, yang mengakibatkan beragamnya tingkat pembangunan ekonomi dan kebijakan perdagangan (Bhatti & Ghouse, 2023).

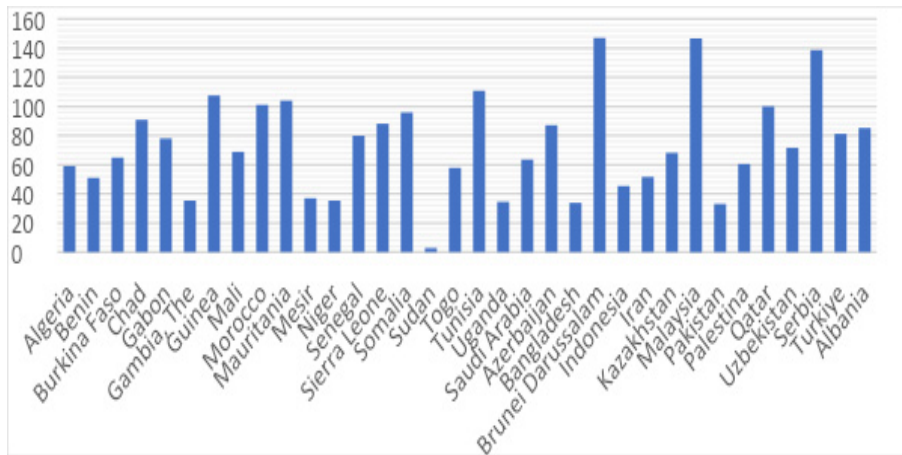
Meski mewakili seperempat populasi dunia, negara-negara anggota OKI hanya menyumbang 15% terhadap PDB global. Pada tahun 2019, tingkat pertumbuhan PDB riil negara-negara OKI menurun dari 3,9% pada tahun 2018 menjadi 3,1%, jauh di bawah rata-rata dunia (SESRIC, 2019). Secara keseluruhan, statistik ini menyoroti perlunya mengatasi

tantangan ekonomi yang dihadapi negara-negara anggota OKI dan mencari cara untuk mendorong perdagangan dan kerja sama ekonomi yang lebih besar di antara mereka. Dengan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan perdagangan dan mengidentifikasi tantangan dan peluang, pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan integrasi dalam kerangka OKI (Bhatti & Ghouse, 2023).

Ketidakseimbangan dalam distribusi sumber daya dan diversifikasi ekspor dapat membuat negara-negara rentan terhadap fluktuasi pasar eksternal. Negara-negara seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab telah membangun perekonomian mereka bergantung pada ekspor minyak, yang membuat mereka rentan terhadap ketidakstabilan harga minyak global. Di sisi lain, negara-negara seperti Turki, Malaysia, dan Indonesia telah menerapkan strategi pembangunan ekonomi di luar produksi minyak dan melakukan diversifikasi produk ekspor mereka (Ahad *et al.*, 2020). Terlepas dari tantangan-tantangan ini, beberapa negara anggota OKI telah berhasil mengembangkan hubungan dagang mereka. Turki telah menjadi pemain penting dalam perekonomian global, dengan total ekspor sebesar \$171 miliar pada tahun 2019 (Gürel & Kozluca, 2022).

Demikian pula dengan Malaysia dan Indonesia yang mengalami pertumbuhan besar dalam ekspor minyak sawit mereka, dengan nilai ekspor masing-masing sebesar \$23,7 miliar dan \$22,7 miliar pada tahun 2019 (Huang, 1997). Namun, beberapa negara anggota OKI menghadapi hambatan besar dalam pengembangan perdagangan, termasuk terbatasnya infrastruktur, kurangnya diversifikasi produk ekspor, dan ketidakstabilan politik. Negara Yaman, Sudan, dan Somalia, misalnya, pernah mengalami kerusuhan dan konflik politik, yang menyebabkan penurunan pertumbuhan ekonomi dan hubungan dagang. Proyeksi menunjukkan adanya penurunan perdagangan global yang signifikan berkisar antara 13% hingga 32% pada tahun 2020. Perkiraan ini menyoroti besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian di seluruh dunia (Allam *et al.*, 2022; Vo & Tran, 2021; Yu *et al.*, 2021).

Grafik 1. Perdagangan Internasional Negara OKI tahun 2022



Pada grafik 1 dapat dilihat bahwa Brunei Darussalam memiliki tren perdagangan tertinggi dibandingkan negara OKI lainnya. Selanjutnya disusul oleh Malaysia, Serbia, Tunisia, Guinea, Mauritania, Morocco, Qatar, dan sebagainya. Perekonomian Brunei Darussalam terutama didorong oleh minyak dan gas, yang menyumbang sekitar setengah dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan ekspor barang dagangan serta empat perlima pendapatan pemerintah pada tahun 2021. Ekspor barang dagangan Brunei Darussalam menurun tajam dari B\$13,438 miliar pada tahun 2014 menjadi B\$9,122 miliar pada tahun 2020, namun pulih dengan kuat menjadi B\$14,134 miliar pada tahun 2021 berkat kenaikan tajam harga minyak dan gas. Ekspor utamanya adalah bahan bakar mineral yang menyumbang 78% dari total ekspor barang dagangan pada tahun 2021 (Chian, 2023).

Mitra ekspor terbesar Brunei Darussalam adalah Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN), Jepang, Tiongkok, dan Australia. Sementara itu, impor barang dagangan melonjak dari B\$4,556 miliar pada tahun 2014 menjadi B\$9,722 miliar pada tahun 2021. Sejak tahun 2019, impor bahan bakar mineral melonjak, menyusul dimulainya pembangunan kilang minyak besar dan kompleks petrokimia, yang mencakup tiga perlima dari total impor barang dagangan di tahun 2014-2021. Impor utama lainnya adalah mesin dan peralatan transportasi, barang-barang manufaktur, dan makanan. Mitra impor terbesar Brunei

Darussalam adalah ASEAN, Tiongkok, Australia, AS, dan Uni Eropa. Meskipun Brunei Darussalam adalah eksportir bersih barang dagangan, negara ini juga merupakan importir jasa bersih. Ekspor perdagangan jasa Brunei Darussalam terutama berupa transportasi dan perjalanan, sedangkan impor terdiri dari transportasi, perjalanan, konstruksi, dan jasa bisnis (Sekretaris Nasional ASEAN, 2024a).

Keberagaman perekonomian di negara-negara anggota OKI menghadirkan berbagai peluang dan tantangan. Pandemi Covid-19 mengedepankan tantangan dan peluang yang terkait dengan pengembangan perdagangan di antara negara-negara anggota OKI. Meningkatkan hubungan perdagangan antar negara-negara OKI berpotensi merangsang perekonomian dan mendorong integrasi ekonomi antar negara anggota (Raimi & Mobolaji, 2008). Pengembangan hubungan perdagangan antar negara anggota OKI juga menghadirkan tantangan lain yaitu kurangnya kerangka peraturan umum yang mengatur perdagangan intra-OKI, yang menyebabkan fragmentasi peraturan dan kurangnya harmonisasi kebijakan perdagangan antar negara anggota (Hassan *et al.*, 2023). Untuk mengatasi tantangan tersebut, berbagai strategi telah diusulkan untuk meningkatkan hubungan perdagangan antar negara anggota OKI termasuk penelitian mendalam yang dilakukan oleh banyak peneliti termasuk (Ariff *et al.*, 2021; Ghouse *et al.*, 2022; Hassan *et al.*, 2023).

Selain itu, terbatasnya infrastruktur, prosedur birokrasi, dan kebijakan perdagangan yang restriktif dapat menghambat arus perdagangan di kawasan OKI. SESRIC dan International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC), anggota dari Islamic Development Bank (IsDB) Group, menyiapkan laporan teknis yang menyelidiki potensi dampak Kawasan Perdagangan Bebas Kontinental Afrika (AfCFTA) terhadap negara-negara OKI tertentu, yaitu Pantai Gading, Gading, Mesir, Guinea, Mozambik, Tunisia dan Uganda. Laporan tersebut menilai dampak keluaran, perdagangan dan kesejahteraan dengan fokus utama pada keenam negara tersebut dan memberikan beberapa arah kebijakan untuk memanfaatkan perjanjian ini dengan lebih baik berdasarkan hasil yang diproyeksikan. AfCFTA, yang mulai berlaku pada 1 Januari 2021, merupakan langkah besar dalam meningkatkan perdagangan regional dan integrasi ekonomi antar negara-negara Afrika. Hal ini diharapkan dapat memfasilitasi, menyelaraskan dan mengoordinasikan rezim perdagangan

dengan lebih baik serta menghilangkan tantangan terkait perjanjian perdagangan yang tumpang tindih di seluruh benua (Bagci *et al.*, 2022).

Pada bagian pembahasan ini kita akan mempelajari bagaimana konsep teori perdagangan internasional. Pembahasan juga berlanjut pada ranah kebijakan dalam menangani permasalahan serta pengaruh dan dampak yang ditimbulkan dari perdagangan internasional. Pembahasan juga diperluas pada kajian-kajian dalam perspektif ekonomi Islam.

TEORI, KEBIJAKAN, PENGARUH, DAN DAMPAK

Teori

Teori Adam Smith: Teori keunggulan absolut adalah salah satu konsep penting ekonomi dan perdagangan internasional. Adam Smith seorang ekonom klasik, mengemukakan teori keunggulan absolut menyatakan bahwa sebuah negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi suatu barang jika negara tersebut dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya absolut yang lebih rendah daripada negara lainnya. Dalam hal ini, Smith menyatakan bahwa spesialisasi dalam produksi barang di mana sebuah negara memiliki keunggulan absolut akan menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi semua negara yang terlibat dalam perdagangan (Todaro & Smith, 2012).

Tabel 1 Contoh Keunggulan Absolut

Produksi	Negara Indonesia	Negara India
Minyak (1 unit)	10	12
Gandum (1 unit)	6	4

Dalam tabel 1 sederhana yang sering digunakan untuk menjelaskan konsep ini adalah perbandingan antara dua negara. Negara Indonesia dan negara India masing-masing menghasilkan dua barang berbeda, yaitu gandum dan Minyak. Negara Indonesia dapat menghasilkan minyak (10 unit) dengan tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit dari negara India (12 unit) dengan demikian negara Indonesia memiliki keunggulan absolut memproduksi minyak. Sementara negara India lebih efisien menghasilkan produk gandum karena jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan lebih sedikit (4 unit) dari negara Indonesia (6 unit) dengan demikian negara

India memiliki keunggulan absolut memproduksi gandum. Dikatakan keunggulan absolut karena negara tersebut menghasilkan produk dengan biaya yang secara absolut lebih rendah dari negara lain (Mahyus, 2014).

Teori David Ricardo Konsep perdagangan yang semakin disukai masyarakat internasional, pertama kali dikemukakan oleh David Ricardo (1771-1823) ini dikenal juga dengan teori *comparative cost* atau *comparative advantage*. Dalam teori ini, setiap negara mengkhususkan produksinya dalam bidang-bidang yang diunggulinya secara komparatif dan semua negara melakukan perdagangan secara bebas tanpa hambatan, maka akan tercapainya efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi dan pada gilirannya produksi dunia secara keseluruhan akan mencapai maksimum, sehingga makin tinggi kemakmurannya (Apridar, 2012).

Teori David Ricardo didasarkan pada nilai kerja atau *theory of labor value*, yang menyatakan bahwa nilai atau harga suatu produk ditentukan oleh jumlah waktu atau jam kerja yang diperlukan untuk memproduksinya. Menurut teori ini suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat memproduksi relative lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relative kurang atau tidak relatif.

Tabel 2 Contoh Keunggulan Komparatif

Produksi	Negara Indonesia	Negara India
Coklat	50 unit	25 unit
Kelapa	25 unit	50 unit

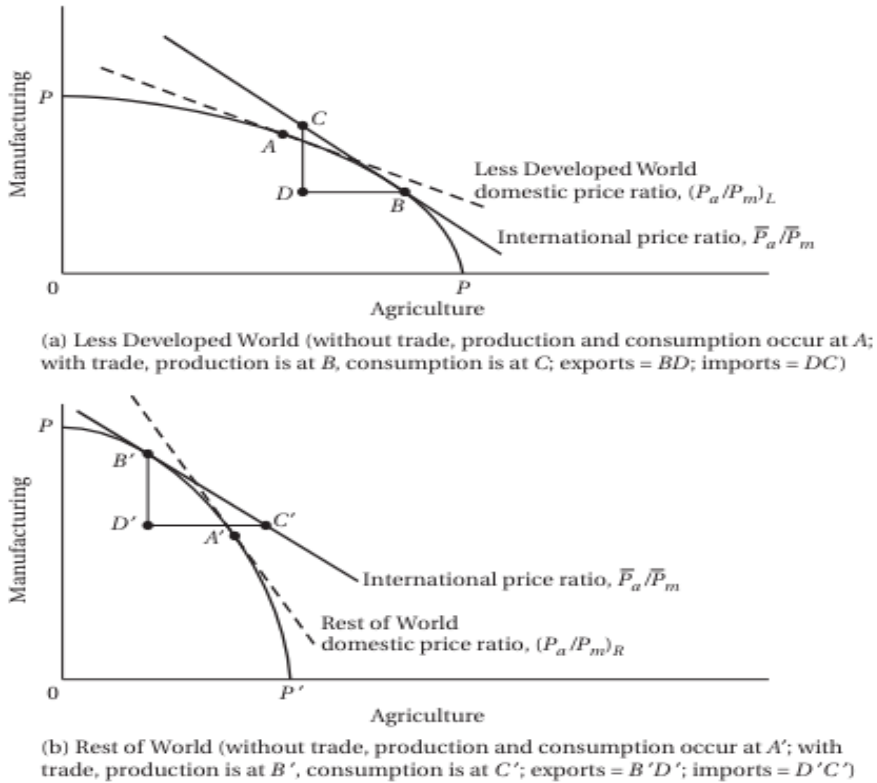
Apabila Indonesia memproduksi coklat maka akan memperoleh 50 unit sedangkan kalau memproduksi kelapa hanya memperoleh 25 unit. Hal ini berarti biaya (yang berupa *opportunity cost*) bagi Indonesia untuk memproduksi 1 unit coklat $\frac{1}{2}$ unit kelapa (*opportunity cost* untuk memproduksi 1 unit kelapa adalah 2 unit coklat). Dengan kata lain produksi kelapa lebih mahal daripada Indonesia sebaliknya negara India produksi coklat lebih mahal karena *opportunity cost*nya adalah 2 unit kelapa untuk tiap 1 unit coklat dan *opportunity cost* untuk memproduksi 1 unit kelapa hanya $\frac{1}{2}$ unit coklat. Berarti keuntungan absolut coklat berada

di Indonesia dan keuntungan absolut kelapa berada di India. Dalam keadaan ini Indonesia dan India beruntung bila diadakan pertukaran hasil produksi. Keuntungan dari spesialisasi ini mudah dilihat dengan menjumlahkan semua hasil produksi negara Indonesia dan India untuk coklat dan kelapa. Tanpa spesialisasi, baik Indonesia dan India mereka memproduksi 75 unit coklat dan kelapa, sedangkan dengan spesialisasi Indonesia akan memproduksi 50 unit coklat dan negara India 50 unit kelapa, berarti memperoleh hasil produksi tambahan 25 unit coklat dan 25 unit kelapa (Mahyus, 2014).

Ricky W. Griffin (2007) menjelaskan Amerika Serikat memiliki keunggulan komparatif dalam industri komputer karena kecanggihannya serta dalam bidang pertanian karena kesuburan tanah dan iklimnya yang sedang. Sedangkan Korea Selatan memiliki keunggulan komparatif di bidang manufaktur alat-alat elektronik karena operasionalnya yang efisien dan tenaga kerjanya yang murah. Akibatnya, perusahaan-perusahaan Amerika Serikat mengeksport komputer dan hasil pertanian, seperti biji-bijian ke Korea Selatan, serta mengimpor VCR dan stereo dari Korea Selatan. Artinya Korea Selatan dapat memproduksi makanan dan Amerika Serikat dapat membuat VCR, tetapi setiap negara mengimpor produk tertentu karena yang mendapatkan keuntungan komparatif dalam industri relevan.

Teori Heckscher-Ohlin: Teori modern dalam perdagangan internasional muncul sebagai reaksi terhadap teori klasik yang mendapat kritik tajam dan pukulan hebat terutama dengan munculnya depresiasi yang cukup besar pada tahun 1933-an. Teori modern yang diajukan oleh Eli Heckscher kemudian dikenal sebagai teori H-O (Era Amalia, 2007). Teori perdagangan anugerah faktor Heckscher-Ohlin perdagangan anugerah faktor memungkinkan untuk menjabarkan secara analisis dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak perdagangan terhadap struktur ekonomi nasional dan terhadap perolehan pendapatan atau pembayaran atas beragam faktor produksi. Selain itu, Heckscher dan Ohlin mengatakan suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi (Todaro & Smith, 2012).

Gambar 1. Contoh Perdagangan dengan Anugerah Faktor yang Berbeda



Produksi domestik relatifnya sama dengan harga relatif dunia. Negara maju kemudian dapat memperdagangkan produk manufaktur sebanyak $B'D'$ (=DC) guna mendapatkan produk pertanian sebanyak $D'C'$ (=BD) dari negara dunia ketiga. Dengan demikian negara maju juga dapat meningkatkan batas kemungkinan produksinya dan mengonsumsi pada titik C' dalam peraga 1b. perdagangan mencapai titik keseimbangan nilai ekspor sama dengan nilai impor bagi kedua kelompok negara. Selain itu, perdagangan ini telah menghasilkan peningkatan konsumsi kedua jenis barang tersebut di kelompok negara, seperti yang ditunjukkan oleh perbandingan antara titik perdagangan bebas C dan C' dan titik sebelum adanya perdagangan A dan A' pada gambar 1.

Kebijakan Perdagangan Internasional

Kebijakan ekonomi dan perdagangan negara-negara maju merupakan yang terpenting dari sudut pandang pendapatan valuta asing negara berkembang di masa depan dalam tiga bidang utama: hambatan tarif dan non tarif terhadap ekspor mereka, bantuan penyesuaian bagi mereka yang mengalami pemutusan kerja di industri negara maju yang terkena imbas dari akses ekspor yang lebih bebas dari negara-negara berkembang yang padat karya dan berbiaya rendah dan dampak umum kebijakan ekonomi domestik negara maju terhadap perekonomian negara berkembang (Todaro & Smith, 2012).

Bentuk hambatan perdagangan yang paling penting secara historis adalah tarif. Tarif merupakan bentuk kebijakan perdagangan yang paling tua dan secara tradisional telah digunakan sebagai sumber penerimaan pemerintah sejak lama. Ditinjau dari aspek asal komoditi, ada dua macam tarif, yakni tarif impor dan tarif ekspor (Kindleberger, 1995). Hambatan tarif dan non tarif proteksionis baru antara lain: bea cukai, kuota, batasan ekspor, peraturan sanitasi yang dibuat-buat yang dikenakan oleh negara-negara kaya pada komoditas ekspor negara-negara miskin menjadi penghalang utama bagi ekspansi kapasitas penerimaan ekspor negara-negara miskin atau berkembang. Sudah banyak diulas tarif atas produk pertanian maupun non pertanian sering meningkatnya derajat pengolahan produk, yakni tarifnya lebih tinggi bagi produk makanan olahan dari pada makanan mentah.

Kebijakan Tarif: Tarif impor adalah pungutan yang dikenakan pada barang ketika masuk ke batas negara. Tarif impor biasanya dihubungkan dengan proteksionisme, yakni kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antar negara. Telah banyak perundingan perdagangan internasional atau perjanjian multilateral untuk mengurangi hambatan tarif. Banyak tarif perdagangan perdagangan yang dihapuskan, tetapi komoditas tertentu seperti produk perikanan masih membutuhkan proteksi pada komoditas tersebut. Besar tarif yang dikenakan pada produk impor di suatu negara bergantung pada negara asal produk (Maharani Tristi *et al.* 2021).

Kebijakan Non Tarif: Menurut UNCTAD (2010), kebijakan non tarif adalah kebijakan selain tarif, yang berpotensi berdampak ekonomi pada perdagangan barang internasional, mengubah kuantitas

yang diperdagangkan, atau harga atau keduanya. Kebijakan non tarif yang diperlakukan oleh negara-negara importir atas tuna olahan asal Indonesia meliputi tindakan *Sanitary and Phytosanitary Measures* (SPS), *Technical Barriers to Trade* (TBT), inspeksi pra-pengiriman, lisensi, kuota, dan tindakan kontrol kuantitas lainnya, tindakan pengendalian harga, tindakan keuangan, tindakan yang memengaruhi, dan hak milik intelektual (Maharani Tristi *et al.* 2021).

Kebijakan non tarif terbanyak diterapkan atas tuna olahan Indonesia adalah SPS. Tindakan ini diterapkan untuk melindungi kehidupan manusia atau hewan dari risiko yang timbul dari zat aditif, kontaminan, racun, atau organisme penyebab penyakit dalam makanan. Hampir semua negara importir tuna olahan Indonesia menerapkan syarat tindakan SPS, kecuali togo. China merupakan negara importir tuna olahan Indonesia SPS dengan jumlah 57 tindakan. Terbanyak kedua ditempati oleh Amerika Serikat yang merupakan negara importir utama tuna olahan dunia dengan jumlah tindakan SPS 50. Algeria, Arab Saudi, Bahrain, dan UEA juga termasuk negara importir yang menerapkan SPS atas tuna olahan Indonesia. Adapun negara importir yang tergabung dalam Uni Eropa menerapkan tindakan SPS yang sama, dengan jumlah 10 tindakan, terdapat 35 jenis kebijakan SPS yang diberlakukan oleh negara importir atas tuna olahan Indonesia. Jenis kebijakan SPS yang terbanyak diberlakukan ialah persyaratan, sertifikasi, kemasan dan persyaratan batas toleransi residu (Maharani Tristi *et al.* 2021).

Pengaruh Perdagangan Internasional Pengaruh Teknologi

Teknologi modern dan penemuan atau inovasi terobosan telah mengubah sifat produksi dan perdagangan secara besar-besaran, baik di dalam negeri maupun internasional (Iwiadek *et al.*, 2019). Oleh karena itu, hal ini membentuk pilihan strategis bagi para manajer di semua sektor perekonomian nasional (Pini, 2019). Implementasinya sebagai revolusi industri keempat (4IR). Instrumen intinya terdiri dari *internet of things* (IoT), kecerdasan buatan (AI), perangkat *cyber* fisik, percetakan 3D, *blockchain*, data besar, komputasi awan, material nano dan biologi sintetis (Sieja & Wach, 2019). Perubahan-perubahan yang diperkirakan akan terjadi dalam perdagangan internasional sebagai akibat dari teknologi dan inovasi ini akan mencakup hal-hal berikut: (i)

erubahan sifat perdagangan, (ii) peningkatan volume perdagangan, (iii) perubahan struktur perdagangan, dan (iv) dampak faktor keunggulan komparatif mitra dagang. Perdagangan sebagian besar akan menjadi digital. Kita akan melihat penurunan besar dalam biaya perdagangan, peningkatan transparansi dan keamanan perdagangan serta jaminan bahwa kontrak dilaksanakan dengan andal dan barang serta jasa dibayar. Dengan turunnya biaya dan berkurangnya asimetri informasi, khususnya usaha kecil dan menengah, perusahaan dan entitas virtual dari negara-negara berkembang kemungkinan mengalami pertumbuhan pangsa perdagangan mereka (Uma, 2023).

Pertumbuhan pasar teknologi internasional tercermin dalam studi tentang transfer pasar pengetahuan. Perjanjian lisensi internasional banyak ditemukan di bidang bahan kimia, elektronik, dan komputer (Anand & Sen, 2017). Perusahaan teknik khusus di industri kimia memainkan peran penting dalam transfer pasar transfer teknologi melalui layanan konsultasi Teknik. Beberapa penelitian mengaitkan dampak teknologi dengan tingkat dan komposisi perdagangan barang internasional, ditemukan bahwa dampak impor terkait dari perdagangan barang modal. Jika perdagangan dan transfer teknologi berkorelasi positif, maka penting untuk mengendalikan peningkatan perdagangan produk akibat transfer teknologi (Xu & Wang, 2019).

Teori perdagangan internasional menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam menjelaskan daya saing internasional suatu negara memandang pembangunan ekonomi sebagai proses dinamis yang berasal dari industri dan ekspor, dan inovasi memainkan peran kunci dalam pengembangan keduanya. Inovasi teknologi didefinisikan sebagai “kapasitas penyerapan” suatu negara kemampuan untuk menerapkan informasi dari luar negeri ke dalam praktik dengan mengembangkan produk dan proses baru yang memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pengembangan indikator yang relevan untuk mengukur tingkat inovasi teknologi yang dipandang sebagai kapasitas penyerapan antar negara merupakan hal yang sangat penting dalam perekonomian berbasis pengetahuan dengan ketergantungan yang tinggi dan semakin meningkat terhadap teknologi informasi dan sumber daya manusia (Márquez-ramos *et al.*, 2010).

Perdagangan internasional di bidang teknologi memungkinkan banyak negara untuk menggabungkan upaya penelitian dan pengembangan dan menerapkan inovasi yang sama. Negara-negara memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan mentransfer pengetahuan, bukan produk. Perdagangan internasional di bidang teknologi meningkatkan kualitas inovasi dengan memperluas kelompok eksperimen penelitian dan pengembangan yang menjadi dasar pemilihan teknologi terbaik. Perdagangan teknologi meningkatkan nilai yang diharapkan dari perdagangan barang antar negara, meningkatkan variasi barang yang diharapkan diproduksi dan diperdagangkan secara internasional (Spulber, 2008).

Teknologi digital membuat biaya perdagangan lintas batas menurun. Biaya-biaya ini terdiri dari informasi, transportasi, logistik, lintas batas, biaya transaksi, dan biaya yang terkait dengan kebijakan perdagangan. Aliran informasi terpercaya yang lancar dan murah akan memudahkan pencarian produk, layanan, dan produsennya yang paling optimal. Selain itu, akan lebih mudah untuk menjalin kontak dengan produsen, untuk memverifikasi keandalan dan kualitas produk mereka, untuk melakukan negosiasi perdagangan dan menandatangani kontrak, untuk mengangkut, menyimpan, dan memindahkan barang untuk memberikan izin lintas batas dan melakukan pembayaran (Adhetyo, 2022).

Platform online memainkan peran besar dalam menyediakan informasi ini dan dalam membangun kontak antara eksportir dan importir, produsen, dan konsumen. Platform ini membantu mengatasi hambatan asimetri informasi mengenai kualitas barang dan keandalan penyediaannya, sehingga meningkatkan kepercayaan dan keyakinan di antara mitra. Sejumlah besar platform bertindak sebagai perantara antara pembeli dan penjual, memastikan bahwa produk yang dikirimkan akan persis seperti yang dideskripsikan, selain itu juga mengelola klaim pembeli dan melindungi mereka dari penjual yang nakal (Rymarczyk, 2021).

Transparansi harga dan informasi produk akan memperketat persaingan antar penjual demi kepentingan konsumen. Platform online global, seperti google, amazon, facebook, apple (yang disebut GAFA), Alibaba, ebay, flipkart, dan route menghubungkan penjual dan pembeli di seluruh dunia (R *et al.*, 2018). Arus barang dan jasa internasional sebagian

besar dilakukan melalui rantai pasokan intra-perusahaan. Dalam hal ini, operasional antara entitas induk perusahaan tradisional dan cabang-cabangnya memerlukan koordinasi dan pemantauan yang sempurna. Agar perusahaan-perusahaan ini dapat dikelola secara efektif, penting untuk memiliki aliran informasi antara mereka dan operator terminal, pengirim barang, operator, pialang khusus, perusahaan asuransi, dan banyak entitas lain yang terlibat dalam proses ini. Tanpa perangkat teknologi informasi dan komunikasi (TIK) modern (Lechman, 2018).

Hambatan utama bagi perdagangan internasional adalah biaya transportasi dan logistik. Meskipun telah menerapkan inovasi seperti peti kemas, transportasi multimoda, pusat logistik, GPS, dan sarana transportasi modern, biaya-biaya ini masih merupakan bagian terbesar dari keseluruhan biaya perdagangan. Hal yang diharapkan dapat mengurangi biaya secara signifikan di bidang ini adalah penerapan inovasi berikut: robotisasi, kecerdasan buatan, internet of things, pencetakan 3D. menggabungkan robot cerdas dengan internet of things akan memungkinkan perusahaan mengoptimalkan rute arus kargo, selanjutnya memungkinkan pelacakan, penyesuaian, dan pemilihan lokasi untuk pergudangan dan transshipment.

Sistem pembayaran yang dipasang pada platform online seperti amazon pay America, paypal, dan Alipay tiongkok memungkinkan perusahaan menghindari infrastruktur bank koresponden, sehingga menghemat waktu dan biaya. Namun masa depan adalah milik blockchain (Nowiński & Kozma, 2017). Penerapan teknologi digital secara luas yang mengakibatkan pengurangan biaya menimbulkan peningkatan volume perdagangan sekaligus mengubah (Dergil, 2022). Perdagangan barang teknologi informasi akan menunjukkan tren yang meningkat, yang akan tumbuh adalah perdagangan perangkat keras pembawa informasi, telepon pintar, tablet, ponsel, dan perangkat lain dengan kandungan pengetahuan yang besar, serta perangkat yang terlibat dalam pemasangan teknologi modern seperti sensor, kamera atau layer kristal cair (Lula *et al.*, 2019).

Serangkaian teknologi modern seperti IoT, komputasi awan, data besar, pencetakan 3D, dan platform online akan membentuk volume dan pangsa produk yang disesuaikan dalam struktur perdagangan global. Semakin besarnya pasokan barang yang lebih terdiversifikasi harus sejalan

dengan semakin besarnya permintaan terhadap barang-barang yang dapat memuaskan preferensi individu konsumen (WTO, 2018). Pasar teknologi memperoleh keuntungan dari perdagangan dengan meningkatkan jumlah eksperimen penelitian dan pengembangan, sehingga eksperimen terbaik dapat digunakan di banyak negara dan dengan memungkinkan negara-negara untuk mengoordinasikan tingkat aktivitas penelitian dan pengembangan mereka. Manfaat menjual penemuan kepada produsen di negara lain membantu menjelaskan pasar teknologi internasional yang diwakili oleh data neraca pembayaran teknologi. Perdagangan teknologi meningkatkan volume perdagangan produk dengan menghilangkan perbedaan teknologi produksi. Perdagangan internasional di bidang teknologi merangsang produktivitas dalam dan luar negeri, sehingga menghasilkan perdagangan produk yang lebih besar. Hasil dari model ini menunjukkan bahwa perubahan dalam perdagangan teknologi akan membantu menjelaskan variasi dalam perdagangan produk (Spulber, 2008).

Pengaruh Faktor Politik, Sosial, Ekonomi

Negara maju dan negara berkembang memiliki perbedaan dalam hal kekuatan politik dan ekonomi. Banyak kasus menunjukkan, isu-isu politik menjadi penghambat hubungan atau diplomasi ekonomi yang dimiliki negara (Fahrazi, 2015). Negara maju umumnya memiliki pengaruh politik dan ekonomi yang besar di pasar internasional. Perbedaan ini mempengaruhi cara negara-negara tersebut mempengaruhi dan membentuk kebijakan perdagangan internasional. Negara maju cenderung melindungi industri dalam negeri mereka dan mendorong ekspor produk-produk mereka. Di sisi lain, negara berkembang sering kali menghadapi tantangan dan keterbatasan dalam hal perdagangan internasional. Mereka mungkin memiliki industri yang masih lemah, kurangnya sumber daya, atau masalah lain yang menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, negara-negara berkembang sering membutuhkan perlindungan khusus dalam kebijakan perdagangan internasional (Permata Sari & Ibrahim, 2023).

Perdagangan internasional memegang peranan sentral dalam dinamika ekonomi global. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu negara, tetapi juga membentuk interaksi

kompleks antara berbagai negara di arena internasional. Negara-negara cenderung memanfaatkan potensi alam mereka untuk memasok pasar global, membentuk landasan pertama dalam dinamika perdagangan internasional. Negara perlu memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan terkadang memerlukan impor barang dan jasa tertentu yang tidak dapat diproduksi secara efisien di dalam negeri. Faktor ini menciptakan aliran perdagangan yang memenuhi kesenjangan antara produksi domestik dan konsumsi (Yuni, 2021).

Salah satu aspek penting dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju adalah pengaruh politik domestic. Politik domestic seringkali menjadi faktor utama mempengaruhi kebijakan perdagangan suatu negara. Para pemimpin politik di negara maju harus mempertimbangkan kepentingan dalam negeri mereka, termasuk kepentingan ekonomi dan politik, dalam mengambil Keputusan tentang perdagangan internasional. Perilaku demokratis merupakan pencerminan dari budaya politik nasional atau negara (Suryo, 2015).

Selain politik domestik, kepentingan ekonomi juga merupakan faktor kunci dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maju . negara maju umumnya memiliki ekonomi yang kuat dan bergantung pada perdagangan internasional untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Daya saing internasional suatu negara didasari pada keunggulan teknologi, produktivitas tenaga kerja, upah riil, dan tingkat relative keterbukaan perdagangan. Keadaan geopolitik negara maju sebenarnya sangat rendah dibandingkan dengan negara berkembang dimulai dari sumber daya alam, tetapi dengan kemajuan yang dicapai negara-negara berkembang dalam bidang teknologi dan informasi menjadikannya negara yang maju (Rahmat, 2021). Ketidakpastian geopolitik juga dapat menjadi tantangan dalam pembentukan kebijakan perdagangan internasional oleh negara maj. Ketegangan politik antara negara-negara dapat mempengaruhi perdagangan internasional dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku bisnis dan pasar global. Negara maju harus berurusan dengan konflik geopolitik dan mencari Solusi agar perdagangan internasional tetap berjalan lancar (Alice & Christian, 2022).

Ekonomi yang kuat memungkinkan negara-negara berkembang untuk menjadi pelaku utama dalam perdagangan internasional, investasi

asing, dan pembiayaan pembangunan. Negara-negara seperti China dan India kini menjadi kekuatan ekonomi global yang sangat berpengaruh, dengan potensi untuk membentuk aturan-aturan perdagangan internasional. Populasi yang besar di negara-negara berkembang juga menjadi faktor penting dalam peningkatan peran politik mereka. Populasi yang besar berarti adanya pangsa pasar yang besar untuk produk dan jasa, serta tenaga kerja yang melimpah. Terdapat isu-isu global yang semakin kompleks dan saling terkait juga memerlukan peran politik yang kuat dari negara-negara berkembang. Isu-isu dengan ancaman keamanan dalam bentuk baru (Human Security) ini merupakan “ancaman keamanan yang nyata” karena memiliki relevansi dengan kondisi domestik negara-negara dunia ketiga yang masih disibukkan oleh berbagai persoalan mengenai:

1) Situasi transisi politik; 2) lemahnya kekuasaan pemerintah akibat tidak maksimalnya upaya penegakan hukum; 3) ketidakpastian politik; 4) krisis ekonomi; 5) masalah konflik di wilayah perbatasan; 6) konflik etnis dan konflik komunal dengan berbagai dimensi internasionalnya; 7) persoalan disintegrasi bangsa; 8) peningkatan jumlah pelaku terorisme; 9) kemampuan melakukan Tindakan ancaman terhadap human security (Permata Sari & Ibrahim, 2023).

Hubungan diplomatik dengan negara lain juga memainkan peran penting dalam menentukan kebijakan perdagangan internasional di negara berkembang. Negara berkembang yang memiliki hubungan diplomatic yang baik dengan negara-negara lain cenderung dapat memperoleh dukungan dan bantuan dalam upaya mempromosikan kebijakan perdagangan yang menguntungkan. Misalnya, negara berkembang yang memiliki hubungan yang kuat dengan negara maju dapat memperoleh bantuan teknis untuk meningkatkan kapasitas perdagangan. Sebaliknya, negara dengan hubungan diplomatik yang tegang dapat menghadapi kesulitan dalam memperoleh dukungan dan akses pasar yang lebih terbuka (Sunu, 2020).

Dampak Perdagangan Internasional

Dampak ekonomi: Pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional dan lapangan kerja, teknologi

Pada dasarnya dengan adanya perdagangan internasional baik kegiatan ekspor maupun impor sangat memberikan keuntungan

terhadap negara yang menerapkannya. Perdagangan internasional dapat mempererat persahabatan antarbangsa. Berikut beberapa dampaknya pada pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional, lapangan kerja (R. D. S. Putri & Muljanto, 2021):

- 1) Ekspor menjadi salah satu sumber devisa yang sangat *urgen* bagi suatu negara terbuka, hal ini karena ekspor mampu memberikan perubahan kearah peningkatan jumlah produksi yang mampu memberikan peran penting bagi kesejahteraan suatu negara (Azzaki, 2021). Banyak pula negara yang mengandalkan sumber pendapatan negaranya melalui pajak impor maupun ekspor.
- 2) Dengan adanya kegiatan perdagangan internasional yang menghasilkan devisa menjadikan suatu negara mampu mengimpor barang modal, barang konsumsi, maupun jasa tenaga ahli yang dibutuhkan demi kesejahteraan negara.
- 3) Jika suatu negara lebih banyak melakukan kegiatan ekspor dibandingkan dengan impor maka kondisi pendapatan nasional suatu negara akan naik hingga pada akhirnya akan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, dengan adanya keuntungan perdagangan internasional memungkinkan suatu negara untuk melakukan spesialisasi dalam menghasilkan barang maupun jasa. Sehingga melancarkan kegiatan ekspor keluar negeri.
- 4) Dengan adanya perdagangan internasional dapat memberikan kesejahteraan, kemakmuran dan menaikkan pendapatan bagi suatu negara yang menerapkannya. Melalui kegiatan pertukaran yakni negara yang kelebihan suatu barang dapat menjualnya ke negara lain, sebaliknya Ketika negara mengalami kekurangan akan membeli barang yang dibutuhkan kepada negara yang kelebihan, dengan meningkatnya pendapatan negara merepresentasikan kesejahteraan suatu negara.
- 5) Perdagangan internasional negara penganur promosi ekspor dapat menambah jumlah produksi untuk konsumsi luar negeri, dengan naiknya tingkat produksi tentu akan memperluas kesempatan kerja. Sedangkan negara penganut substitusi impor akan memperoleh sebuah manfaat yakni tanpa memproduksi barang yang dibutuhkan sehingga sumberdaya yang dimilikinya dapat dialihkan ke sektor yang dapat memberi keuntungan yang lebih.

Dampak Sosial: Kesenjangan pendapatan, Kemiskinan, dan Ketidaksetaraan

Pada kondisi ini perdagangan internasional lebih cenderung memberikan pengaruh yang negatif, seperti terjadinya beberapa persaingan yang memancing pemerintah untuk memenangkan persaingan tersebut, meskipun pada akhirnya akan menciptakan sebuah kericuhan akibat dari situasi yang tidak adil antar industri yang ada. Adapun beberapa dampaknya terhadap kesenjangan pendapatan, kemiskinan dan ketidaksetaraan sebagai berikut (Mahyus, 2014):

- 1) Akibat dari adanya perdagangan internasional menyebabkan produk dalam negeri mengalami penurunan karena kurang disukai Masyarakat akibat kalah bersaing dan kalah dalam mempertahankan kualitas produksi.
- 2) Perdagangan internasional menyebabkan ketergantungan pada negara-negara maju yang menghasilkan barang dengan jumlah, kualitas dan teknologi yang lebih tinggi mengalahkan barang jenis yang diproduksi dalam negeri.
- 3) Mengakibatkan pola konsumsi Masyarakat yang meniru konsumsi negara yang lebih maju sehingga mengubah perilaku konsumtif pada penduduk negara yang mengimpor barang dengan teknologi tinggi. Akibat dari pola konsumtif ini, terjadi kekurangan tabungan masyarakat untuk investasi hingga pada akhirnya menyebabkan kemiskinan.
- 4) Perdagangan internasional menyebabkan banyak industri kecil yang kurang mampu bersaing menjadi gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk impor.
- 5) Adanya persaingan yang tidak sehat dalam perdagangan internasional seperti praktik dumping, praktik tarif impor, dan lain lainnya.

Dampak Lingkungan: Perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan konservasi sumber daya alam

Dengan adanya perdagangan internasional ternyata memberi dampak positif terhadap lingkungan. Secara umum perdagangan bebas mampu memberi dorongan untuk terjadinya alokasi sumber daya yang efisien diseluruh dunia dan berkontribusi terhadap peningkatan standar hidup Masyarakat melalui perluasan kegiatan produksi dan

konsumsi. Maka dari itu, dengan mengurangi penggunaan sumber daya yang tidak efisien, perdagangan dapat memberi pengaruh positif terhadap lingkungan, perdagangan dapat menghasilkan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan lingkungan hidup, khususnya di negara-negara berkembang (Japan, 1995). Ketika tidak dibarengi dengan kebijakan lingkungan yang tepat perdagangan internasional ternyata juga dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, seperti pencemaran udara dan air akibat dari limbah yang berada tidak pada tempatnya (Wiedmann & Lenzen, 2018). Sama halnya dalam konteks peningkatan transportasi, pergerakan internasional bahan berbahaya dan lain sebagainya. Dalam kasus tersebut, dampak yang lebih tidak langsung dapat disebabkan oleh peningkatan sumber daya alam. penggunaan sumber daya dan emisi polutan dan limbah yang terkait dengan perluasan kegiatan ekonomi. Selain itu, perdagangan internasional dapat menyebabkan degradasi lingkungan dengan melemahkan kegiatan ekonomi tertentu, seperti pertanian dan kehutanan, yang mempunyai fungsi pelestarian lingkungan yang bermanfaat (Wassie, 2020).

Perdagangan internasional seringkali menyebabkan relokasi produksi ke negara-negara dengan peraturan lingkungan hidup yang tidak terlalu ketat. Fenomena ini, sering disebut dengan *carbon leakage* yang mengakibatkan peningkatan emisi secara global, meskipun emisi di negara-negara maju mengalami penurunan. Contohnya teramat banyak proses manufaktur telah berpindah ke negara-negara seperti Tiongkok dan India, yang memiliki peraturan lingkungan yang kurang ketat jika dibandingkan dengan negara-negara barat (Otim *et al.*, 2023).

Akibat dari perdagangan internasional tentunya bisa saja memberi pengaruh negatif terhadap degradasi lingkungan terhadap berbagai mekanisme baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Tentunya demi memperluas pasar dan memenuhi permintaan global akan berbagai komoditas contohnya komoditas pertanian seperti kelapa sawit, kedelai dan lain sebagainya, banyak negara yang mengubah hutan dan habitat alami lainnya menjadi sebuah lahan pertanian. Hal ini tentunya sangat berkontribusi atas erosi tanah, hilangnya keragaman hayati bahkan mengganggu siklus air. Meskipun terkadang isu penerapan energi terbarukan mengurangi degradasi lingkungan akan tetapi energi tak terbarukan lebih memberi tekanan yang lebih besar bagi degradasi

lingkungan (Iorember *et al.*, 2022).

Pada konservasi sumber daya alam perdagangan internasional memang memberikan dorongan Pembangunan ekonomi dan memberikan peluang mendorong keberlanjutan, dengan adanya perdagangan internasional memfasilitasi transfer teknologi dan praktik berkelanjutan, negara-negara dapat mengimpor teknologi canggih yang membantu efisiensi penggunaan dan konservasi sumber daya alam, seperti teknologi energi terbarukan, sistem irigasi hemat air, dan praktik pertanian berkelanjutan. Namun hal ini juga dapat menimbulkan sebuah risiko seperti pengeksploitasian sumber daya dengan cara berlebihan, perusakan habitat, polusi degradasi dan perubahan iklim (Redmond & Nasir, 2020).

PERDAGANGAN INTERNASIONAL MENURUT PERSPEKTIF ISLAM

Sejak lama, semua orang dan negara telah melakukan perdagangan internasional. Perdagangan kaum Quraisy digambarkan dalam Al Quran sebagai salah satu potret perdagangan internasional, dan karena kehebatan perdagangan mereka, Al Quran mencatat aktivitas perdagangan mereka sebagaimana tercantum dalam QS. Al Quraisy. Mereka mampu menjadi pemain global dalam perdagangan internasional meskipun sumber daya alamnya terbatas. Mereka biasanya melakukan perdagangan internasional pada musim dingin (Al shita) dan musim panas (Al shaif). Pada musim dingin, mereka berdagang dengan wilayah Yaman, dan pada musim panas mereka berdagang dengan wilayah Syam (Ghufron, 2019).

Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, Allah SWT memerintahkan hamba-Nya untuk mencari rezeki di daerahnya sendiri, serta di seluruh dunia. Berikut beberapa ayat yang menjelaskan tentang perdagangan internasional dalam QS. Al-Jumuah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Apabila salat (jumat) telah dilaksanakan, bertebaran kamu dibumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung.

QS. Al-Mulk ayat 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ

Artinya: Dialah yang menjadikan bumi untuk kamu dalam keadaan mudah dimanfaatkan. Maka, jelajahilah segala penjurunya dan makanlah Sebagian dari rezekinya. Hanya kepadanya kamu (Kembali setelah) dibangkitkan.

Perdagangan internasional sangat penting karena tidak mungkin suatu negara dapat memenuhi semua kebutuhan negaranya sendiri, dan Allah SWT menciptakan kelebihan dan kekurangan di setiap wilayah dan negara. Dua musafir terkenal dari kalangan tabi'in, Ikrimah dan Al Dahak, disebutkan oleh Al Qurtubi dalam menafsirkan ayat diatas:

"Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni) nya" yaitu, Allah memberi rezeki kepada penduduknya dan apa yang sesuai untuk kehidupan mereka berupa perdagangan, pohon-pohon dan manfaat-manfaat yang ada pada setiap negeri yang Allah tidak menjadikannya di daerah lain, supaya sebagian dengan yang lainnya bisa saling menghidupi melalui perdagangan dan perjalanan dari satu negeri ke negeri lainnya.

Sama halnya degan salah satu musafir kontemporer dari Mesir yakni Imam Al-Maraghi mengemukakan bahwa:

"Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)-nya", yaitu Allah menentukan bagi penduduk negeri makanan-makanan mereka yang sesuai dengan kondisi alam mereka berupa makanan, pakaian dan tumbuh-tumbuhan, karena sebagian manusia membutuhkan yang lainnya. Pedagang di antara mereka mengedarkan dan mengangkut apa yang telah dihasilkan oleh satu negara ke negara lain dan dari satu wilayah ke wilayah lain. Ini dalam rangka memakmurkan dunia dan sistemnya (Waluyo, 2016).

Menurut Juribah bin Ahmad Al Haritsi, penulis buku Fikih ekonomi Umar bin Al Khatab, agar hubungan ekonomi internasional benar-benar bermanfaat bagi umat Islam dan menghindari dampak negatifnya, hubungan tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan: Pertama, barang dan jasa harus halal di tempat perdagangan; Kedua, jika hubungan ekonomi internasional benar-benar bermanfaat bagi umat Islam; dan ketiga, jika itu benar-benar bermanfaat bagi umat Islam (Waluyo, 2016).

Salah satu dari ketiga tujuan perdagangan internasional, yang

terkait langsung dengan pembentukan blok ekonomi, adalah mencapai kemakmuran global melalui kerja sama negara-negara Muslim. Negara-negara Muslim bekerja sama untuk membantu satu sama lain dan memperluas pemikiran dan nilai-nilai Islam untuk mencapai tujuan ini. Dalam hal ini, negara-negara Muslim harus meningkatkan kemandirian mereka sehingga mereka dapat menawarkan bantuan, bukan menerimanya. Oleh karena itu, setiap negara memiliki kemampuan untuk mengurangi kemiskinan ekonomi global atau membantu negara-negara berkembang yang miskin secara individu maupun kolektif melalui lembaga-lembaga seperti OKI dan Islamic Economic Bank.

KESIMPULAN

- 1) Perdagangan internasional sering kali memainkan peranan penting bagi pengalaman historis negara-negara berkembang. Dalam tahun-tahun belakangan ini, banyak perhatian pada isu perdagangan dan pembangunan telah difokuskan untuk memahami keberhasilan ekspor yang spektakuler dari Asia Timur, Taiwan, Korea Selatan, dan perekonomian negara Asia Timur lainnya memelopori strategi ini, yang berhasil diikuti oleh tetangganya yang jauh lebih besar, Cina. Pengalaman negara-negara ini menjadi alur penting dalam mengungkapkan drama perdagangan dan pembangunan dan akan dibahas lebih lanjut. Negara-negara berkembang biasanya lebih bergantung pada perdagangan daripada negara-negara maju.
- 2) Teori Adam Smith: Teori keunggulan absolut adalah salah satu konsep penting ekonomi dan perdagangan internasional. Adam Smith seorang ekonom klasik, mengemukakan teori keunggulan absolut menyatakan bahwa sebuah negara memiliki keunggulan absolut dalam produksi suatu barang jika negara tersebut dapat menghasilkan barang tersebut dengan biaya absolut yang lebih rendah daripada negara lainnya.
- 3) Teori David Ricardo: Dalam teori ini, setiap negara mengkhususkan produksinya dalam bidang-bidang yang diunggulinya secara komparatif dan semua negara melakukan perdagangan secara bebas tanpa hambatan, maka akan tercapainya efisiensi dalam penggunaan faktor-faktor produksi dan pada gilirannya produksi dunia secara keseluruhan akan mencapai maksimum, sehingga makin tinggi kemakmurannya.

- 4) Teori Hecksher-Ohlin: Teori perdagangan anugerah faktor Heckscher-Ohlin perdagangan anugerah faktor memungkinkan untuk menjabarkan secara analisis dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap pola perdagangan dan dampak perdagangan terhadap struktur ekonomi nasional dan terhadap perolehan pendapatan atau pembayaran atas beragam faktor produksi. Selain itu, Hecksher dan Ohlin mengatakan suatu negara akan melakukan perdagangan dengan negara lain karena negara tersebut memiliki keunggulan komparatif, yaitu keunggulan dalam teknologi dan keunggulan faktor produksi.
- 5) Kebijakan: Kebijakan Tarif (Tarif impor adalah pungutan yang dikenakan pada barang ketika masuk ke batas negara. Tarif impor biasanya dihubungkan dengan proteksionisme, yakni kebijakan ekonomi yang membatasi perdagangan antarnegara); Kebijakan Non tarif (Kebijakan non tarif yang diperlakukan oleh negara- negara importir atas tuna olahan asal Indonesia meliputi tindakan *sanitary and phytosanitary measures* (SPS), *technical barriers to trade* (TBT), inspeksi pra-pengiriman, lisensi, kuota, dan tindakan control kuantitas lainnya, tindakan pengendalian harga, tindakan keuangan, tindakan yang memengaruhi, dan hak milik intelektual).
- 6) Pengaruh teknologi terhadap perdagangan internasional: Teori perdagangan internasional menyoroti pentingnya inovasi teknologi dalam menjelaskan daya saing internasional suatu negara memandang pembangunan ekonomi sebagai proses dinamis yang berasal dari industri dan ekspor, dan inovasi memainkan peran kunci dalam pengembangan keduanya. Inovasi teknologi didefinisikan sebagai “kapasitas penyerapan” suatu negara kemampuan untuk menerapkan informasi dari luar negeri ke dalam praktik dengan mengembangkan produk dan proses baru yang memainkan peran penting dalam perdagangan internasional dan pembangunan ekonomi.
- 7) Pengaruh faktor politik, sosial, ekonomi terhadap perdagangan internasional: Politik domestik seringkali menjadi faktor utama mempengaruhi kebijakan perdagangan suatu negara. Para pemimpin politik di negara maju harus mempertimbangkan kepentingan dalam negeri mereka, termasuk kepentingan ekonomi dan politik,

dalam mengambil Keputusan tentang perdagangan internasional. Perilaku demokratis merupakan pencerminan dari budaya politik nasional atau negara.

- 8) Dampak perdagangan internasional: Selain memberikan dampak pada sektor pemerintahan perdagangan internasional juga memberikan dampak terhadap sektor rumah tangga Perusahaan. Dengan adanya perdagangan internasional pada akhirnya akan memberikan sebuah keuntungan bagi suatu negara. Hal ini tentu saja dapat meningkatkan kekayaan dan kesejahteraan bagi penduduknya. perdagangan internasional dapat memundurkan industri dalam negeri jika masyarakatnya lebih menyukai produk-produk impor dari luar negeri, memunculkan ketergantungan terhadap negara-negara maju sebagai penguasa faktor produksi, sehingga negara-negara maju seenaknya menetapkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat merugikan negara berkembang. Akibat dari adanya perdagangan internasional menyebabkan produsen dan tenaga kerja domestik akan dirugikan karena kehilangan bisnis akibat aliran barang luar negeri yang lebih murah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhetyo, S. A. (2022). Penanggulangan Perdagangan Lintas Batas Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. *Trade Policy Journal*, 1(1), 19–24.
- Ahad, Z. A., Rahmatullah, P., Safiullah, S., Zmarai, M., & Naqibullah, H. (2020). Complex Correlation Between Economic Growth and Oil Earnings : Empirical Study From Brunei Darussalam Using an Ardl – Bound Test Approach and Ecm. *Journal of Archaeology of Egyptology*, 17(9), 7301–7322.
- Alice, A., & Christian, N. (2022). Efektivitas Komite dan Mekanisme Tata Kelola Perusahaan terhadap Pencegahan Kejahatan Keuangan. *Owner*, 6(1), 176–188. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i1.546>
- Allam, Z., Bibri, S. E., & Sharpe, S. A. (2022). The Rising Impacts of the COVID-19 Pandemic and the Russia–Ukraine War: Energy Transition, Climate Justice, Global Inequality, and Supply Chain Disruption. *Resources*, 11(11). <https://doi.org/10.3390/>

- resources11110099
- Anand, S., & Sen, A. (2017). Human development and economic sustainability. *Sustainability*, 28(12), 421–441. <https://doi.org/10.4324/9781315241951-37>
- Apridar. (2012). *Ekonomi Internasional, Sejarah, Teori, Konsep dan Permasalahan dalam Aplikasinya*. (kedua). Graha Ilmu.
- Ariff, M., Zarei, A., & Bhatti, M. I. (2021). Monitoring exchange rate instability in 12 selected Islamic economies. *Journal of Behavioral and Experimental Finance*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jbef.2021.10051>
- Arisanto, P. T., & Adi Wibawa. (2021). Perang Dagang Era Donald Trump Sebagai Kebijakan Luar Negeri Adaptif Convulsive Amerika Serikat. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 163–183. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.222>
- Azzaki, M. A. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional, Dan Keterbukaan Ekonomi Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Negara- Negara Asean. *Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Kewirausahaan*, 10(2), 154. <https://doi.org/10.26418/jebik.v10i2.46953>
- Bagci, K., Diallo, A., & Terai, A. (2022). *Potential Impacts of the African Continental Free Trade Area (AfCFTA) on Selected Countries*. 1–48.
- Bhatti, M. I., & Ghouse, G. (2023). The Trade Development Among OIC Countries: Exploring Challenges, Opportunities, and the Impact of the Covid-19 Pandemic. *Muslim Business and Economic Review*, 2(1), 1–25. <https://doi.org/10.56529/mber.v2i1.158>
- Chian, K. W. (2023). Trade Facilitation in Brunei Darussalam and the Results of the ASTFI II Follow-up Study. *Follow up ASEAN Seamless Trade Facilitation Indicators*, 44–59.
- Derg[], F. E. (2022). *Economics and Administrative Sciences*. 3(3), 37–47. Era Amalia. (2007). *Ekonomi Internasioanal* (pertama). Graha Ilmu. Fahrzi, M. (2015). *Indonesia Dalam Liberalisasi Perdagangan (Perspektif Politik dan Budaya Hukum)*. *Jurnal Yuridis*, 2(2), 151–163.
- Ghouse, G., Ejaz, N., Bhatti, M. I., & Aslam, A. (2022). Performance of Islamic vs conventional banks in OIC countries: Resilience and recovery during Covid-19. *Borsa Istanbul Review*, 22, S60–S78. <https://doi.org/10.1016/j.bir.2022.11.020>

- Ghufron, M. I. (2019). ASEAN Free Trade Area, Tantangan Ekonomi Indonesia dan Perdagangan Internasional Perspektif Islam. *Jihbiz : Jurnal Ekonomi, Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 3(2), 131–146. <https://doi.org/10.33379/jihbiz.v3i2.797>
- Gnangnon, S. K. (2015). Trade openness and structural vulnerability in developing countries. *Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/10.1108/JES-01-2015-0013>
- Gumilar, A. (2018). Analisis Bisnis Internasional Di Indonesia. *Jurnal ADBIS*, 2(2), 141–154.
- Gürel, B., & Kozluca, M. (2022). Chinese Investment in Turkey: The Belt and Road Initiative, Rising Expectations and Ground Realities. *European Review*, 30(6), 806–834. <https://doi.org/10.1017/S1062798721000296>
- Hassan, M. K., Chiaramonte, L., Dreassi, A., Paltrinieri, A., & Piserà, S. (2023). Equity costs and risks in emerging markets: Are ESG and Sharia principles complementary? *Pacific-Basin Finance Journal*, 77, 101904. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.pacfin.2022.101904>
- Huang, G. (1997). Determinants of United States-Japanese Foreign Direct Investment: a comparison across countries and industries. *Taylor & Francis*.
- Iorember, P. T., Gbaka, S., Jelilov, G., Alymkulova, N., & Usman, O. (2022). Impact of international trade, energy consumption and income on environmental degradation in Africa's OPEC member countries. *African Development Review*, 34(2), 175–187.
- Japan, G. (1995). *Harmonizing Environment and Trade Policies*. [https:// www.env.go.jp/en/earth/iec/hetp/ch1.html](https://www.env.go.jp/en/earth/iec/hetp/ch1.html)
- Kemendag. (2023). *Free Trade Agreement Center*.
- Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia. (2008). *D-8 Sepakat Tingkatkan Perdagangan*.
- Kemlu. (2024). *Developing Eight (D-8)*.
- Kendie, D. (1999). Egypt and the Hydro-Politics of the Blue Nile River. *Northeast African Studies*, 6(1), 141–169. <https://doi.org/10.1353/nas.2002.0002>
- Kindleberger, P. H. L. C. P. (1995). *Ekonomi Internasional* (keempat). Penerbit Erlangga.

- Lechman, E. (2018). Networks externalities as social phenomenon in the process ICT diffusion. *Economics and Sociology*, 11(1), 22–43. <https://doi.org/10.14254/2071-789X.2018/11-1/2>
- Lula, P., Oczkowska, R., Wilniewska, S., & Wójcik, K. (2019). An attempt to estimate the competency gap in the IT sector. *International Entrepreneurship Review*, 5(3), 95–112. <https://doi.org/10.15678/ier.2019.0503.07>
- Maharani Tristi, Harianto, H., & Rifin, A. (2021). Dampak Kebijakan Tarif dan Non-tarif Negara-Negara Importir atas Ekspor Tuna Olahan Indonesia. *Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia*, 26(3), 468–478. <https://doi.org/10.18343/jipi.26.3.468>
- Mahyus, E. (2014). *Ekonomi Internasional*. Jakarta: Erlangga.
- Márquez-ramos, L., Martínez-zarzoso, I., Jaume, U., Institut, I., Internacional, E., & Ekonomi, P. (2010). *Pengaruh Inovasi Teknologi terhadap*. April, 0–38.
- Nowilski, W., & Kozma, M. (2017). How can blockchain technology disrupt the existing business models? *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 5(3), 173–188. <https://doi.org/10.15678/EBER.2017.050309>
- Otim, J., Watundu, S., Mutenyo, J., Bagire, V., & Adaramola, M. S. (2023). Effects of carbon dioxide emissions on agricultural production indexes in East African community countries: Pooled mean group and fixed effect approaches. *Energy Nexus*, 12(October), 100247. <https://doi.org/10.1016/j.nexus.2023.100247>
- Permata Sari, C. D., & Ibrahim, H. (2023). Peran Politik dalam Pembentukan Kebijakan Perdagangan Internasional (Studi Perbandingan Antara Negara Maju dan Negara Berkembang). *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2464–2473. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13291>
- Pini, M. (2019). Family management and Industry 4.0: Different effects in different geographical areas? An analysis of the less developed regions in Italy. *Journal of Entrepreneurship, Management and Innovation*, 15(3), 73–102. <https://doi.org/10.7341/20191533>
- Purnastuti, L. (2007). *Ekonomi Internasional* (Kedua). Universitas Terbuka.
- Putri, K., Azmi Puteh, C., Sirait, E. V., Lie, J., Rabintar, D., & Simanjorang, F. (2023). Analisis Efek Globalisasi Terhadap

- Perdagangan Internasional Negara Indonesia. *Jurnal Kendali Akuntansi*, 1(3), 15–28.
- Putri, R. D. S., & Muljanto, S. (2021). Pengaruh Perdagangan Internasional (Ekspor-Import) dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *Journal of Public Auditing and Financial Managemen*, 2021(1), 13–26.
- R, Yaro, J. a, Yamauchi, F., Larson, D. F., Work, S. F. O. R., Work, D., Wolseth, J., Wiuf, C., Donnelly, P., Wilson, J., Wilson, J., Wilson-Parr, R., Westminster, N., Plc, B., No, W., Office, R., Authority, P. R., Authority, F. C., Authority, P. R., ... Marchetti, A. (2018). Title. *World Development*, 1(1), 1–15.
- Rahmat, A. (2021). Konsep Perbandingan Geopolitik, sosial Budaya dan Ekonomi Negara Maju dan Negara Berkembang. *Jurnal Edukasia Multi Kultura*, 3(1), 17.
- Raimi, L., & Mobolaji, H. I. (2008). Imperative of economic integration among Muslim countries: Lessons from European globalisation. *Humanomics*, 24(2), 130–144. <https://doi.org/10.1108/08288660810876840>
- Redmond, T., & Nasir, M. A. (2020). Role of natural resource abundance, international trade and financial development in the economic development of selected countries. *Resources Policy*, 66, 101591.
- Ricky W. Griffin, R. J. E. (2007). Pengantar Bisnis Edisi 2. In Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Rodrik, D. (2009). Growth After The Crisis. *CEPR Discussion Paper No. DP7480*.
- Rymarczyk, J. (2021). The Impact of Industrial Revolution (Industry 4.0) on Naval Industry in. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 9 (1), 105–117.
- Sekretaris Nasional ASEAN. (2024a). *Perdagangan Brunei Darussalam*. Sekretaris Nasional ASEAN. (2024b). *Perdagangan Malaysia*. SESRIC. (2019). *OIC Economic Outlook*.
- Sieja, M., & Wach, K. (2019). The use of evolutionary algorithms for optimization in the modern entrepreneurial economy: Interdisciplinary perspective. *Entrepreneurial Business and Economics Review*, 7(4), 117–130. <https://doi.org/10.15678/EBER.2019.070407>

- Spulber, D. F. (2008). Innovation and international trade in technology. *Journal of Economic Theory*, 138(1), 1–20. <https://doi.org/10.1016/j.jet.2007.06.002>
- Sunu, A. P. (2020). Perdagangan Internasional Sebagai Aspek Kedua dan Ketiga dari Power. *Padjadjaran Journal of International Relations*, 2(1), 3. <https://doi.org/10.24198/padjir.v2i1.25602>
- Suryo, H. (2015). Budaya Politik Negara Maju dan Negara Berkembang: Suatu Perbandingan. *Transformasi*, 1(27), 1–47.
- Sutria, D. (2019). Implementasi Metode Batu Pijar Dalam Pembelajaran Matematika Untuk Meningkatkan Aktifitas Dan Hasil Belajar Siswa Sd Negeri 47 Kota Jambi. *Jurnal Pesona Dasar*, 7(2), 1–9. <https://doi.org/10.24815/pear.v7i2.14753>
- Łwiadek, A., Dzikowski, P., Tomaszewski, M., & Gorczkowska, J. (2019). Sectoral patterns of innovation cooperation in polish industry. *Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economic Policy*, 14(1), 183–200. <https://doi.org/10.24136/eq.2019.009>
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development Twelfth Edition* (12th ed.) Pearson.
- UMA, L. (2023). Dampak Revolusi Industri 5.0. *Lembaga Penjaminan Mutu*, 1, <https://lpm.uma.ac.id/ini-dampak-revolusi-industri>.
- Vo, T. D., & Tran, M. D. (2021). The Impact of Covid-19 Pandemic on the Global Trade. *International Journal of Social Science and Economics Invention*, 7(01), 1–7. <https://doi.org/10.23958/ijsssei/vol07-i01/261>
- Waluyo, B. (2016). Implementasi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Untuk Merealisasikan Tujuan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam | Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 185–204. <https://www.e-journal.unair.ac.id/JEBIS/article/view/3167>
- Wassie, S. B. (2020). Natural resource degradation tendencies in Ethiopia: a review. *Environmental Systems Research*, 9(1), 1–29. <https://doi.org/10.1186/s40068-020-00194-1>
- Wiedmann, T., & Lenzen, M. (2018). Environmental and social footprints of international trade. *Nature Geoscience*, 11(5), 314–321. <https://doi.org/10.1038/s41561-018-0113-9>
- WTO. (2018). *The future of world trade: How digital technologies are global commerce*.

- Xu, J., & Wang, B. (2019). Intellectual capital performance of the textile industry in emerging markets: A comparison with China and South Korea. *Sustainability (Switzerland)*, 11(8). <https://doi.org/10.3390/su11082354>
- Yu, Z., Razzaq, A., Rehman, A., Shah, A., Jameel, K., & Mor, R. S. (2021). Disruption in global supply chain and socio-economic shocks: a lesson from COVID-19 for sustainable production and consumption. *Operations Management Research*, 233–248. <https://doi.org/10.1007/s12063-021-00179-y>
- Yuni, R. (2021). Dampak Perdagangan Internasional Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Pada Tahun 2009-2019. *Niagawan*, 10(1), 62. <https://doi.org/10.24114/niaga.v10i1.19193>

DEFISIT NERACA PEMBAYARAN: UTANG PEMERINTAH, KRISIS KEUANGAN DAN KEBIJAKAN STABILISASI

(Cut Sari Maswidar, Khadhiya Fahira, Maya Karmila, Muhammad Akbar
Ramadhani)

PENDAHULUAN

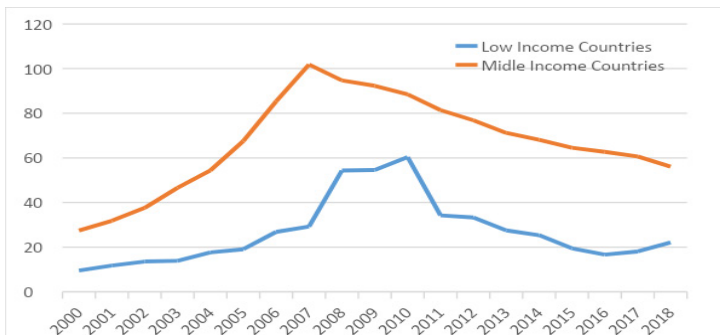
Model perekonomian terbuka memungkinkan terjadinya perdagangan internasional bagi suatu negara dengan negara lainnya. Bagi setiap negara-negara dunia, konektifitas ekonomi menjadi suatu hal yang penting guna memenuhi kebutuhan dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, serta memperluas cakupan pasar dan sumber permodalan bagi ekonomi negara (Ekanda, 2014). Selanjutnya dalam konsep ekonomi internasional, neraca pembayaran menggambarkan kapasitas ekonomi sebuah negara dalam melakukan transaksi perdagangan internasional (Wau, 2021). Neraca pembayaran berguna sebagai salah satu indikator ekonomi utama untuk memahami realitas perekonomian suatu negara dengan negara lain (Ismael, 2022). Saldo neraca pembayaran memungkinkan kita untuk dapat melakukan analisis ekonomi suatu negara dan mengamati trend dari kegiatan-kegiatan transaksi yang terjadi dalam neraca perdagangan di negara-negara berkembang. Tiga akun transaksi yang menjadi komponen neraca pembayaran yaitu: akun neraca berjalan (*current account*), akun neraca modal (*capital account*), akun neraca tunai (*cash account*). (Todaro & Smith, 2012).

Defisit yang tercermin pada neraca pembayaran selanjutnya menjadi masalah yang krusial bagi perekonomian suatu negara. Defisit yang terus berlanjut akan menyebabkan kerugian yang besar dan kerugian yang besar serta ekonomi makro yang sangat besar (Ilakajac *et al.*, 2023). Keadaan ini selanjutnya membutuhkan langkah penangan untuk menutupinya,

beberapa kebijakan diterapkan sebagai upaya mencapai keseimbangan. Dalam kondisi semacam ini, cadangan devisa negara digunakan untuk menutupi defisit dari akumulasi neraca berjalan dan neraca modal. (Todaro, 2015). Studi Benigno *et al.*, (2022) mengkonfirmasi bahwa kemungkinan penggunaan cadangan untuk menyediakan likuiditas selama krisis memperkuat dampak positif akumulasi cadangan terhadap pertumbuhan. Pengelolaan cadangan yang optimal memerlukan tingkat akumulasi cadangan yang cepat, serta pertumbuhan yang lebih tinggi dan surplus transaksi berjalan yang lebih besar. Céspedes & Chang (2021) mengungkapkan pada praktiknya terdapat interaksi antara akumulasi cadangan devisa yang optimal dan penyediaan likuiditas internasional bank sentral dalam perekonomian terbuka kecil yang mengalami tekanan keuangan, bank sentral muncul dan berperan sebagai pihak yang mengumpulkan cadangan untuk menyediakan likuiditas jika terjadi gesekan keuangan.

Namun masalah yang serius dihadapi oleh negara-negara berkembang yang miskin terutama bagi mereka yang memiliki cadangan devisa rendah sehingga memiliki ketidakmampuan menutupi defisit yang pada kelanjutannya mendorong mereka untuk terus berutang (Todaro, 2015). Studi Essl *et al.*, (2019) misalnya mengungkapkan bahwa mayoritas negara berpendapatan rendah akan sangat terpukul oleh pelemahan mendadak dalam perdagangan atau kondisi keuangan global akibat tingginya utang luar negeri, kurangnya ruang fiskal, rendahnya cadangan mata uang asing, dan ekspor yang tidak terdiversifikasi.

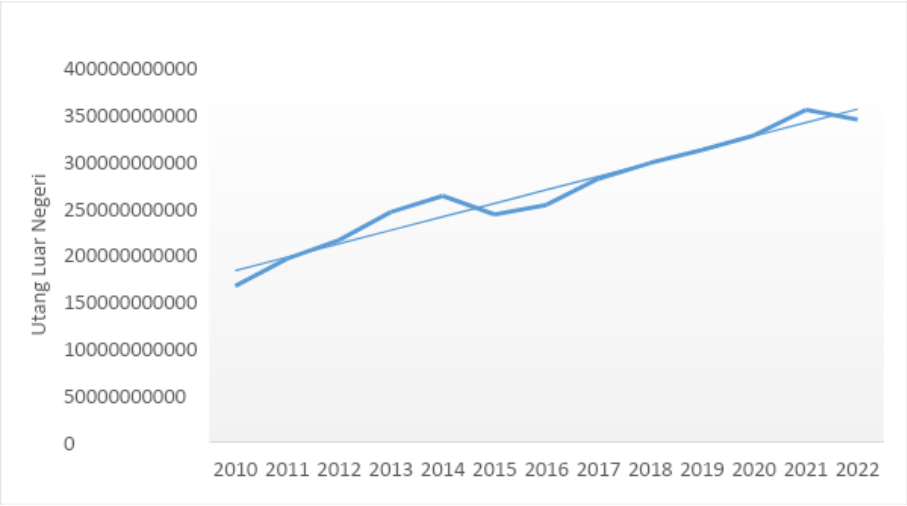
Gambar 1. Rasio Cadangan Devisa terhadap Utang Luar Negeri (%)



Sumber: World Bank (2024)

Grafik di atas memberikan gambaran bagaimana kondisi cadangan devisa bagi negara-negara yang pendapatannya rendah dibandingkan dengan cadangan devisa bagi negara-negara berpendapatan menengah. Kasus yang terjadi di negara berpendapatan rendah menunjukkan rasio cadangan devisa terhadap utang yang kecil, ini menunjukkan kepemilikan cadangan devisa yang sangat minim dan tidak mampu menutupi keseluruhan utang luar negeri. Adapun kondisi berbeda ditemui di negara-negara berpendapatan menengah, di mana kepemilikan cadangan devisa di negara-negara ini relative besar dan nyaris dapat menutupi keseluruhan utang luar negerinya. Kondisi ini menggambarkan kondisi yang berbeda-beda yang dihadapi tiap-tiap negara terkait dengan cadangan devisa mereka. *Trend* dalam neraca pembayaran mencerminkan pola pembangunan ekonomi yang dijalankan oleh setiap negara dalam rangka mewujudkan ekspansi ekonominya. Bagi negara-negara berkembang, periode sebelum tahun 1980 cenderung menoleransi terjadinya defisit pada neraca transaksi berjalan mereka sebagai bentuk upaya membangun industrialisasi dalam ekonomi dengan banyak mengimpor mesin-mesin dan peralatan yang dibutuhkan untuk menjamin terlaksananya proses industrialisasi. Kegiatan impor ini pada akhirnya melampaui pendapatan ekspor yang mereka peroleh dan terus meningkat sehingga menciptakan ketidakseimbangan pada transaksi berjalan (Todaro, 2015). Utang luar negeri telah menjadi perhatian global yang besar, tidak hanya bagi negara-negara miskin yang berhutang banyak (HIPC) namun juga negara-negara berkembang akibat Krisis Keuangan Global (GFC) tahun 2008. Hal ini telah menjadi topik yang banyak dibicarakan dan secara umum menjadi perhatian utama keuangan global dan perekonomian dunia (Lau & Lee, 2016).

Tabel 2. Akumulasi Utang Luar Negeri di Negara-negara OIC



Sumber: World Bank

Data di atas menggambarkan adanya trend peningkatan akumulasi utang luar negeri yang dilakukan oleh negara-negara OKI, hal ini menandakan bahwa utang memegang peranan penting bagi perekonomian banyak negara. Pinjaman luar negeri sering menjadi pilihan bagi sumber pembiayaan pembangunan ekonomi negara. Negara-negara OKI terdiri dari beragam kategori negara dari berbagai tingkatan pendapatan dimulai dari negara berpendapatan rendah, negara berpendapatan menengah, hingga negara berpendapatan tinggi.

Apakah utang luar negeri selalu berdampak buruk? Tentu saja ini adalah ungkapan yang tidak sepenuhnya benar. Pinjaman luar negeri berguna untuk menciptakan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan proses pembangunan dan hal tersebut tidak menjadi masalah selama akumulasi utang tersebut dipergunakan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang produktif dan mampu memberi tingkat pengembalian yang lebih besar (Todaro, 2015). Studi Yusuf & Mohd (2023) mengungkapkan bahwa utang luar negeri mempunyai dampak positif dan simetris yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang dan pendek, sedangkan pembayaran utang yang

mendukung hipotesis *debt overhang* mengaktifkan efek simetris yang menghambat pertumbuhan. Artinya kewajiban penganggsuran utanglah yang selanjutnya menjadi beban ekonomi suatu negara.

Akumulasi utang dapat berbuntut pada masalah krisis utang ketika suatu negara terus menerus menumpuk sehingga menyebabkan beban angsuran yang semakin membesar. Krisis utang yang terjadi di era 80 an menjelaskan bagaimana kecendrungan menambah utang terus menerus dan kemudahan dalam pembiayaan pinjaman oleh bank swasta non resmi dapat menjadi awal mula bagaimana krisis bisa terjadi. Keadaan diperburuk dengan adanya lonjakan harga-harga minyak dan resesi ekonomi yang kian mendorong peningkatan pinjaman (Todaro, 2015). Studi Studi Wang *et al.*, (2021) mengungkapkan peristiwa lain, selama pandemi COVID-19, terjadi peningkatan dramatis pada tingkat utang nasional di seluruh dunia, dengan laporan adanya kasus penurunan peringkat utang negara dan kesulitan memenuhi kewajiban utang ("*debt distress*"), yang sebagian besar terkonsentrasi pada negara-negara berpendapatan rendah dan menengah. Kilinc (2023) mengungkapkan bahwa beban pembayaran utang mengurangi pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka pendek maupun menengah. Terdapat pengaruh negatif yang berkepanjangan dari beban pembayaran utang terhadap pengangguran dan konsumsi rumah tangga.

Pada bagian pembahasan ini kita akan mempelajari bagaimana konsep dari neraca pembayaran dan teori-teori yang berkaitan dengan transaksi-transaksi pada neraca pembayaran. Pembahasan juga berlanjut pada ranah kebijakan dalam menangani permasalahan deficit pada neraca pembayaran dan bagaimana mengelola utang agar tidak sampai memicu krisis bagi perekonomian. Pembahasan juga diperluas pada kajian-kajian dalam perspektif ekonomi Islam.

TEORI DAN KEBIJAKAN

Utang Luar Negeri

a. Definisi Utang Luar Negeri

Utang luar negeri merupakan total utang luar negeri swasta dan publik yang harus dibayar oleh suatu negara (Todaro & Smith, 2015). Lebih jauh lagi, pengertian utang luar negeri menurut Rachbini sebagai mana dikutip oleh Ulfa & Zulham, (2017) menjelaskan bahwa Utang luar

negeri (ULN) atau pinjaman luar negeri adalah sebagian dari total utang suatu negara yang diperoleh dari para kreditor di luar negara tersebut. Penerima uang luar negeri dapat berupa pemerintah, perusahaan atau perorangan. Bentuk utang dapat berupa uang yang diperoleh dari bank swasta, pemerintah negara lain, atau lembaga keuangan internasional seperti IMF dan Bank Dunia.

Menurut Keynes, alasan utama pemerintah melakukan pinjaman ke luar negeri adalah tingginya defisit anggaran pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan. Maka dari itu, pemerintah berusaha untuk menutupi kekurangan tersebut dengan melakukan pinjaman ke luar negeri. Namun, tentunya hal tersebut akan menimbulkan adanya kewajiban untuk membayar kembali utang tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati (Neng Dilah Nur Fadillah & Sutjipto, 2018).

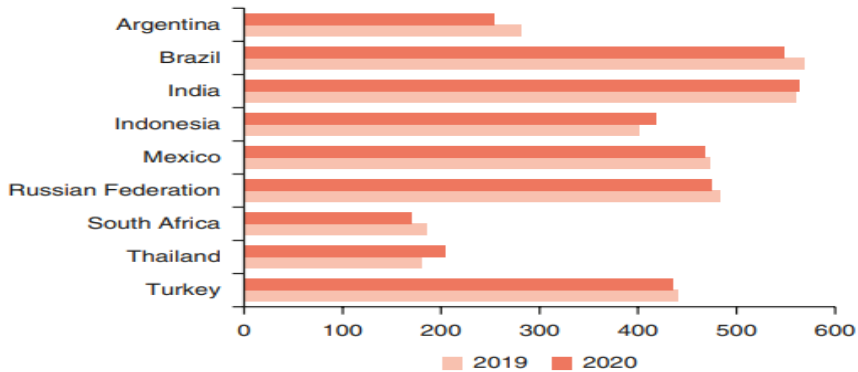
b. Akumulasi utang dan kemunculan krisis utang

Akumulasi utang eksternal merupakan fenomena yang sering terjadi di negara berkembang pada tahap pembangunan ekonomi dimana pasokan tabungan domestik rendah, defisit pembayaran transaksi berjalan tinggi, dan impor barang modal di perlukan untuk memperbanyak sumber daya domestik. Meskipun pinjaman luar negeri tersedia dan sangat bermanfaat akan tetapi apabila di kelola dengan buruk, akan memakan banyak biaya. Biaya utama terkait dengan akumulasi utang eksternal yang besar adalah pengangsuran utang, pengangsuran utang adalah pembayaran likuidasi utang pokok ketika utang makin besar atau ketika bunga meningkat akan menyebabkan pengangsuran utang membesar. Pengangsuran utang harus dilakukan melalui valuta asing dengan kata lain kewajiban pengangsuran utang hanya dapat di penuhi melalui pendapatan ekspor, pemangkasan impor, atau menambah pinjaman eksternal. Transfer dasar di definisikan sebagai aliran masuk atau keluar neto dari valuta asing terkait dengan pinjaman internasionalnya. Transfer dasar di hitung sebagai selisih antara aliran masuk modal kotor dan amortisasi utang sebelumnya. Transfer dasar mencerminkan jumlah valuta asing yang di dapatkan atau di dikeluarkan oleh negara berkembang setiap tahunnya dari aliran modal internasional.

Menurut *International Monetary Fund* (IMF), hampir semua negara di dunia pernah berutang kepada IMF. Gambar di bawah menunjukkan data dengan 10 negara peminjam yang berpenghasilan rendah dan

menengah 2019-2020 memiliki utang terbesar di dunia pada tahun 2020, di gambar ini Indonesia menempati posisi ke-6.

Top-10 Low- and Middle-Income Borrowers, Excluding China, 2019 and 2020 US\$ (billion)



Sumber: *The World Bank* (2022)

Jika dibandingkan dengan negara-negara di ASEAN, Indonesia merupakan negara dengan tingkat utang luar negeri tertinggi (*World Bank*, 2022). Umumnya pinjaman luar negeri yang dilakukan oleh pemerintah dalam pembangunan nasional terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek. Pinjaman program merupakan utang luar negeri pemerintah dalam bentuk kurs mata uang asing yang dapat dikonversi ke dalam mata uang rupiah yang meminjamannya digunakan untuk pembiayaan terkait program-program pemerintah baik program pembangunan ataupun program dari masing-masing sektor pemerintahan. Sedangkan, pinjaman proyek adalah utang luar negeri pemerintah yang mana meminjamannya digunakan untuk pembiayaan terkait kegiatan pembangunan-pembangunan infrastruktur di berbagai sektor seperti sektor perhubungan, pariwisata, energi, dan proyek-proyek dalam rangka mengentaskan kemiskinan. Kebijakan yang akan dilakukan pemerintah Indonesia yang modalnya didapat dari pinjaman luar negeri pasti berdasarkan kesepakatan bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Selama ini, penggunaan pinjaman-pinjaman tersebut memiliki tujuan yang jelas berdasarkan kekurangan pembiayaan di beberapa sektor atau

program tertentu. Pinjaman-pinjaman tersebut rata-rata terus meningkat setiap tahunnya sebab kekurangan anggaran dari pendapatan negara untuk memenuhi belanja APBN di tiap tahunnya (FEB, 2019).

c. Upaya Penanggulangan: Instabilitas Makroekonomi, Kebijakan Stabilisasi IMF Klasik Serta Kritikanya.

Salah satu tindakan yang semakin sering digunakan oleh negara-negara yang menghadapi ketidakstabilan makroekonomi yang serius (inflasi yang tinggi dan defisit anggaran pemerintah dan pembayaran luar negeri yang parah) seiring dengan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat, adalah dengan pelaksanaan renegosiasi pinjaman dengan bank-bank swasta internasional. Gagasan dasarnya adalah melalui renegosiasi itu, diharapkan masa pembayaran utang akan diperpanjang dan suku bunganya direndahkan atau untuk mendapatkan pinjaman tambahan dengan syarat syarat yang ringan. Tetapi sebelum konsorsium bank internasional bersedia mempertimbangkan untuk memberikan keringanan tersebut, mereka menuntut agar negara pengutang yang bersangkutan untuk terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi dari IMF. Yakni dengan melaksanakan kebijakan-kebijakan stabilitas. Pada dasarnya terdapat empat komponen dasar yang terkandung dalam program stabilisasi IMF, yakni;

- 1) Penghapusan atau leberalisasi atas kontrol pihak pemerintah terhadap lalu lintas devisa impor.
- 2) Devaluasi nilai tukar resmi mata uang domestik negara-negara berkembang yang seringkali terlalu tinggi.
- 3) Pemberlakuan program-program anti infalmasi domestik ketat yang terdiri dari, pengendalian kredit perbankan untuk menaikkan tingkat bunga dan cadangan minimum, pengendalian defisit pemerintah melalui pembatasan belanja negara, termasuk pada bidang layanan sosial bagi penduduk miskin dan subsidi bahan pangan pokok, bersama dengan peningkatan pajak dan harga-harga produk yang di dihasilkan oleh BUMN, pengendalian peningkatan upah, terutama penghapusan indeks upah.
- 4) Peningkatan upaya untuk menarik danan investasi asing dan pembukaan perekonomian terhadap hubungan-hubungan komersial internasional

d. Strategi Untuk Melepaskan Diri Dari Utang

Banyak usulan yang telah diajukan untuk meringankan atau merenegosiasi beban utang Negara-negara pengutang terbesar, usulannya pun bervariasi, yakni

- 1) Membentuk Kartel debitur
Sekelompok debitur negara berkembang yang bergabung untuk melakukan tawar-menawar sebagai kelompok dengan kreditor.
- 2) Restrukturisasi.
Perubahan syarat dan ketentuan pembayaran utang, biasanya dengan menurunkan tingkat bunga atau memperpanjang periode pelunasan.
- 3) Rancangan Brady
Rancangan untuk mengurangi ukuran utang komersial negara berkembang yang beredar melalui pengampunan utang swasta yang diperoleh dengan imbalan jaminan utang IMF dan Bank Dunia dan kepatuhan yang lebih besar terhadap persyaratan persyaratan.
- 4) Swap Utang untuk ekuitas
Mekanisme yang digunakan oleh negara berkembang yang berutang untuk mengurangi nilai riil utang luar negeri dengan menukar ekuitas di perusahaan domestik (saham) atau obligasi pemerintah berbunga tetap untuk utang swasta luar negeri dengan diskon besar.
- 5) Swap utang untuk alam
Pertukaran utang luar negeri yang dimiliki oleh suatu organisasi untuk jumlah utang domestik yang lebih besar yang digunakan untuk membiayai pelestarian sumber daya alam atau lingkungan di negara debitur
- 6) Repudiasi utang
Kekhawatiran negara maju selama 1980 an bahwa negara-negara berkembang akan berhenti membayar kewajiban utang mereka.

e. Alternatif Upaya dari Pemerintah untuk Menangani Utang Luar Negeri Indonesia

Negara Indonesia masih mengandalkan ULN sebagai pembiayaan pembangunan negara. Dikarenakan, keterbatasan tabungan domestik yang dimiliki Indonesia dalam membiayai pembangunan menjadi salah satu pilihan dalam mempergunakan ULN tersebut. Untuk menangani permasalahan ULN yang terjadi, pemerintah dan Bank Indonesia selaku

bank sentral di Indonesia melakukan berbagai tindakan penyelamatan. Langkah-langkah yang dilakukan antara lain melakukan negosiasi dengan para kreditur untuk menjadwalkan ulang ULN kepada debitur yang lebih panjang dengan bunga yang lebih rendah, membeli obligasi rekapitulasi untuk menyelamatkan industri perbankan dari kesulitan likuiditas yang parah, serta melakukan disiplin anggaran fiskal (Sari, 2014).

Selain langkah-langkah tersebut, diperlukan peran pemerintah dan Bank Indonesia melalui beberapa alternatif kebijakan sebagai berikut:

- 1) Pembatasan Pinjaman Baru Dalam penggunaan jangka pendek
Pembatasan tersebut dilakukan untuk mengurangi pinjaman yang bersifat program atau hanya menghasilkan produk kebijakan, sehingga output pinjaman baru diharapkan dapat berpotensi memberikan multiplier effect yang tinggi di masa mendatang dan meningkatkan devisa negara.
- 2) Peningkatan Penerimaan Pajak (*tax ratio*)
Peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak dapat mengurangi ketergantungan ULN Indonesia.
- 3) Sinergi BUMN
Salah satu alternatif lainnya dalam mengurangi ULN yaitu dengan menggandeng BUMN dalam penataan kembali dan memaksimalkan kinerja BUMN, sehingga BUMN Indonesia dapat berkontribusi terhadap pembiayaan pembangunan negara.
- 4) Pengelolaan Utang
Adapun beberapa alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi beban ULN seperti melakukan penundaan pembayaran angsuran pokok utang (*debt rescheduling*) dengan menjadwalkan kembali jatuh tempo pembayaran utang dan bunga, selanjutnya dengan melakukan pengalihan kewajiban membayar angsuran pokok utang menjadi kewajiban melaksanakan suatu program atau proyek tertentu seperti misalnya yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat serta pemeliharaan lingkungan (*debt swap*), terakhir yaitu pembebasan atas seluruh atau sebagian utang.

Krisis Keuangan

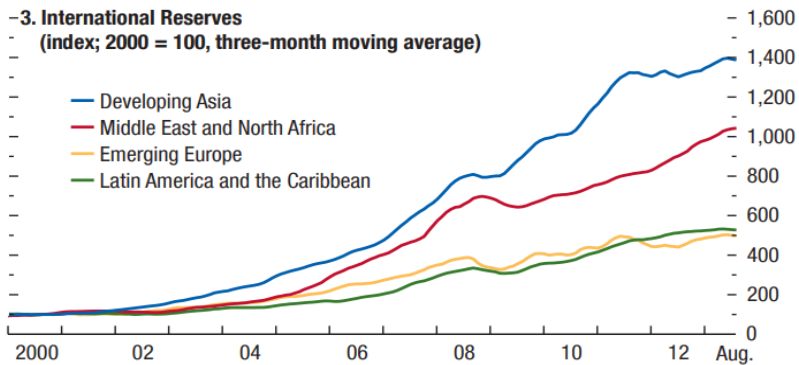
1. Penyebab Krisis dan Tantangan untuk Bertahan

Para ekonom belum mencapai konsensus mengenai akar penyebab krisis ini; dalam satu pandangan, hal itu tidak akan terjadi seandainya tidak terjadi beberapa hal yang tidak beres pada waktu yang bersamaan. Di Amerika Serikat, salah satu faktor penyebab terjadinya krisis adalah deregulasi keuangan yang berlangsung cepat dan luas (ceroboh dalam perancangan dan implementasinya). Deregulasi terjadi karena adanya pencabutan peraturan yang memisahkan perbankan komersial dan investasi tanpa adanya kerangka peraturan yang memadai untuk menggantikannya, kegagalan dalam mengatur instrumen-instrumen keuangan yang baru diperkenalkan, lemahnya penegakan peraturan-peraturan yang ada, dan suku bunga rendah yang dibuat-buat. Pemicunya berasal dari kebijakan publik yang mendorong kepemilikan rumah melalui pinjaman subprime (Todaro & Smith, 2015). Kredit subprime adalah pinjaman yang diberikan kepada peminjam dengan syarat yang tidak begitu ketat. Kredit ini adalah pinjaman yang beresiko baik untuk kreditur (yang meminjamkan) dan debitur (peminjam), khususnya dibidang perumahan (Utami, 2016).

Faktor kedua yang mungkin menjadi penyebab krisis ini adalah ketidakseimbangan perdagangan internasional yang kronis antara Asia Timur, terutama Tiongkok, dan negara-negara maju, khususnya Amerika Serikat, yang juga disertai dengan aliran modal ke Amerika Serikat (Todaro & Smith, 2015).

Krisis yang terjadi di Amerika Serikat, disertai dengan kemerosotan ekonomi terburuk sejak depresi besar. Kemerosotan global yang terjadi setelah krisis ini awalnya berlangsung paling singkat di banyak negara berkembang, yang juga mengejutkan banyak orang adalah peran utama beberapa negara berkembang (terutama Tiongkok, India, Brazil, dan beberapa negara lainnya) dalam membantu menarik banyak negara keluar dari resesi melalui dinamika ekonomi yang berkelanjutan. Pada dekade krisis, negara-negara berkembang memiliki akumulasi cadangan devisa yang meningkat terutama negara berkembang di Asia (IMF, 2014).

Gambar 2. International Reserves (Index 2000 = 100, three-month moving average)



Sumber: IMF, World Economic Outlook Transitions and Tensions, October 2013

2. Dampak Ekonomi Terhadap Negara Berkembang

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pada tahun 2007 dan paruh pertama tahun 2008, negara-negara berkembang terkena dampak yang lebih sedikit dibandingkan negara-negara maju, namun pada paruh kedua tahun 2008, dampaknya cukup parah di sebagian besar wilayah berkembang, dan berlanjut hingga tahun 2009. Seperti yang dinyatakan dalam Laporan Investasi Dunia tahun 2009, Negara-negara berkembang mampu mengatasi krisis keuangan global lebih baik dibandingkan negara-negara maju, karena sistem keuangan mereka tidak terlalu terhubung dengan sistem perbankan Amerika Serikat dan Eropa yang terkena dampak paling parah.

b. Ekspor

Ekspor turun drastis segera setelah krisis terjadi. Volume perdagangan dunia turun 14,4% pada tahun 2009, penurunan terbesar dalam beberapa dekade, namun kemudian kembali pulih dengan kuat sebelum kembali ke pertumbuhan moderat seperti pada tahun 2011. Perserikatan Bangsa-Bangsa melaporkan bahwa negara-negara berkembang masih mengalami penurunan nilai ekspor sebesar 31 persen pada tahun 2009.

- c. Arus Masuk Investasi Asing
Studi Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan (UNCTAD) menyimpulkan bahwa krisis global membatasi pendanaan yang tersedia untuk FDI dan mencatat bahwa Arus masuk FDI ke negara-negara berkembang dan dalam transisi menurun sebesar 27 persen menjadi \$548 miliar pada tahun 2009, menyusul enam tahun pertumbuhan tanpa gangguan.
- d. Pasar Saham Negara Berkembang
Pada awalnya, perpindahan dana ke aset-aset yang lebih aman menyebabkan volatilitas pasar saham negara-negara berkembang meningkat pesat. Namun harga-harga kemudian kembali naik, dan pasar semakin berkembang di beberapa negara dengan pertumbuhan pesat, terutama Tiongkok dan India.
- e. Bantuan
Bantuan tidak banyak meningkat sejak tahun 2001, namun hanya sebagian kecil dari peningkatan yang dijanjikan yang terealisasi, kemungkinan besar disebabkan oleh dampak krisis dan resesi yang terjadi di negara-negara donor berpendapatan tinggi.
- f. Distribusi Pengaruh di antara Negara-Negara Berkembang
Selalu ada perpecahan di negara-negara berkembang. Selama Perang Dingin, negara-negara diminta untuk memihak, menyelaraskan diri dengan Amerika Serikat dan negara-negara NATO lainnya, atau Uni Soviet, atau Tiongkok. Konflik-konflik ini meluas ke gerakan nonblok, yang mencakup negara-negara dengan aliansi yang jelas.
- g. Pengiriman Uang oleh Pekerja
Pengiriman uang ke negara-negara berkembang dari pekerja migran telah mencapai rekor \$336 miliar pada tahun 2008 (meskipun kurang dari 10% dari jumlah tersebut masuk ke negara-negara berpendapatan rendah). Namun angka ini turun secara signifikan setelah terjadinya krisis, dan diikuti oleh pemulihan yang signifikan.
- h. Kemiskinan di negara-negara berkembang
Setelah krisis terjadi, pertumbuhan yang lebih rendah mengurangi laju pengentasan kemiskinan di sebagian besar negara berkembang, dan di banyak negara, jumlah orang yang hidup dalam kemiskinan meningkat.

i. Kesehatan dan Pendidikan

Jed Friedman dan Norbert Schady menggunakan data rumah tangga untuk mengembangkan model ekonometrik untuk memproyeksikan kematian bayi dan melaporkan bahwa perkiraan menunjukkan bahwa akan ada sekitar 30.000 hingga 50.000 kematian berlebih di Afrika pada tahun 2009 kematian yang tidak akan terjadi pada tahun 2009 seandainya krisis sub-prime yang dimulai di Amerika Serikat tidak menyebar ke negara-negara Afrika.

3. **Dampak Krisis yang Berbeda dan Tantangan yang Berkelanjutan di Kawasan Berkembang**

a. Asia

Selama periode September 2008 hingga Maret 2009, terjadi perlambatan dramatis dan bahkan pembalikan besar dari tingginya pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan PDB yang selama ini dianggap remeh oleh kawasan Asia Timur, termasuk Tiongkok. Rebound berikutnya kuat namun tidak merata.

b. Tiongkok

Tiongkok berhasil melewati krisis awal dengan baik, sebagian karena paket stimulus yang sangat besar yang berjumlah hampir \$600 miliar, yang merupakan bagian yang jauh lebih tinggi terhadap PDB dibandingkan paket stimulus AS (sekitar \$800 miliar). Para pengambil kebijakan ekonomi Tiongkok nampaknya fokus pada pengurangan ketergantungan pada ekspor dasar yang bergantung pada pengolahan impor untuk mendapatkan nilai tambah yang rendah sebelum mengekspor kembali. Selain itu, pertumbuhan Tiongkok telah melambat dari tingkat yang tidak berkelanjutan dan bertahan lebih lama dari perkiraan sebelumnya, sebagian disebabkan oleh peningkatan pasca- paket stimulus krisis dan kebijakan pinjaman selanjutnya. Salah satu alasan terjadinya perlambatan pertumbuhan lebih lanjut di Tiongkok yaitu total utang meningkat sangat pesat.

c. Asia Timur dan Asia Tenggara selain Tiongkok

Lima ekonomi berpenghasilan tinggi di kawasan ini, Jepang, Singapura, Taiwan, Korea Selatan, dan Hong Kong tetap bergantung pada ekspor untuk pertumbuhan dan semuanya mengalami penurunan ekspor yang substansial.

d. India

Pada awalnya, perekonomian India mampu melewati krisis keuangan dengan relatif baik. Selama krisis, defisit fiskal pemerintah pusat meningkat hingga hampir 7% PDB. Hal ini sebagian merupakan stimulus yang direncanakan untuk mempertahankan pertumbuhan selama periode krisis. Pertumbuhan PDB di India turun dari hampir 10% pada tahun 2007, menjadi kurang dari 4% pada tahun 2008, yang mencerminkan dampak krisis.

e. Amerika Latin dan Karibia

Meskipun ada kekhawatiran bahwa krisis ini akan segera menyebabkan terulangnya krisis di masa lalu di kawasan ini, banyak negara yang berhasil mengatasi guncangan awal dengan cukup baik. Meksiko mengalami kontraksi ekonomi sekitar 6,5% pada tahun 2009, setelah krisis tersebut, karena hubungan ekonomi yang erat dengan Amerika Serikat dan diperparah oleh merebaknya virus flu H1N1. Ketika peso terdorong ke rekor terendah pada bulan Desember 2008, perusahaan-perusahaan Meksiko menderita kerugian derivatif asing. Meskipun pertumbuhan meningkat menjadi sekitar 5% pada tahun 2010, pertumbuhan tersebut turun kembali menjadi kurang dari 4% pada tahun 2011 dan 2012. Meskipun pertumbuhan pengiriman uang kembali meningkat dan tetap kuat di sebagian besar wilayah, pertumbuhan tersebut masih lemah di Amerika Latin dan Karibia, dimana pertumbuhannya melambat karena pelemahan ekonomi AS dan perubahan kebijakan. Argentina sangat terpuak oleh krisis ini, dan mengalami pemulihan yang sangat kuat pada tahun 2010. Brasil pada awalnya berhasil melewati krisis ini dengan baik, dengan pertumbuhan sebesar 6% pada tahun 2007 dan pertumbuhan sebesar 5% pada tahun 2008, yang sebagian besar disebabkan oleh peningkatan ekspor komoditas, khususnya ke Tiongkok.

f. Afrika

Tingkat perdagangan yang rendah, ditambah dengan harga komoditas ekspor yang relatif tinggi, dalam beberapa hal membantu melindungi Afrika sub-Sahara dari dampak krisis yang paling parah. Masalah pengangguran terdidik semakin parah karena lulusan universitas di wilayah tersebut mengalami kesulitan yang lebih besar dari biasanya dalam mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi mereka.

g. Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA)

Pemulihan sangat lamban di sebagian besar wilayah MENA, karena pertumbuhan terus lambat pada periode 2011-2013 di beberapa negara, terlepas dari kenyataan bahwa pemerintah di wilayah tersebut melakukan kebijakan fiskal ekspansif. Negara-negara yang menyaksikan penggulingan pemerintah mereka selama pemberontakan Musim Semi Arab, yaitu Mesir, Tunisia, Libya, dan Yaman, memiliki keberhasilan yang beragam dalam pemulihan ekonomi. Pada tahun 2013 di Mesir, gejolak baru juga menciptakan ketidakpastian ekonomi dan politik dan menyebabkan penurunan lebih lanjut dalam investasi dan pariwisata. Kehancuran ekonomi di Suriah mengikuti kebrutalan perang saudara di negara tersebut. Bahkan di negara-negara yang tidak mengalami gejolak, beberapa “limpahan”, termasuk persepsi investor, telah menyebabkan penurunan aktivitas perekonomian. Di sisi lain, negara-negara eksportir minyak mendapat keuntungan dari harga minyak yang relatif tinggi (walaupun jauh di bawah harga puncak sebelum krisis), meskipun perekonomian negara-negara importir minyak seperti Mesir terkena dampak negatifnya.

4. Upaya dan Kebijakan dalam Menangani Krisis Keuangan

Penanganan krisis keuangan global 2008, G20 dianggap telah membantu dunia kembali ke jalur pertumbuhan dan mendorong reformasi di bidang finansial. Pada saat krisis keuangan terjadi, Negara G20 (Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Turki, Inggris, Amerika Serikat) dan Uni Eropa, menyadari perlunya mendukung ekonomi dunia, dan menyepakati serangkaian kebijakan untuk membangkitkan pertumbuhan dan membuat kebijakan keuangan dalam rangka menciptakan stabilitas keuangan global melalui upaya pencegahan dan penyelesaian krisis keuangan internasional (Utami, 2016).

Negara anggota G20 sepakat untuk mengambil langkah kuat dan signifikan untuk merangsang perekonomian global dengan cara menyediakan likuiditas, penguatan modal dari lembaga keuangan, melindungi tabungan, memastikan bahwa *International Financial Institution*

(IFIs) dapat memberikan dukungan penuh pada ekonomi global. Membantu negara maju dan berkembang dalam mendapatkan akses melalui fasilitas likuiditas dan kegiatan pendukung. Mendorong Bank Dunia dan MDBs dalam mendukung rencana pembangunan. Memastikan Bank Dunia, IMF dan MDBs memiliki sumber daya yang cukup guna melanjutkan peran mereka dalam penanganan krisis. Selain itu, G20 juga mengambil langkah jangka pendek dan jangka menengah dalam penanganan dampak akibat krisis 2008:

- 1) Meningkatkan sumber daya Bank Dunia, IMF dan MDBs tiga kali lipat yang kemudian dana tersebut dipakai untuk membantu negara yang paling lemah perekonomiannya.
- 2) Melakukan ekspansi fiskal dengan cara menyediakan jutaan lapangan pekerjaan baru.
- 3) Bank Sentral melakukan pemotongan tingkat suku bunga dengan menggunakan kebijakan moneter untuk menstabilkan harga.
- 4) Langkah jangka panjang dengan menjaga kesinambungan fiskal dengan menjaga pertumbuhan ekonomi. Kemudian secara rutin melaporkannya untuk dievaluasi oleh IMF.

Kebijakan Stabilitas

a. Prospek Pemulihan dan Stabilitas

Bank Dunia, dan IMF, mengindikasikan akan adanya risiko yang mengarah ke sisi negatif. Setidaknya ada lima alasan untuk berhati-hati:

- 1) Setelah pertumbuhan di Amerika Serikat, Eropa dan Jepang tetap jauh di bawah tingkat historis selama enam tahun setelah krisis, dan ada keraguan bahwa pertumbuhan yang lebih cepat dapat dilanjutkan di sebagian besar negara OECD untuk beberapa waktu mendatang bahkan mengingat bahwa resesi setelah krisis keuangan secara historis lebih dalam dan lebih tahan lama daripada penurunan lainnya.
- 2) Defisit fiskal juga tinggi di hampir semua negara OECD berpendapatan tinggi, tetapi turun dengan cepat, mengurangi permintaan; Defisit tidak mungkin kembali ke level sebelumnya. Tetapi di sebagian besar negara, utang pemerintah sekarang jauh lebih tinggi daripada sebelum krisis. Ada sedikit ruang bagi kebijakan

- fiskal untuk merespons dengan stimulus jika terjadi krisis lain.
- 3) Persepsi pasar tentang risiko gagal bayar pemerintah tinggi, meskipun saat ini secara historis mengalami kebalikan, Dimana risiko ini secara rata-rata lebih rendah bagi negara-negara berkembang daripada sejumlah negara maju. Gagal bayar atau restrukturisasi utang besar di Eropa dapat mengancam solvabilitas bank di luar kelompok ini, dengan potensi untuk kembali ke krisis yang lebih luas.
 - 4) Risiko deflasi masih tetap lebih tinggi daripada normal. Hal Ini memperparah kesulitan lain yang muncul akibat krisis baru.
 - 5) Manfaat mengeksport manufaktur ke negara-negara berpenghasilan tinggi masih ada. Tetapi kesempatan untuk melakukannya terancam karena pertumbuhan yang sangat lambat, kendala kredit yang memburuk, dan bahkan mungkin peningkatan proteksionisme terselubung di negara-negara maju.
- b. Kebijakan Stabilitas yang diterapkan di Indonesia

Dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaku ekonomi yang memiliki fungsi prioritas sebagai dinamisator dan stabilisator, maka pemerintah perlu merencanakan dan melaksanakan tindakan-tindakan yang berkesinambungan guna menyiapkan dan mengarahkan kegiatan ekonomi Indonesia. Tindakan-tindakan itulah yang kemudian lebih dikenal dengan kebijakan stabilisasi pemerintah di bidang ekonomi. Dari sekian banyak kebijakan ekonomi yang pernah, sedang dan akan dijalankan oleh pemerintah dengan dukungan semua pelaku ekonomi di Indonesia, dapat dikelompokkan ke dalam kebijakan moneter dan kebijakan fiskal.

1) Kebijakan Moneter

Kebijakan moneter (*monetary policy*) adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi. Untuk mencapai tujuan tersebut Bank Sentral atau Otoritas Moneter berusaha mengatu keseimbangan antara persediaan uang dengan persediaan barang agar inflasi dapat terkendali, tercapai kesempatan kerja penuh dan kelancaran dalam pasokan/distribusi barang. Kebijakan moneter dilakukan antara

lain dengan instrument sebagai berikut yaitu suku bunga, giro wajib minimum, intervensi di pasar valuta asing dan sebagai tempat terakhir bagi bank-bank untuk meminjam uang apabila mengalami kesulitan likuiditas (Turmudi, 2019).

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua yaitu:

- a) Kebijakan moneter ekspansif/*monetary expansive policy*, yaitu suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang beredar.
 - b) Kebijakan moneter kontraktif/*monetary contractive policy*, yaitu suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini disebut juga kebijakan uang ketat (*tight money policy*).
- 2) Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal atau yang disebut juga dengan kebijakan anggaran adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pengaturan pengeluaran negara maupun pendapatan negara yang ditujukan untuk mempengaruhi tingkat permintaan agregat didalam perekonomian. Kebijakan fiskal dibedakan menjadi dua yakni kebijakan fiskal aktif dan kebijakan fiskal pasif. Kebijakan fiskal aktif adalah kebijakan pemerintah dimana pemerintah melakukan perubahan tingkat pajak atau program-program pengeluarannya. Sementara itu, kebijakan fiskal pasif adalah segala sesuatu yang menurunkan *marginal propensity to spend* dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi besarnya penganda. Dengan kata lain, kebijakan ini adalah segala sesuatu yang cenderung meningkatkan deficit pemerintah (menurunkan surplus pemerintah) ataupun cenderung meningkatkan surplus pemerintah (menurunkan defisit pemerintah) tanpa harus ada tindakan eksplisit oleh para pembuat kebijakan (Turmudi, 2019).

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Utang Pemerintah Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Utang merupakan perwujudan dari suatu pinjaman yang dilakukan oleh pemerintah. Biasanya transaksi utang atau pinjaman ini terjadi,

manakala pendapatan negara dalam keadaan terbatas, dan tidak imbang dengan meningkatnya kebutuhan akan anggaran pembangunan. Dengan kata lain, penerimaan negara yang ada masih belum mampu berpacu dengan kebutuhan pengeluaran negara yang diinginkan, atau pemerintahan tidak punya uang yang cukup (Afriyeni, 2016).

Dalam bahasa Arab, utang merupakan sesuatu yang berada dalam tanggungjawab orang lain. *Dayn* disebut juga dengan *وصف الذمة* (sesuatu yang harus dilunasi atau diselesaikan. Menurut Hanafiyah, *dayn* termasuk kepada *al-milk*. Utang dapat dikategorikan pada *al-Māl al-Hukmi*: “sesuatu yang dimiliki oleh pemberi utang, sementara harta itu berada pada orang yang berutang.” Sehingga utang negara adalah milik rakyat dan dipergunakan untuk keperluan rakyat. Selain itu, utang secara bahasa utang juga dapat bermakna memberikan pinjaman. *Al Dayn* mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utang, hal ini yang membedakan *al-Qardh* yang tidak mensyaratkan jangka waktu tertentu dalam pengembalian utangnya, *dayn* lebih umum dari *al-qardh* (Huda et al., 2019). Dalam Islam mengambil pinjaman dan meminjamkan uang menduduki tempat yang sangat penting sebagaimana dijelaskan dalam Al Quran surat Al Baqarah 282-283:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun.

وَأَنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ أَمَّا قَلْبُهُ ۖ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya: Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kedua ayat ini menjelaskan tentang tata cara untuk melaksanakan hutang dan piutang. Utang harus ditulis dalam dokumen dan ditandatangani oleh individu yang berhutang dan pihak yang menjadi debitur dan disaksikan oleh dua saksi yang adil. Dokumen tersebut merupakan bukti, yang membuktikan bahwa individu mengambil pinjaman dari pemberi pinjaman. Dokumen tersebut berisi beberapa informasi yang meliputi jumlah utang yang diberikan, periode pembayaran, metode pengembalian (baik secara tunai atau kredit), jumlah angsuran yang perlu dibayar, tanggal mulai dan berakhirnya utang dan cara membayar utang (seperti dengan transfer di rekening bank atau menerima uang tunai). Selain itu, dari dua ayat di atas kita dapat menarik kesimpulan bahwa Islam memungkinkan debitur untuk mengambil jaminan untuk menjamin pembayaran utang. Kedua ayat ini menyoroti etika dalam mengelola utang, bagi pemberi pinjaman atau peminjam. Islam sangat ketat dalam hal utang. Pembayaran utang harus diprioritaskan dan harus diselesaikan dengan baik (Mawardi *et al.*, 2019). Secara umum, dalam perspektif Ekonomi Islam, ada dua pandangan tentang mengambil pinjaman dari pihak eksternal untuk membiayai pembangunan ekonomi. Pandangan pertama menyatakan bahwa utang luar negeri diperbolehkan dalam Islam, asalkan utang tersebut tidak bertentangan dengan syariat dan ajaran Islam (Huda, 2016). Dengan demikian, pandangan tersebut dilatar belakangi oleh konsep dan fakta historis bahwa kerja sama dengan pihak lain dalam suatu usaha diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Bentuk kerja sama yang diperkenankan dalam skema kegiatan ekonomi Islam seperti Mudhorobah, Musyarakah dan Murabahah dapat dikembangkan sebagai bentuk *external financing* dalam anggaran negara. Sedangkan pandangan kedua tidak membenarkan pinjaman dari pihak eksternal negara. Pandangan ini bersifat preventif, dikhawatirkan pinjaman akan membebani negara karena bergantung

pada praktik ribawi (pinjaman dengan bunga). Faktanya adalah, sebagian besar negara pemberi pinjaman atau penyedia modal adalah negara maju dengan kekuatan ekonomi dan bukan negara Muslim. Oleh karena itu, proses peminjaman akan melibatkan keuntungan berupa bunga yang harus ditanggung oleh peminjam. Hal ini tentu tidak akan dibenarkan dalam ajaran Islam (Ismail, 2013). Ekonom Islam, Umar Chapra dan Munzer Kahf sangat menentang teori yang dibangun oleh Keynes. (Chapra, 1992) mengatakan bahwa pengeluaran negara yang besar dapat menyebabkan salah urus dalam sistem penganggaran nasional dan pemborosan pendapatan negara. Munzer Kahf (1999) mensyaratkan setiap negara memiliki sumber daya yang cukup dan dana yang cukup untuk membiayai pengeluaran negara, dengan kata lain pengeluaran negara hanya dapat dilakukan jika terdapat dana yang cukup. Akibatnya, tidak ada pengeluaran pemerintah yang melampaui pendapatan yang diharapkan diterima oleh negara.

Chaudhry, (2012) percaya bahwa efektivitas pengumpulan pajak, sedekah dan sumber pendapatan lain yang bersifat wajib dan sukarela, serta pendapatan dari proyek-proyek negara, properti dan sumber daya alam akan membuat negara Islam berdiri sepenuhnya. Oleh karena itu, negara akan menerapkan prinsip tengah (at tawasuth), mengupayakan anggaran yang seimbang dan menghindari pengeluaran yang tidak produktif. Jika terjadi keadaan darurat dan krisis nasional yang disebabkan oleh perang atau bencana alam dan pemerintah membutuhkan dana, maka dana tersebut akan diperoleh melalui penarikan pajak tambahan atau pencetakan uang dengan catatan akan dihentikan jika krisis berlalu. Al Ghazali merupakan salah satu dari sedikit cendekiawan muslim yang menjadikan utang sebagai sumber pendapatan negara. Menurut Al Ghazali, pemerintah bisa mengambil utang dari masyarakat jika pendapatan negara di masa depan bisa menjamin pembayarannya. Hal ini tentu memerlukan perhitungan yang matang, karena jika pemerintah tidak mampu menjamin pengembalian dana pinjaman, maka pemerintah tidak mempunyai dasar untuk mengambil utang negara tersebut. Saat ini, contoh utang seperti ini adalah revenue bond yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah di Amerika Serikat (Karim, 2012).

Pembiayaan program pembangunan suatu negara harus menghindari sumber utang. Walaupun harus terjadi, utang yang akan diambil harus diperoleh dari negara sesama umat Islam. Harus

dipastikan bahwa pembiayaan dalam negeri tidak lagi mencukupi. Untuk menyeimbangkan defisit anggaran, salah satu inovasi dan solusi yang sedang populer untuk mendukung pembiayaan program pemerintah adalah dengan menggunakan instrumen yang melibatkan semua pihak, baik pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembiayaannya menggunakan yang disebut dengan obligasi syariah, yang pada hakekatnya merupakan pembiayaan bersama dalam bentuk investasi atau pembelian dan skema penjualan dapat berupa skema Mudarabah, Murabahah, Salam atau Istisna'. Dengan demikian diharapkan akan tercipta kemandirian negara, khususnya akibat kemandirian fiskal dalam APBN (Sakti, 2007).

Krisis Keuangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Krisis keuangan terjadi sejak era globalisasi. Negara negara yang mengalami krisis tidak saja di Amerika latin, Asia, Eropa, tetapi juga melanda Amerika Serikat. Krisis keuangan Amerika Serikat merambah ke berbagai negara termasuk Indonesia. Hampir semua negara yang menerapkan sistem kapitalisme mengalami krisis keuangan.

Salah satu alasan utama terjadinya krisis global adalah kemajuan dalam teknologi informasi yang memperbesar gelombang krisis dan mempercepat penyebarannya ke negara lain. Alasan lain adalah perkembangan pesat dari sektor keuangan. Sistem ekonomi kapitalis, sosialis dan mix economic yang berkembang berdasarkan pemikiran barat menunjukkan kegagalan dalam meningkatkan harkat hidup orang banyak terutama di negara-negara berkembang. Kekurangan yang dimiliki oleh setiap jenis sistem perekonomian tersebut menyebabkan munculnya pemikiran baru tentang sistem ekonomi syariah yang berkembang di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Krisis ekonomi yang sedang melanda dunia secara global menjawab secara transparan kekuatan rapuh dari sistem ekonomi kapitalis. Munculnya sistem ekonomi syariah menjadi solusi yang tak terbantahkan dalam krisis keuangan global. Pilar-pilar prinsip yang dimiliki oleh sistem ekonomi syariah dapat mendukung dan memperkuat perekonomian. Prinsip-prinsip ekonomi syariah yang tidak dimiliki ekonomi konvensional merupakan kunci keberhasilan dalam menghadapi krisis ekonomi global. Sebagaimana diketahui, krisis keuangan 2008 disebabkan oleh terjadinya kredit macet di sektor perumahan AS dan Eropa atau yang

disebut *subprime mortgages*. Kredit macet ini menimbulkan krisis likuiditas yang kemudian menyulut terjadinya *rush* atau *bank run*. Dalam teori keuangan syariah, tidak dibolehkan membayar utang dengan utang dan memperjualbelikan utang (*bay'al-dayn*). Hal ini untuk mencegah terjadinya ketidakmampuan membayar (*default*) oleh debitur yang bersangkutan yang dapat berujung pada kepailitan (*bankruptcy*). Dalam keuangan syariah, bunga bank dilarang dan pemberian pembiayaan kepada perusahaan yang terlilit utang juga tidak dianjurkan. Dengan demikian, secara teoritis kebangkrutan dapat dicegah dan pada gilirannya kredit macet (*non-performing loan/NPL*) atau dalam keuangan syariah disebut *non-performing financing* (NPF) dapat ditekan seminimal mungkin. Ada beberapa beberapa jenis transaksi yang tidak dibolehkan antara lain yaitu *riba*, *gharar*, *maysir*, *taḍlis*. Larangan terhadap *riba* sudah jelas dengan diharamkannya berbagai bentuk bunga pinjaman (*interest*). Larangan ini bukan hanya didasarkan pada larangan mengeksploitasi pihak yang membutuhkan kredit, tetapi lebih kepada terciptanya iklim ekonomi yang lebih adil dengan bergeraknya sektor riil, bukan hanya sektor keuangan. Kalau sebagian besar orang merasa lebih nyaman mendapatkan uang dengan bunga, maka sektor riil tentu tidak bergerak. Akibatnya perdagangan barang dan jasa jadi terhambat dan ekonomi masyarakat memburuk dan mengundang terjadinya krisis yang lebih besar.

Kebijakan Stabilisasi dalam Perspektif Ekonomi Islam

Stabilitas ekonomi dalam suatu negara dapat tercipta apabila seluruh kegiatan atau aktivitas ekonomi yang telah direncanakan telah berjalan sesuai dengan jalannya. Seluruh kegiatan perekonomian akan berpusat kepada kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di antara kebijakan yang paling umum kita ketahui adalah kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Kedua kebijakan ini merupakan kebijakan yang di pakai dalam perekonomian dunia baik dalam perekonomian secara konvensional maupun perekonomian syariah atau Islam. Begitu pun stabilitas perekonomian pada masa pemerintahan Rasulullah yang tidak lepas dari kebijakan ekonomi pada masa tersebut. Kedua kebijakan ini akan masih di pakai bahkan tidak akan lepas dari dua kebijakan pemerintah tersebut, hanya saja pengimplementasian dan tujuan serta manfaat kedua kebijakan ini dalam konvensional dan

syariah akan berbeda. Karena dalam Islam istilah riba dalam dunia mata uang dihilangkan sehingga tujuan moneter dalam Islam akan berbeda dengan konvensional. Maka stabilitas ekonomi yang dapat tercipta dalam perekonomian Islam akan berpusat kepada masyarakat dan juga pemerintah (Sugiatni, 2019).

Kebijakan fiskal akan dikatakan seimbang apabila fiskal telah dapat mensejahterahkan masyarakat sejarah luas dengan menggunakan instrument-instrument fiskal secara Islamnya dimana fiskal Islam akan menggunakan zakat sebagai salah satu bentuk untuk mendapatkan pajak dari masyarakat yang tentunya harus memenuhi syariat dan prinsip-prinsip Islam. Akan tetapi fiskal juga akan sangat terhubung dengan keseimbangan kegiatan ekspor impor negara. Jika kedua aktivitas ini berada dalam keadaan seimbang atau berjalan sesuai yang direncanakan maka fiskal telah berhasil mengatasi permasalahan ekonomi secara bertahap. Namun, sebagian besar studi mengenai kebijakan fiskal Islam berkisar pada peran zakat dalam mendistribusikan kembali pendapatan dalam perekonomian. Ekonom Islam seperti Umer Chapra dan lainnya menegaskan bahwa ekonomi Islam akan menjadi negara kesejahteraan dan kebijakan fiskal harus fokus pada pembangunan dan keseimbangan ekonomi. Dengan demikian, pemerintah dapat mengenakan pajak di luar zakat untuk mencapai tujuan sosial ekonomi (Chapra, 1979).

Tujuan kebijakan fiskal dalam ekonomi Islam adalah untuk menciptakan sebuah stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Tidak hanya itu fiskal dalam ekonomi Islam juga bertujuan untuk membantu dan mendukung ekonomi masyarakat yang terbelakang dan juga untuk menyebarkan ajaran Islam. Bentuk kebijakan fiskal yang diterapkan oleh Rasulullah SAW adalah Zakat, Ghanimah, fa'i, dan Jizyah. Pada masa pemerintahan Rasulullah Secara keseluruhan, penerapan zakat, ghanimah, fa'i, dan jizyah memiliki pengaruh positif terhadap pembangunan stabilitas perekonomian negara. Kebijakan tersebut membantu memperkuat redistribusi kekayaan, memperkuat kestabilan sosial, dan memperkuat keamanan dan pertahanan negara.

Kebijakan moneter akan berbicara tentang stabilitas nilai uang. Karena stabilitas nilai uang merupakan sebuah prioritas yang paling utama dalam manajemen kebijakan moneter. Baik moneter konvensional

maupun Islam keseimbangan nilai uang akan membawa sebuah stabilitas ekonomi yang baik. Stabilitas nilai uang yang baik akan terealisasikan dalam bentuk pencapaian tujuan pembangunan ekonomi negara yaitu: pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pemerataan distribusi pendapatan dan kekayaan, tingkat pertumbuhan ekonomi riil yang baik dan menyeluruh. Teori moneter dalam Islam sudah ada sejak agama tersebut didirikan (Sugiatni, 2019).

Pada masa Rasulullah, otoritas moneter pada saat itu hanyalah Nabi sendiri. Dia mengawasi kegiatan moneter dan ekonomi, dan kemudian mengeluarkan kebijakan moneter yang sejalan dengan Islam. Hadits-haditsnya yang meliputi jenis *qauliyah*, *fi'liyah* dan *taqririyah* yang menyatakan tentang moneter dan keuangan merupakan kebijakan moneter dalam Islam. Salah satu kebijakan moneter yang dilakukan Nabi pada awal Islam adalah beliau menyetujui penggunaan Dinar dan Dirham sebagai alat tukar bagi masyarakat Muslim. Kebijakan seperti itu dianggap sebagai landasan kegiatan ekonomi dan keuangan pada masa itu. Mengenai kebijakan tersebut, Nabi menyetujui untuk mempertimbangkannya, yaitu. Dinar dan Dirham, sebagai mata uang umat Islam, termasuk dalam timbangan kaum Quraisy (Khalidin, 2021). Penerapan dinar dan dirham sebagai mata uang resmi serta larangan transaksi riba memiliki pengaruh positif dalam pembangunan ekonomi dan stabilitas perekonomian pada zaman Rasulullah. Sistem perdagangan dan transaksi yang terkontrol, pelarangan riba, dan pengembangan usaha berbasis modal yang produktif, merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan adil bagi seluruh masyarakat (Rahman, 2023).

KESIMPULAN

Neraca pembayaran mencerminkan pola pembangunan ekonomi negara. Negara berkembang toleransi defisit sebelum 1980 untuk industrialisasi. Utang luar negeri dapat berdampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Cadangan devisa penting untuk menutupi defisit neraca berjalan. Rasio cadangan devisa terhadap utang luar negeri penting untuk negara berpendapatan rendah. Studi tentang neraca pembayaran penting dalam analisis ekonomi dan kebijakan.

Utang luar negeri digunakan sebagai pembiayaan pembangunan

oleh negara, namun dapat menjadi faktor risiko dalam krisis keuangan jika tidak dikelola dengan baik. Dalam menghadapi krisis keuangan, penerapan kebijakan stabilitas seperti kebijakan fiskal dan moneter menjadi penting untuk menjaga stabilitas ekonomi dan mengatasi risiko yang terkait dengan utang. Faktor yang mungkin menjadi penyebab krisis ekonomi yang berisiko baik untuk kreditur dan debitur dalam bidang perumahan adalah deregulasi keuangan yang berlangsung cepat dan luas, terutama dalam hal perancangan dan implementasinya. Deregulasi ini terjadi karena pencabutan peraturan yang memisahkan perbankan komersial dan investasi tanpa adanya kerangka peraturan yang memadai untuk menggantikannya. Selain itu, kebijakan publik yang mendorong kepemilikan rumah melalui pinjaman subprime juga menjadi faktor risiko dalam bidang perumahan.

Dalam perspektif Ekonomi Syariah, utang pemerintah dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis keuangan, namun harus sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang melarang riba. Krisis keuangan global dapat diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip ekonomi syariah yang fokus pada keadilan, keberlanjutan, dan kemandirian. Kebijakan stabilisasi dalam ekonomi syariah berpusat pada prinsip-prinsip keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan untuk mencapai stabilitas ekonomi yang berkelanjutan. Dalam perspektif Ekonomi Islam, kebijakan fiskal menggunakan zakat sebagai salah satu bentuk pajak dari masyarakat yang harus mematuhi syariat dan prinsip-prinsip Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyenis, W. (2016). *Perspektif Ekonomi Islam Terhadap Utang Luar Negeri Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia*.
- FEB, B. (2019). Utang Luar Negeri: Memajukan atau Menghambat Perekonomian Indonesia? *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*.
- Čakajac, B., Janković, N., & Luković, S. (2023). ICT services as a factor in financing the current account deficit of the Republic of Serbia. *Bizinfo Blace*, 14(2), 67–74. <https://doi.org/10.5937/bizinfo2302067c>
- Céspedes, L. F., & Chang, R. (2021). Optimal Foreign Reserves and Central Bank Policy Under Financial Stress. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3709613>

- Chapra, M. U. (1979). *The Islamic Welfare State and its Role in the Economy*. UK: *The Islamic Foundation*.
- Chapra, M. U. (1992). *Islam and the economic challenge*. Islamic Foundation.
- Chaudhry, M. S. (2012). *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*. Kencana.
- Ekanda, M. (2014). *Ekonomi Internasional*. Penerbit Erlangga.
- Essl, S., Kilic Celik, S., Kirby, P., & Proite, A. (2019). *Debt in Low-Income Countries: Evolution, Implications, and Remedies*. World Bank Policy Research Working Paper 8794. *Policy Research Working Paper 8794*, March.
- Gianluca Benigno, Luca Fornaro, & M. W. (2022). Reserve accumulation, growth and financial crises. *Journal of International Economics*, 139. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.jinteco.2022.103660>
- Huda, N., Aliyadin, A., Suprayogi, A., & Arbain, D. M. (2019). *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teorit*. Kencana.
- IMF.(2014).WorldEconomicOutlookTransitionsandTensions.In*International Monetary Fund*. <https://doi.org/10.5089/9781498344029.081>
- Ismael, H. O. (2022). *The mechanism for transferring the impact of the deficits and surpluses in the public budget to the balance of payments*. 1–17.
- Kilinc, C. T. & M. (2023). Household Debt and Economic Growth: Debt Service Matters. *Open Economies Review*, 34.
- Khalidin, B. (2021). Monetary Policy in An Islamic Economics. *International Journal of Research -GRANTHAALAYAH*, 9(5), 315–326. <https://doi.org/10.29121/granthaalayah.v9.i5.2021.3948>
- Mawardi, I., Widiastuti, T., Anova, D. F., Mustofa, M. U. Al, Ardiantono, D. S., & Insani, T. D. (2019). Public debt as a source of financing for government expenditures in the perspective of Islamic scholars. *Humanities and Social Sciences Reviews*, 7(4), 285–290. <https://doi.org/10.18510/hssr.2019.7436>
- Neng Dilah Nur Fadillah, A., & Sutjipto, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Utang Luar Negeri Indonesia. *Jurnal Ekonomi-Qu*, 8(2), 212–226. <https://doi.org/10.35448/jequ.v8i2.4449>
- Nor Asmat Ismail. (2013). *Hutang: dan pembangunan ekonomi negara Islam*. Dewan Bahasa dan Pustaka.

- Rahman, R. A. (2023). Konsep Kebijakan Ekonomi Nabawi Dalam Membangun Stabilitas Perekonomian Negara (Analisis Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Perspektif Hadis). *Seminar Internasional Ilmu Hadits*. <https://mudzakarah.stdiis.net/seminter/>
- Sakti, A. (2007). Ekonomi Islam: jawaban atas kekacauan ekonomi modern. *Paradigma & Aqsa Publishing*.
- Sugiatni, E. (2019a). Stabilitas Ekonomi Dalam Ekonomi Perspektif Islam. *Universitas Islam Negeri Makassar (UINAM)*.
- Sugiatni, E. (2019b). Stabilitas Ekonomi Dalam Ekonomi Perspektif Islam. *Universitas Islam Negeri Makassar*.
- Sari, R. (2014). Alternatif Kebijakan Pengentasan Utang Luar Negeri. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, VI(12), 13–16.
- Lau, E., & Lee, A. S.-Y. (2016). International Journal of Economics and Financial Issues Determinants of External Debt in Thailand and the Philippines. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 6(4), 1973–1980.
- Todaro, M. P. (2015). *Economic Development* (12th ed.). Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2012). *Economic Development Twelfth Edition* (12th ed.) Pearson.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2015). *Economics Development* (Twelfth Ed). Pearson.
- Turmudi, I. (2019). Kajian Kebijakan Fiskal dan Kebijakan Moneter dalam Islam. *Jurnal STAI An-Nawawi*, 1(2), 74–90.
- Ulfa, S., & Zulham, T. (2017). Analisis Utang Luar Negeri Dan Pertumbuhan Ekonomi: Kajian Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya. 2(1), 144–152.
- Utami, A. T. (2016). Analisis Efektivitas G20 Dalam Menangani Krisis Finansial Tahun 2008. *Insignia Journal of International Relations*, 3(02), 1. <https://doi.org/10.20884/1.ins.2016.3.02.468>
- Wang, D., Zong, Z., Mao, W., Wang, L., Maguire, P., & Hu, Y. (2021). Pr o of nc ore re ed Pr o. *Journal of Safety Research*, September.
- Wau, T. (2021). *Ekonomi Internasional Suatu Kajian Teoritis dan Empiris*. Magister Ekonomi Syariah (MES) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2021.

- World Bank. (2022). International Debt Statistics 2022. In *International Debt Statistics*. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1800-4>
- Yusuf, A., & Mohd, S. (2023). Nonlinear effects of public debt on economic growth in Nigeria. In *SN Business & Economics* (Vol. 3, Issue 4). Springer International Publishing. <https://doi.org/10.1007/s43546-023-00468-7>

KEUANGAN ASING, INVESTASI, BANTUAN, DAN KONFLIK: KONTERVERSI DAN PELUANG

(Pipi Gusmianti, Laras Aisah, M.Yusril Hafidz Nur Izza,
Muhammad Rafiuddin)

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi yang semakin terintegrasi, arus keuangan dan investasi lintas batas negara telah menjadi aspek penting dalam perekonomian dunia. Namun, fenomena ini tidak hanya membawa peluang, tetapi juga kontroversi dan tantangan yang kompleks. Perdebatan seputar *Foreign Direct Investment* (FDI), bantuan luar negeri (*foreign aid*), dan pendanaan eksternal telah menarik perhatian berbagai kalangan, mulai dari pembuat kebijakan hingga masyarakat sipil. FDI telah dipandang sebagai salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di banyak negara. Aliran modal, transfer teknologi, dan penciptaan lapangan kerja yang dibawa oleh FDI dapat berkontribusi positif bagi negara penerima (geert bekaert, 1997). Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran bahwa FDI dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik dengan masyarakat lokal (Hansen, 2018).

Sementara itu, bantuan luar negeri (*foreign aid*) telah memainkan peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan penanganan bencana di banyak negara berkembang. Meskipun demikian, efektivitas dan motivasi di balik pemberian bantuan ini sering dipertanyakan, dengan beberapa pihak menganggapnya sebagai alat politik untuk memperluas pengaruh negara donor. Namun, dampak faktor-faktor eksternal ini terhadap konflik tidak selalu terlihat jelas, dan hubungan di antara faktor-faktor tersebut seringkali dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk konteks politik dan ekonomi negara penerima, sifat intervensi asing, dan kepentingan negara tersebut dari pihak-pihak yang melakukan intervensi (Nguyen, 2022).

Salah satu manfaat utama dari investasi portofolio adalah kemampuannya untuk menyediakan sumber pendanaan bagi negara-negara yang membutuhkan modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur (Gates *et al.*, 2012). Aliran modal ini dapat membantu mengatasi kekurangan tabungan domestik dan mendorong investasi produktif. Selain itu, investasi portofolio juga dapat meningkatkan likuiditas pasar modal, mempromosikan praktik tata kelola perusahaan yang baik, dan mendorong integrasi ekonomi global. Di sisi lain, investasi portofolio juga dihadapkan pada risiko dan volatilitas yang signifikan. Aliran modal yang bersifat jangka pendek dan mudah bergerak ini dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam sistem keuangan dan nilai tukar suatu negara (Fratzscher, 2011).

Dalam bab ini, kita akan mengamati aliran sumber daya keuangan internasional, yang dapat berbentuk investasi swasta asing langsung dan investasi portofolio, terdiri dari (a) investasi asing langsung, investasi portofolio asing (misalnya saham, obligasi, dan surat berharga) di pasar kredit dan ekuitas negara-negara berkembang oleh badan usaha (bank, reksa dana, perusahaan) dan individu swasta: (2) pengiriman uang dari pendapatan yang diperoleh pekerja migran di luar negeri, dan (3) bantuan pembangunan publik dan swasta (bantuan asing), dari (a) pemerintah nasional, individual dan badan donatur multinasional dan, yang kini makin berperan, (b) lembaga sundnya masyarakat-LSM (*non-government organization* (NGO)) swasta, sebagian besar bekerja langsung di tingkat lokal di negara-negara berkembang. Serta, kita akan mengulas konsekuensi dan penyebab konflik disertai kekerasan di berbagai negara berkembang dan strategi pencegahannya, dan bantuan dalam pemulihan dan juga pencegahan dari perang saudara dan pertikaian antar etnis yang menjadi permasalahan tersulit bagi pembangunan ekonomi dan menjadi titik penting bantuan asing.

TEORI DAN KEBIJAKAN

Aliran sumber daya keuangan internasional

a. Modal Asing dalam Pembangunan

Sejarah mencatat bahwa negara yang tidak mempunyai tabungan dalam negeri yang cukup untuk membiayai pertumbuhan ekonomi umumnya menutup kesenjangan pembiayaan dengan mencari sumber-

sumber dari luar negeri. Keseluruhan arus modal asing, sebagaimana ditunjukkan oleh Gambar 1, dapat dibagi dalam modal yang tidak dan yang harus dibayar kembali (Kuncoro, 2010). Dalam kelompok arus modal yang pertama biasanya mengalir modal dari sektor pemerintah negara maju ke sektor yang sama di NSB, tanpa suatu ekspor modal balasan dari negara tersebut. Sebaliknya dalam kelompok arus modal yang harus dibayar kembali, terdapat arus balik berupa ekspor modal dari NSB, tergantung dari sumber arus modal tersebut, apakah ke sektor pemerintah atau swasta di negara maju. Kelompok arus modal yang pertama tadi pinjaman kredit dan pembiayaan dari proyek-proyek pembangunan, sedangkan kelompok yang terakhir adalah mengenai investasi langsung, investasi portofolio, dan kredit ekspor.

b. Arus Internasional dan Sumber Daya Keuangan

Situasi keuangan internasional dari suatu negara yang tercermin pada kondisi neraca pembayaran dan tingkat cadangan devisanya tidak hanya tergantung kepada saldo neraca transaksi berjalannya (nilai neto perdagangan komoditi atau berbagai produk barang dan jasa), tetapi juga kepada saldo neraca modalnya (saldo neto arus keluar masuknya sumber-sumber keuangan pemerintah dan swasta). Arus internasional dan sumber-sumber daya keuangan tersebut dapat terbagi menjadi dua bentuk. Bentuk yang pertama ialah penanaman modal asing langsung yang dilakukan oleh pihak swasta (*private foreign direct investment*) yang dilakukan oleh perusahaan multinasional dan investasi asing portofolio yang dana investasinya diwujudkan dalam bentuk modal yang ditanamkan pada pasar modal dan kredit milik lembaga swasta (bank, reksa dana, perusahaan). Sedangkan bentuk kedua ialah bantuan pembangunan resmi pemerintah dan swasta (*foreign aid*) yang berasal dari pemerintah secara individual atau beberapa pihak (multilateral) melalui lembaga perantara lembaga keuangan pemberi bantuan multinasional maupun lembaga NGO (*non-governmental organizations*) (Todaro & Smith, 2014).

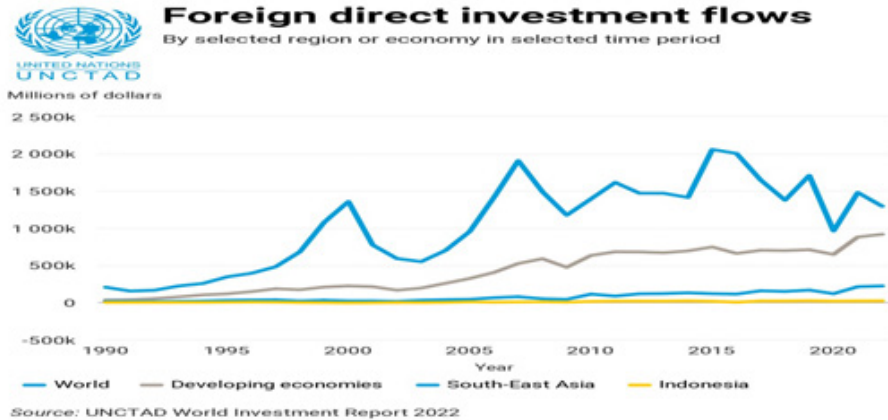
Lebih lanjut Kennedy (2019) menambahkan komponen neraca modal yang ketiga terdiri atas investasi modal lain, yang mencerminkan transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek (seperti sekuritas pasar uang) antar negara. Secara umum investasi asing langsung mengukur perluasan dari aktivitas operasi asing perusahaan, sementara investasi

portofolio dan investasi modal lain mengukur arus dana bersih terkait transaksi aset keuangan antar individu atau investor institusi. Dengan demikian secara ringkas neraca modal mencakup: Pertama, Investasi asing langsung (*direct foreign investment*): investasi pada aktiva tetap pada negara asing yang dapat digunakan untuk melakukan operasi usaha. Contoh: pembangunan pabrik baru. Kedua, Investasi portofolio: transaksi terkait aset keuangan jangka panjang (seperti saham dan obligasi) antar negara yang tidak mempengaruhi adanya transfer pengendalian. Ketiga, Investasi modal lain: transaksi yang melibatkan aset keuangan jangka pendek.

Penanaman modal asing swasta secara langsung dan perusahaan-perusahaan multinasional

Perusahaan multinasional beberapa dasawarsa terakhir diketahui memiliki peran dalam pertumbuhan perdagangan internasional dan arus-arus permodalan global yang telah tumbuh sedemikian pesat. Perusahaan multinasional pada dasarnya adalah sebuah perusahaan raksasa yang menjalankan, memiliki serta mengendalikan operasi bisnis atau kegiatan-kegiatan usahanya di lebih dari satu negara (Ahmed *et al.*, 2022). Pada umumnya perusahaan multinasional relatif lebih sedikit mempekerjakan tenaga-tenaga kerja setempat. Operasi mereka cenderung terpusat di kota dan tidak jarang memberikan pengaruh yang terlalu besar terhadap kesenjangan tingkat upah tingkat upah. Namun begitu, perusahaan-perusahaan multinasional tersebut juga membawa teknik-teknik atau teknologi produksi, selera dan gaya hidup, praktik bisnis, periklanan dan jasa-jasa manajerial (Todaro & Smith, 2014). Lebih lanjut, dalam tahun-tahun belakangan, PMA dengan mudah menjadi sumber dana asing terbesar yang mengalir ke negara-negara berkembang. Berikut merupakan perkembangan aliran modal asing khususnya di dunia, negara berkembang, Negara Asia Tenggara dan Indonesia.

Gambar 2 Perkembangan aliran Modal Asing (FDI)
dari tahun 1990-2020



Pada tahun 2003, misalnya, aliran masuk PMA enam kali lebih tinggi daripada aliran resm, sedang PMA menempati 72% dari semua aliran sumber daya ke negara-negara berkembang. Sementara itu, tingkat FDI inflow (US\$) tertinggi tahun 2019 sebesar \$23,883.25 juta, terendah \$4,550.37 juta tahun 2000 dengan rata-rata \$879,5.823 juta.

a. Penanaman Modal Swasta Asing: Beberapa Pendapat Pro dan Kontra

Secara umum, segenap pendapat pro dan kontra mengenai dampak-dampak pembangunan yang ditimbulkan oleh penanaman modal asing dalam konteks suatu proses pembangunan yang ideal dapat diringkas sebagai berikut:

- 1) Argumen-argumen Ekonomi Tradisional yang Mendukung Penanaman Modal Asing: Pemenuhan Tabungan, Devisa, Pendapatan dan Manajemen

Menurut Amalia (2007), Argumen yang mendukung tersebut didasarkan pada hal-hal berikut:

- a) Penanaman modal asing (dan juga bantuan luar negeri) merupakan sesuatu yang sangat positif, karena hal tersebut mengisi kekurangan tabungan yang dapat dihimpun dari dalam negeri, menambah cadangan devisa, memperbesar penerimaan

- pemerintah dan mengembangkan keahlian manajerial bagi perekonomian di negara penerimanya.
- b) Peranannya dalam mengisi kekosongan atau kekurangan sumber daya antara tingkat investasi yang ditargetkan (diinginkan) dengan jumlah aktual tabungan domestik yang dapat dimobilisasikan.
 - c) Peranannya dalam mengisi kesenjangan antara target jumlah valuta yang dibutuhkan dan hasil-hasil aktual valuta dari ekspor ditambah dengan bantuan luar negeri neto (atau menambah kekurangan valuta yang tidak terpenuhi oleh hasil ekspor dan pinjaman luar negeri yang ada). Itulah yang dinamakan kesenjangan valuta atau kesenjangan perdagangan luar negeri (*trade gap*).
 - d) Dengan memungut pajak atas keuntungan perusahaan multinasional dan ikut serta secara finansial dalam kegiatan-kegiatan mereka di dalam negeri, pemerintahan negara-negara berkembang berharap bahwa mereka pada akhirnya akan dapat turut memobilisasikan sumber-sumber finansial dalam rangka membiayai proyek pembangunannya secara lebih baik.
 - e) Perusahaan multinasional tersebut tidak hanya akan menyediakan sumber-sumber finansial dan pabrik-pabrik baru saja kepada negara-negara miskin yang bertindak sebagai tuan rumah, akan tetapi mereka juga menyediakan suatu “paket” sumber daya yang dibutuhkan bagi proses pembangunan secara keseluruhan, termasuk juga pengalaman dan kecakapan manajerial, kemampuan kewirausahaan, serta injeksi teknologi produksi, yang kemudian dapat dialihkan kepada mitra-mitra usaha didalam negeri melalui program-program latihan dan proses belajar sambil bekerja
- 2) Argumen-Argumen yang Menentang Penanaman Modal Swasta Asing: Memperlebar Kesenjangan

Sedangkan menurut Todaro & Smith (Todaro & Smith, 2014) kedudukan teoretis dari keempat argumen “pengisian kesenjangan” yang mendukung berlangsungnya penanaman modal asing di negara-negara Dunia Ketiga tersebut ditentang atas dasar beberapa pemikiran dan fakta-fakta sebagai berikut:

- a) Walaupun perusahaan-perusahaan multinasional tersebut menyediakan sejumlah modal, namun dalam kenyataannya mereka bisa saja justru menurunkan tingkat tabungan maupun investasi domestik di negara tuan rumah sehubungan dengan terciptanya aneka bentuk persaingan tidak sehat, tidak terlaksananya reinvestasi atas tingkat konsumsi domestik sehingga justru menurunkan minat masyarakat setempat untuk menabungkan atau menginvestasikan tambahan pendapatannya. Perusahaan-perusahaan multinasional juga harus menambah modal yang mereka tanamkan di negara berkembang dalam jumlah yang besar; dan hal ini akan mengakibatkan terjadinya *crowding out* pada investasi dari perusahaan-perusahaan setempat.
- b) Walaupun dampak awal (berjangka pendek) dari penanaman modal perusahaan multinasional memang dapat memperbaiki posisi devisa negara yang menerima mereka (negara tuan rumah), tetapi dalam jangka panjang dampaknya justru negatif, yakni dapat mengurangi penghasilan devisa itu, baik dari-sisi neraca transaksi berjalan maupun neraca modal. Neraca transaksi berjalan malah bisa memburuk karena adanya impor besar-besaran atas barang-barang setengah jadi dan barang modal oleh perusahaan multinasional.
- c) Walaupun perusahaan multinasional memang memberi kontribusi bagi penerimaan pemerintah dalam bentuk pajak perusahaan, tetapi dalam prakteknya nilai kontribusi tersebut jauh lebih kecil daripada yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh adanya konsesi-konsesi pajak yang bersifat liberal, praktek transfer harga, pemberian fasilitas penanaman modal yang berlebihan, subsidi-subsidi terselubung, serta proteksi tarif yang diberikan oleh pemerintah negara tuan rumah.
- d) Keterampilan dan pengalaman manajemen, semangat kewirausahaan, gagasan teknologi, dan jaringan hubungan dagang luar negeri yang diberikan oleh perusahaan-perusahaan multinasional ternyata tidak banyak memberi manfaat nyata bagi pengembangan sumber daya dan keterampilan kerja yang masih tergolong langka di negara tuan rumah. Bahkan, mungkin

saja perusahaan multinasional itu, bertolak dari pertimbangan kepentingan mereka yang bersifat sepihak, justru menghambat proses pembangunan di negara-negara berkembang dengan terbatasnya pertumbuhan jaringan kewirausahaan dari para pengusaha setempat akibat adanya dominasi perusahaan multinasional itu di pasar domestik

b. Mempertemukan argumen-argumen Pro dan Kontra

Secara lebih lanjut, mungkin penjelasan yang paling kuat mengenai pentingnya keberadaan perusahaan-perusahaan multinasional di negara-negara berkembang adalah bahwa mereka mentransfer pengalaman yang dimiliki oleh negara-negara maju ke negara-negara berkembang; tempat di mana perusahaan-perusahaan multinasional tersebut berada. Nguyen (2022) melaporkan bukti-bukti statistik dan manajerial dari penelitian di ASEAN yang mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan multinasional benar-benar mentransfer teknologi kepada para pengusaha setempat, walaupun hanya dengan maksud agar mereka bisa mendapatkan input yang berkualitas tinggi dengan biaya murah. Hal ini mengungkapkan bahwa memang terdapat suatu imbas teknologi yang signifikan. Penelitiannya juga menemukan bahwa daya positif investasi asing langsung terhadap pertumbuhan ekonomi menjadi lebih kuat ketika di dorong oleh pembangunan keuangan yang diukur melalui sektor perbankan dan pasar saham.

PERAN DAN PERTUMBUHAN REMITANSI

Tingkat upah di negara-negara berpendapatan tinggi kira-kira lima kali lipat tingkat upah untuk pekerjaan pada pekerjaan serupa di negara-negara berkembang rata-rata, setelah disesuaikan dengan paritas daya beli. Hal ini jelas memberikan insentif bagi migrasi, dan tentu saja, para migran sering kali melakukan hal tersebut risiko pribadi yang besar untuk melakukan perjalanan ke Amerika Serikat, Eropa, dan bahkan destinasi negara berkembang. Ketika imigran rendah terampil dan penerima remitansi miskin, potensi pengembangannya dan manfaat pengentasan kemiskinan menjadi jelas. Para migran seringkali membangun rumah untuk keluarga mereka dan mengirimkan uang yang sangat penting untuk menjaga anak-anak tetap bersekolah dan diberi makan lebih

baik (Todaro & Smith, 2014). Oleh karena itu, pengiriman uang kini memberikan jalan keluar yang signifikan kemiskinan.

Secara lebih lanjut, Azizi *et al.*, (2023) dalam penelitiannya berargumen bahwa meskipun pengiriman uang mempunyai dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang dengan sumber daya manusia yang tinggi, namun tidak memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan di negara-negara berkembang dengan sumber daya manusia yang rendah. Temuan tersebut menunjukkan bahwa pengiriman uang tidak berdampak pada pasokan tenaga kerja di negara-negara berkembang dengan sumber daya manusia yang tinggi, namun mengurangi pasokan tenaga kerja di negara-negara dengan sumber daya manusia yang rendah. Selain itu, remitansi meningkatkan investasi modal fisik di negara-negara berkembang dengan sumber daya manusia yang tinggi, namun tidak berdampak terhadap investasi di negara-negara berkembang dengan sumber daya manusia yang rendah.

FOREIGN AID (BANTUAN LUAR NEGERI)

Semua transfer sumber daya riil dari suatu negara ke negara lain dikatakan sebagai bantuan luar negeri. Namun, dalam definisi yang sederhana itu pun terkadang sejumlah masalah. Masalah yang pertama, banyak transfer sumber daya yang berlangsung dalam bentuk-bentuk yang terselubung misalnya, pemberian *tarif preferential* (lebih rendah daripada tarif rata-rata sesungguhnya) oleh negara-negara maju bagi ekspor produk manufaktur dari negara-negara Dunia Ketiga. *Tarif preferential* tersebut memungkinkan negara-negara berkembang untuk lebih mudah menjual produk-produk industrinya ke negara tadi, dan keuntungan bersih yang diperolehnya tentunya juga menjadi lebih besar daripada kalau ia menjualnya ke negara-negara lainnya. Kelebihan, keuntungan itulah yang bisa dipandang sebagai transfer sumber daya dari negara pemberi tarif preferential kepada negara-negara Dunia Ketiga yang menerimanya (Amalia, 2007).

Transfer sumber daya secara implisit atau terselubung ini sebenarnya juga harus dihitung dalam total penjumlahan arus bantuan luar negeri. Namun, dalam prakteknya hal itu tidak pernah dilakukan. Hal itu tidak berarti bahwa kita harus menghitung semua transfer dana, modal atau sumber daya yang diterima oleh negara-negara berkembang, terutama

yang berasal dari investor swasta. Arus arus modal swasta dinyatakan sebagai transaksi-transaksi komersial biasa, yang semata-mata bertolak dari hitungan pertimbangan untung-rugi khas dunia bisnis oleh karena itu, modal ini lantas dianggap tidak bisa dikategorikan sebagai “bantuan” bagi negara-negara berkembang yang menerimanya. Untuk selanjutnya, arus-arus dana komersial dari kalangan swasta asing secara luas dinyatakan tidak merupakan salah satu bentuk bantuan luar negeri, meskipun dana-dana tersebut bisa saja memberikan manfaat atau keuntungan bagi negara-negara berkembang yang menampungnya.

a. Bantuan (pinjaman) asing: perdebatan tentang bantuan pembangunan

1) Berbagai masalah konseptual dan pengukuran

Selain pendapatan ekspor dan investasi asing langsung dan portofolio swasta, negara-negara berkembang menerima dua sumber devisa utama lainnya: bantuan pembangunan bilateral dan multilateral publik (resmi) dan bantuan swasta (tidak resmi) yang diberikan oleh organisasi non-pemerintah (LSM). seluruh transfer sumber daya pemerintah dari satu negara ke negara lain harus dimasukkan dalam definisi bantuan luar negeri. Namun definisi sederhana ini pun menimbulkan sejumlah masalah. Salah satu penyebabnya adalah banyaknya transfer sumber daya yang bisa dilakukan secara terselubung, seperti pemberian tarif preferensial oleh negara maju terhadap ekspor barang-barang manufaktur, terutama dari negara-negara kurang berkembang. Hal ini memungkinkan negara-negara berkembang memperoleh lebih banyak devisa dengan menjual produk-produk industri mereka di pasar negara-negara maju dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan harga yang seharusnya bisa diperoleh. Para ekonom telah mendefinisikannya bantuan luar negeri, oleh karena itu, setiap aliran modal ke negara berkembang yang memenuhi dua kriteria: pertama, Tujuannya harus non-komersial dari sudut pandang donor, dan yang kedua, harus bercirikan ketentuan konsesi; artinya, tingkat suku bunga dan jangka waktu pembayaran kembali modal pinjaman harus lebih lunak (tidak seketat) dibandingkan persyaratan komersial (Todaro & Smith, 2013).

- 2) Jumlah dan alokasi: bantuan publik
Penerimaan arus masuk FDI tidak diragukan lagi merupakan sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan bagi perekonomian negara manapun. Modal asing ini menggunakan bidang perekonomian negara tertentu, seperti manufaktur, sektor jasa, dll. Negara-negara berkembang mengatakan bahwa FDI merupakan faktor yang saling melengkapi dengan sumber daya dalam negeri, termasuk modal, teknologi, perluasan pengetahuan, kemampuan manajemen, dan peningkatan produktivitas. . Selain itu, faktor hukum menjadi penyebab paling kuat tarikan FDI ke dalam negeri. Negara-negara maju dan berkembang bersaing dalam adopsi melalui metode regulasi nasional yang berbeda, termasuk WTO, BIT, RIA, dan yang lain. Perjanjian-perjanjian ini dikatakan sebagai faktor liberalisasi bagi *Foreign Direct Investment* (FDI) dan juga dianggap karena sifatnya yang proteksionis terhadap investor asing langsung (Keita *et al.*, 2023) (Todaro & Smith, 2013).
- 3) Alasan negara donor memberikan bantuan
Pemerintah negara donor memberikan bantuan karena hal tersebut demi kepentingan politik, strategis, atau ekonomi mereka. Beberapa bantuan pembangunan mungkin dimotivasi oleh keinginan moral dan kemanusiaan untuk membantu kelompok yang kurang beruntung (misalnya, bantuan pangan darurat dan program medis), dan tentunya hal ini telah menjadi retorika internasional dalam peningkatan bantuan pada dekade pertama abad kedua puluh satu, yang mungkin mencerminkan fakta bahwa warga negara biasa seringkali lebih dermawan dibandingkan pemimpin mereka. Disisi lain motivasi bantuan luar negeri negara-negara donor dalam dua kategori besar namun seringkali saling terkait: politik dan ekonomi.
Motivasi politik jauh lebih penting bagi negara-negara pemberi bantuan, terutama bagi negara donor terbesar, Amerika Serikat memandang bantuan luar negeri untuk membangun kembali perekonomian Eropa Barat yang dilanda perang, sebagai cara untuk membendung penyebaran Komunisme secara internasional. Sebagian besar program bantuan kepada negara-negara berkembang lebih berorientasi pada pembelian keamanan dan menopang rezim mereka yang kadang-kadang goyah daripada mendorong

pembangunan sosial dan ekonomi jangka panjang.

Dalam konteks prioritas politik dan strategis yang luas, program bantuan luar negeri negara-negara maju mempunyai alasan ekonomi yang kuat. Hal ini terutama berlaku bagi Jepang, yang mengarahkan sebagian besar bantuannya ke negara-negara tetangga di Asia, dimana Jepang mempunyai investasi swasta yang besar dan perdagangan yang meluas. Meskipun motivasi politik mungkin merupakan hal yang sangat penting bagi donor lain, alasan ekonomi setidaknya hanya sekedar basa-basi sebagai motivasi utama pemberian bantuan. Asumsi bahwa kesenjangan tabungan (sumber daya riil dalam negeri) dan kesenjangan devisa besarnya tidak sama dan pada dasarnya independen. Implikasinya adalah salah satu dari dua kesenjangan tersebut akan “mengikat” bagi negara berkembang mana pun pada suatu saat. (Todaro & Smith, 2013).

4) Mengapa negara penerima menyetujui bantuan

Alasan mengapa negara-negara berkembang biasanya sangat ingin menerima bantuan, bahkan dalam bentuk yang paling ketat dan restriktif, kurang mendapat perhatian dibandingkan alasan negara donor memberikan bantuan. Alasan utamanya mungkin adalah faktor ekonomi. Negara-negara berkembang seringkali cenderung menerima usulan tersebut yang biasanya dikemukakan oleh para ekonom negara maju dan didukung oleh referensi dari kisah-kisah sukses seperti Korea Selatan tanpa memperhitungkan banyak negara yang mengalami kegagalan bahwa bantuan merupakan unsur yang krusial dan esensial dalam proses pembangunan. Hal ini melengkapi sumber daya dalam negeri yang langka, membantu mentransformasi perekonomian secara struktural, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, alasan ekonomi untuk memberikan bantuan sebagian didasarkan pada penerimaan mereka terhadap persepsi donor mengenai apa yang dibutuhkan negara-negara miskin untuk mendorong pembangunan ekonomi. konflik pada umumnya muncul bukan karena perbedaan pendapat mengenai peran bantuan, namun karena jumlah dan kondisinya. Tentu saja, negara berkembang mana pun ingin mendapatkan lebih banyak bantuan dalam bentuk hibah langsung atau pinjaman jangka panjang berbiaya rendah, dengan

persyaratan minimal. Hal ini berarti tidak mengikatkan bantuan pada ekspor donor dan memberikan keleluasaan yang lebih besar kepada negara-negara penerima untuk memutuskan sendiri apa yang menjadi kepentingan pembangunan jangka panjang terbaik mereka. Kedua, di beberapa negara, bantuan dipandang oleh donor dan penerima sebagai memberikan pengaruh politik yang lebih besar kepada kepemimpinan yang ada untuk menekan oposisi dan mempertahankan kekuasaannya. Dalam kasus seperti ini, bantuan tidak hanya berbentuk transfer sumber daya finansial namun juga penguatan militer dan keamanan dalam negeri (Keita *et al.*, 2023).

- 5) Peran lembaga swadaya masyarakat dalam bantuan asing Bantuan yang diberikan melalui pihak swasta organisasi non-pemerintah atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) adalah organisasi sukarela yang bekerja dengan, dan atas nama, sebagian besar organisasi akar rumput lokal di negara-negara berkembang. LSM mempunyai dua keuntungan penting. Pertama, karena tidak terlalu dibatasi oleh kepentingan politik, sebagian besar LSM mampu bekerja lebih efektif di tingkat lokal dengan masyarakat yang ingin mereka bantu dibandingkan dengan program bantuan bilateral dan multilateral dalam jumlah besar. Kedua, dengan bekerja secara langsung dengan organisasi masyarakat lokal, banyak LSM yang lebih mampu menghindari kecurigaan dan sinisme dari sebagian besar masyarakat miskin yang mereka layani bahwa bantuan mereka tidak tulus atau hanya berumur pendek. Diperkirakan LSM di negara-negara berkembang berdampak pada kehidupan sekitar 250 juta orang; Fakta bahwa suara mereka semakin didengarkan di pemerintahan negara maju dan di konferensi internasional mengenai pembangunan memperjelas bahwa sifat dan fokus bantuan luar negeri berubah dengan cepat.

Ada beberapa tantangan yang umumnya dihadapi oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan di Indonesia :pertama, Tantangan dari dalam diri NGOs itu sendiri, yaitu masalah internal seperti inefisiensi manajemen, pertikaian antara aktivis kurangnya transparansi. Kedua, Tantangan yang berkelanjutan menyangkut sumber keuangan. Ketiga, Akuntabilitas Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sangat lemah dan terakhir,

Problem keterputusan (*disconnection*) yang biasanya ditemukan di dalam hubungan antara Masyarakat (LSM) atau organisasi kemasyarakatan dengan masyarakat atau komunitas (Boediningsi *et al.*, 2022).

6) Dampak-dampak bantuan

Banyak kritikus yang mencatat bahwa volume FDI kini lebih dari 15 kali lipat volume aliran bantuan asing. bantuan masih lebih besar dibandingkan FDI di banyak negara yang paling membutuhkan bantuan, termasuk negara-negara rentan. FDI mengalir ke negara-negara yang kurang membutuhkan bantuan; dan pelarian modal merupakan masalah kronis di negara-negara yang rentan dan dilanda konflik.

Investasi asing langsung dianggap sebagai sumber modal yang penting. Bersama dengan arus modal yang masuk, terdapat aliran ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang sulit didapatkan di dalam negeri. Pandangan ini mengatakan bahwa di dunia masa kini, daya saing suatu negara semakin kurang dipengaruhi oleh keberlimpahan faktor relatifnya serta kemampuan inheren tenaga kerjanya, namun lebih dipengaruhi oleh sifat investasinya. Investasi asing langsung ke ASEAN pada 2018 melanjutkan tren positif setelah menembus ke level tertinggi sepanjang masa. Pangsa pasar investasi langsung di ASEAN pun sudah tembus di atas 10%. Dikutip dari laporan ASEAN pada November 2019, negara-negara Asia Tenggara mencatatkan pertumbuhan investasi langsung sebesar 5,44% menjadi US\$155 miliar pada 2018. Nilai itu melanjutkan tren positif selama tiga tahun berturut-turut di mana investasi langsung ASEAN terus tembus ke level tertinggi sepanjang masa. Beberapa investasi asing langsung ke sektor jasa ini terkait dengan usaha grosir dan eceran dan aktivitas real estate.

Diperkirakan investasi asing langsung sektor jasa bidang kesehatan akan menjadi primadona pada tahun berikutnya. Perkiraan itu berdasarkan hasil analisis perusahaan dan startup di industri jasa kesehatan. Apalagi, ASEAN juga memperkuat kerja sama regional dalam jasa kesehatan melalui perjanjian sektoral dan rencana aksi strategis. (Kurniasih, 2020)

KONFLIK DAN PEMBANGUNAN

Konflik disertai kekerasan akan dapat menghambat bagi negara-negara dengan pendapatan perkapita rendah cenderung lebih rentan terhadap konflik karena mereka menghadapi tantangan pembangunan yang besar seperti kemiskinan, pengangguran, dan ketimpangan. Konflik dan kekerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti perang antar negara, konflik internal, kerusuhan sipil, terorisme, dan kekerasan yang terkait dengan kejahatan terorganisir. Faktor-faktor yang dapat memicu konflik antara lain ketimpangan ekonomi, kekurangan sumber daya alam, perpecahan etnis, perbedaan agama, ketidakpuasan terhadap pemerintah, dan intervensi asing. Kondisi ini dapat menciptakan ketidakpuasan dan memicu konflik sosial jika tidak ditangani dengan baik.(Todaro & Smith, 2013).

a. Penyebab Konflik Bersenjata Dan Faktor Risiko Konflik

Penyebab konflik bersenjata sejauh ini belum menghasilkan teori yang konsisten dan dapat diterima oleh sebagian besar pakar yang bekerja di bidang tersebut. Namun, kemungkinan besar terdapat satu konsensus: bahwa konflik tidak dapat direduksi menjadi satu sebab saja, atau hanya satu penjelasan saja. Sebelum awal tahun 1990 sebagian besar sarjana berkonsentrasi pada perang internasional. Baru belakangan ini penyebab konflik internal menjadi pertimbangan. Hebatnya, ada teori yang mengatakan bahwa monopoli kekuasaan dan kohesi internal mendukung perdamaian, dan teori yang mengatakan sebaliknya. Jelas sekali bahwa penelitian mengenai penyebab konflik tidak dapat disimpulkan (Irenes, n.d.). Analisis Ekonometrik menunjukkan bahwa konflik lebih lazim terjadi di negara-negara dengan pendapatan yang lebih rendah, pertumbuhan lambat, penduduk dengan jumlah menengah besar, produksi minyak yang signifikan, lembaga negara yang buruk, sejumlah besar etnis minoritas yang marginal, pembagian etnis, penekanan berlebih pada sumber daya primer dan peluang meraup keuntungan dari komoditas ekspor yang bernilai tinggi (Todaro & Smith, 2013). Berikut adalah penyebab konflik bersenjata dan faktor risiko konflik sebagai berikut :

- 1) Ketimpangan Ekonomi Dan Kemiskinan, perbedaan antar kelompok sosial dalam hal distribusi kekuasaan politik dan ekonomi dapat menimbulkan ketidakpuasan dan dorongan untuk berkonflik, dimana perbedaan-perbedaan horizontal antar kelompok menjadi

penyebab utama konflik (Stewart, 2002). Ketimpangan horizontal bersifat ekonomis, sosial, dan politis sebaiknya diprioritaskan di masyarakat multi etnis sebagian dari pada kebijakan pembangunan secara umum terutama dalam lingkungan pasca konflik (Todaro & Smith, 2013).

- 2) Kekurangan Sumber Daya Alam, kelangkaan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama langkanya pangan, lahan subur dan air dapat berkontribusi menimbulkan konflik atau resiko konflik. Colin Kahl berpendapat bahwa jumlah dan pendapatan penduduk merupakan faktor risiko konflik yang signifikan dimana negara yang bergantung pada sumber daya alam yang mengalami tingkat deforestasi dan degradasi tanah yang tinggi. Adanya sumber daya alam yang bernilai ekspor tinggi seperti intan, minyak, dan kayu tanpa adanya aturan hukum tentang bagaimana manfaat komoditas ini akan didistribusikan akan memicu konflik yang disertai kekerasan (Todaro & Smith, 2013).
- 3) Pecahnya Etnis Dan Agama, dapat menjadi sumber konflik jika terdapat persaingan untuk sumber daya, kekuasaan politik, atau pengakuan budaya diantara kelompok-kelompok yang berbeda dengan mengakibatkan ketimpangan dan diskriminasi secara ekonomi, politik dan sosial oleh kelompok yang dominan. Adanya perpecahan etnis dan agama juga dapat berkembang menjadi perang sipil yang melibatkan penggunaan senjata dan kekerasan massal antara kelompok-kelompok yang bertikai.
- 4) Ketidakpuasan Terhadap Pemerintah, adanya konflik bersenjata bisa terjadi atas ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah yang mengakibatkan meningkatnya marginalisasi dan diskriminasi dan kurangnya rasa percaya dari masyarakat untuk pemerintah (Tangguh Chairil, 2020).
- 5) Intervensi Asing, mengejar tujuan kepentingan masing-masing yang berbeda-beda akan dapat menjadikan persaingan maupun kerjasama dalam mendorong konflik dengan adanya campur tangan pihak asing dari luar negeri yang berpotensi menimbulkan geopolitik dan geopolitik yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan bagi suatu negara (Pemerintah *et al.*, 2012).

- 6) Warisan Masa Lalu, Trauma historis yang dialami suatu kelompok atau masyarakat, seperti penjajahan, genosida, atau diskriminasi sistematis di masa lalu, dapat menyebabkan rasa dendam dan keinginan untuk membalas yang berpotensi memicu konflik bersenjata. Selain itu, juga dapat berkaitan dengan perbatasan atau wilayah yang tidak terselesaikan dengan baik, terutama jika terkait dengan pembagian sumber daya alam atau identitas etnis/agama. Narasi sejarah dan ideologi tertentu yang diajarkan atau diwariskan dari generasi ke generasi pun dapat memicu rasa kebencian dan keinginan balas dendam terhadap kelompok lain yang dianggap sebagai musuh.

b. Konsekuensi Dari Konflik Bersenjata

Berikut adalah konsekuensi dari konflik bersenjata sebagai berikut:

- 1) Untuk masalah kesehatan, konsekuensi atas konflik disertai senjata akan berakibat besar terhadap kesehatan dan memerlukan jangka yang sangat panjang dalam memulihkannya, dengan adanya konflik tersebut diantaranya dapat meningkatkan angka kematian, kurangnya akses kesehatan, kelangkaan obat-obatan dan memicu penyakit yang menular. Dampak psikologis juga seperti stres pasca trauma dan gangguan kejiwaan merupakan konsekuensi penting lainnya akibat konflik, terutama pada anak-anak. Investigasi ini dapat berlangsung dalam jangka panjang bahkan setelah konflik berakhir, karena diperlukan upaya rekonstruksi dan pemulihan yang signifikan untuk memulihkan sistem kesehatan dan mengatasi dampak kesehatan yang ditimbulkan oleh konflik bersenjata (Pemerintah *et al.*, 2012)(Todaro & Smith, 2013)(Karaye *et al.*, 2022).
- 2) Untuk masalah pendidikan, konflik bersenjata memiliki berbagai dampak negatif yang serius terhadap pendidikan di suatu negara. Konflik bersenjata menyebabkan terhentinya proses belajar mengajar karena sekolah-sekolah harus ditutup. Fasilitas pendidikan pun rusak akibat konflik. Belanja pemerintah untuk pendidikan juga menurun ketika anggarannya dialihkan untuk keperluan penanganan konflik. Dampak lainnya adalah meningkatnya jumlah anak jalanan dan *drop out* siswa, serta berkurangnya minat orang tua untuk mengirimkan anaknya ke-sekolah. Secara umum, konflik bersenjata menimbulkan

gangguan serius terhadap akses mendapatkan pendidikan bagi anak-anak. Hal ini sangat merugikan upaya pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pendidikan (Todaro & Smith, 2013; Vestby *et al.*, 2021).

- 3) Hancurnya kekayaan disebabkan adanya konflik bersenjata, memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap kekayaan dan aset ekonomi suatu negara atau wilayah. Menurut ekonom pembangunan, konflik bersenjata akhirnya menyebabkan kerusakan infrastruktur fisik seperti jalan, jembatan, bangunan, dan fasilitas publik lainnya yang membutuhkan biaya besar untuk perbaikan. Selain itu, modal fisik seperti mesin dan peralatan produktif juga dapat hancur akibat konflik, menghambat aktivitas ekonomi dan produktivitas. Perpindahan penduduk secara massal sebagai pengungsi dapat menyebabkan hilangnya tenaga kerja produktif yang dibutuhkan untuk pembangunan ekonomi. Konflik juga menciptakan peradangan dan risiko tinggi, menghambat perdagangan internasional dan arus investasi di wilayah yang terkena konflik. Selama konflik sedang berlangsung, sumber daya ekonomi harus diarahkan untuk membiayai upaya perang dan keamanan, bukan untuk investasi produktif. Hilangnya kekayaan dan aset ekonomi akibat konflik bersenjata dapat memiliki dampak jangka panjang terhadap pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2013).
- 4) Memperparah kelaparan dan kemiskinan, konflik bersenjata memiliki dampak yang sangat merugikan terhadap upaya penanggulangan kelaparan dan kemiskinan di suatu negara. Secara langsung, konflik mengalihkan belanja publik untuk kepentingan militer sehingga mengurangi anggaran yang dialokasikan untuk program-program sosial seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan. Hal ini berdampak pada peningkatan tingkat kelaparan dan kemiskinan di masyarakat. Selain itu, secara tidak langsung konflik juga menyebabkan menurunnya pertumbuhan ekonomi selama maupun pasca konflik berakhir. Hal ini menyebabkan perekonomian lemah dan daya beli masyarakat menurun. Kondisi ini semakin memperparah kelaparan dan kemiskinan. Di samping itu, konflik seringkali merusak infrastruktur negara seperti jalan, listrik, dan sanitasi. Hal ini melemahkan kapasitas negara dalam

mendistribusikan pangan dan layanan publik ke seluruh wilayah. Akibatnya, tingkat kelaparan dan kemiskinan di negara-negara yang mengalami konflik bersenjata jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara yang tidak mengalami konflik dengan kondisi perekonomian serupa (Gates *et al.*, 2012; Todaro & Smith, 2013).

- 5) Ikatan sosial. Konflik dapat menghancurkan kepercayaan dan perpecahan antar kelompok, terutama jika konflik terjadi di sepanjang garis etnis atau agama, serta meninggalkan luka akibat pengalaman traumatis yang mendalam selama konflik. Sementara itu, menekankan bahwa modal sosial yang terdiri dari jaringan, norma, dan kepercayaan merupakan faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, konflik bersenjata dapat merusak modal sosial tersebut dengan menghancurkan kepercayaan antar individu dan kelompok, yang pada akhirnya menghambat kerjasama ekonomi dan pembangunan. Upaya rekonsiliasi, pemulihan kepercayaan, dan memperbaiki ikatan sosial merupakan tantangan besar pasca konflik yang membutuhkan waktu, upaya, dan komitmen jangka panjang (Todaro & Smith, 2013; Sulistia, 2021).

c. Resolusi Dan Pencegahan Konflik Bersenjata

1) Kelembagaan

Peranan lembaga adalah membuat aturan hukum dan normal informal yang dapat mendefinisikan dan memperkuat cara-cara di mana kepentingan kelompok, sekalipun ketika terjadinya pertentangan kuat, dapat diselesaikan setidaknya hingga satu titik dimana pembangunan dapat berkelanjutan. Lembaga yang baik memberikan landasan akan jaminan keamanan dan hak dasar, untuk mencegah atau setidaknya memitigasi risiko konflik bersenjata yang bisa menghambat dan memundurkan pembangunan. Pentingnya fungsi lembaga-lembaga khusus untuk menangani konflik dan membuat prioritas bagi bantuan asing untuk membantu menciptakan aturan-aturan yang disepakati dalam resolusi konflik dan selanjutnya menegakkan kesepakatan tersebut sebelum konflik menjadi aksi kekerasan. Pelaksanaan kesepakatan internasional baru dapat dikatakan efektif saat lembaga dapat berdiri dengan tegak (Todaro & Smith, 2013).

Dalam pembangunan pasca konflik, keterlibatan aktor-aktor di tingkat global, regional, nasional, dan komunitas sangatlah penting. Keamanan nasional sekali lagi, merupakan sebuah institusi yang mendasar tidak dapat dianggap remeh ketika kekerasan melintasi perbatasan dan sisa-sisa kekuatan kekerasan dan kriminal masih aktif di daerah-daerah kantong lintas batas. Peraturan dan perjanjian internasional yang baru membantu mengurangi masalah insentif konflik dengan menciptakan kontrol terhadap ekspor dan impor sumber daya bernilai tinggi. Selain itu, dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat sipil bermitra untuk mendorong pengaturan sukarela internasional guna mengurangi insentif keuangan untuk perang atau untuk memastikan bahwa sumber daya tidak mendanai konflik. Rekonstruksi pasca-konflik juga merupakan masalah bagi kerja sama regional multinasional. Ketika perjanjian perdamaian ditandatangani dan transisi yang berfungsi atau pemerintahan permanen sudah terbentuk, dukungan terhadap pembangunan ekonomi pasca-konflik menjadi hal yang penting. Pemerintah harus menunjukkan komitmen untuk mengkonsolidasikan perdamaian dan keamanan serta kebutuhan sosial dan ekonomi yang belum terpenuhi, memperbaiki kondisi makroekonomi dan menerapkan kebijakan utang yang baik, memiliki kebijakan pengelolaan keuangan yang baik (Stewart, 2002; Todaro & Smith, 2013).

Suatu Negara harus cukup kuat untuk melindungi warganya dari kekerasan dan menjalankan peran penting lainnya yang hanya dapat dilakukan oleh pemerintah. Negara kerapuhan adalah bagian besar dari masalahnya. Namun harus ada checks and balances yang efektif. Konflik dapat dipahami sebagai masalah keseimbangan ganda dengan kegagalan koordinasi, yang mungkin bergantung pada norma-norma sosial tentang konflik dan kerja sama (Ridwan, 2023).

2) Pembangunan

Dalam memajukan dan mensejahterakan masyarakat suatu negara harus memulai kembali pembangunan pasca konflik. Dengan melakukan berbagai upaya pembangunan baik dalam pendidikan, infrastruktur maupun ekonomi. Namun hal yang paling utama dalam mencegah adanya konflik yang terjadi kembali diperlukannya wawasan pengetahuan bagi masyarakat melalui pendidikan. *Education For All* (EFA)

dari UNESCO menunjukkan adanya hubungan yang saling menguatkan antara pendidikan yang rendah dengan adanya konflik disertai kekerasan. Kenyataannya bahwa konflik dapat merusak pendidikan dan menghancurkan infrastruktur, melukai atau membunuh sebagian anak-anak dan orang dewasa, dsb. EFA menyatakan bahwa pendidikan juga berdampak pada konflik karena konflik bisa jadi munculnya dari suatu ideologi yang disebarluaskan melalui pendidikan, oleh karena itu kerangka kerja EFA menuntut adanya pendidikan “peka terhadap konflik” dengan memberikan pelajaran yang diterapkan guna untuk mendidik dan mengambil pelajaran dari pengalaman karena pada dasarnya konflik tidak dapat dibatasi oleh wilayah tertentu (Todaro & Smith, 2013).

Penekanan dalam pentingnya pencegahan konflik bersenjata untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan aman bagi pembangunan ekonomi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor seperti kemiskinan, ketimpangan ekonomi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia sebagai pemicu potensi konflik bersenjata. Upaya pencegahan konflik meliputi pembangunan ekonomi yang inklusif, pemerataan pendapatan, perlindungan hak asasi manusia, dan penguatan tata kelola pemerintahan yang baik (Todaro & Smith, 2013). Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif dapat menjadi strategi efektif dalam mencegah konflik bersenjata. Pembangunan ekonomi yang merata dapat mengurangi ketimpangan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang pada gilirannya dapat mengurangi potensi konflik (Permatasari, 2019). Peran penting dalam menumbuhkan ekonomi juga dimainkan oleh tatanan lokal atau yang disebut dengan *community driven development* (CDD). Sierra Leone menemukan bahwa CDD menghasilkan perbaikan dalam penyediaan barang publik lokal, hubungan dengan pemerintah, dan kesejahteraan ekonomi rumah tangga, meskipun tidak ada perbaikan dalam kemampuan tindakan kolektif, namun hal ini dapat menjadi bidang penting dan harus adanya perhatian dalam pembangunan ekonomi (Todaro & Smith, 2013).

EKONOMI PEMBANGUNAN ISLAM

Dalam perspektif Islam, isu-isu terkait keuangan, investasi, bantuan, dan konflik di negara asing melibatkan sejumlah pertimbangan etis dan

prinsip-prinsip syariah. Investasi dan aktivitas keuangan harus terbebas dari unsur riba (bunga berlebihan), judi, spekulasi berlebihan, atau ketidakpastian ekstrem (gharar). Kegiatan bisnis harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari industri yang terlibat dalam aktivitas haram. Transparansi dan keadilan juga menjadi kunci dalam setiap transaksi finansial (Syamsi, 2018).

Dalam hal pemberian bantuan dan filantropi, Islam sangat menekankan kepedulian terhadap sesama, khususnya bagi mereka yang membutuhkan. Bantuan dapat berupa zakat (sedekah wajib), sedekah sukarela, atau wakaf (dana abadi untuk kepentingan umum). Namun, bantuan tersebut harus diberikan dengan niat tulus dan tanpa syarat yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Terkait konflik dan perdamaian, Islam menganjurkan penyelesaian konflik melalui cara-cara damai, seperti negosiasi, mediasi, dan arbitrase. Penggunaan kekerasan hanya diperbolehkan sebagai upaya terakhir untuk membela diri dari agresi atau ancaman nyata. Islam juga menekankan prinsip keadilan, perlindungan terhadap kaum minoritas, dan menghormati perjanjian internasional.

Dalam hubungan internasional, Islam menganjurkan kerjasama dan hubungan baik dengan semua negara, selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Perjanjian internasional harus dihormati dan dipatuhi selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Konflik dan perselisihan harus diselesaikan dengan cara-cara damai sesuai dengan hukum internasional.

Secara keseluruhan, dalam menangani masalah keuangan, investasi, bantuan, dan konflik di negara asing, umat Islam harus mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah, keadilan, dan kepedulian terhadap sesama. Tujuannya adalah untuk mencapai kemaslahatan (kesejahteraan) bagi seluruh umat manusia dengan tetap menjaga keseimbangan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi.

KESIMPULAN

Keuangan, investasi, dan bantuan asing memiliki berbagai kontroversi dan peluang bagi negara penerima. Terdapat berbagai pendapat mengenai peran penanaman modal asing (FDI) dan investasi portofolio asing dalam perekonomian negara berkembang. Pendukung berargumen bahwa FDI dan investasi portofolio dapat menambah

tabungan, devisa, penerimaan negara, serta transfer teknologi ke negara penerima. Namun, penentang berpandangan bahwa FDI dan investasi portofolio justru dapat menurunkan tabungan dan investasi domestik, mengurangi penghasilan devisa jangka panjang, memberikan kontribusi pajak yang kecil, serta kurang memberdayakan sumber daya lokal.

Bantuan luar negeri juga memiliki peran penting dalam upaya pengentasan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, dan penanganan bencana di berbagai negara berkembang. Meskipun demikian, efektivitas dan motivasi pemberian bantuan luar negeri kerap dipertanyakan karena dianggap sebagai alat politik negara donor untuk memperluas pengaruhnya. Remitansi penduduk kerja migran menjadi sumber pendanaan lain bagi negara penerima, namun rentan terhadap guncangan eksternal karena sifatnya yang tidak stabil.

Secara umum, semua bentuk keuangan, investasi, dan bantuan asing memiliki potensi manfaat maupun dampak bagi negara penerima. Akan tetapi, dampaknya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti konteks politik, ekonomi masing-masing negara, serta sifat intervensi asing tersebut. Diperlukan kerjasama yang seimbang antara kepentingan negara donor dan penerima guna memaksimalkan manfaat serta meminimalkan kontroversi dari aliran keuangan, investasi, dan bantuan asing.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Sanchez-Rebull, M.-V., & Ninerol, A. (2022). Foreign Direct Investment by Multinational Corporations in Emerging Economies: a Comprehensive Bibliometric Analysis. *International Journal of Emerging Markets*. <https://doi.org/10.1108/IJOEM-12-2021-1878>
- Amalia, L. (2007). *Ekonomi Pembangunan*. Graha Ilmu.
- Azizi, S., Aftabi, A., Azizkhani, M., & Yektansani, K. (2023). Remittances and economic growth: a blessing for middle-income countries, ineffective for low-income countries. *Journal of Economic Studies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JES-04-2023-0207>
- Boediningsi, W., Rusmaya, E., Narotama, U., Boediningsi, W., Rusmaya, E., & Narotama, U. (2022). Peran Lembaga Swadaya Masyarakat (Ism) dalam Masyarakat Sosial. *Journal Transformation of Mandalika (Jtm)*, 2(2), 282–291.

- Fratzscher, M. (2011). *Capital Flows, Push versus Pull Factors and the Global Financial Crisis*.
- Gates, S., Hegre, H., Nygård, H. M., & Strand, H. (2012). Development Consequences of Armed Conflict. *World Development*, 40(9), 1713–1722. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2012.04.031>
- geert bekaert. (1997). beakert. *Foreign Speculators and Emerging Equity Markets*.
- Hansen, M. W. (n.d.). *Economic Theories of Transnational Corporations, Environment and Development*.
- Hayat, H. (2013). Teori Konflik Dalam Perspektif Hukum Islam: Interkoneksi Islam Dan Sosial. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(2), 269. <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i2.31.269-292>
- Irenes. (n.d.). *Penyebab konflik bersenjata*. Irenes.
- Jhinghan, M. L. (2016). *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Karaye, I. M., Stone, K. W., & Horney, J. A. (2022). Determinants of Under-Five Mortality in an Armed Conflict Setting: Empirical Findings from the Demographic and Health Surveys. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19 (21). <https://doi.org/10.3390/ijerph192114179>
- Keita, K., Razak, A. B. A., & Abdullah, N. A. (2023). Regulatory Framework on Foreign Direct Investment as a Factor in Determining the Economic Growth in Malaysia Post-Covid-19 Pandemic. *International Journal of Law and Society (IJLS)*, 2(3), 206–225. <https://doi.org/10.59683/ijls.v2i3.60>
- Kennedy, P. S. J. (2019). *Diktat Mata Kuliah Keuangan Internasional*. Kuncoro, M. (2010). *Ekonomika Pembangunan*. Erlangga.
- Kurniasih, E. P. (2020). Perkembangan Investasi Asing di Negara ASEAN. *Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan 2020*, 362–370.
- Nguyen, M. T. (2022). Foreign Direct Investment and Economic Growth: The Role of Financial Development. *Cogent Business & Management*, 9(1). <https://doi.org/10.1080/23311975.2022.2127193>
- Pemerintah, P., Indonesia, R., Dan, J., Atas, T., Penerimaan, J., Bukan, N., Berlaku, Y., Kementerian, P., Umum, P., & Pasal, P. D. (2012). *Tambahan lembaran negara ri*. 5293(5293), 1–3.

- Permatasari, V. B. D. (2019). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, IPM, Tingkat Pengangguran, Upah minimum Terhadap Kemiskinan di Jawa Timur tahun 2012-2017. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Prihantoro, B. (2024). *Pembangunan Menurut Perspektif Islam: Peran Kritis Pemimpin*. RRI, Radio Republik Indonesia.
- Qur'an, A. A. (2018). Sumber Daya Alam Dalam Pembangunan Berkelanjutan Perspektif Islam. *ElJizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 5(1), 1–24. <https://doi.org/10.24090/ej.v5i1.1621>
- Rahmat, A. (2015). *Islam Dan Bina Damai: Memahami Dinamika Konflik Sosial di Indonesia*. 53–76.
- Ridwan. (2023). *Dinamika Pembangunan Global*.
- Rifa'i, A. (2010). Konflik Dan Resolusinya Dalam Perspektif Islam. Millah, ed(khus), 171–186. <https://doi.org/10.20885/millah.ed.khus.art10>
- Siregar, M. R. (2020). Sustainable Development Dalam Pembangunan Islam. *Hukum Islam*, 20(1), 81. <https://doi.org/10.24014/jhi.v20i1.8068>
- Soenjoto, A. R. (2018). Strategi Kebijakan Pembangunan Ekonomi Dalam Perspektif Islam (Studi Kritis Terhadap Pemikiran Ekonomi Neo Klasik). *Islamic Economics Journal*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21111/iej.v4i1.2896>
- Stewart, F. (2002). Education and debate: Root cause of violent in developing countries. *British Medical Journal*, 324(2), 342–345.
- Sulistia, T. (2021). Pengaturan Perang dan Konflik Bersenjata dalam Hukum Humaniter Internasional. *Indonesian Journal of International Law*, 4(3). <https://doi.org/10.17304/ijil.vol4.3.157>
- Tangguh Chairil, W. A. S. (2020). *Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis*. Binus.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2013). *Economic Development. Economic Development 12th edition*.
- Todaro, M. P., & Smith, S. C. (2014). *Economic Development*. New York University.
- Tri Andika, M., & Nur Aisyah, A. (2017). Analisis Politik Luar Negeri Indonesia-China di Era Presiden Joko Widodo: Benturan Kepentingan Ekonomi dan Kedaulatan? *Indonesian Perspective*, 2(2), 161. <https://doi.org/10.14710/ip.v2i2.18477>

Vestby, J., Buhaug, H., & von Uexkull, N. (2021). Why do some poor countries see armed conflict while others do not? A dual sector approach. *World Development*, 138, 105273. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105273>

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAN FISKAL UNTUK PEMBANGUNAN

(Novita Ayu Amalikhah, Intan Magfirah, M. Faizin Rasyidi, Asmara)

PENDAHULUAN

Semakin diakui bahwa dalam proses pembangunan ekonomi, sistem keuangan memainkan peran yang sangat penting (Todaro and Smith 2012). Sistem keuangan yang terus mengalami perkembangan di suatu negara serta menunjukkan stabilitas keuangan yang baik menandakan terjadi pembangunan ekonomi yang baik pada negara tersebut (Lubis and Ramadhoni 2020). Banyak studi empiris tidak hanya menunjukkan bahwa sistem keuangan yang lengkap terkait erat dengan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi tetapi telah mulai menyajikan temuan ilmiah yang solid bahwa arah hubungan adalah dari pengembangan sistem keuangan untuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Kim, Yu, and Hassan 2018). Pemerintah mewujudkan hal ini dengan mengadopsi kebijakan makroekonomi yang sehat dan stabil, termasuk kebijakan fiskal dan moneter yang kuat namun fleksibel, bertindak untuk membangun pasar keuangan di mana mereka belum ada, dan memberikan peraturan kehati-hatian dari sistem keuangan (Todaro and Smith 2012). Kebijakan fiskal dan kebijakan moneter merupakan bauran kebijakan makroekonomi yang berperan untuk mencapai tujuan makroekonomi suatu negara yang telah diuraikan dalam rencana pembangunannya. Efektivitas kedua kebijakan tersebut mutlak diperlukan untuk mencapai target pembangunan dan menciptakan stabilitas perekonomian (Paramita 2021).

Organisasi Kerjasama Islam (OKI) memegang posisi penting di pasar negara berkembang. Sebagai organisasi multinasional yang mewakili 57 negara anggota di empat benua, OKI sangat penting dalam mempromosikan

kerja sama ekonomi, politik, dan sosial di antara negara-negara anggotanya, banyak di antaranya dianggap sebagai pasar negara berkembang. Melalui kerja sama ekonomi, promosi perdagangan, dan pengaruh politik, OKI berkontribusi pada kemajuan dan kemakmuran ekonomi-ekonomi ini di panggung global (Tekin 2024). Namun, posisi kebijakan fiskal negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agak heterogen, terutama jika dikaitkan dengan ukuran ekonomi mereka. Schoenherr dan Mosler (2017) melaporkan bahwa negara-negara OKI dicirikan oleh heterogenitas utang dengan rasio utang bruto terhadap PDB berkisar antara 3% dan 139%. Dalam nada yang sama, negara-negara OKI berkinerja di bawah rata-rata global dalam hal indikator fiskal. Menurut Pusat Penelitian dan Pelatihan Statistik, Ekonomi dan Sosial untuk Negara-negara Islam dalam Laporan Outlook Ekonomi 2021 menyatakan bahwa negara-negara OKI mengalami peningkatan defisit fiskal akibat pandemi COVID-19. Ini menyumbang 7,6% dari PDB pada tahun 2020 dibandingkan dengan 3,6% pada tahun 2019. Peningkatan defisit telah dikaitkan dengan kenaikan pengeluaran pemerintah dan penurunan pendapatan pemerintah (Baita, Malami, and Al-Faryan 2023).

Kebijakan keuangan mencakup pengelolaan dana pemerintah yang meliputi pengumpulan, pengeluaran, dan pengelolaan utang. Ini adalah mekanisme penting untuk memastikan bahwa pemerintah memiliki sumber daya yang cukup untuk membiayai program-program pembangunan. Pengelolaan keuangan yang efektif memungkinkan pemerintah untuk menyediakan layanan publik yang esensial, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, yang semuanya merupakan dasar dari pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Disisi lain kebijakan fiskal melibatkan penentuan tingkat pajak dan pengeluaran publik. Ini adalah alat utama untuk mempengaruhi perekonomian, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Kebijakan fiskal yang tepat dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan investasi, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Kebijakan ini juga memainkan peran kritis dalam stabilisasi ekonomi, dengan mengatasi fluktuasi siklus bisnis melalui pengaturan pengeluaran dan penerimaan. Dalam konteks ini akan di paparkan mengapa seringkali sulit bagi pemerintah negara berkembang menjalankan kebijakan keuangan dan bagaimana kebijakan fiskal berperan dalam pembangunan.

TEORI DAN KEBIJAKAN

1. Peran Sistem Keuangan Dalam Pembangunan Ekonomi

Di negara-negara maju, kebijakan moneter dan fiskal memainkan peran yang sangat penting, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam upaya pemerintah yang dirancang untuk memperluas kegiatan ekonomi pada saat terjadinya lonjakan pengangguran dan kelebihan kapasitas produksi atau sebaliknya. Sebaliknya, pada negara berkembang pasar dan lembaga keuangan cenderung sangat tidak terorganisasi, seringkali bergantung secara eksternal dan terfragmentasi. Banyak bank-bank di negara berkembang yang merupakan cabang dari perusahaan perbankan swasta di negara-negara maju. Oleh sebab itu, situasi mereka (seperti perusahaan multinasional) cenderung memperhatikan situasi moneter eksternal ketimbang internal. Kemampuan pemerintah pada negara berkembang untuk meregulasi jumlah uang beredar nasional seringkali terhambat sebab keterbukaan perekonomian mereka. Dalam beberapa kasus, mematok mata uang mereka pada dolar atau euro atau sejumlah mata uang negara maju lainnya, serta kenyataan bahwa akumulasi pendapatan mata uang atau valuta asing menjadi sumberdaya keuangan domestik yang penting akan tetapi sangat bervariasi. Bukan jumlah uang beredar itu sendiri sulit untuk diukur dan akan lebih sulit dikendalikan pada saat dalam kondisi substitusi mata uang (Todaro & Smith, 2015 : 784-785).

Kebijakan moneter sebagai suatu kebijakan yang dijalankan oleh otoritas moneter untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi riil serta harga melalui mekanisme transmisi, jalur transmisi moneter yang dimiliki setiap negara akan berbeda di Indonesia terdapat 6 jalur transmisi kebijakan moneter yang dilakukan Bank Indonesia sebagai otoritas moneter meliputi jalur suku bunga, jalur agregat moneter, jalur kredit, jalur nilai tukar, jalur harga aset dan jalur ekspektasi. Penerapan kebijakan moneter akan bergantung pada kondisi perekonomian negara, terdapat 2 jenis kebijakan moneter yaitu kebijakan moneter yang bersifat ekspansif dan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif. Pada kebijakan moneter yang bersifat ekspansif akan diterapkan sebagai upaya moneter dalam mendorong perekonomian melalui peningkatan JUB yang ada di masyarakat sedangkan kebijakan moneter yang bersifat kontraktif akan diterapkan

dalam memperlambat perekonomian dengan cara mengendalikan jumlah uang yang beredar di masyarakat (Arthasari 2021).

Dengan demikian sebagian besar dari negara-negara berkembang beroperasi dalam sistem ekonomi moneter dualistik (ganda) yaitu sistem pasar uang terorganisasi dan sistem pasar uang tidak terorganisasi. Pasar uang terorganisasi merupakan sistem perbankan formal dimana dana pinjaman disalurkan melalui lembaga perantara keuangan yang diakui dan berizin. Sistem keuangan terorganisasi yang kecil seringkali dikendalikan atau dipengaruhi secara eksternal dengan aturan hukum yang mengikat mengenai batas atas tingkat bunga nominal yang melayani kebutuhan finansial kelas menengah dan atas serta kalangan bisnis asing dalam sektor industri modern. Sedangkan pasar uang tidak terorganisasi merupakan sistem kredit informal dan berbunga sangat tinggi yang ada di sebagian besar negara berkembang. Sistem ini berkembang dengan besar namun bentuknya tidak jelas, tidak terkendali dan seringkali bersifat ilegal, dan juga dengan bunga yang sangat tinggi yang menjadi tumpuan sebagian besar individu berpendapatan rendah saat mengalami kesulitan dana.

2. Peranan Bank Sentral

Di negara-negara maju, bank sentral (seperti *federal reserve board* di Amerika) melakukan berbagai macam fungsi pengaturan, pengawasan, dan perbankan. Mereka memiliki tanggung jawab publik dan kekuasaan eksekutif yang sangat besar. Kegiatan pokok mereka dapat dikelompokkan menjadi lima fungsi umum yaitu, menerbitkan mata uang, bankir bagi pemerintah, bankir bagi bank-bank umum domestik, regulator lembaga keuangan domestik, dan operator kebijakan moneter dan kredit. Namun terkadang fungsi-fungsi ini dilakukan oleh badan regulator yang berbeda, seperti dewan mata uang. Dewan mata uang adalah suatu bentuk bank sentral yang menerbitkan mata uang domestik untuk ditukarkan dengan valuta asing pada nilai tukar tetap, ini merupakan pengaturan klasik bagi bank sentral (Todaro & Smith, 2015 : 788).

Lingkungan moneter kemungkinan besar akan tunduk pada fluktuasi di pasar komoditas dan keuangan dunia. Sebagai hasilnya, bank sentral lembaga perbankan akan terlibat terutama dalam regulasi dan promosi sistem keuangan yang stabil dan dihormati. Contoh dari lembaga-lembaga tersebut adalah Singapura, Kuwait, Arab Saudi, dan

Uni Emirat Arab. Tabel 1 meringkas fitur-fitur utama dari keempat kategori alternatif bank sentral ini dibandingkan dengan dewan mata uang dan bank sentral.

Institution	Function					
	Issuer of Currency	Banker to Government	Banker to Commercial Banks	Regulator of Financial Institutions	Operator of Monetary Policy	Promoter of Financial Development
Full-fledged central bank	3	3	3	3	3G	1
Supranational central bank	3E	2E	2	2	2E	2
Open-economy central banking institution	3C	2C	2	3	1	3
Transitional central banking institution	3CG	2C	2	1	2G	3
Currency enclave central banking institution	1, 2CE	2CE	2	1	1	3
Currency board	3C	1	1	1	1	1

Source: Charles Collyns, *Alternatives to the Central Bank in the Developing World*, IMF Occasional Paper No. 20 (Washington, D.C.: International Monetary Fund, 1983), p. 22. Copyright © 1983 by the International Monetary Fund. Reprinted with permission.
Key: 1 = limited involvement; 2 = substantial involvement; 3 = full involvement; C = considerable constitutional restrictions; E = considerable external influence; G = considerable government influence.

Otonomi bank sentral masih sangat terbatas dalam banyak kasus. Namun, pada analisis terakhir, yang penting bukanlah struktur organisasi dari institusi bank sentral atau tingkat otonomi politiknya. Melainkan sejauh mana lembaga tersebut mampu membiayai dan mendorong pembangunan ekonomi domestik, melalui lingkungan keuangannya, yang dicirikan oleh berbagai tingkat dominasi dan ketergantungan. Bank-bank komersial di negara-negara berkembang harus mengambil peran yang jauh lebih aktif dalam mempromosikan industri-industri baru dan membiayai industri-industri yang sudah ada dibandingkan dengan bank-bank di negara-negara maju. Mereka harus menjadi sumber modal ventura serta tempat penyimpanan pengetahuan komersial dan keterampilan bisnis yang biasanya kurang tersedia di dalam negeri (Todaro & Smith, 2015 : 789).

Bank pembangunan adalah lembaga keuangan publik dan swasta khusus yang memasok dana jangka menengah dan panjang untuk penciptaan atau perluasan perusahaan industri. Bank-bank ini muncul di banyak negara berkembang karena bank-bank yang ada biasanya berfokus pada pinjaman jangka pendek untuk tujuan komersial (bank komersial dan tabungan) atau, dalam kasus bank sentral, pada kontrol dan pengaturan jumlah uang beredar. Bank pembangunan memainkan

peran yang sangat penting dalam perekonomian suatu negara, terutama dalam konteks pembangunan ekonomi dan sosial (Dalimunthe and Lubis 2023). Untuk memfasilitasi pertumbuhan industri dalam ekonomi yang ditandai dengan kelangkaan modal keuangan, bank-bank pembangunan telah berusaha untuk meningkatkan modal, yang pada awalnya berfokus pada dua sumber utama yaitu, pinjaman bilateral dan multilateral dari badan-badan bantuan nasional dan pinjaman dari pemerintah mereka sendiri. Pertumbuhan dan penyebaran bank-bank pembangunan di negara berkembang sangat besar. Pada tahun 2000, jumlah mereka telah meningkat menjadi ratusan, dan sumber daya keuangan mereka telah membengkak menjadi miliaran dolar. Selain itu, meskipun sumber modal awal adalah lembaga-lembaga seperti Bank Dunia, lembaga-lembaga bantuan bilateral, dan pemerintah daerah, pertumbuhan pembiayaan bank pembangunan semakin difasilitasi oleh modal dari swasta, baik institusi maupun perorangan, asing maupun lokal. Hampir 20% dari modal saham bank-bank ini dimiliki oleh pihak asing, dan 80% sisanya berasal dari investor lokal. Akibatnya, perusahaan-perusahaan pembiayaan ini hampir sepenuhnya menarik diri dari bantuan kepada usaha kecil (Todaro & Smith, 2015 : 791).

3. Pembiayaan Informal dan Pembiayaan Mikro

Sebagian besar kegiatan ekonomi di negara-negara berkembang berasal dari produsen dan badan usaha berskala kecil serta sebagian lainnya berasal dari badan usaha non-korporat, tanpa izin dan tidak terdaftar. Kebutuhan keuangan mereka sangat unik dan berada diluar bidang peminjaman bank umum biasa. Karena jumlah yang diperlukan cenderung kecil, sedangkan biaya administrasi dan pengelolaannya tinggi dan juga hanya ada segelintir peminjam informal yang memiliki jaminan yang dibutuhkan dalam mengamankan sektor formal.

Pembiayaan informal tradisional adalah sistem pembiayaan yang dilakukan di luar lembaga keuangan formal seperti bank dan lembaga kredit lainnya. Sistem ini telah ada sejak lama dan sering kali digunakan oleh masyarakat yang tidak memiliki akses atau enggan menggunakan layanan perbankan konvensional. Beberapa bentuk pembiayaan informal tradisional yang umum ditemukan di berbagai budaya adalah arisan, koperasi simpan-pinjam, *tontine*, pinjaman keluarga, BMT, komunitas

kredit rotasi, rentenir, dan pegadaian tradisional budaya (Winanto and Rapini 2014)

Pembiayaan informal tradisional memiliki beberapa kelebihan, seperti fleksibilitas, proses yang cepat, dan tidak memerlukan banyak dokumen. Namun, ada juga kekurangan, seperti tingkat bunga yang tinggi dalam kasus rentenir, risiko penipuan, dan kurangnya perlindungan hukum. Oleh karena itu, sistem ini sering kali digunakan sebagai pelengkap dari sistem keuangan formal, terutama di kalangan masyarakat dengan akses terbatas ke layanan perbankan resmi (Salangka 2013).

Pembiayaan mikro adalah suatu kegiatan pembiayaan usaha berupa penghimpunan dana yang di pinjamkan bagi usaha mikro (kecil) yang dikelola oleh pengusaha mikro yaitu masyarakat menengah ke bawah yang memiliki penghasilan di bawah rata-rata (Ascarya 2007). Tujuan pembiayaan mikro adalah untuk memaksimalkan laba, meminimkan risiko, pendayagunaan sumber ekonomi dan penyaluran kelebihan dana (Lestari 2020). Peneliti ekonomi secara konsisten menemukan bahwa masalah ketersediaan kredit merupakan masalah utama yang sangat mengganggu bagi pengembangan usaha mikro. Sebagian besar usaha mikro dijalankan oleh perempuan. Akan tetapi secara khusus kurangnya ketersediaan kredit akan mempengaruhi peminjam perempuan untuk berbagai alasan, mulai dari minimnya hak milik hingga kebiasaan lokal dan minimnya jaminan.

Perbankandesaberusahamemecahkanmasalahdenganmengorganisir pengusaha mikro dalam koperasi kredit, yang meminjamkan modal awal. Dalam model tradisional, sebelum memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman, setiap anggota diharuskan untuk mengidentifikasi beberapa anggota lain atau calon anggota yang bersedia menjaminkan pinjaman mereka. Seringkali, setelah seorang anggota kelompok *cosigning* menerima pinjaman, tidak ada anggota lain yang boleh meminjam sampai peminjam pertama membuat catatan pembayaran rutin, dan bagaimanapun juga, tidak ada pinjaman baru yang disetujui sampai semua rekening anggota dilunasi dengan memuaskan. Pinjaman yang lebih besar akan disetujui setelah peminjam mendapatkan pengalaman dan riwayat kredit dan mengidentifikasi penggunaan produktif untuk pinjaman yang lebih besar (Todaro & Smith, 2015 : 795).

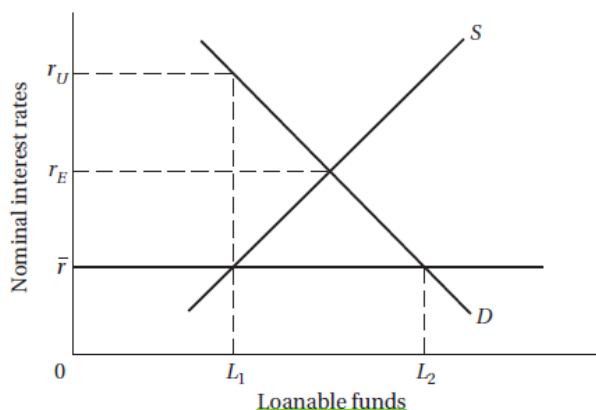
Pembiayaan mikro memiliki beberapa keterbatasan. Kredit mikro awalnya dirancang dan dipasarkan sebagai pembiayaan untuk usaha mikro,

tetapi sebagian orang mungkin lebih memilih upah dan gaji tetap daripada menjalankan usaha mikro yang berisiko. Beberapa praktisi terkemuka berpendapat bahwa tujuan sebenarnya dari LKM bukanlah untuk mengurangi kemiskinan, melainkan untuk menstimulasi sistem keuangan yang lebih baik (dan diharapkan dapat mengurangi kemiskinan secara tidak langsung). Keuangan mikro memiliki beberapa tujuan yang layak, dan subsidi dapat membantu mengatasi kegagalan pasar dan kemiskinan, tetapi tidak dapat diasumsikan bahwa keuangan mikro adalah cara yang paling efektif untuk membelanjakan dana penanggulangan kemiskinan yang langka sebelum analisis dampak komparatif dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan (Todaro & Smith, 2015:799).

4. Mereformasi Sistem Keuangan

Mereformasi sistem keuangan adalah proses perubahan struktur dan regulasi keuangan yang bertujuan meningkatkan efisiensi, stabilitas, dan inklusivitas dalam sistem keuangan suatu negara yang mempengaruhi berbagai aspek keuangan, termasuk tingkat tabungan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Perubahan ini dapat meningkatkan akses keuangan untuk masyarakat berpendapatan rendah, meningkatkan alokasi modal dan likuiditas aset, serta mendorong investasi pada kegiatan yang memiliki nilai tambah tinggi (Moyo *et al.* 2020).

Gambar 1. Dampak Penetapan Batas Atas Tingkat Bunga Terhadap Alokasi Kredit



Gambar 1. Menunjukkan dampak pemberlakuan batas atas tingkat bunga nominal yang mengikat pada tingkat dibawah tingkat bunga pasar. Dengan batas atas tingkat bunga, , yang lebih rendah daripada tingkat bunga ekuilibrium sesuai mekanisme pasar, yakni , maka permintaan atas dana pinjaman, yakni , akan jauh melampaui tingkat penawarannya yang tersedia, .

Tujuan utama dari liberalisasi keuangan adalah untuk membangun sistem keuangan yang lebih efisien, lebih kuat dan lebih dalam, yang dapat mendukung pertumbuhan sektor swasta. Secara keseluruhan, liberalisasi keuangan diharapkan untuk dapat mendorong pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan jangka panjang (Levine, 2004). Melalui liberalisasi keuangan, negara-negara berkembang dapat merangsang tabungan domestik dan pertumbuhan, dan mengurangi ketergantungan berlebihan pada arus modal asing. Liberalisasi keuangan dapat membantu memfasilitasi aliran dana dari sektor swasta yang akan meningkatkan investasi dan pendapatan yang akhirnya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Pemerintah dapat berperan dalam mengatur dan mengawasi sektor keuangan dengan cara mengeluarkan kebijakan yang sesuai, seperti deregulasi sektor perbankan dan pengembangan pasar modal, seperti yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1988. Liberalisasi keuangan tidak berarti bahwa pemerintah tidak memiliki peran dalam sektor keuangan. Sebaliknya, pemerintah harus berperan aktif dalam mengawasi dan mengatur sektor keuangan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pendapatan (Demirgüç-Kunt, 2014).

Tahun-tahun belakangan ini kita telah melihat pertumbuhan pesat dalam pasar saham negara-negara berkembang. Hal ini menimbulkan kerugian dan manfaat bagi pembangunan. Pasar saham telah meningkatkan volatilitas dalam perekonomian ketika dana mengalir masuk dari luar negeri dan bahkan keluar dengan sangat cepat. Beberapa penelitian mengemukakan bahwa pengembangan pasar saham dapat memainkan peran yang sangat konstruktif dalam merangsang pertumbuhan. Pasar saham di negara berkembang mempunyai konsekuensi nilai kapitalisasi pasarnya yang kecil. Kapitalisasi pasar biasanya dilihat dari rasio perbandingan dengan nilai Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara. Konsekuensi lainnya adalah terdapatnya volume transaksi perdagangan

yang tipis, lebih disebabkan oleh ketidaksinkronan perdagangan di pasar. Perdagangan yang tidak sinkron disebabkan oleh banyaknya sekuritas yang tercatat, tetapi tidak seluruhnya diperdagangkan atau tidak terjadi transaksi (Fitrirahmawati 2020).

Untuk memahami peran pasar saham dalam kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara berkembang, studi kasus tentang dampak pasar saham bisa memberikan pemahaman yang mendalam. Dengan memahami lebih baik keterkaitan antara pasar saham dan pertumbuhan ekonomi, para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan bisa merancang strategi yang lebih efisien untuk memanfaatkan potensi pasar modal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan (Syarief 2021).

Tabel 2. Indikator Pertumbuhan Ekonomi

Indikator Pertumbuhan Ekonomi	2020	2021	2022	2023
Pertumbuhan PDB (Persen)	-2.07%	3.8%	5.2%	5.5%
Inflasi (Persen)	1.68%	2.5%	2.7%	3.0%
Investasi (Miliar Rupiah)	7301.3	8200.0	9000.0	9500.0
Ekspor (Miliar Dollar AS)	163.3	175.0	190.0	200.0
Impor (Miliar Dollar AS)	139.2	150.0	160.0	170.0

Tabel ini mencakup pertumbuhan PDB, inflasi, investasi, ekspor, dan impor untuk setiap tahun dari 2020 hingga 2023. Data untuk tahun 2022 dan 2023 merupakan proyeksi yang didasarkan pada estimasi dan perkiraan dari pemerintah atau lembaga-lembaga terkait. Perkembangan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun dapat memperkirakan tren masa depan. Ini dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi kinerja ekonomi dan merencanakan langkah-langkah kebijakan yang sesuai untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam jangka waktu yang akan datang.

5. Kebijakan Fiskal Untuk Pembangunan

Kebijakan fiskal secara sederhana didefinisikan sebagai; peningkatan pendapatan dan pengeluaran publik untuk mempengaruhi perekonomian suatu negara. Kebijakan fiskal tidak hanya mencapai pertumbuhan

ekonomi tetapi juga menghilangkan hambatan yang membantu stabilitas ekonomi. Kebijakan fiskal berfokus pada perpajakan dan pengeluaran pemerintah. Bersama-sama mereka mewakili sebagian besar kegiatan sektor publik. Sebagian besar upaya stabilitas terkonsentrasi pada pemotongan pengeluaran pemerintah untuk mencapai keseimbangan anggaran. Namun beban mobilisasi sumber daya untuk membiayai upaya-upaya penting pembangunan publik harus berasal dari sisi pendapatan. Pinjaman publik dalam dan luar negeri dapat mengisi beberapa kesenjangan tabungan. Dalam jangka panjang, pemungutan pajak yang efisien dan adil menjadi landasan pembangunan pemerintah. Di negara berkembang tanpa pasar uang yang terorganisasi dengan baik, langkah-langkah fiskal menjadi penting untuk menstabilkan ekonomi dan menggerakkan sumber daya dalam negeri.

Negara-negara berkembang menghadapi tantangan besar dalam membangun sistem pajak yang efisien. Pertama, mayoritas pekerja di negara-negara tersebut biasanya bekerja di sektor pertanian atau perusahaan-perusahaan kecil dan informal, membuat sulitnya menghitung dasar pajak penghasilan karena fluktuasi penghasilan dan pembayaran di luar pembukuan. Kedua, menciptakan administrasi pajak yang efisien sulit tanpa staf terlatih dan dana yang mencukupi, menyebabkan pemerintah sering mengambil jalan yang paling mudah dengan sistem perpajakan yang kurang rasional dan modern. Ketiga, keterbatasan data statistik menghalangi evaluasi dampak perubahan pajak, membatasi perubahan struktural yang diperlukan. Keempat, ketidakmerataan pendapatan mempersulit penerapan pajak progresif karena tekanan dari kelompok ekonomi dan politik yang kuat. Oleh karena itu, negara-negara berkembang sering kesulitan memanfaatkan potensi penuh dari pajak penghasilan dan properti, serta mencapai progresivitas yang diinginkan dalam sistem perpajakan mereka (Abd Hakim *et al.* 2022).

6. Badan Usaha Milik Negara Dan Privatisasi

Dalam mencapai tujuan faktor-faktor dari persoalan administrasi negara/publik di negara berkembang disertai dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh badan-badan usaha milik negara (BUMN) dan privatisasi memiliki peran penting. Badan-badan usaha milik negara dan privatisasi memiliki peran penting dalam meningkatkan kemampuan

negara dalam mengembangkan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Keberadaan BUMN di negara-negara maju seperti Amerika Latin dan Eurasia lebih kecil dikebayakan negara atas badan usaha masih cukup umum, dan BUMN mencakup porsi yang besar dalam output investasi dan industri di banyak negara berkembang, terutama Cina dan India dan negara-negara miskin yang telah menjalankan kebijakan BUMN dan privatisasi dalam beberapa tahun terakhir.

Dalam menjalankan peran BUMN dan privatisasi adalah untuk meningkatkan kemampuan negara dalam mengembangkan sumber daya alam, meningkatkan pendapatan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. BUMN dapat berupa perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dioperasikan oleh pemerintah, seperti industri, jasa, dan lain-lain. Pendirian BUMN menjadi langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan efisiensi untuk memenuhi tujuan-tujuan social dan ekonomi.

Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi BUMN serta privatisasi. Kebijakan pemerintah yang efektif dapat membantu meningkatkan manfaat BUMN dan privatisasi, serta mengurangi dampak negatifnya. Pemerintah harus mengawasi BUMN dan privatisasi secara ketat untuk mencegah korupsi dan penggunaan dana yang tidak efektif. Kemudian harus mengatur industri dan bisnis yang diprivatisasi agar tidak mengganggu keseimbangan pasar dan tidak meningkatkan biaya hidup. Dan berupaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui program-program sosial dan pendidikan yang efektif. Kinerja BUMN banyak mendapat sorotan karena meskipun mendapatkan berbagai dukungan fasilitas dari Negara tetapi masih banyak yang gagal menjalankan fungsinya dengan baik. Kinerja yang buruk membuat banyak BUMN direncanakan akan di merger dengan BUMN lainnya, atau bahkan di likuidasi. Performa BUMN yang buruk tersebut disebabkan oleh banyak hal. Diantaranya intervensi dari pihak luar ataupun dari birokrasi sendiri. Hal ini dapat terlihat dari konflik yang terjadi mengiringi pengangkatan komisaris maupun direksi di BUMN. Pengangkatan direksi yang harus melalui fit and proper test yang membuat banyak kepentingan terselubung berbenturan satu sama lain. Hal lain yang ikut mempengaruhi buruknya kinerja BUMN

adalah budaya kerja internal organisasi itu sendiri. Budaya birokrasi seperti BUMN dikenal sangat lamban, berbelit-belit dalam memberikan pelayanan, miskin kreasi dan inovasi. Hal ini akhirnya membuat BUMN sulit bersaing dengan swasta dalam bidang usaha yang sama. Kinerja BUMN juga sulit teruji jika BUMN tersebut diberikan monopoli dalam satu bidang tertentu. Tidak ada kompetensi yang dapat memacu kinerja BUMN agar lebih baik (Enceng and EA 2015).

Peran pemerintah dalam memelihara, menjaga dan mengelola kepentingan publik semakin lama semakin tergerus. Ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola BUMN didasari karena banyaknya kepentingan yang harus dipenuhi, misalnya kepentingan kelompok tertentu, permasalahan kesejahteraan pegawai dan tingkat gaji, hingga permasalahan jumlah pengangguran, hal-hal tersebut itulah yang membuat tidak fokusnya pemerintah dalam membuat BUMN mendapatkan keuntungan. Berbanding terbalik dengan perusahaan yang dikelola swasta yang berfokus dengan keuntungan untuk beradaptasi pada pergantian kondisi pasar, kurangnya sumber daya finansial dan berkaitan (Annisa and Alif 2020). Selain itu, salah satu opsi dalam reformasi kebijakan adalah reorganisasi dengan fokus untuk mencari laba yang lebih ditekankan pada BUMN; lainnya adalah pengalihan kepemilikan dan penguasaan dari sektor publik ke swasta, proses yang dikenal dengan privatisasi.

7. Administrasi Publik

Administrasi publik merupakan elemen kunci dalam menjalankan fungsi pemerintahan di seluruh dunia. Sebagai sumber daya yang paling langka dari perspektif global, administrasi publik memegang peran penting dalam mengelola kebijakan publik, layanan masyarakat, dan alokasi sumber daya negara. Di negara maju, administrasi publik sering didukung oleh infrastruktur yang canggih, sumber daya manusia yang terlatih, dan sistem yang efisien. Negara-negara maju memiliki akses yang lebih baik terhadap teknologi dan inovasi dalam administrasi publik, memungkinkan mereka untuk memberikan layanan yang lebih baik kepada warganya.

Administrasi publik sepertinya tidak akan berfungsi secara efisien ketika aturan hukum dipertanyakan, ketika huru-hara, atau ketika konsensus pada isu-isu fundamental tidak mencapai kata mufakat.

Kondisi konflik antarkelas, suku, atau agama yang akut dalam masyarakat biasanya tercermin dalam pengelolaan dan pengoperasian dari departemen dan badan pemerintah. Dalam masyarakat yang teramat tradisional, dimana ikatan klan atau suku begitu kuat dan konsep kenegaraan dan layanan publik tidak berakar kuat, sistem meritokrasi tidak dipertimbangkan sama sekali. Di sisi lain, negara berkembang sering menghadapi tantangan dalam mengelola administrasi publik karena keterbatasan sumber daya manusia, keuangan, dan teknologi. Kurangnya infrastruktur yang memadai, tingkat korupsi yang tinggi, dan kurangnya akses terhadap pendidikan dan pelatihan administrasi publik menjadi hambatan utama dalam meningkatkan kinerja administrasi publik di negara-negara berkembang (Elias 2006).

Dalam menghadapi tantangan administrasi publik yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, peran dan kebijakan pemerintah memegang peranan krusial. Pemerintah perlu memainkan peran yang proaktif dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya yang langka. Salah satu kebijakan yang dapat diterapkan adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui investasi dalam pelatihan dan pengembangan pegawai negeri. Selain itu, pemerintah juga perlu memperkuat kontrol internal, transparansi, dan akuntabilitas dalam administrasi publik untuk mengurangi risiko korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Kolaborasi dengan sektor swasta dan masyarakat sipil juga menjadi penting untuk memanfaatkan sumber daya tambahan dan meningkatkan pelayanan publik. Dengan mengadopsi teknologi informasi dan komunikasi, pemerintah dapat meningkatkan efisiensi operasional dan memberikan layanan yang lebih responsif kepada masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, pemerintah dapat menghadapi tantangan administrasi publik yang langka dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja administrasi publik secara keseluruhan (Worldbank 1997).

PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

Dalam sistem ekonomi Islam, kebijakan fiskal merupakan sebuah media untuk merealisasikan tujuan syariah, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali termasuk untuk mendongkrak kesejahteraan dengan tetap menjaga keimanan, intelektualitas, kehidupan dan kekayaan serta kepemilikan. (Rantebua, Rosnawintang,

and Suriadi 2020). Pada umumnya teori ekonomi Islam sudah lama mengetahui kebijakan fiskal, yaitu sejak zaman Rasulullah dan sahabat, dengan berjalannya masa sehingga kemudian dikembangkan lagi oleh para ulama Islam. Ibnu khaldun pernah berpendapat bahwasanya untuk memecahkan masalah terkait resesi adalah dengan upaya memperkecil pungutan pajak serta meningkatkan belanja pemerintah. (Zakiyatul Miskiyah *et al.* 2022)

Dalam perspektif ekonomi Islam ada beberapa kebijakan fiskal dan juga pemikiran para ahli terdahulu yang relevan hingga sekarang dalam kebijakan fiskal pembangunan ini, yaitu :

1. Relevansi Kebijakan Fiskal Umar bin Khattab dengan APBN Indonesia

Konsep kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Umar adalah : Pertama, Negara Islam mengambil harta publik yang sebenarnya dan hanya mengambil harta Kharaj atau Fa'i yang Allah berikan dengan cara yang benar. Kedua, negara memberikan hak kepemilikan umum, tidak membelanjakan sesuai dengan haknya, dan negara memberikan subsidi serta menutupi utang. Ketiga, negara tidak menghasilkan kekayaan dari aset ilegal. Keempat, negara menggunakan kekayaan sebagaimana mestinya. (Aini 2021)

Umar bin Khattab mengelola kebijakan fiskal yang sangat ketat dari pendapatan hingga pengeluaran dan dikelola sedemikian rupa sehingga penggunaannya sesuai dengan peraturan untuk meminimalkan praktik kecurangan (korupsi). Hal ini menciptakan administrasi yang terbuka, efisien dan efektif Kebijakan fiskal yang diarahkan oleh Khalifah Umar bin Khattab menggunakan sistem anggaran berimbang yang dikelola oleh Baitul Maal dengan instrumen kebijakan fiskal adalah zakat, ushr, jizyah, kharaj, khums, ghanimah dan kaffarah. Sementara itu, di sisi pengeluaran, alokasi anggaran dilakukan sesuai prioritas, kebutuhan mustahik, pertahanan dan keamanan, sosial dan keagamaan, serta kebutuhan administrasi pemerintah. (Handayani and Huda 2023)

Relevansi kebijakan fiskal Umar bin Khattab dengan yang diterapkan di Indonesia memiliki beberapa poin khususnya pada anggaran keuangan negara, yaitu: Pertama dalam hal penerimaan negara, zakat relevan dengan PPN dan PPh yang diterapkan di Indonesia, Kharaj memiliki

relevansi dengan PBB, Ushr relevan dengan bea masuk dan ekspor (bea cukai), Jizyah relevan dengan Visa, dan Kaffarah berelevansi dengan PNPB lainnya, Rikaz relevan dengan minyak, gas bumi, pertambangan panas bumi, pertambangan umum dan PNPB lainnya, sedangkan dana hibah berelevansi dengan dana hibah pada keuangan Indonesia. Kedua bagian dari pengeluaran negara memuat beberapa poin yang memiliki relevansi, yaitu: Pengeluaran negara untuk dakwah dan penyebaran Islam pada masa Umar bin Khattab signifikan dengan pengeluaran yang terkait dengan kebutuhan keagamaan Negara Indonesia, pembangunan struktur relevan dengan layanan publik, perumahan dan ruang publik, pariwisata, lingkungan hidup dan ekonomi. Pendidikan memiliki relevansi dengan pendidikan, gaji pegawai relevan dengan layanan publik, dana pensiun relevan dengan jaminan sosial, layanan dan jaminan sosial relevan dengan perlindungan sosial dan kesehatan, pendanaan militer memiliki relevansi dengan ketertiban, keamanan dan pertahanan. (Handayani and Huda 2023)

2. Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharaj perspektif Pemikiran Abu Yusuf

Dalam pandangan Abu Yusuf mengenai kebijakan fiskal atau sering disebut dengan keuangan publik. Dengan daya observasi dan analisisnya yang tinggi, Abu Yusuf menguraikan masalah keuangan dan menunjukan beberapa kebijakan yang harus diadopsi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Terlepas dari berbagai prinsip perpajakan dan pertanggungjawaban negara terhadap kesejahteraan rakyatnya, ia memberikan beberapa saran tentang cara-cara memperoleh sumber perbelanjaan untuk pembangunan jangka panjang, seperti membangun jembatan dan bendungan serta menggali saluran-saluran besar dan kecil. (Rrahayu, Januari, and Jubaedah 2022)

Dalam kitabnya membahas mengenai kebijakan fiskal atau keuangan public yang dapat dijadikan pegangan bagi umat muslim di dunia. Dalam kitab al-Kharaj, kebijakan fiskal dibagi menjadi dua pos yaitu penerimaan Negara dan pengeluaran Negara. dalam al-Kharaj penerimaan Negara dibagi menjadi tiga bagian yakni Pertama, perpajakan dan ghanimah, jizyah, usyur, fai', khumus, rikaz, tanah mati. Kedua, kepemilikan umum dan ketiga Zakat. Adapun pengeluaran

Negara menurut Abu Ysuuf dalam kitab al-Kharaj yakni belanja pegawai, pertahanan militer, Pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat (minimum level of living), proyek infrastruktur dan mustahik zakat. (Rrahayu, Janwari, and Jubaedah 2022)

3. Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah

Pada masa Rasulullah saw. hampir seluruh pekerjaan yang diperkerjakan tidak mendapat upah/imbalan, tidak ada tentara formal. Tidak ada yang mendapat gaji tetap, namun mereka diperbolehkan mengambil harta dari rampasan perang. Kebijakan pertama yang diambil Rasulullah dalam rangka meningkatkan permintaan agregat masyarakat muslim di Madinah setelah hijrah dengan mempersaudarakan kaum muhajirin dan Anshar yang menyebabkan terjadinya distribusi dari kaum Anshar kepada kaum Muhajirin, kebijakan lain yang ditempuh Rasulullah adalah menyediakan lapangan pekerjaan sekaligus meningkatkan pendapatan nasional dengan menerapkan kontrak muzaraa, mudharabah dan kerja sama terbatas antar kaum Muhajirin yang menyediakan lapangan kerja dengan kaum Anshar yang menyediakan lahan pertanian, perkebunan dan tambang. (Karbila, Helim, and Rofii 2020)

Pada tahun kedua setelah hijrah sedekah dan fitrah diwajibkan pada bulan Ramadhan. Zakat mulai diwajibkan pada tahun kesembilan setelah hijrah. Dengan diwajibkannya zakat maka ditunjuklah pengelola zakat yang tidak digaji keberadaannya, namun pengelola tersebut diperbolehkan mendapat bagian dari zakat tersebut maksimal 12,5% dari zakat yang ada. (Al Arif, 2015).

Al-Quran telah memberikan batasan-batasan terkait pengeluaran dan pembelanjaan harta serta distribusi pendapatan agar seimbang. Pengeluaran yang di maksud dalam Al-Quran adalah berdasarkan keperluan dan bukan berdasarkan keinginan bahkan hal-hal yang tidak menentu. Islam bukan hana mencegah tetapi mengutuk hal yang sifatnya boros. Sebagaimana Firman Allah dalam QS. Al-Isra': 27

إِنَّ الْمُبَدِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya (Kementerian Agama, 2010, hlm. 296).

Berdasarkan konsep dalam ekonomi Islam, pengeluaran didasarkan atas distribusi kekayaan berimbang dengan menetapkan nilai-nilai material dan spiritual pada tingkat yang sama. Kebijakan fiskal menurut ekonomi Islam diharapkan dapat menjadi fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi pendapatan dan pengeluaran dalam suatu negara. (Karbila, Helim, and Rofii 2020)

Ekonomi Islam mempunyai sumber penerimaan dan pendapatan yang unique dan tidak dimiliki oleh sistem ekonomi kapitalis, yaitu zakat yang dapat dipergunakan sebagai instrumen kebijakan fiskal. Beberapa piranti atau instrumen kebijakan fiskal ekonomi Islam adalah zakat, belanja dan pengeluaran pemerintah dan pemungutan pajak (Mansur, 2012).

Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan fiskal. Akan tetapi, ada beberapa ajaran ekonomi dan prinsip-prinsip pengarah yang terekam dalam sunnah sebagai pengarah dan penjelasnya. Dengan demikian, sunnah Nabi menjadi sumber penting kedua keuangan publik dalam Islam setelah al-Qur'an. (Mansur 2012)

Dalam Islam, kebijakan fiskal merupakan suatu kewajiban negara dan menjadi hak rakyat, sehingga kebijakan fiskal bukanlah semata-mata sebagai suatu kebutuhan untuk perbaikan ekonomi maupun untuk peningkatan kesejahteraan rakyat saja, akan tetapi lebih pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil. Karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi. Jadi uang publik dipandang sebagai amanah di tangan penguasa dan harus diarahkan pertama-tama pada lapisan masyarakat yang lemah dan orang-orang miskin, sehingga tercipta keamanan masyarakat dan kesejahteraan umum. (Aini 2021)

KESIMPULAN

Sistem keuangan memainkan peran yang sangat penting dalam pembangunan dinegara maju. Sistem keuangan ini mencakup kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang diadopsi oleh pemerintahan. Namun sangat jauh berbeda dengan negara berkembang, implementasi sistem keuangan cenderung tidak terorganisir bahkan seringkali bergantung secara eksternal dan terfragmentasi. Kebijakan fiskal berfokus pada

perpajakan dan pengeluaran pemerintah, mewakili sebagian besar kegiatan sektor publik. Pendapatan yang efisien dan adil menjadi landasan pembangunan pemerintah. Namun, kebijakan fiskal menjadi penting untuk menstabilkan ekonomi dan menggerakkan sumber daya dalam negeri.

Dalam perspektif Islam, kebijakan fiskal adalah sarana untuk mencapai tujuan Islam dalam mencapai stabilitas ekonomi dengan tetap menjaga hak-hak asasi manusia, kekayaan intelektual, dan kesejahteraan sosial. Aspek-aspek kunci dari kebijakan fiskal mencakup hubungan antara pemerintahan yang meliputi alokasi sumber daya, penentuan prioritas, dan efisiensi manajemen fiskal. Kebijakan keuangan Islam, seperti yang digariskan oleh Umar bin Khattab, mencakup alokasi sumber daya ke berbagai sektor, seperti pemerintahan, layanan publik, dan pendidikan. Hal ini juga mencakup peran pemerintah dalam mempromosikan nilai-nilai Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan fiskal dipandang sebagai sarana untuk mengatasi tantangan ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh umat Islam di seluruh dunia.

Tetapi Bagi banyak negara berkembang, kualitas pengawasan keuangan, tata kelola, dan manajemen fiskal telah meningkat tajam selama beberapa dekade terakhir. Ini adalah salah satu faktor dalam peningkatan kinerja ekonomi banyak negara berkembang, meskipun masih banyak yang harus dilakukan. Pada saat yang sama, agar efektif, perhatian aktif terhadap kendala lain pada pembangunan ekonomi juga akan diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hakim, Taufik *et al.* 2022. "Impact of Direct and Indirect Taxes on Economic Development: A Comparison between Developed and Developing Countries." *Cogent Economics and Finance* 10(1).
- Aini, Ihda. 2021. "Kebijakan Fiskal Dalam Ekonomi Islam." *Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum* 17(2): 43–50.
- Annisa, tapi omas, and jeffits khusnu Alif. 2020. "Dampak Privatisasi BUMN Terhadap Kinerja Keuangan BUMN Indonesia Tapi." *Jurnal Akutansi* 5(1): 55.
- Arthasari, Tyas. 2021. "Efektifitas Kebijakan Moneter Dan Makroprudensial Sebagai Pengendali Risiko Kredit Perbankan

- Di Indonesia Effectiveness of Monetary and Macroprudential Policy as a Control of Banking Credit Risk in Indonesia.” 18(3): 585–93.
- Baita, Abubakar Jamilu, Hussaini Usman Malami, and Mamdouh Abdulaziz Saleh Al-Faryan. 2023. “Fiscal Policy and Sukuk Market Development in OIC Countries.” *Journal of Islamic Accounting and Business Research* 14(8): 1216–31.
- Dalimunthe, N, and N K Lubis. 2023. “Peran Lembaga Perbankan Terhadap Pembangunan Ekonomi: Fungsi Dan Tujuannya Dalam Menyokong Ketenagakerjaan.” ... *Ekonomi dan Perbankan* ... 8(30): 956–63.
- Demirguc-kunt, Asli, World Bank, Enrica Detragiache, and *International Monetary Fund*. 2014. “The Determinants of Banking Crises in Developing and Developed Countries.” (March 1998).
- Elias, Abu Elias. 2006. “New Public Management in Developing Countries: An Analysis of Success and Failure with Particular Reference to Singapore and Bangladesh.” *International Journal of Public Sector Management* 19(2): 180–203.
- Enceng, and Yuli Tirta Riandi EA. 2015. “Membenahi Kinerja BUMN Melalui Kepemimpinan Transformasional.” *Ut* 4(2): 321–31.
- Fitrirahmawati, Marini. 2020. “Analisis Pengaruh Pasar Saham Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Negara Berkembang (Suatu Kajian Literatur).” 4(1).
- Handayani, Tri, and Dr. Nurul Huda. 2023. “Relevansi Kebijakan Fiskal Umar Bin Khattab Dengan APBN Indonesia 2023.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9(2): 2759.
- Karbila, Ibnu Hasan, Abdul Helim, and Rofii Rofii. 2020. “Kebijakan Fiskal Pada Masa Rasulullah Dan Sekarang.” *AL-Muqayyad* 3(2): 153–68.
- Kim, Dai Won, Jung Suk Yu, and M. Kabir Hassan. 2018. “Financial Inclusion and Economic Growth in OIC Countries.” *Research in International Business and Finance* 43: 1–14.
- Lestari, Sry. 2020. “Analisi Peranan Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan UMKM Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri KCP. Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas.” *Institut Agama Islam Negeri Padang sidimpuan* 5(3): 15–31.
- Levine, Ross, and Ross Levine. 2004. “No Title.” (September).

- Lubis, Deni, and Muhammad Giffari Ramadhoni. 2020. "Analisis Keterkaitan Inklusi Keuangan Syariah Dengan Pembangunan Di Negara Anggota OKI." *Al-Muzara'Ah* 7(2): 1–16.
- Mansur, Ahmad. 2012. "Kebijakan Fiskal Dan Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi." *El-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)* 2(1): 214–31.
- Moyo, Clement, Pierre Le Roux, Port Elizabeth, and South Africa. 2020. "Financial Liberalisation , Fi Nancial Development and Fi Nancial Crises in SADC Countries." 12(4): 477–94.
- Paramita, Rastri. 2021. "Efektivitas Kebijakan Fiskal Dan Kebijakan Moneter Dalam Mengatasi Inflasi Di Indonesia Periode 1984-2019." *Jurnal Budget : Isu dan Masalah Keuangan Negara* 6(1): 152–68.
- Rantebua, Sem, Rosnawintang Rosnawintang, and La Ode Suriadi. 2020. "Analisis Pengaruh Kebijakan Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia." *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)* 5(1): 1–11.
- Rahayu, Anisa Eka, Yadi Janwari, and Dedah Jubaedah. 2022. "Kebijakan Fiskal Dalam Pandangan Al-Kharaj Perspektif Pemikiran Abu Yusuf." *Ekonomi Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8(1): 125–44.
- Salangka, R.R. 2013. "Peranan Leambaga Kredit Informasi Bagi Petani Padi Sawah Di Desa Wolaang Kecamatan Langowan Timur." *Journal of Chemical Information and Modeling*: 1–18.
- Syarief, Elza. 2021. "Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas Terhadap Implikasi Praktik Insider Trading Dalam Perdagangan Saham Di Pasar Modal." 6(1): 72–89.
- Tekin, Hasan. 2024. "Financial Inclusion and Sustainable Development of Banks: The Place of Organization of Islamic Cooperation (OIC) in Emerging Markets." *Journal of Economic Studies*.
- Todaro, Michael P., and Stephen C. Smith. 2012. *Economic Development Twelfth Edition (12th Ed.)* Pearson.
- Todaro, Michael P, and Stephen C Smith. 2015. *Economic Development Twelfth Edition*. 12th ed. ed. Donna Battista. United Kingdom: Arrangement with Pearson Education Limited.

- Winanto, Aris Riat, and Titi Rapini. 2014. "Peran Lembaga Keuangan Informal Terhadap Pemberdayaan Kelompok Usaha Informal." *Ekulibrium Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi* 58(12): 7250-57.
- Worldbank. 1997. "World Development Report 1997: The State in a Changing World." *Oxford University Press*.
- Zakiyatul Miskiyah, Arif Zunaidi, Sodiq Almustofa, and Mahrus Suhardi. 2022. "Kebijakan Moneter Dalam Perspektif Ekonomi Makro Islam." *Istithmar : Jurnal Studi Ekonomi Syariah* 6(1): 69-83.